

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional selama 1 (satu) tahun, memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Sumber-sumber lain yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Selanjutnya dengan mempedomani Pasal 150 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka visi dan misi pembangunan Kepala Daerah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025.

RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010 -2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 telah ditetapkan Visi Pembangunan untuk tahun 2010 – 2015. Adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan dalam Perda tersebut yaitu : **“EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA” JAMBI EMAS 2015.**

Ekonomi Maju, mengartikan bahwa adanya pergerakan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Selain itu, juga ditandai dengan struktur ekonomi yang kokoh yang mampu mencapai produktifitas tinggi dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Aman, Keadaan yang menggambarkan perwujudan memiliki perasaan aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih

bermutu dan maju; serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya, yang dilandasi supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia yang tinggi.

Adil, mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat

Sejahtera, mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan sandang dan pangan secara merata.

Berpijak pada perkembangan kondisi ekonomi dalam dan luar negeri pada tahun 2010, dan prospek ekonomi 2011, perlu dikaji dengan seksama perkembangan perekonomian dalam dan luar negeri yang diperkirakan mungkin terjadi, serta tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam tahun anggaran 2012. Pengkajian tersebut sangat penting terutama di dalam menetapkan langkah-langkah kebijakan pembangunan pada umumnya, dan kebijakan APBD pada khususnya dalam tahun 2012. Dalam kerangka ini, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk melakukan berbagai upaya percepatan dan perluasan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran RPJMD 2010-2015. Pencapaian pembangunan tahun 2010 dan perkiraan pencapaian tahun 2011 harus dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk perencanaan pembangunan tahun 2012. Dalam RPJMD tahun 2010-2015, telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yaitu : **1) Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum 2) Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya 3) Meningkatkan Perekonomian Daerah dan**

Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri **4)** Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan **5)** Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender

Kelima misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015 tersebut, selanjutnya dijabarkan secara rinci dan bertahap ke dalam tema-tema pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2012, merupakan penjabaran RPJMD tahun 2010-2015, yang memuat langkah-langkah untuk mendukung tercapainya Visi Jambi Emas 2015. Tema RKPD tahun 2012, yaitu ***“Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Menuju Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Berkeadilan”***. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, RKPD 2012 disusun dengan mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2010 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2011, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2012.

Untuk melaksanakan misi yang harus diemban dalam RPJMD 2010-2015 guna mewujudkan visi pembangunan 2010-2015, telah ditetapkan 5 prioritas dalam RKP tahun 2012 dengan ringkasan penjabaran sebagai berikut :

1. **Peningkatan infrastruktur wilayah dan Pelayanan umum**, dengan fokus : a) Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur Listrik b) Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih c) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan.

2. **Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta sosial budaya,** dengan fokus : a) Pemerataan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas b) Peningkatan Peran Agama dan Budaya Dalam Pembangunan c) Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga d) Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial e) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan
3. **Pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan,** dengan fokus : a) Meningkatkan Perekonomian Daerah b) Meningkatkan kepariwisataan daerah
4. **Ketahanan pangan dan sumberdaya alam serta Lingkungan hidup,** dengan fokus a) Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan b) Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya mineral, Air, Lahan dan energi yang dapat diperbarukan. c) Peningkatan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup
5. **Penataan Tata Pemerintahan yang baik,** dengan fokus : a) Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik b) Peningkatan Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum c) Peningkatan Kesetaraan Gender

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil dalam penyusunan RPJM daerah ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasioinal meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah antara lain :

1. Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I

Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi.
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
27. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi.
28. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.
29. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

1. RPJMN dan RPJMD Provinsi Jambi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. RPJMN 2010 – 2014 menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan.

Visi RPJMN 2010 – 2014 adalah **Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan**. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi, yaitu : 1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, 2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi, 3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014 menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi

Jambi 2010 - 2015 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

2. **RPJPD dan RPJMD Provinsi Jambi**

RPJMD Provinsi Jambi 2010 – 2015 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2010-2015, harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi. Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2005 – 2025, dengan visi **JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu : (1) Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif; (2) Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum; (4) Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib; (5) Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan; (6) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahap kedua RPJMD Provinsi Jambi yang dimuat di dalam RPJPD Provinsi Jambi, fokus pembangunan di arahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Ketiga fokus pembangunan ini ditujukan dalam

rangka meningkatkan dan memperkuat identitas pembangunan Provinsi Jambi yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan Provinsi Jambi 2005-2025.



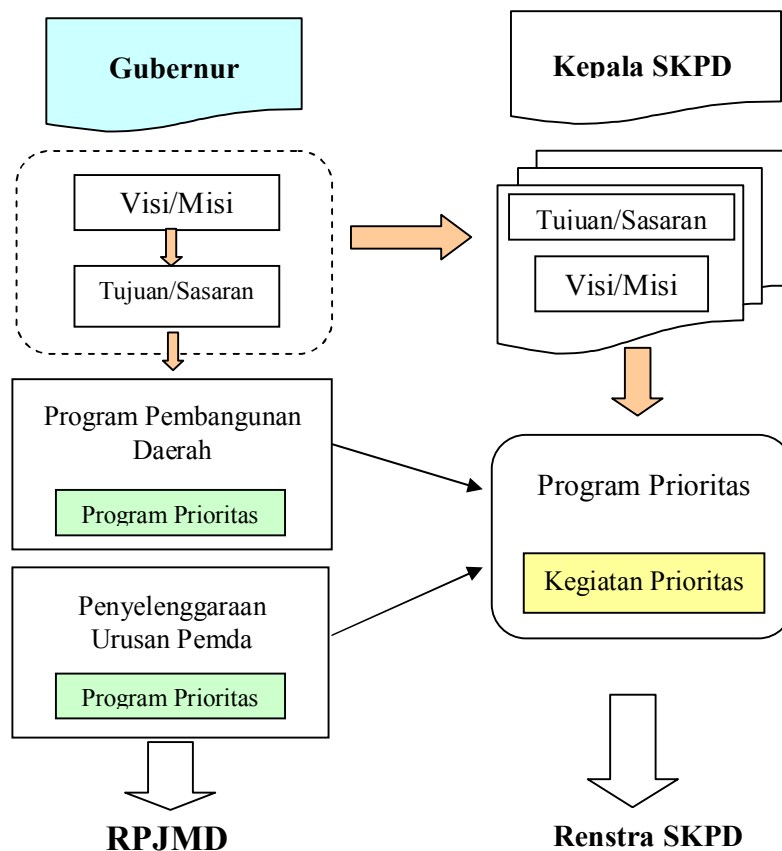
3. RPJMD dan RTRW Provinsi Jambi

Penyusunan RPJMD 2010 – 2015, juga harus berpedoman pada berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jambi sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi Jambi. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyeraskan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang

berkelanjutan. Dari pembagian kawasan lindung dan budi daya yang juga bereratan dengan topografi dan rona wilayah, Provinsi Jambi bisa dibagi dalam tiga zona yaitu barat, tengah dan timur. Zona Barat Provinsi Jambi yang merupakan dataran tinggi didominasi oleh kegiatan konservasi sehingga bisa disebut sebagai **zona konservasi**, meliputi Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo. Sedangkan zona tengah Provinsi Jambi dengan topografi yang relatif datar didominasi oleh kegiatan produksi sehingga bisa disebut sebagai **zona produksi** meliputi Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari. Sedangkan zona timur diarahkan untuk menjadi outlet Provinsi Jambi sehingga bisa disebut sebagai **zona distribusi** meliputi Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

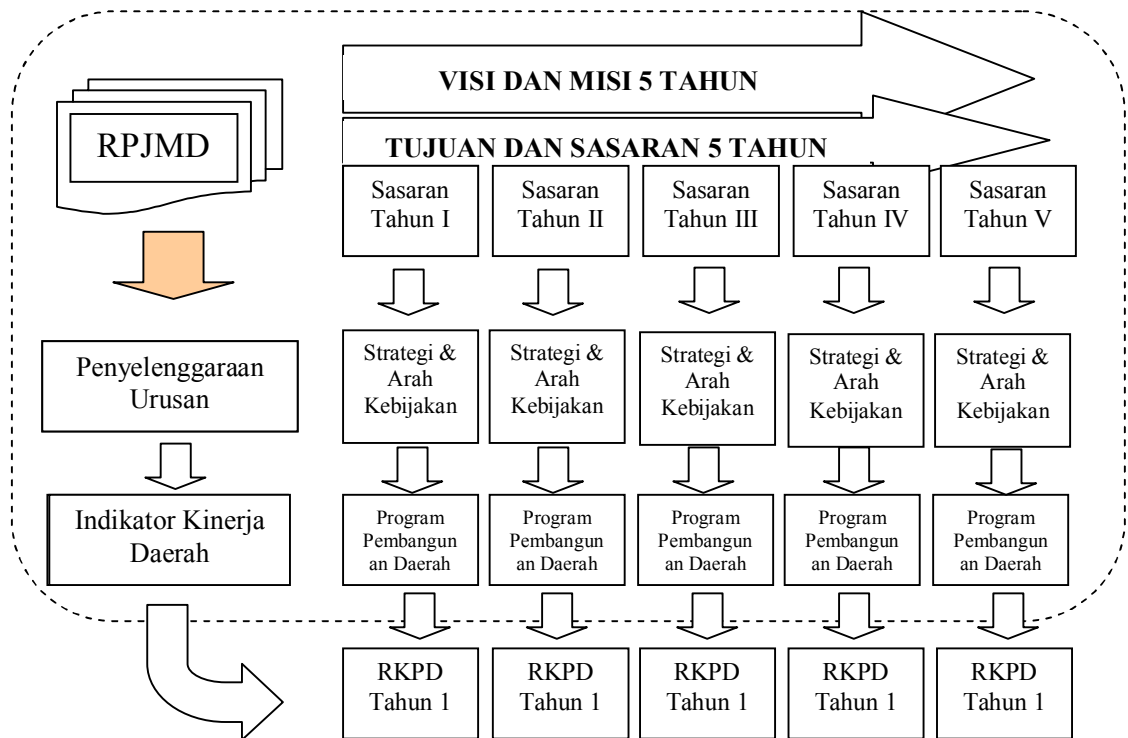
4. **RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah**

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Provinsi Jambi. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.



5. **RPJMD dan RKPD**

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi 2010 – 2015 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Jambi yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.



6. RKPD, KUA dan PPAS, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta APBD.

Hubungan dan keterkaitan antar dokumen RKPD, KUA dan PPAS, Renstra dan Renja SKPD serta APBD sangat berkaitan erat. Keterkaitan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD yang disusun ke dalam Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi sebagaimana menjadi acuan

perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam RKPD.

2. RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD. RKPD provinsi disempurnakan menjadi RKPD provinsi berdasarkan hasil verifikasi seluruh Renja SKPD provinsi. Verifikasi dilakukan berpedoman pada surat edaran kepala daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap Renja SKPD provinsi sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD provinsi. Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan Renja SKPD provinsi disampaikan kembali sejak verifikasi dilakukan.
3. RKPD provinsi yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan Renja SKPD provinsi dan akhir RKPD kabupaten/kota. RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengendalian pelaksanaan RKPD provinsi mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD provinsi. Pemantauan dan

supervisi harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan KUA, PPAS dan APBD Provinsi. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam KUA, PPAS dan APBD provinsi.

4. Kepala SKPD menyampaikan RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3.Hubungan Antar Dokumen
- 1.4.Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5.Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1.Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2.Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3.Permasalahan Pembangunan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2	Prioritas Pembangunan
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI	PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

RKPD Provinsi Jambi tahun 2012 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010 - 2015. Untuk menyusun RKPD Tahun 2012 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka telah dilaksanakan Forum SKPD Provinsi Jambi Tahun 2012. RKPD memuat prioritas pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, lintas Provinsi Jambi dan lintas wilayah yang tercerminkan dalam bentuk (i) kerangka regulasi dan (ii) kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian RKPD merupakan pedoman bagi APBD, dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah, yang mempunyai fungsi pokok :

1. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.

Dengan demikian, RKPD Provinsi Jambi Tahun 2012 merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam

penyusunan KUA dan PPAS serta APBD Provinsi Jambi tahun 2012 yang menguraikan tentang program dan kegiatan beserta pembiayaannya.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0°45'-2°45' LS dan 101°10'-104°55' BT di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura *Growth Triangle*).

Disamping itu, peluang Jambi kedepan dengan adanya pembukaan Terusan Thai (sebelumnya disebut Terusan Kra atau Terusan tanah genting Kra) yaitu terusan yang akan melewati Thailand Selatan untuk mempersingkat transportasi di wilayah tersebut dan rencananya akan dibuka pada tahun 2011 akan membuka peluang baru bagi Provinsi Jambi karena posisinya yang menghadap dan terbuka langsung ke Laut Cina Selatan. Pembukaan Terusan Kra ini akan mengubah geo-ekonomi global (khususnya Asia Timur) mengingat arus transportasi laut yang selama ini melewati Selat Malaka akan langsung berubah rute pelayarannya melalui Terusan Kra. Disamping itu Pelabuhan Sabang yang berada di ujung barat Indonesia bisa menjadi kota pelabuhan yang besar. Menghadap langsung ke Laut China Selatan. Peluang lainnya adalah

rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda akan membuka aksesibilitas ke Pulau Jawa.

Secara geografis, luas wilayah Provinsi Jambi tercatat seluas 53.435,72 km² yang terdiri dari (Biro Pemerintahan dan OTDA, 2009) :

- 1) Kabupaten Kerinci 3.808,50 Km² (7,13%),
- 2) Kabupaten Bungo 6.461,00 Km² (12,09%),
- 3) Kabupaten Tebo 6.802,59 Km² (12,73%),
- 4) Kabupaten Merangin 7.451,30 Km² (13,94%),
- 5) Kabupaten Sarolangun 6.175,43 Km² (11,56%),
- 6) Kabupaten Batanghari 5.804,83 Km² (10,86%),
- 7) Kabupaten Muaro Jambi 5.246,00 Km² (9,82%),
- 8) Kabupaten Tanjab Barat 5.645,25 Km² (10,56%),
- 9) Kabupaten Tanjab Timur 5.444,98 Km² (10,19%),
- 10) Kota Jambi 205,38 Km² (0,38%).
- 11) Kota Sungai Penuh 391,5 Km² (0,73%).

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian yaitu (Bappeda, 2005):

- 1) Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;
- 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan
- 3) Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten

Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

Provinsi Jambi berada di bagian tengah Pulau Sumatera memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Tabel 2.1
Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi

Topografi/ Ketinggian (m/dpl)	Luas		Wilayah/ Kabupaten
	Ha	%	
1	2	3	4
Dataran Rendah (0 – 100)	3.431.165	67	Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang Hari
Dataran sedang (100 – 500)	903.180	17	Sebagian Sarolangun, Tebo, sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, sebagian Tanjung Jabung Barat,
Dataran Tinggi (> 500)	765.655	16	Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Merangin, sebagian Sarolangun dan sebagian Bungo
Jumlah	5.100.000	100	

Sumber : BPS Prov. Jambi

Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang melewati wilayah ini. Wilayah ini didominasi jenis tanah gley humus rendah dan orgosol yang bergambut. Daya dukung lahan terhadap pengembangan wilayah sangat rendah sehingga membutuhkan input teknologi dalam pengembangannya. Dibagian tengah didominasi jenis tanah podsolik merang kuning yang kesuburannya relatif rendah. Daya dukung lahan cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial untuk pengembangan tanaman keras dan perkebunan. Pada bagian barat didominasi dataran tinggi lahan kering yang berbukit-bukit. Wilayah ini didominasi oleh jenis tanah latosol dan andosol. Pada bagian tengah Kabupaten Kerinci banyak di temui jenis tanah alluvial yang subur yang dimanfaatkan sebagai lahan persawahan irigasi yang cukup luas. Beberapa jenis tanah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Provinsi Jambi

No.	Jenis Tanah	Jumlah	%
1	2	3	4
1	Podzolik Merah Kuning	2,036,386	39.93
2	Latosol	952,386	18.67
3	Gley Humus Rendah	547,830	10.74
4	Andosol	354,406	6.95
5	Organosol	308,338	6.05
6	Podzolik Coklat + Andosol + Podzolik	275,652	5.40
7	Podzolik Merah Kuning	236,343	4.63
8	Alluvial	199,553	3.91
9	Hidromorfik Kelabu	83,743	1.64
10	Latosol Andosol	60,032	1.18
11	Rawa Laut	42,951	0.84
12	Komplek Latosol + Litosol	2,380	0.05
Jumlah		5,100,000	100.00

Sumber : RTRW Provinsi Jambi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis tanah yang dominan di Provinsi Jambi adalah Podzolik Merah Kuning dengan luas 2.036.386 hektar atau 39,93% dari luas wilayah sedangkan jenis tanah yang terendah adalah kompleks latosol dan litosol yaitu 2.380 hektar atau 0,05%.

Dilihat dari pola aliran sungai, dimana di daerah hulu pola aliran sungainya berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Merangin dan Kabupaten Kerinci, sedangkan di daerah pesisir berbentuk paralel. Sungai-sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruh pada musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan kecenderungan air sungai menjadi banjir, sebaliknya pada musim kemarau kecenderungan air sungai menjadi dangkal dan fluktuasinya dapat mencapai 7 (tujuh) meter. Dari kondisi ini sangat berpengaruh pula pada permukiman penduduk yang tinggal di sepanjang WS Batang Hari baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha tani.

Berdasarkan kondisi topografi, kelerengan dan kondisi hidrologi, dapat disimpulkan berbagai karakter lahan di Provinsi Jambi sebagai berikut :

- a) Pertanian lahan basah (LB), luasnya 684,060 hektar atau 13,41 % dari total luas Provinsi Jambi, dengan kemiringan 0-3 % dan ketinggian 0-10 m dpl. Terdapat di wilayah timur bagian utara sepanjang pesisir pantai dan bagian wilayah tengah yang merupakan WS Batanghari dan sub WS nya.
- b) Pertanian lahan kering dataran rendah sampai sedang (LKDR) luasnya 2.747.105 hektar atau 53,87 % dari luas total Provinsi Jambi dengan kemiringan 3-12 % dan ketinggian 10-100 m dpl. Terdapat di wilayah timur bagian selatan (Tanjung Jabung Timur), sebagian besar wilayah tengah kecuali WS (Kota Jambi, Batanghari, Bungo, Tebo

bagian tengah dan selatan) dan wilayah barat (Sarolangun, Merangin bagian selatan dan Kerinci bagian tengah).

- c) Pertanian lahan kering dataran tinggi (LKDT) luasnya 903.180 hektar atau 17,71 % dari total luas Provinsi Jambi dengan kemiringan 12-40 % dan ketinggian 100-500 m dpl. Umumnya terdapat di wilayah barat (seluruh Kerinci kecuali bagian tengah, Sarolangun-Merangin bagian utara dan barat serta Bungo, Tebo bagian barat dan utara). Sedangkan sisanya 15,02 % merupakan dataran tinggi dengan ketinggian di atas 500 m dpl merupakan daerah pegunungan dari rangkaian pegunungan bukit barisan yang membujur di sebelah barat wilayah Provinsi Jambi.

Berdasarkan karakter kompleks ekologi, perkembangan kawasan budidaya khususnya untuk pertanian terbagi atas tiga daerah yaitu kelompok ekologi hulu, tengah dan hilir. Masing-masing memiliki karakter khusus, dimana pada kompleks ekologi hulu merupakan daerah yang terdapat kawasan lindung, ekologi tengah merupakan kawasan budidaya dengan ragam kegiatan yang sangat bervariasi dan kompleks ekologi hilir merupakan kawasan budidaya dengan penerapan teknologi tata air untuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

Tabel 2.3
Karakter Lahan Pertanian di Provinsi Jambi

Uraian	Karakter lahan pertanian		
	LB	LKDR	LKDT
1	2	3	4
Proporsi luas Lahan	18,41 %	53,87 %	17,71 %
Kemiringan	0-3 %	3-12 %	12-40 %
Topografi	0-10 m dpl	10-100 m dpl	100-500 m dpl
Penggunaan lahan eksisting	- Hutan rawa bakau, - Hutan nipah - Semak belukar - Sawah tanda hujan - Sawah pasang surut - Sawah irigasi - Kebun kelapa - Permukiman - Hutan lindung	- Hutan primer - Ladang berpindah - karet rakyat - Hultikultura - Sawah irigasi - kelapa sawit - Permukiman - Hutan lindung	- Hutan primer - Ladang berpindah - kayu manis - Hultikultura - Sawah irigasi - Semak belukar - Permukiman - Hutan lindung
Upaya pemanfaatan lahan	Input teknologi menengah tinggi	Ketersediaan unsur hara	Keterbatasan lahan karena hutan lindung
Komoditi potensial	- Sawah pasang susut - Sawah tandah hujan - Sawah irigasi - Palawija, hultikultura - Kebun kelapa, kopi kakao - Perikanan laut & tambak	- Sawah irigasi - Palawija - Hultikulture - Peternakan - Perkebunan sawit - Karet, kopi, kakao - Perikanan kolam & tambak	- Casiavera - Sawah irigasi - Holtikultura - Kopi - Perikanan kolam
Cakupan wilayah	- Tanjung Jabung Barat dan Timur - WS Batanghari	- Tanjab Timur - Kota Jambi - Batanghari - Bungo, Tebo tengah & selatan - Sarolangun	- Kerinci kecuali bagian tengah - Bungo, Tebo Barat dan Utara - Sarolangun utara dan barat

Keterangan :

LB : Lahan Basah
LKDR : Lahan Kering Dataran Rendah
LKDT : Lahan Kering Dataran Tinggi

Adapun Penggunaan lahan di Provinsi Jambi secara umum terdiri dari : 1) Lahan Permukiman tercatat 43.631 Ha; 2) Sawah Tadah Hujan tercatat 136.662 Ha; 3) Tegalan/Ladang tercatat 117.516 Ha; 3) Kebun Campuran tercatat 112.787 Ha; 4) Kebun Karet tercatat 1.284.003 Ha; 5) Kebun Sawit tercatat 936.565 Ha; 6) Kebun Kulit Manis tercatat 93.609 Ha; 7) Kebun teh tercatat 4.691 Ha; 8) Semak dan alang-alang tercatat 87.177 Ha; 9) Hutan Lebat tercatat 1.634.492 Ha; 10) Hutan Belukar tercatat 413.406 Ha; 11) Hutan Sejenis tercatat 187.704 Ha; 12) Lain-lain tercatat 47.757 Ha

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasar kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008, Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- a. Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan) (I/B/1)
- b. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi) (I/B/1)
- c. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau) (I/B/1)

d. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi) (I/B/1)

Sedangkan untuk Kawasan strategis provinsi adalah yang wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi. Adapun kawasan-kawasan strategis yang berada untuk Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya
2. Kawasan strategis Metropolitan Jambi dan sekitarnya.
3. Kawasan strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tungkal Ulu dan sekitarnya.
4. Kawasan strategis Muaro Bungo
5. Kawasan strategis Tebo – Wiroto Agung
6. Kawasan strategis Bangko - Sarolangun – Singkut
7. Kawasan strategis Sungai Penuh dan sekitarnya

Berdasarkan penunjukkan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 421/Kpts-II/1999, dimana kawasan hutan Provinsi Jambi meliputi luas $\pm$ 2.179.440,00 Ha atau 42,73% dari keseluruhan luas Provinsi Jambi. Adapun luasan tersebut sesuai dengan pemaduserasian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 30.400,00 Ha (1,39%), Taman Nasional 608.630,00 Ha (27,92%), Taman Hutan Raya 36.660,00 Ha (1,68%), Hutan Wisata Alam 430,00 Ha (0,02%), Hutan Lindung 191.130,00 Ha (8,77%), Hutan Produksi Terbatas 340.700,00 Ha (15,63%), Hutan Produksi Tetap 971.490,00 Ha (44,57%).

Berkaitan dengan kondisi ketahanan pangan di Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan perkembangan yang positif dimana terlihat dengan meningkatnya beberapa indikator, yaitu:

1. Sampai dengan tahun 2009, luas areal untuk komoditi perkebunan di Provinsi Jambi seluas 1.334.595 ha yang terdiri dari 5 komoditi utama perkebunan yaitu karet dengan luasan 650.623 ha (48,75 %), kelapa sawit dengan luasan 493.678 ha (36,99 %), kelapa dalam dengan luasan 118.879 ha (8,91 %), kopi dengan luasan 23.954 ha (1,79 %) dan cassiavera dengan luasan 47.461 ha (3,56 %). Pada tahun 2006 luas perkebunan karet di Provinsi Jambi baru mencapai 630.211 ha, maka pada tahun 2009 meningkat sebesar 3,24 % menjadi 650.623 ha. Sementara untuk Karet areal Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) terjadi peningkatan sebesar 36,27 %, dimana pada tahun 2006 luas areal TBM adalah sebesar 128.031 ha meningkat pada tahun 2009 menjadi 174.472 ha. Untuk Tanaman Menghasilkan (TM) juga mengalami peningkatan sebesar 1,35 %, dimana pada tahun 2006 luas arealnya adalah 342.346 ha dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 346.977 ha. Sementara untuk Tanaman Tua/Tanaman Rusak (TT/TR) terjadi penurunan sebesar -19,18 %, dimana pada tahun 2006 jumlah areal TT/TR adalah 159.834 ha menurun pada tahun 2009 menjadi 129.174 ha.
2. Secara umum peningkatan ini juga diikuti dengan meningkatnya luas areal kebun karet sebesar 3,24 % dari 630.211 ha pada tahun 2006 menjadi 650.623 ha pada tahun 2009, untuk periode yang sama juga terjadi peningkatan jumlah petani karet di Provinsi Jambi sebesar 10,16 % dimana pada tahun 2006 jumlah petani karet

berjumlah 228.576 KK, maka pada tahun 2009 meningkat menjadi 251.796 KK. Sementara harga komoditi tersebut secara rata-rata juga meningkat sebesar 41,54 %, dimana pada tahun 2006 harga karet Rp. 6.436/kg meningkat menjadi Rp. 9.109,64/kg. Sementara dari sisi eksportnya, juga mengalami peningkatan sebesar 0,80 % jika dibandingkan dengan tahun 2006 berjumlah 250.781,28 ton menjadi 252.794,76 ton di tahun 2009.

3. Sampai dengan tahun 2009 luasan areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi adalah 493.678 ha atau setara dengan 36,99 % dari total luasan perkebunan yang berjumlah 1.334.595 ha. Jika dilihat perkembangan luasan lahannya, maka telah terjadi peningkatan luasan sebesar 16,74 % dari tahun 2006 dengan luas 422.888 ha menjadi 493.678 ha pada tahun 2009. produksi Tandan Buah Segar (TBS) mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2006 menghasilkan TBS sebanyak 5.093.840 ton menjadi 6.351.540 ton pada tahun 2009. Begitu juga dengan produksi CPO mengalami peningkatan dari 1.018.768 ton pada tahun 2006 meningkat sebesar 1.270.308 ton pada tahun 2009.
4. Untuk komoditi kelapa dalam, jika dilihat dari luasan lahannya menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Secara rata-rata untuk periode tahun 2006 -2009 terjadi penurunan luasan lahan dari 199.292 ha tahun 2006 menjadi 118.879 ha tahun 2009 atau turun sebesar 0,12 %. Seiring dengan penurunan luasan lahan tersebut, juga diikuti dengan penurunan produksi kopra, dari 118.886 ton tahun 2006 menjadi 113.142 tahun 2009 atau secara rata-rata untuk periode yang sama mengalami penurunan sebesar 1,59 %. Indikator lain yang mengalami penurunan

adalah jumlah petani yang mengalami penurunan dari 100.147 KK tahun 2006 menjadi 95.785 KK atau turun sebesar 1,46 %. Disisi lain, untuk harga kopra secara rata-rata untuk tahun 2006 – 2009 mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan jika dibandingkan pada tahun 2006, dimana pada tahun 2009 harga kopra mencapai Rp4.627/kg atau meningkat sebesar 4,36 % jika dibandingkan dengan harga kopra pada tahun 2006 yaitu Rp1.624/kg.

5. Terhadap komoditi kopi, jika dilihat dari luasan lahannya menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun dari 24.458 ha tahun 2006 menjadi 23.954 ha tahun 2009. Secara rata-rata untuk periode tahun 2006 - 2009 terjadi penurunan luasan lahan sebesar 0,69 %. Seiring dengan penurunan luasan lahan tersebut, juga diikuti dengan penurunan produksi kopi pada tahun 2007 menjadi 10.190 ton, namun secara perlahan mengalami peningkatan produksi kembali pada tahun 2008 menjadi 10.539 ton atau naik sebesar 3,42 % dan kembali meningkat di tahun 2008 yaitu sebanyak 10.934 ton atau naik sebesar 3,75 %. Indikator lain yang mengalami penurunan adalah jumlah petani yang mengalami penurunan dari 27.696 KK tahun 2006 menjadi 24.488 KK tahun 2009 atau turun sebesar 3,86 % untuk kurun waktu tahun 2006 – 2009. Disisi lain, untuk harga kopi secara rata-rata mengalami peningkatan dari Rp.8.004 per kg tahun 2006 menjadi Rp.20.494 per kg tahun 2009 atau naik sebesar 38,00 %.
6. Cassiavera merupakan salah satu komoditi perkebunan yang dapat dikategorikan komoditi unggulan daerah, dalam perkembangannya komoditi ini mengalami pasang surut. Dimana luasan arealnya secara rata-rata selama tahun

2006 – 2009 terus mengalami penyusutan dari 49.106 Ha tahun 2006 menjadi 47.461 Ha tahun 2009 atau rata-rata berkurang sebesar 1,12%, begitu juga dengan produksinya yang mengalami penurunan 64.602 ton tahun 2006 menjadi 57.526 ton tahun 2009 atau turun rata-rata sebesar 3,67 %. Sementara jika dilihat jumlah petani yang berusaha pada komoditi ini juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun dari 20.708 KK tahun 2006 menjadi 18.894 KK tahun 2009, atau terjadi penurunan jumlah petani sebesar 2,98 %, untuk harganya sendiri mengalami fluktuasi dimana terjadi peningkatan harga untuk tahun 2007 dan tahun 2008, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2009. Secara kumulatif terjadi peningkatan harga selama kurun waktu 2006 – 2009 sebesar 10,45 %.

7. Jika dilihat lebih lanjut terhadap penanganan pertanian, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 637.757 orang meningkat menjadi 740.849 orang di tahun 2009 atau mencapai 58,22% dari jumlah penduduk bekerja di sektor pertanian. Sangat tingginya penduduk yang bekerja di sektor pertanian ini perlu mendapat perhatian ke depan. Hal ini sangat penting diperhatikan karena sampai pada tahun 2009 kesejahteraan petani masih jauh dari harapan karena nilai NTP masih di bawah 100. Tingkat kemampuan/daya beli petani yang dicerminkan dengan nilai tukar petani (NTP) sejak tahun 2000 dengan nilai 108,17 dan terus menurun sampai tahun 2009 hanya 98,54.
8. Terhadap luas panen dan produksi komoditi pangan, ada beberapa yang mengalami peningkatan cukup signifikan terutama produksi padi yang meningkat produksi dari

579.635 ton GKG tahun 2005 dan mencapai produksi tertinggi pada tahun 2009 yaitu 644.947 Ton GKG dengan pertumbuhan rata 2,71% per tahun. Terjadinya kenaikan produksi ini tidak terlepas dengan terjadinya peningkatan luas panen dari 154.941 Ha tahun 2005 menjadi 155.802 Ha pada tahun 2009 dengan pertumbuhan rata-rata 0,14 per tahun dan produktivitasnya juga meningkat dengan rata-rata peningkatan produktivitas 2,57% per tahun. Sementara itu, terhadap peningkatan luas panen dan produksi tidak hanya terjadi pada produksi Padi namun juga terjadi pada komoditi lainnya seperti pada jagung yang meningkat sebesar 6,49% per tahun. Peningkatan produksi jagung ini seiring dengan peningkatan luas panen rata-rata 3,32% pertahun dan produktivitas meningkat rata-rata 3,08% per tahun, produksi kedele yang meningkat rata-rata 33,64% per tahun. Peningkatan ini diakibatkan pada terjadinya peningkatan luas panen rata-rata 38,82% pertahun walaupun produktivitasnya turun -0,87% per tahun. Produksi kentang juga meningkat menjadi 94.368 ton pada tahun 2009. Namun untuk produksi tanaman pangan lain seperti Kacang tanah mengalami penurunan sebesar -1.45% pertahun, Kacang Hijau sebesar -8,73, Ubi Kayu turun sebesar -0,27% per tahun dan Ubi Jalar turun sebesar -7,67% pertahun. Penurunan ini disebabkan karena turunkan luas panen walaupun dari segi produktivitas terjadi peningkatan. Peningkatan yang cukup signifikan pada produksi padi dari 544.597 ton GKG tahun 2004 dan mencapai produksi tertinggi pada tahun 2009 yaitu 644.947 Ton GKG. Selain itu, untuk komoditi lainnya seperti pada jagung yang meningkat dari 29.288 ton pada tahun 2004 menjadi 38.168 ton pada tahun 2009. Sedangkan kedele

meningkat dari 2.637 ton tahun 2004 menjadi 9.132 ton tahun 2009 dan kentang meningkat dari 48.357 tahun 2004 menjadi 94.368 tahun 2009.

9. Terhadap ketersediaan beras dan jagung untuk dikonsumsi di rumah tangga telah mencukupi kebutuhan konsumsi. Sedangkan untuk penyediaan energi di Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari 3.232 kkal/kapita/hari tahun 2008 menjadi 3.755 kkal/kapita/hari tahun 2009. Penyediaan energi bahan pangan yang diproduksi daerah mengalami peningkatan sebesar 16,18 %, kecuali penyediaan sayur dan buah, yaitu mengalami penurunan sebesar 10,35 %. Dalam menunjang peningkatan produksi padi didukung oleh sawah beririgasi teknis 1,98%, Setengan Teknis 5,69% dan Sederhana 3,38 dan Desa/Non PU 12,20%. Sedangkan sawah yang berupa tadah hujan masih mencapai 18,91%, pasang surut mencapai 38,75%, sawah rawa lebak mencapai 17,19%.
10. Terhadap pencapaian sub sektor peternakan, pada jumlah populasi ternak besar dan kecil di Provinsi Jambi yaitu telah terjadi peningkatan populasi dari 113.678 ekor tahun 2005 menjadi 164.526 ekor tahun 2009 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun mencapai 9,68 %. Sedangkan untuk kerbau walaupun terjadi kenaikan populasi dari 72.852 ekor tahun 2004 menjadi 73.852 tahun 2009 atau naik 0,34% pertahun, namun kenaikan ini belum terlalu signifikan karena rata-rata pemeliharaan kerbau di Provinsi Jambi masih bersifat sangat tradisional dan banyak kerbau yang disentuh dengan program *Artificial Insemination* (AI) atau kawin suntik untuk mempercepat tingkat kelahiran. Sedangkan populasi kuda terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 472 ekor tahun 2005 menjadi 178 ekor

tahun 2009 atau turun -21,64% per tahun. Untuk populasi Kambing dan Domba terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 124.955 ekor untuk Kambing tahun 2004 menjadi 262.072 ekor tahun 2009 dengan rata-rata pertumbuhan 20,34% pertahun sedangkan untuk Domba dari 45.285 ekor Domba tahun 2005 menjadi 56.168 ekor tahun 2009 dengan rata-rata pertumbuhan 5,53% per tahun. Sedangkan untuk babi peningkatan populasi juga terjadi dari 13.614 ekor tahun 2005 menjadi 19.360 ekor tahun 2009 dengan rata-rata pertumbuhan 9,20% pertahun. Sementara itu, pada populasi Itik dan Ayam Kampung serta ayam Pedaging dan Petelur juga terjadi peningkatan populasi rata-rata per tahun yang mencapai 5,12% untuk Itik, 8,91% untuk Ayam kampung, 2,39% untuk ayam pedaging dan 2,55% untuk ayam petelur.

11. Melihat kondisi dan kebutuhan di Provinsi Jambi, ke depan sangat berpotensi untuk pengembangan ternak besar. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan kapasitas daya tampung terlihat untuk limbah tanaman pangan dapat menampung 245.795,54 satuan ternak (ST) dan dengan memanfaatkan limbah kelapa sawit seperti daun, pelepah, lumpur serat bkl sawit dapat menampung 987.356 satuan Ternak (ST) sehingga secara keseluruhan dapat menampung sebanyak 1.233.151,54 satuan ternak. Sedangkan untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan dari jumlah ternak besar yang berpeluang dapat ditampung dapat dihasilkan kotoran ternak sebanyak 12.331,5 ton per hari atau 4.500.997,5 ton/tahun yang dapat dikembalikan dalam bentuk pupuk ke tanaman.
12. Sumberdaya kelautan Provinsi Jambi yang terdiri dari pesisir, dan lautan serta biota di dalamnya mempunyai

peranan penting bagi pembangunan di daerah baik dari aspek ekonomi, sosial, keamanan dan ekologis. Perikanan merupakan salah satu penyumbang dalam menunjang ekspor non-migas dengan bersumber dari perikanan laut, perairan umum dan budidaya (budidaya kolam, budidaya keramba/KJA, budidaya tambak dan budidaya mina padi). Dari ketiga sumber produksi tersebut, pada Tahun 2006 telah menghasilkan 56.321,82 ton, dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada Tahun 2007 jumlah produksi yang dihasilkan adalah 66.518,85 ton, Tahun 2008 70.728,20 ton dan pada Tahun 2009 menghasilkan sebesar 75.946,00 ton. Secara rata-rata, dalam kurun waktu tersebut produksi ikan yang berasal dari perikanan laut adalah sebanyak 42.656,15 ton, perairan umum 5.588,25 ton dan yang berasal dari budidaya sebanyak 19.134,32 ton. bahwa produksi ikan yang bersumber dari perikanan laut masih memberikan kontribusi terbesar untuk kurun waktu 2006 – 2009, dimana secara rata-rata memberikan kontribusi sebesar 63,73 %. Sementara kontribusi produksi yang dihasilkan dari budidaya sebesar 27,94 % dan yang berasal dari perairan umum sebesar 8,33 %. untuk budidaya kolam mampu menghasilkan produksi ikan sebanyak 8.607,8 ton, budidaya keramba (KJA) sebanyak 8.901,5 ton, budidaya tambak sebesar 1.616,8 ton dan budidaya mina padi sebesar 8,3 ton. Secara total, dari empat sumber budidaya tersebut menghasilkan produksi ikan sebesar 19.134,3 ton.

Provinsi Jambi sebagai salah satu provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi

kerentanan terjadi perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan. Dampak perubahan iklim global pada akhirnya akan berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan sumber daya air, ketahanan pangan dan energi yang jika tidak diantisipasi akan memperburuk kinerja pembangunan khususnya sektor sumberdaya alam. Melalui pelaksanaan UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) di Bali Tahun 2007, merupakan momentum yang telah di support oleh beberapa LSM lokal, yang memberikan peluang bagi kelompok masyarakat untuk melindungi hutan adat, hutan desa di wilayah barat dan ada REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia) dengan luas sekitar 48.000 hektar di wilayah Provinsi Jambi tepatnya di Kabupaten Batanghari.

2.1.1.3. Wilayah rawan Bencana

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana yaitu :

2.1.1.3.1. Bencana geologi

Bencana Geologi di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsor, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Berdasarkan data yang sangat terbatas dari penelitian-penelitian, batas-batas daerah bahaya sementara pada Gunung Kerinci, yaitu:

A. Daerah Bahaya

Daerah bahaya Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini, bilamana kegiatannya

meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa awan panas letusan, bom vulkanik yang membara (rnatikan). Jika kegiatan gunung ini meningkat, seluruh wilayah daerah bahaya harus dikosongkan. Daerah bahaya ini di peta berwarna merah, berbentuk lingkaran dengan jari-jari 6 kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lernbah kalinya diperluas mengikuti lembah tersebut.

B. Daerah Waspada

Daerah waspada Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini bilamana kegiatan gunung meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa lapili (kerikil vulkanik) dan abu, ataupun jika di puncak gunung terjadi hujan setelah adanya kegiatan (letusan) daerah ini akan terserang lahar hujan. Daerah waspada di peta berwarna hijau, berbentuk lingkaran dengan jari-jari 9 kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya daerah ini diperluas mengikuti lembah-lembah tersebut.

2.1.1.3.2. Bencana banjir

Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan.

2.1.1.3.3. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari kebakaran lahan yaitu tahun 2006 mencapai 6.752 titik api, tahun 2007 berkurang menjadi 2.782 titik api dan tahun 2008 sebanyak 2020 titik api. Untuk angka terakhir pada tahun 2009 sebesar 1.784 titik api, dengan wilayah yang terbesar terjadinya titik api berada di

Kabupaten Tebo sebanyak 419 titik, Sarolangun sebanyak 398 dan Kabupaten Bungo sebanyak 270 titik serta Tanjung Jabung Barat 118 titik. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta.

2.1.1.4. Demografi

Menurut data BPS (2009), bahwa penduduk Provinsi Jambi tahun 2010 berjumlah 3.088.618 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 60 jiwa/km² kecuali Kota Jambi sebesar 2.293 jiwa/km² dan Kota Sungai Penuh sebesar 199 jiwa/km². Sedangkan pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi selama periode 2005-2010 rata-rata mencapai 1,59% pertahun, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2006 dan 2007 yaitu 2,20%. Namun pada tahun 2008 tingkat pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 1,68% dari tahun 2009. Berdasarkan jenis kelamin, meskipun angkanya berfluktuasi namun selama tahun 2005-2010 rasio penduduk berjenis kelamin laki-laki selalu lebih besar dari kelompok penduduk berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2010 penduduk laki-laki berjumlah 1.578.338 dan perempuan berjumlah 1.510.280 jiwa atau rasio sebesar 1,04 banding 1. Dari jumlah penduduk di Provinsi Jambi, terdapat tiga daerah dengan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2010 yaitu Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Merangin. Sedangkan tiga daerah dengan jumlah penduduk terkecil yaitu Kota Sungai Penuh 81.789 jiwa, Kabupaten Tanjab Timur 204.557 jiwa dan Kabupaten Kerinci 229.387 jiwa. Penurunan jumlah penduduk Kabupaten Kerinci yang disebabkan oleh terbentuknya Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom baru sejak 8 Nopember 2008. Adapun jumlah penduduk

berdasarkan pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2010 meliputi :

1. Kota Jambi dengan jumlah penduduk sebesar 529.118 Jiwa
2. Kabupaten Batang hari dengan jumlah penduduk sebesar 240.743 Jiwa
3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jumlah penduduk sebesar 204.557 Jiwa
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah penduduk sebesar 278.937 Jiwa
5. Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah penduduk sebesar 341.588 Jiwa
6. Kabupaten Tebo dengan jumlah penduduk sebesar 298.043 Jiwa
7. Kabupaten Bungo dengan jumlah penduduk sebesar 302.558 Jiwa
8. Kabupaten Sarolangun dengan jumlah penduduk sebesar 245.848 Jiwa
9. Kabupaten Merangin dengan jumlah penduduk sebesar 336.050 Jiwa
10. Kabupaten Kerinci dengan jumlah penduduk sebesar 229.387 Jiwa
11. Kota Sungai Penuh dengan jumlah penduduk sebesar 81.789 Jiwa

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Secara umum, gambaran terhadap kondisi ekonomi makro PROVINSI JAMBI adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga dapat dicerminkan sebagai berikut :

1. Perekonomian Provinsi Jambi yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 mencapai

Rp.42.816 milyar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2009 sebesar Rp.16.272 milyar.

2. Pertumbuhan ekonomi Jambi melambat sebagai dampak dari lesunya perekonomian global yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2009 menurun dari 7,16 persen tahun 2008 menjadi 6,38 persen tahun 2009. Provinsi Jambi sebagai daerah yang masih mengandalkan ekonominya kepada sektor primer ikut terkena imbas dari penurunan harga komoditi di pasar internasional
3. Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, terutama terkait dengan terjaganya daya beli masyarakat, kegiatan kampanye Pemilukada juga ikut mendorong meningkatnya pengeluaran masyarakat dan pemerintah, disamping itu kendala yang masih dijumpai setiap tahun adalah lambatnya penyerapan anggaran, sehingga perlu upaya mempercepat penyerapan anggaran untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.
4. Secara bertahap indikator ekonomi Provinsi Jambi menguat, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, serta aktivitas perekonomian rakyat yang berbasis kepada komoditi primer mulai kembali bergairah yang disebabkan adanya perbaikan untuk hasil pertanian
5. Untuk pertumbuhan tahunan (*year on year*), ekonomi Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 6,17 persen pada tahun 2009. Sumber pertumbuhan berasal dari sektor pertanian sebesar 2,0 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,3 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 0,7 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi 0,5 persen, sektor keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan sebesar 0,9 persen serta sektor jasa-jasa sebesar 0,5 persen sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih hanya menyumbang sebesar 0,1 persen.

6. Dari sisi permintaan berdasarkan PDRB Penggunaan, pertumbuhan ekonomi Jambi pada triwulan II-2010 didorong oleh peningkatan konsumsi lembaga nir laba, konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah, terutama dipicu oleh penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (PILKADA) Gubernur Jambi pada bulan Juni 2010 dan juga peningkatan impor karena kebutuhan Pilkada seperti kain, plastik baleho dan sebagainya, serta memasuki liburan sekolah dan persiapan memasuki bulan Suci Ramadhan.
7. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 7,0 persen, konsumsi lembaga nir laba sebesar 3,8 persen, impor sebesar 5,2 persen dan konsumsi rumah tangga sebesar 0,5 persen. Namun dari sisi distribusi, Konsumsi rumah tangga masih mempunyai pangsa yang paling besar, yakni mencapai 63,2 persen, diikuti oleh pengeluaran pemerintah sebesar 17,09 persen, impor sebesar 48,4 persen dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 17,1 persen.
8. Perkembangan PDRB sektor pertanian berdasarkan harga konstan terlihat terjadi peningkatan dari 3.643,6 Miliar pada tahun 2004 menjadi 4.998,7 Miliar tahun 2009 dengan pertumbuhan rata-rata 6,63% pertahun. Perkembangan ini diikuti oleh sub sektor tanaman pangan dari 1.394,2 Milliar tahun 2004 menjadi 1.864,1 Miliar tahun 2009 dengan pertumbuhan dibawah rata-rata sektor pertanian yakni 5,98% pertahun. Sedangkan sub sektor perkebunan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di atas rata-rata sektor pertanian dari 1.516,5 Miliar tahun 2004 menjadi

2.351,7 Miliar tahun 2009 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 9,17 % pertahun. Sedangkan subsektor peternakan terlihat perkembangan yang belum berarti dari 286,8 Miliar pada tahun 2004 menjadi 317, 7 Miliar pada tahun 2009 dengan pertumbuhan di bawah rata-rata pertumbuhan sektor pertanian yaitu hanya 2,06% pertahun. Selanjutnya, terhadap kondisi kehutanan juga terjadi penurunan dari 271,9 Miliar tahun 2004 menjadi 264,3 Miliar tahun 2009 dengan pertumbuhan rata-rata -0,57% pertahun. Kemudian perkembangan untuk sub sektor perikanan terlihat perkembangan dari 174, 1 Miliar tahun 2004 menjadi 200,8 Miliar pada tahun 2009 dengan rata-rata pertumbuhan di bawah sektor pertumbuhan yaitu 2,9% pertahun. Pada subsektor perkebunan terlihat terjadi peningkatan PDRB rill cukup signifikan dari 2.186,1 Miliar tahun 2004 menjadi 5.228,6 Miliar tahun 2009. Seiring dengan ini terjadi juga peningkatan kontribusi sektor ini dari 41,13% tahun 2004 menjadi 46,07% tahun 2009.

9. Upaya mengurangi ketimpangan pembangunan pada wilayah perbatasan dan kawasan erat kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan antar golongan masyarakat. Pada tahun 2005 kesenjangan antar golongan masyarakat di Provinsi Jambi yang digambarkan oleh Gini Ratio sebesar 0,302, namun pada tahun 2009 tingkat kesenjangan tersebut menurun dengan Gini Ratio sebesar 0,269 sehingga termasuk kategori tingkat kesenjangan ringan. Menurunnya kesenjangan antar golongan masyarakat ini, disumbangkan oleh program yang berkaitan langsung dengan masyarakat bawah seperti replanting karet, subsidi bibit sawit untuk petani dan program lain seperti penyediaan kerambah dan lain-lain.

Namun disisi lain ketimpangan pembangunan antarwilayah relatif meningkat yang ditandai dengan angka Indeks Williamson yaitu dari 0,393 tahun 2005 meningkat menjadi 0,4137 tahun 2009. Kesenjangan pembangunan ini dapat berdampak buruk bagi perkembangan otonomi daerah di Provinsi Jambi. Untuk itu, pengurangan penduduk miskin, selain merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, untuk meningkatkan hak dan martabatnya, juga salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di masa depan adalah melalui perbaikan kemampuan si miskin, sehingga akan membuka jalan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi setiap tingkatan ke tingkat yang lebih tinggi. Upaya penanggulangan kemiskinan harus berjalan seiring dengan upaya untuk meningkatkan pemerataan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok dan antar individu.

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada bidang Pendidikan dan Kebudayaan, akan sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, dimana secara implisit terkandung makna pentingnya memperhatikan aspek kualitas penduduk, SDA dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan. Kenyataan telah menunjukkan bahwa strategi peningkatan kualitas penduduk yang hanya bertumpu pada penekanan pertumbuhan penduduk, tidak dapat memberikan makna yang cukup berarti dalam pemecahan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, penekanan pada pembangunan pendidikan dengan memperhatikan potensi penduduk serta kondisi SDA dan lingkungan yang ada, ternyata mampu mewujudkan keberlangsungan serta kesinambungan (*sustained*)

pembangunan. Isu pembangunan pendidikan berwawasan kependudukan menjadi penting artinya, karena memiliki makna bahwa pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan penduduk dan potensi sumberdaya setempat. Dengan kata lain, pengaruh mutu SDM penduduk merupakan modal (*Human Capital*) penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan masyarakat antara lain tingkat pendidikan, status kesehatan dan kesempatan kerja. Adapun gambaran umum mengenai aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi, dari 71 di tahun 2005 meningkat menjadi 72,45 pada tahun 2009.
- 2) Angka harapan hidup masyarakat Jambi yang mencapai 68,95 tahun berada diatas angka harapan hidup nasional yang hanya mencapai 68,5 tahun.
- 3) Angka melek huruf dapat dijadikan sebagai salah satu indikator taraf pendidikan masyarakat Jambi. Angka melek huruf masyarakat Jambi cukup tinggi yaitu mencapai 96,06 persen pada tahun 2009.
- 4) Rata-rata lama sekolah penduduk Jambi yaitu 7,68 tahun pada tahun 2009. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Jambi masih berpendidikan rendah.
- 5) APM PAUD tahun 2005 mencapai 18,93 meningkat menjadi 58,43 % pada tahun 2009, atau rata-rata pertumbuhan sebesar 32,5 %, sedangkan pada APM SD/MI/Paket A pada tahun 2005 mencapai 86,36 % meningkat menjadi 99,5 pada tahun 2009.
- 6) APK SMP/MTs/Paket B mencapai 79,45 % pada tahun 2005, meningkat menjadi 98,00% pada tahun 2009, dan

APK SMA/SMK/MA/SL B/Paket C mencapai 56,89 % pada tahun 2005 meningkat menjadi 72,98 % pada tahun 2009.

- 7) Buta Aksara > 15 tahun mencapai 1,81 % dan pada tahun 2009 dapat ditangani.
- 8) Persentase rata-rata kematian bayi waktu proses persalinan masih cukup tinggi yaitu hanya 0,57% atau 57 bayi meninggal dari 1000 persalinan. Angka kematian tertinggi terjadi di Kabupaten Merangin sebesar 1,46% diikuti oleh Bungo sedangkan angka kematian bayi waktu persalinan yang paling kecil terjadi di kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kota Jambi. Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan pada waktu proses persalinan perlu mendapat perhatian. Data menunjukkan bahwa untuk provinsi di Sumatera, persalinan dengan bantuan dukuk tradisional masih cukup tinggi yaitu mencapai 20,49% dan Jambi termasuk provinsi dengan rata-rata persalinan dibantu oleh dukun tradisional yang paling tinggi di Sumatera.
- 9) Walaupun demikian terjadi penurunan jumlah angka Kematian Bayi (AKB) dari 41 per 1.000 kelahiran hidup berdasarkan SDKI tahun 2002 menjadi 29,90 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. AKB cenderung menurun sebagai dampak dari hasil pembangunan program kesehatan yang sangat insentif dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Jambi.
- 10) Keberhasilan penurunan AKB tidak terlepas dari rangkaian program pangan dan perbaikan gizi, kondisi gizi balita secara umum mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya prevalensi kurang gizi. Pada tahun 2005, prevalensi kekurangan gizi pada anak balita sebesar

9,9 % dan menurun menjadi 8,6 % pada tahun 2009. Upaya perbaikan status gizi masyarakat terutama masyarakat miskin akan terus dilakukan dan menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan. Begitupula kasus gizi buruk yang terdata pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi juga mengalami penurunan dari 2,05 % pada tahun 2005 menjadi 1,8 % pada tahun 2009.

- 11) Status dan kecenderungan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan berdasarkan survei SDKI tahun 2003 adalah 219,8 per 100.000 Kelahiran hidup. Kecenderungan Angka Kematian Ibu (AKI) secara konsisten digunakan angka proyeksi dari tahun 2000 sampai tahun 2001. Sedangkan pada tahun 2004 Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Jambi adalah 215,8 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Nasional hasil SDKI pada tahun 2002/2003 sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup, ini berarti Provinsi Jambi masih dibawah angka Nasional.
- 12) Peran Pemerintah Kabupaten/Kota adalah untuk dapat menggerakkan penyelenggaraan promosi kesehatan di Kabupaten/Kota dengan melakukan penelitian/pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian berbagai bentuk kegiatan promosi kesehatan sesuai keadaan di daerah kabupaten/kota, meliputi kegiatan advokasi, bina suasana, penggerakkan masyarakat, serta menjalin hubungan kemitraan lintas program dan sektor di daerahnya, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan swasta.

2.1.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

Provinsi Jambi terdiri dari beragam kelompok etnik yang memiliki khazanah budaya yang sangat kaya dengan keanekaragaman seni dan budaya serta tradisi daerah. Adapun beberapa gambaran umum yang berkaitan dengan aspek seni budaya dan olahraga adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengembangan wisata, menunjukkan terjadi peningkatan wisatawan manca negara menjadi 7.572 orang pada tahun 2009 atau meningkat sebesar 1,05 persen dari tahun sebelumnya. Namun jumlah wisatawan nusantara meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 11,14 persen menjadi 861.540 orang pada tahun 2009.
2. Kenaikan wisatawan ini mendorong tumbuhnya hotel berbintang di Provinsi Jambi sebesar 1,29 persen yaitu dari 17 hotel tahun 2008 menjadi 22 hotel berbintang di tahun 2009. Peningkatan wisatawan ini juga mendorong tumbuhnya usaha lain seperti hotel non bintang atau melati sebesar 10,44 persen yaitu menjadi 118 buah, jumlah restoran meningkat menjadi 42 buah atau terjadi peningkatan sebesar 11,35 persen dari tahun sebelumnya, rumah makan meningkat sebesar 10,12 persen menjadi 415 buah. Demikian juga dengan biro perjalanan wisata yang meningkat sebesar 11,08 persen menjadi 51 biro perjalanan.
3. Mayoritas penduduk Jambi sebesar 94,98 persen beragama Islam, kemudian Katolik sebesar 2,29 persen, Protestan dan Buddha sebesar 1 persen, Hindu 0,5 persen dan Konghucu 0,07 persen.
4. Jumlah rumah peribadatan untuk Masjid sebanyak 3.178 buah, Musholla 1.737, Langgar 3.639 ; Vihara 4 buah ;

Gereja 312 buah, Pura 4 buah dan Klenteng berjumlah 24 buah.

5. Provinsi Jambi juga pada tahun 2009 mencanangkan Program Ayo Membaca, dengan tujuan untuk meningkatkan budaya baca pada masyarakatnya. Hal ini terlihat dari peningkatan pengunjung Perpustakaan pada tahun 2009 meningkat sebesar 22,84 persen dari tahun sebelumnya menjadi 101.208 orang. Sementara itu juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah koleksi buku di Perpustakaan menjadi 97.861 buah buku atau terjadi peningkatan sebesar 123 persen.
6. Cabang olahraga yang diminati oleh masyarakat Jambi mayoritas adalah cabang olahraga Voli, Badminton dan Sepakbola, hal ini terlihat dari jumlah sarana olahraga yang tersebar di semua kabupaten, yaitu berjumlah 118 sarana olahraga Voli, 110 sarana olahraga Badminton dan 84 sarana olahraga sepakbola, yang diikuti juga dengan cabang Basket berjumlah 79 sarana olahraga dan tenis berjumlah 67.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1. Pelayanan dasar

Indikator dan capaian pembangunan aspek pelayanan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang merupakan cerminan dari pemenuhan pelayanan dasar dapat digambarkan dari :

1. Perkembangan angka partisipasi sekolah di Provinsi Jambi terlihat bahwa angka partisipasi sekolah yang cukup tinggi untuk tingkat Sekolah Dasar yang mencapai lebih dari 98,11 persen. Angka ini sedikit menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu tingkat Sekolah

Menengah Pertama dan Menengah Atas. Perkembangan APS terjadi tidak begitu nyata terutama untuk Sekolah Dasar dan SLTP bahkan untuk tingkat SLTP cenderung terjadi penurunan, sementara untuk tingkat SLTA terjadi peningkatan di tahun 2009.

2. Jumlah rasio murid terhadap Guru cukup baik yaitu pada tahun 2009 untuk Sekolah Dasar baik negeri (11,45) maupun swasta (11,08) masih relatif sama. Untuk SD ternyata pada swasta (19,05) lebih tinggi dibanding dengan negeri (14,67). Sementara untuk tingkat SLTP dan SMA untuk negeri masih relatif lebih tinggi dari swasta, sedangkan untuk SMK lebih dominan pada sekolah swasta. Hal ini menjadi indikasi bahwa minat belajar siswa cukup baik tetapi jumlah Guru masih terbatas. Untuk sebaran fasilitas pendidikan usia dini di masing-masing Kabupaten terlihat bahwa Kabupaten Merangin memiliki fasilitas pendidikan usia dini yang lebih baik sementara Kabupaten dengan jumlah fasilitas pendidikan usia dini yang terbatas adalah Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Rasio murid terhadap Guru untuk pendidikan usia dini paling tinggi ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rasio murid terhadap guru cukup tinggi yaitu 17,13.
3. Untuk pendidikan dasar, secara umum Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi memiliki infrastruktur yang relatif merata. Kabupaten Kerinci dan Merangin memiliki jumlah sekolah dan jumlah murid yang cukup baik demikian juga dengan rasio murid terhadap guru yang berkisar 12,42 – 14,72. Angka ini ideal untuk melakukan proses belajar mengajar dengan baik dan kondusif. Beberapa Kabupaten seperti Tanjung Jabung Barat, Sarolangun,

Tebo, dan Kota Jambi memiliki rasio murid terhadap guru yang lebih tinggi diatas 16. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecuali perlu penambahan infrastruktur pendidikan, penambahan dan peningkatan kualitas guru juga diperlukan. Apalagi, angka rasio murid terhadap guru ini akan meningkat secara signifikan untuk wilayah-wilayah perdesaan.

4. Kota Jambi dan Kerinci merupakan kota dan Kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki jumlah murid SLTP terbanyak sedangkan untuk rasio murid terhadap guru Kota Sungai Penuh dan Merangin memiliki rasio yang paling kecil sementara Tanjung Jabung Barat dan Tebo memiliki rasio tertinggi. Rata-rata rasio murid terhadap guru di Provinsi Jambi untuk tingkat SLTP adalah dalam kondisi ideal yaitu 11,24. Untuk jumlah sekolah Merangin dan Sarolangun dan Muara Jambi merupakan Kabupaten dengan jumlah sekolah terbanyak.
5. Pelaksanaan program ini, telah berhasil meningkatkan APM SD/MI/SDLB dari 86,95 persen pada tahun 2006 menjadi 98,72 persen di tahun 2009. Untuk tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB juga mengalami peningkatan dari 79,45 persen pada tahun 2006 menjadi 96,17 persen pada tahun 2009.
6. Angka putus sekolah setelah menamatkan SD cukup tinggi di Provinsi Jambi. Demikian juga dengan murid yang melanjutkan pendidikan dari SLTP ke SLTA. Angka putus sekolah ini juga diperkuat dengan rata-rata lama sekolah yang hanya 7,63 tahun.
7. Untuk pendidikan menengah, rasio murid dan guru rata-rata sudah cukup baik, rata-rata tingkat Provinsi Jambi mencapai 11,66, tetapi harus diingat bahwa perbandingan

yang cukup baik ini ada kemungkinan disebabkan jumlah siswa yang terbatas bukan jumlah guru yang telah mencukupi.

8. Jumlah sekolah, murid dan guru untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Jambi masih sangat terbatas. Sekolah dan murid terbanyak terdapat di Kota Jambi diikuti oleh Kabupaten Kerinci dan Merangin. Rasio murid terhadap guru sudah cukup baik kecuali di Sarolangun terutama untuk SMK Swasta dimana rasionya mencapai 86,80. Penambahan tenaga guru di sekolah-sekolah ini mutlak untuk dilakukan. Kabupaten yang memiliki jumlah sekolah dan murid paling sedikit adalah Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Tebo. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahkan tidak ditemukan sekolah kejuruan yang dikelola oleh swasta. Melihat data tersebut maka Jumlah sekolah kejuruan masih sangat terbatas di Provinsi Jambi apalagi jika mengacu kepada proyeksi ke depan bahwa rasio lulusan SLTA Umum dan Kejuruan adalah 40 : 60.
9. Pendidikan Sekolah Luar Biasa, Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Jumlah guru dan murid sekolah luar biasa (SLB) disajikan pada Tabel 2.43. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah murid yang bersekolah relatif sedikit. Perlu dilakukan suatu kajian apakah anak dengan keterbatasan tertentu memang tidak cukup banyak di Provinsi Jambi atau yang bersekolah atau disekolahkan memang terbatas sebagai akibat dari keterbatasan fasilitas pendidikan Luar Biasa atau karena faktor lain. Sedangkan untuk jumlah mahasiswa sebanyak 45.230 orang dengan perguruan tinggi sebanyak 25 unit dan tenaga edukatif sebanyak 2.635 orang.

10. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi, dapat dilihat dari status kesehatan serta pola penyakit. Dalam mengukur tingkat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya *usia harapan hidup*, *menurunnya angka kematian bayi*, *Angka kematian ibu* dan *status gizi buruk*. Perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan selama tahun 2005 – 2010 menunjukkan pertumbuhan yang cukup mampu menggambarkan upaya pemenuhan pelayanan kesehatan secara merata yaitu pada jumlah sebaran baik puskesmas pembantu, puskesmas dan rumah sakit walaupun masih tergolong kurang, namun dapat memberikan arti positif upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan pelayanan. Secara keseluruhan, saat ini jumlah puskesmas mencapai 167 unit, puskesmas pembantu 596 unit, posyandu sebanyak 2.536 unit. Sedangkan untuk penanganan kesehatan skala besar juga terlihat dari jumlah rumah sakit baik swasta maupun rumah sakit pemerintah sebanyak 21 unit yang menyebar pada setiap Kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Selain itu, juga didukung dengan jumlah apotik sebanyak 180 unit.
11. Jumlah tenaga kesehatan menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi, yaitu medis sebanyak 777 orang, perawat/bidan sebanyak 6.027, tenaga farmasi sebanyak 560 orang, Gizi sebanyak 171 orang, sanitasi sebanyak 534 orang, kesmas sebanyak 418 orang, dokter umum sebanyak 560 orang, dokter gigi sebanyak 150 orang, dan dokter spesialis sebanyak 67 orang

12. Jumlah tenaga kesehatan ini masih sangat jauh dari rasio ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 2.834.264 orang

2.1.3.2. Pelayanan Penunjang

Dalam mendukung aspek pelayanan umum, merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya. Salah satu upaya pemenuhan pelayanan penunjang, antara lain meningkatkan Kondisi ketentraman dan ketertiban, khususnya baik pelanggaran keperdataan dan kepidanaan yang terjadi di Provinsi Jambi cenderung masih tinggi dan meningkat setiap tahunnya.

Dalam konteks demokrasi lokal, dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perkembangan media massa lokal (cetak dan elektronik) yang cenderung meningkat, telah memperkokoh iklim keterbukaan dan demokratisasi sehingga mampu mendorong partisipasi politik masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009 yang mencapai 74,8 %. Penggunaan hak-hak politik rakyat juga terlihat partisipasi masyarakat untuk bergabung dalam kelembagaan politik dan kemasyarakatan, seperti Organisasi kemasyarakatan (ORMAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai politik. Perkembangan jumlah organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan (Ormas/OKP) di Provinsi Jambi hingga tahun 2009 tercatat 454 ormas, sedangkan perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berjumlah 405. Dari pemilihan umum legislatif telah menghasilkan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sebanyak 45 orang yang terdiri dari 40 orang laki-laki dan 5 perempuan.

Partai Demokrat dan PAN memiliki wakil terbanyak yaitu masing-masing 8 orang atau 17,78 %. Sedangkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat di kabupaten/kota sebanyak 385 orang.

Kendati demokratisasi terus berkembang, namun belum mampu menunjukkan demokrasi yang berkualitas, hal ini terkait kompleksitas sosial budaya dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum mampu dalam menunjang nilai-nilai sistem demokrasi yang berkualitas. Sejumlah permasalahan yang masih sangat dirasakan diantaranya adalah belum optimalnya fungsi kelembagaan politik; dalam hubungan pemerintah daerah dan masyarakat, peran masyarakat masih lemah dalam menentukan sejumlah kebijakan strategis pembangunan sehingga masih ditemui berbagai disparitas dan ketimpangan diberbagai bidang pembangunan daerah, di sisi lain pemerintah daerah sangat dominan; dan akses masyarakat terhadap informasi dan pemberitaan media massa masih sangat kurang, sehingga tidak jarang terjadi distorsi informasi yang berpihak kepada kelompok yang lebih kuat dan berkuasa.

2.1.4. ASPEK DAYA SAING

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi daerah

Dalam upaya ekonomi makro PROVINSI JAMBI adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga dapat dicerminkan sebagai berikut :

1. Perdagangan antar daerah dan luar negeri Provinsi Jambi sejak triwulan I-2010 mengalami defisit. Namun pada triwulan II-2010 neraca perdagangan Jambi mencapai surplus, hal ini dicapai karena nilai ekspor Bulan Juni mencapai US\$ 90,59 juta atau naik 6,62 persen dan nilai

impor bulan Juni hanya US\$ 14,26 juta atau turun 29,02 persen, sehingga surplus neraca perdagangan Provinsi Jambi bulan Juni 2010 sebesar US\$ 76,33 juta. Dengan demikian secara kumulatif surplus neraca perdagangan Januari-Juni 2010 mencapai US\$ 453,65 Juta (BPS, Agustus 2010).

2. Nilai ekspor Jambi periode Januari-Juni 2010 didominasi oleh karet olahan sebesar US\$ 328,45 juta atau 62,54 persen kemudian pertambangan sebesar US\$ 64,12 juta atau 12,21 persen, sehingga nilai tambah (*added value*) dari komoditi ekspor ini masih relatif rendah. Kondisi ini tentunya berpengaruh rendahnya pada *multiplier effect* dari komoditi ekspor tersebut seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan harga komoditi dan tentunya penerimaan daerah juga berpengaruh.
3. Kemudian dari sisi negara tujuan, ekspor Jambi mayoritas ke negara Singapura sebesar US\$ 149,72 juta atau 28,51 persen, kemudian Malaysia US\$ 67,02 juta atau 12,76 persen dan China sebesar US\$ 63,29 juta atau 12,05 persen. Hal ini menunjukkan ketergantungan ekspor Jambi ke Singapura dan Malaysia cukup tinggi, dan karakteristik dari kedua negara tersebut adalah membeli komoditi primer atau bahan mentah dan sebagian bahan setengah jadi, dan kedua negara tersebut akan mengolahnya kembali untuk di ekspor kembali ke Indonesia termasuk Jambi dalam bentuk barang jadi.
4. Ekspor Jambi sebesar US\$ 405,93 juta atau 77,29 persen melalui Pelabuhan Talang Duku, kemudian US\$ 61,97 juta atau 11,80 persen melalui Pelabuhan Kuala Tungkal dan

Pelabuhan Muara Sabak hanya sebesar US\$ 57,26 juta atau 10,90 persen.

5. Selanjutnya bila dilihat dari Impor Jambi menurut kelompok komoditi sampai Juni 2010 didominasi oleh mesin dan alat angkutan sebesar US\$ 38,07 juta atau 53,24 persen, hasil industri lainnya sebesar 18,73 juta atau 26,19 persen dan bahan kimia dan sejenisnya sebesar US\$ 10,23 juta atau 14,31 persen serta bahan makanan dan sejenisnya sebesar US\$ 2,67 juta atau 3,73 persen. Salah satu yang menjadi keprihatinan kita kedepan adalah meningkatnya impor bahan makanan dan sejenisnya yang dapat mengancam permintaan terhadap bahan makanan produk lokal termasuk dari Jambi, karena produk lokal tersebut kalah bersaing dari sisi kualitas dan harga, sehingga konsumen lebih menyukai produk makanan dari impor. Oleh karena dalam mewujudkan Jambi Emas 2015, sektor pertanian harus menjadi basis pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditi dari sektor pertanian tersebut yang padagilirannya dapat meningkat kesejahteraan rakyat.
6. Berdasarkan pangsa impor Provinsi Jambi menurut negara asal utama sampai Juni 2010 didominasi oleh Negara China sebesar US\$ 33,36 juta atau 46,65 juta, Singapura sebesar US\$ 14,20 juta atau 19,86 persen dan Amerika Serikat sebesar US\$ 5,36 juta atau 7,50 persen. Berdasarkan selisih ekspor dan impor tersebut, maka Provinsi Jambi mengalami surplus neraca perdagangan kumulatif bulan Januari-Juni 2010 sebesar US\$ 453,65 juta, sedangkan total surplus bulan Juni 2010 sebesar US\$ 76,33 juta atau 16,82 persen dari total kumulatif Januari-juni 2010, Negara yang memberikan surplus terbesar pada bulan Juni 2010

adalah China sebesar US\$ 14,98 juta atau 19,63 persen, kemudian Jepang sebesar US\$ 11,73 juta atau 25,86 persen, Malaysia sebesar 14,99 persen, Amerika Serikat sebesar US\$ 8,595 juta atau 11,26 persen dan Singapura sebesar US\$ 6,54 juta atau 8,57 persen, negara lain sebesar US\$ 22,94 juta atau 30,05 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan Provinsi Jambi terhadap ekspor-impor dari negara China, Singapura, Jepang, Malaysia dan Singapura relatif besar, perlu dilakukan strategi diversifikasi dan strategi pengembangan pasar ekspor komoditi Provinsi Jambi, disamping yang lebih penting tentunya peningkatan nilai tambah dari komoditi ekspor tersebut.

7. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jambi, pada bulan Agustus 2010, Kota Jambi mengalami deflasi sebesar 0,66 persen. Indeks harga konsumen (IHK) Kota Jambi turun dari 125,76 persen pada bulan Juli 2010 menjadi 124,93 pada bulan Agustus 2010. Laju inflasi tahun kelender Kota Jambi pada bulan Agustus sebesar 6,29 persen, sedangkan laju inflasi tahun ke tahun mencapai 7,92 persen. Inflasi tahun kelender sebesar 6,29 persen terjadi karena adanya kenaikan bahan makanan sebesar 14,71 persen, makanan jadi, minuman rokok dan tembakau sebesar 7,51 persen, perumahan, air listrik, gas dan bahan bakar sebesar 2,63 persen, sandang 1,31 persen, kesehatan 1,69 persen, pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,50 persen dan transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,12 persen.
8. Pada bulan September – Oktober 2010 ini, diperkirakan dorongan permintaan secara umum akan lebih kuat karena momentum bulan puasa dan hari raya idul fitri 1431

Hijryah sehingga akan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Provinsi Jambi dalam mendorong tekanan inflasi. Inflasi di kota Jambi pada Tahun 2010 ini diperkirakan mencapai 7 – 8 persen, sehingga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang diprediksi hanya mencapai 6 - 7 persen. Walaupun tingkat inflasi di Kota Jambi diperkirakan masih dibawah satu digit, namun pengendalian terhadap meningkatnya inflasi harus dijadikan prioritas dalam kebijakan stabilisasi, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, khususnya peningkatan produksi komoditas pokok yang selama ini didatangkan dari luar Provinsi Jambi.

9. Sektor riil mulai bergerak namun relatif lambat, hal ini tercermin dari pertumbuhan volume ekspor pada bulan Juni 2010 hanya sebesar 0,79 persen dan nilai ekspor sebesar 6,62 persen. Disisi lain nilai impor tumbuh sebesar 29,02 persen dan volumenya naik sebesar 21,76 persen. Namun secara keseluruhan neraca perdagangan Provinsi pada bulan Juni 2010 surplus sebesar US\$ 76,33 juta atau naik 17,66 persen dibanding bulan sebelumnya, sehingga kumulatif surplus neraca 453,65 juta.
10. Instrumen yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak adalah melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Proses peningkatan taraf hidup tersebut terutama sekali terfokus pada sektor-sektor yang menjadi andalan perekonomian di Provinsi Jambi. Peranan UMKM dan Koperasi pada sektor industri yang berbasis pertanian memiliki kecenderungan yang lebih tinggi berdampak positif terhadap perekonomian Provinsi Jambi, yaitu dengan angka multiplier rata-rata sebesar 7,55. Ini berarti, bila UMKM

dan Koperasi pada sektor industri diberi injeksi sebesar 1 milyar maka output perekonomian Provinsi Jambi akan meningkat sebesar 7,55 milyar.

11. Secara rata-rata selama tahun 2005 – 2009 perkembangan jumlah koperasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 5,29%. Dimana perkembangan jumlah koperasi pada tahun 2007 sebesar 3,25 %, tahun 2008 sebesar 4,08 % dan tahun 2009 sebesar 8,53 %. Sementara perkembangan jumlah koperasi aktif juga cenderung menunjukkan trend yang positif, dimana jika pada tahun 2007 menunjukkan perkembangan negatif 0,24 %, maka untuk tahun 2008 meningkat tajam sebesar 3,13 % dan terus mengalami peningkatan di tahun 2009 sebesar 5,65 %. Sedangkan untuk jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2007 meningkat sebesar 10,00 %, tahun 2008 meningkat sebesar 13,64 % dan pada tahun 2009 meningkat sebesar 7,31 %.

2.1.4.2. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu aspek pendukung yang sangat dominan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini tercermin dari kurangnya aksesibilitas transportasi dalam mendukung pengangkutan bahan-bahan kebutuhan pokok, pertanian, pertambangan dan keperluan lainnya antar wilayah. Yang menjadi pijakan dasar dalam melaksanakan pembangunan daerah tentunya dicerminkan pada :

1. Salah satu aspek penunjang dalam penyelenggaraan roda pemerintahan serta penyebaran pembangunan secara merata ke seluruh wilayah adalah tersedianya jaringan jalan yang memadai. Penyelenggaraan infrastruktur

transportasi, irigasi dan energi serta kelistrikan sangat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di Provinsi Jambi.

2. Dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan, hingga saat ini juga dilihat dari perkembangan kondisi jalan dan jembatan di Provinsi Jambi masih sangat memprihatinkan. Hingga saat ini panjang jalan Provinsi di Jambi telah mencapai 1.566,68 km dan jalan negara sepanjang 820,40 km. Dari kondisi jalan ini diklasifikasikan pada status kondisi jalan baik sepanjang 921,74 km, jalan sedang sepanjang 926,04 km, jalan rusak 384,05 km, dan jalan rusak berat 155,24 km.
3. Pemanfaatan transportasi sungai dan laut dapat dilihat dari data jumlah barang dan orang yang menggunakan jasa transportasi tersebut. Dalam tahun 2009 jumlah barang yang dibongkar dan dimuat di Pelabuhan di Provinsi Jambi masing-masing mencapai 861.958 ton dan 4.001.989 ton untuk transportasi barang antar pulau 1.282.100 ton untuk transportasi barang ke luar negeri. Perkembangan penggunaan transportasi angkutan laut di provinsi Jambi terjadi fluktuasi jumlah penumpang yang sangat nyata dari tahun 2007 ke tahun 2009. Pada tahun 2007 jumlah penumpang 30.691 dan di tahun 2008 sedikit mengalami peningkatan menjadi 53.269 orang dan di tahun 2009 mengalami penurunan mencapai 33.175. Data ini menunjukkan bahwa transportasi laut tidak begitu menarik untuk digunakan sejalan dengan peningkatan transportasi udara yang relatif ekonomis. Kondisi ini menjadi tantangan sektor perhubungan sungai dan laut untuk melakukan pembenahan sehingga kembali diminati oleh masyarakat.

4. Jumlah lalu lintas udara dan penumpang yang melalui bandara Sultan Thaha terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penumpang yang datang dan yang berangkat dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Untuk jumlah penumpang yang datang mengalami peningkatan sebesar 24,65% dan penumpang yang berangkat 22,28%. Sedangkan lalu lintas pesawat mengalami penurunan walaupun tidak begitu besar.
5. Terhadap infrastruktur dalam mendukung sektor pertanian adalah pada sumberdaya air yaitu dengan berfungsinya daerah irigasi seluas 21.701 Ha, jaringan rawa seluas 37.475 ha di seluruh Provinsi Jambi. Selama tahun 2006 – 2009, telah terlaksana rehabilitasi jaringan irigasi untuk kawasan seluas rata-rata 1.694 Ha per tahun, pembangunan untuk kawasan seluas rata-rata 264 Ha per tahun, serta operasi dan pemeliharaan untuk kawasan seluas rata-rata 5.948 Ha per tahun. Sedangkan rehabilitasi jaringan rawa telah terlaksana rata-rata seluas 10.350 Ha per tahun serta operasi dan pemeliharaan untuk kawasan seluas rata-rata seluas 1.300 Ha. Selain itu, telah dilakukan langkah-langkah antara lain meningkatkan fungsi irigasi; pembatasan alih fungsi lahan terutama pada wilayah hulu; serta menggalakkan konservasi sumberdaya air untuk menjaga ketersediaan air dalam rangka mengamankan ketersediaan pangan serta pengembangan daerah rawa harus diiringi dengan pembangunan sarana transportasi dan sarana penyediaan air bersih sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat
6. Selama tahun 2006 – 2009, telah terlaksana rehabilitasi jaringan irigasi untuk kawasan seluas rata-rata 1.694 Ha/

tahun, pembangunan untuk kawasan seluas rata-rata 264 Ha/tahun, serta operasi dan pemeliharaan untuk kawasan seluas rata-rata 5.948 Ha per tahun. Sedangkan rehabilitasi jaringan rawa telah terlaksana rata-rata seluas 10.350 Ha/tahun serta operasi dan pemeliharaan untuk kawasan seluas rata-rata seluas 1.300 Ha. Sedangkan untuk penyediaan air baku telah dibuatkan 5 - 6 buah sumur bor per tahun sehingga pada akhir 2009 telah tersedia 23 buah sumur bor di seluruh Provinsi Jambi.

7. Dalam upaya untuk mengantisipasi kecenderungan terjadinya peningkatan permintaan rumah serta kekumuhan akibat pertambahan penduduk, telah dilaksanakan melalui pengembangan sarana dan prasarana permukiman yang difokuskan pada pembangunan jalan lingkungan dan MCK, dengan tingkat capaian selama 2006 – 2009 : pembangunan jalan lingkungan sebanyak 103.987 m² dan sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) sebanyak 15 unit.
8. Persentase Rumah tinggal yang menggunakan penerangan listrik cukup tinggi di Provinsi Jambi. Data dari tahun 2004 hingga tahun 2008 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2004, 67,69% dari rumah tinggal telah mendapat penerangan listrik dan ditahun 2008 mencapai 84,39%. Penyediaan air minum ledeng masih mengalami kendala dimana hanya sekitar 17% rumah tinggal yang memiliki fasilitas tersebut. Data menunjukkan tidak adanya pertumbuhan yang berarti dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Demikian juga penyediaan air bersih, hanya sekitar 30% rumah tinggal yang mendapat fasilitas tersebut dan data ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2004 hingga 2008. Untuk rumah tinggal yang

memiliki jamban sendiri mengalami peningkatan dari hanya 28,31% di tahun 2004 mencapai 57,54% pada tahun 2008.

9. Kemampuan pelayanan penyediaan air bersih masih sangat terbatas. Kemampuan pelayanan pada tahun 2005 64,32 persen dan mengalami kemajuan yang cukup baik dimana pada tahun 2008 mencapai 71,82 persen. Sedangkan berdasarkan sumber air minum, sekitar 60 persen merupakan air minum yang dimanfaatkan sendiri, sekitar 8 – 20 dimanfaatkan bersama dan sekitar 14 persen tidak memiliki fasilitas sumber air minum
10. Cakupan layanan listrik di Provinsi Jambi pada tahun 2006 telah mencapai 80,40%. Meningkat menjadi 84, 39 % pada tahun 2009. Sedangkan untuk persentase pengguna listrik serta Ratio Elektrisitas Provinsi Jambi Tahun juga secara bertahap setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga pada tahun 2009 tercapai 76,43%. Selain itu, juga telah tersedia Pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang tersebar di Kabupaten Sarolangun, Merangin dan Bungo yang secara keseluruhan berjumlah 8 unit. Selain itu juga dibangun pembangkit listrik tenaga surya telah terpasang sebanyak 11.495 unit.
11. Fasilitas telekomunikasi berupa sambungan telpon yang terpasang di Provinsi Jambi tidak mengalami kemajuan yang nyata dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Bahkan cenderung terjadi penurunan. Jumlah unit satuan sambungan telpon yang telah terpasang di Provinsi Jambi sejak tahun 2005 – 2009 sebanyak 58.019 unit, penurunan ini kecuali disebabkan oleh kemampuan pelayanan telekomunikasi juga disebabkan oleh berkembangnya pemanfaatan telepon genggam yang telah mencapai hingga pedesaan.

2.1.4.3. Iklim Berinvestasi

Provinsi Jambi dalam menopang aktivitas pembangunannya sangat tergantung pada hasil eksploitasi dan produksi sumberdaya alam yang dimilikinya. Minyak bumi, gas bumi, dan batubara mempunyai peranan besar sebagai sumber energi untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya peluang yang sangat besar dalam pemanfaatan sumberdaya yang secara tidak langsung akan berdampak pada iklim investasi daerah yang antara lain :

1. Pangsa investasi swasta pada triwulan II-2010 tidak banyak mengalami perubahan dibanding dengan periode-periode sebelumnya yakni sebesar 17,20 persen. Namun demikian, kredit investasi selama triwulan II-2010 tumbuh sebesar 13,34 persen dengan nilai mencapai Rp. 222,28 miliar. Kondisi ini meningkat lebih dua kali lipat dibandingkan dengan pencapaian triwulan I-2010 di mana kredit investasi hanya tumbuh 5,92 persen dengan nilai Rp. 98,94 miliar (Bank Indonesia, 2010).
2. Komoditas energi berperan sebagai sumber penerimaan PDRB Provinsi Jambi yaitu jumlah hasil minyak bumi yang dihasilkan dari Tahun 2004 mencapai 8.995,230 barrel berturut-turut Tahun 2005 sebanyak 9.265.060 barrel, pada Tahun 2006 sebanyak 8.375.790 barrel dan pada Tahun 2007 sebanyak 7.354.710, dan pada Tahun 2009 turun menjadi 6.795.020. Hal yang sama juga terjadi pada produksi gas alam dari 667.465 MMBTU pada Tahun 2000 menjadi hanya 27.020 MMBTU Tahun 2003, dan 8 995,23 MMBTU pada Tahun 2004, sekitar 9 265,06 MMBTU pada Tahun 2005, berturut-turut 8 375,79 MMBTU pada Tahun

2006, 7 354,71 MMBTU pada Tahun 2007 dan 6 795,02 MMBTU Tahun 2008. Sedangkan produksi batubara juga terjadi penurunan dari 60.585 ton Tahun 2000 menjadi hanya tinggal 8.206 ton Tahun 2003. Selanjutnya pada kurun waktu dua tahun terakhir terjadi kenaikan antara tahun Tahun 2007 dan Tahun 2008 terjadi kenaikan produksi sebesar 2.215.496,24 m ton Tahun 2007, dan 4.216.057,27 m ton pada Tahun 2009.

3. Berdasarkan pada inventarisasi data potensi, Provinsi Jambi memiliki potensi sumber energi di beberapa wilayah kabupaten, seperti pada Gas alam yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur sebesar 178,13 triliun kaki kubik (TCF) terdiri dari 91,17 TCF cadangan terbukti dan 86,69 TCF cadangan potensi.
4. Potensi batubara sebesar 50 miliar ton, daerah penghasil terbesar adalah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Potensi energi panas bumi yang dimiliki oleh Provinsi Jambi terdapat di sepanjang wilayah Pesisir Pantai Timur dengan tingkat produksi hanya mencapai 807 MW.
6. Energi terbarukan yang meliputi tenaga matahari, angin, biomasa, biogas, dan gambut mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.
7. Energi gheo thermal, micro hydro yang terdapat di wilayah Kabupaten Tebo, Merangin, Sarolangun dan Kerinci atau pada wilayah Barat Provinsi Jambi.
8. Wilayah Timur Provinsi Jambi yang diarahkan sebagai wilayah zonasi distribusi yang didukung oleh potensi transportasi laut dan pembangunan pelabuhan.

2.1.4.4. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting yang dicerminkan pada :

1. Indikator keberhasilan dari bidang ketenagakerjaan tergambar pada meningkatnya kesempatan kerja dibandingkan dengan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2006 sebesar 1.205.000 orang dan pada tahun 2009 sebesar 1.452.372 orang atau meningkat 20,53%, begitupula dengan angka kesempatan kerja pada Provinsi Jambi pada tahun 2006 sebesar 1.103.000 orang dan pada tahun 2009 sebesar 1.378.372 atau meningkat 24,97%.
2. Pertumbuhan angkatan kerja pertahun relatif berfluktuasi selama periode 2006 – 2010, dimana pertumbuhan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 12,58 persen, sehingga secara rata-rata pertumbuhannya mencapai 4,9 persen pertahun. Demikian juga pertumbuhan kesempatan kerja relative berfluktuasi, dimana pada tahun 2006 hanya sebesar 0,56%, namun tahun 2009 mencapai 12,58%., Secara rata-rata jika digunakan periode tahun 2006 – 2009, maka pertumbuhan kesempatan kerja mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,96% pertahun. Dengan tingkat pertumbuhan kesempatan kerja yang mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,96% selama periode 2006 – 2009, membawa konsekuensi pada penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan. Tingkat pengangguran pada tahun 2006 sebanyak 94.703 orang, menurun menjadi

74.000 orang di tahun 2009, atau jumlah pengangguran menurun rata-rata sebesar (7,28) persen pertahun.

3. Program pembangunan SDM yang dilakukan di Provinsi Jambi selama ini telah mampu meningkatkan kualitas SDM menjadi semakin baik didasarkan pada Indek Pembangunan Manusia (IPM), dari 71,99 pada tahun 2008 menjadi 72,45 pada tahun 2009.
4. Pada tingkat provinsi, Kota sungai Penuh menempati peringkat paling atas dengan IPM sebesar 76,29 lebih tinggi dari IPM di Kota Jambi yang berada pada peringkat kedua dengan IPM sebesar 75,47, sementara yang paling rendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan IPM sebesar 70,61. Namun jika dilihat lebih jauh mengenai tingkat pendidikan penduduk khususnya penduduk yang berumur 10 tahun keatas, menunjukkan bahwa secara umum daya saing SDM Provinsi Jambi masih relatif rendah. Penduduk di atas umur 10 tahun yang tidak memiliki ijazah SD dan menamatkan SD/MI yang mencapai 58 persen. Sedangkan yang berpendidikan SLTP/MI 18 persen, SMU/MA/SMK sebanyak 19 persen, sementara yang termasuk dalam jajaran berpendidikan tinggi D1 hingga S.3 hanya 5 persen
5. Kebijakan ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2010 ini, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 73.904 orang atau 4,45 persen pada tahun 2010 (bulan Februari) menjadi 60.055 orang atau 4,45 persen tahun 2010 (bulan Februari). Demikian juga tingkat kemiskinan perkotaan menurun dari 117.285 orang penduduk miskin atau 12,71 persen menurun menjadi 110.819 orang atau 11,80 persen. Penduduk miskin

pedesaan juga menurun dari 132.407 orang tahun 2009 atau 6,88 persen menjadi 130,788 orang atau 6,67 persen tahun 2010, sehingga secara total penduduk miskin Provinsi Jambi menurun dari 249.692 orang atau 8,77 persen di tahun 2009 menjadi 241.607 orang atau 8,34 persen pada tahun 2010 (BPS, 2010). Penurunan kemiskinan ini sebenarnya masih sangat labil dan satu saat dapat cepat berubah, karena tergantung pada garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan yang nilainya dalam pendapatan perkapita pada tahun 2010 sebesar Rp 216.187,- perbulan.

6. Jika dilihat dari kelompok pendapatan masyarakat yang berada di batas garis kemiskinan tersebut relatif banyak dan ini juga diperkuat oleh indeks kedalaman kemiskinan diperkotaan sebesar 1,62 dan secara total sebesar 1,05. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga golongan masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan dan dibawah garis kemiskinan dapat keluar dari zona kemiskinan tersebut secara permanen melalui program pemberdayaan masyarakat miskin.
7. Pelayanan Publik. Hingga saat ini, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan yang salah satunya adalah dengan mengubah *mindset* para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Selain itu juga melalui penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat.

8. Dalam rangka penataan kelembagaan daerah sebagai realisasi dari PP No. 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Perda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, Perda Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi dan Perda Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Selain kelembagaan daerah, pada tahun 2009 telah dibentuk perda kelembagaan lain melalui Perda Provinsi Jambi Nomor 4 tahun 2009. Berdasarkan Perda ini terdapat empat (4) lembaga daerah baru, terdiri dari: Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Pelaksanaan Penanggulangan Narkotika Daerah, Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah, Dan Sekretariat Korpri.
9. Pada posisi tahun 2009 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dalam wilayah Kantor Gubernur Jambi meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit, Sekretariat KPU dan Korpri. Secara keseluruhan aparatur PNS di Provinsi Jambi berjumlah 5.851 orang yang terdiri dari 3.616 orang laki-laki (61,80 persen) dan 2.235 orang perempuan (38,20 persen). Ditinjau dari segi golongan kepangkatan terbagi menjadi; golongan I sebanyak 120 orang (2,05 persen), golongan II sebanyak 1.383 orang (23,64 persen), golongan III sebanyak 3.923 orang (67,05 persen), dan golongan IV 425 (7,26 persen). Secara umum, tingkat

pendidikan Pegawai Negeri Sipil terbanyak adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) 2.485 orang (42,47 persen), disusul Strata 1 (S1) 1.821 orang (31,12 persen), Diploma I-IV 679 orang (11,60 persen), SMTP 369 orang (6,31 persen), Pasca Sarjana (S2) 321 orang (5,49 persen), Sekolah Dasar (SD) 171 orang (2,92 persen), dan Doktor (S3) 5 orang (0,09 persen). Sementara Pengangkatan PNS Formasi Umum Tahun 2006-2009 mencapai 9.935 orang. Dalam rangka peningkatan kemampuan PNS, hingga tahun dari tahun 2005 - 2010 yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Diklat), yaitu Diklat struktural sebanyak 6.938 orang; Diklat Teknis sebanyak 1.125 orang, diklat Fungsional sebanyak 572 orang dan Diklat Manajemen sebanyak 620 orang. Pengembangan budaya hukum dan Penghormatan, Pemajuan, serta Penegakan Hak Asasi Manusia.

10. Pembenahan peraturan daerah hingga tahun 2009 dilakukan melalui upaya mengatasi disharmoni peraturan daerah dengan peraturan pusat. Jumlah pembentukan perda Provinsi Jambi, terdiri dari tahun 2007 sebanyak 9 Perda, tahun 2008 sebanyak 14 Perda dan Tahun 2009 sebanyak 11 Perda. Selain itu pembenahan juga dilakukan melalui evaluasi dan konsultasi peraturan daerah kabupaten/Kota dengan pertimbangan antara lain, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, bias jender, tidak berpihak pada kelompok miskin, dan bertentangan dengan HAM. Sejak 2005 hingga Agustus 2010, terdapat sejumlah peraturan daerah kabupaten/kota yang ditolak untuk disahkan dan disarankan untuk disempurkan agar sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi berdasarkan UU No. 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Efektifitas peraturan daerah juga ditentukan oleh kelembagaan penegak peraturan daerah. Selain itu untuk melaksanakan penegakan hukum juga perlu didukung oleh adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi juga telah mengalami kemajuan meskipun belum cukup memuaskan. Dari hasil evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), diketahui bahwa instansi Pemerintah Provinsi Jambi secara keseluruhan masih belum dapat mencapai taraf optimal. Oleh karena itu masih perlu upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi tersebut.

11. Adanya pendelegasian kewenangan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah menunjukkan bahwa penegakan hukum (*rule of law*) merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh aparatur daerah berdasarkan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, upaya memantapkan peran aparatur pemerintahan dalam pembangunan daerah menjadi sangat signifikan. Karena betapa pun baiknya kebijakan dan aturan yang dibuat dan ditetapkan, apabila tidak dilaksanakan oleh aparatur negara yang kompeten dan profesional untuk memberikan pelayanan yang cepat dan bermutu kepada masyarakat, maka rasa keadilan masyarakat masih tetap jauh dari harapan.

12. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.

Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN telah menunjukkan gejala peningkatan. Dalam kurun waktu 2006 - 2009 telah memberikan kontribusi nyata dalam bidang pengawasan internal Pemerintah Daerah, Sampai dengan tahun 2009 hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi atas pemeriksaan pada SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota terdapat 3.661 temuan dengan 4851 rekomendasi, dan telah ditindaklanjuti sebanyak 1.886 temuan, dalam proses sebanyak 419 temuan dan 2.549 yang belum ditindaklanjuti. Selain pemeriksaan yang bersifat reguler, Inspektorat Provinsi Jambi telah melakukan pemeriksaan yang bersifat kasus pengaduan, sampai dengan tahun 2009 Inspektorat Provinsi Jambi telah menerima surat pengaduan sebanyak 71 pengaduan dan telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 27 pengaduan dengan katagori terbukti sebanyak 11 pengaduan sedangkan sisanya sebanyak 44 surat pengaduan hanya dilakukan koordinasi.

13. Peningkatan integritas birokrasi ditunjukkan pula dari tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang dapat dilihat dari opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi tahun 2007-2009. Meskipun opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi tidak mengalami kemajuan, yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (*qualified opinion*), tapi paling tidak tidak terperosok pada level yang lebih rendah Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (*adversed opinion*); Tidak Wajar (TW) (*disclaimer of opinion*). Bahkan hasil tindaklanjut rekomendasi-remokendasi BPK RI sejak tahun 2005 hingga 2009. Dari 386 rekomendasi, 285 sudah ditindaklanjuti

sesuai rekomendasi atau 73,83 persen, 66 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi atau 17,10 persen dan 35 belum ditindaklanjuti atau 9,07 persen.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Pembangunan yang dilaksanakan disegala sektor bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang mayoritas berada dipedesaan dengan lapangan kerja utama di sektor pertanian, hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, *pertama*, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan petani. *Kedua*, dapat meningkatkan pelayanan umum yakni ketersediaan input, sarana prasarana pertanian untuk petani, dan ketersediaan pangan untuk publik, dan *ketiga*, dapat meningkatkan daya saing daerah melalui berbagai produk (unggulan) daerah yang betul-betul kompetitif dan kreatif.

Berkaitan dengan itu, perlu disusun indikator strategis yang dapat menentukan potensi dari komoditi unggulan daerah. Penetapan indikator strategis sebagai kriteria pemilihan produk unggulan yaitu : Indikator ekspor, Indikator kandungan lokal dalam produk, Indikator penyerapan tenaga kerja, Indikator pertumbuhan nilai tambah, Indikator keterkaitan antar sektor, Indikator konservasi lingkungan (*ecolabeling*) dan Indikator jangkauan pemasaran. Berdasarkan ketujuh indikator tersebut, dilakukan analisa dan hasil analisisnya dengan berbagai pertimbangan untuk Provinsi Jambi adalah Karet dan Kelapa Sawit sebagai produk unggulan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan tidak mengesampingkan produk unggulan lain.

Pengembangan produk unggulan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang sangat penting sebagai dasar penentuan kebijakan kedepan serta dampak dari kumulatif kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari 6,37 % di tahun 2009, menjadi 7,3 % pada tahun 2010. Hal ini juga tergambar dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (tahun 2000) yang pada tahun 2009 mencapai Rp16.275 milyar meningkat menjadi Rp17.465 milyar.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi ini, secara kualitas mengalami peningkatan meskipun belum signifikan. Peningkatan kualitas ini, didukung oleh penurunan angka pengangguran dari 5,20 % pada tahun 2009, menjadi 4,45 % di tahun 2010. Begitu juga dengan angka kemiskinan yang mengalami penurunan dari 8,77 % di tahun 2009, menjadi 7,82 %. Sedangkan laju inflasi mengalami peningkatan dari 2,49 % di tahun 2009, menjadi 10,52 % di tahun 2010. Peningkatan laju inflasi ini, lebih di picu oleh kelompok inflasi *volatile food inflation* atau bahan makanan, baik dari sisi produksi maupun distribusinya.

Dilihat dari Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha pada tahun 2010, kontribusi terbesar masih didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai 29,6%. Penyumbang terbesar setelah sektor pertanian adalah sektor pertambangan dan galian sebesar 18,1% diikuti sektor Perdagangan hotel dan restoran sebesar 14,5% serta sektor industri pengolahan yang mencapai 11,1%.

Nilai ekspor Provinsi Jambi pada tahun 2010, menunjukkan kecenderungan naik. Pada tahun 2009, nilai ekspor non migas komoditi unggulan di Provinsi Jambi sebesar US \$ 614,432 ribu meningkat menjadi US \$ 1,376.714 ribu dan volume ekspor dari 1.337.556 ton pada tahun 2009, menjadi 2.758.979 ton di tahun

2010. (sumber: Statistik Ekonomi – Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Bank Indonesia Januari 2011). Peningkatan nilai dan volume ekspor ini didorong oleh komoditi Karet Alam Olahan, karet remah yang mencapai US\$ 806,767 ribu dengan volume sebesar 259.670 ton, diikuti oleh komoditi minyak kelapa sawit mencapai US \$ 167,493 ribu dengan volume ekspor 191.888 ton. Sedangkan penyumbang ekspor terbesar ketiga dari komoditi batu bara dengan nilai ekspor US \$ 66,576 ribu dan volume ekspor 1.538.786 ton.

Berdasarkan negara tujuan ekspor, maka negara pembeli produk ekspor Provinsi Jambi masih di dominasi oleh negara-negara di benua Asia yang mencapai US \$ 1.343.369 ribu, diikuti oleh kelompok negara benua Amerika yang mencapai US \$ 18.432 ribu. Melihat perkembangan ini, tentunya Provinsi Jambi, harus lebih pro-aktif lagi untuk mempromosikan produk unggulan Provinsi Jambi ke negara tujuan lainnya.

Impor non-migas Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan dari US \$ 86.622 ribu pada tahun 2009, menjadi US \$ 161.084 ribu di tahun 2010. Peningkatan nilai impor non migas Provinsi Jambi tahun 2010 ini, dipicu oleh kelompok barang-barang mesin dan pesawat mekanik, perlengkapan elektronik dan bagian-bagiannya yang mencapai US \$ 98.455 ribu dan diikuti kelompok barang produk industri kimia dan industri sejenis. Namun demikian, neraca perdagangan Provinsi Jambi selama 2010, tetap mengalami surplus sebesar US \$ 1,2 milyar. Berdasarkan tinjauan ekonomi dan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, maka pertumbuhan ekspor non-migas Provinsi Jambi tumbuh sebesar 114 %, dan ini mengindikasikan bahwa adanya potensi ekspor non migas yang besar di Provinsi Jambi.

Pemerintah mempunyai fungsi sebagai regulator, fasilitator dan administator dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kedepan mempunyai tugas yang cukup

berat dengan telah dimulainya perdagangan bebas *China Asean Free Trade Area (CAFTA)*, untuk itu harus diantisipasi dan dihadapi dengan kerja keras, meningkatkan daya saing, kemudahan pemberian izin, kebijakan sektor perbankan yang mendukung, pembangunan infrastruktur dasar, pemberantasan pungutan liar dan praktek korupsi. Pelaksanaan fungsi tersebut salah satunya diimplementasikan dalam bentuk penentuan skala prioritas pengeluaran pemerintah melalui APBD dan APBN dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai stimulus ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Dengan memberikan stimulus fiskal kepada masyarakat berarti masyarakat memperoleh penghasilan dari pekerjaan dan inflasi tetap terjaga serta konsumsi dalam negeri dapat didorong. Program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut secara konkrit dilaksanakan oleh SKPD-SKPD yang terbagi dalam urusan Wajib dan Pilihan.

2.2.1. URUSAN WAJIB

2.2.1.1. PENDIDIKAN

Urusan wajib bidang pendidikan, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dengan berbagai indikator capaiannya. Namun pada sisi lain masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain; masih rendahnya pemahaman dan motivasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan; kekurangmampuan orang tua secara ekonomi; terbatasnya akses pelayanan pendidikan dasar pada jenjang pendidikan SMP, serta kurangnya sarana dan prasarana belajar.

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Program Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada semua anak 0-6 tahun tumbuh dan berkembang jasmani dan rohani secara optimal sesuai potensi dan tahap perkembangannya sehingga dapat

mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar.

Alokasi anggaran Program PAUD pada tahun 2010 sebesar Rp5.878.829.500,- yang meliputi kegiatan pendampingan *Early Child Development Centre* (ECDC), penyelenggaraan gebyar PAUD, pembinaan rintisan PAUD jenis kelompok bermain dan Taman Penitipan Anak (TPA), pembinaan kelembagaan PAUD, sosialisasi kurikulum PAUD jenis TK, penyelenggaraan workshop pengawas dan kepala TK, bimbingan penyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) TK, dan pengadaan meubelair TK.

Akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ini, tergambar dari peningkatan Angka Partisipasi Murni dari 54,43 % di tahun 2009 meningkat menjadi 58, 43 % atau dari 232.048 orang anak usia 0-6 tahun telah menjadi peserta PAUD sebanyak 246.555 orang.

2. Program Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program Pendidikan Dasar 9 Tahun, bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dan terjangkau. Untuk mencapai tujuan dari program pendidikan dasar 9 tahun ini telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan. Program ini telah dialokasikan dana sebesar Rp33.875.411.900,- yang meliputi kegiatan renovasi gedung SMP Muhammadiyah, pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, pengadaan meubelair pengganti ruang SD, rapat koordinasi kepala SMP, pustakawan, bendaharawan, serta labor SMP, penyelenggaraan dan pembinaan peserta olimpiade sains, bimbingan teknis penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan pengembangan mutu SMP, renovasi gedung SMP 5 dan SMP 7 Kota Jambi, pengadaan alat olahraga dan alat kesenian SMP, pengadaan meubelair pengganti ruang SMP,

penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat SMP, pembangunan ruang kelas baru SD, pengadaan buku dan alat peraga matematika dan pendampingan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Implementasi dari program ini telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB dari 98,70% di tahun 2009 menjadi 98,74% di tahun 2010. Untuk tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB juga mengalami peningkatan dari 96,17%, pada tahun 2009 menjadi 100,96% di tahun 2010. Untuk lulusan Ujian Akhir Nasional (UAN) SD mencapai 99,87% dan untuk SMP tercatat lulus Ujian Nasional (UN) sebesar 95,13%. Sementara siswa SD/MI/SDLB yang melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB di tahun 2010 sebesar 99,87%. Sedangkan siswa SMP/MTs/SMPLB yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas sebesar 99,31 %.

3. Program Pendidikan Menengah

Dalam upaya untuk perluasan akses layanan dan meningkatkan mutu lulusan telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada program pendidikan menengah dialokasikan dana sebesar Rp61.758.622.400,00 dengan kegiatan yang meliputi penyelenggaraan Lomba Siswa SMK, pembangunan ruang perpustakaan SMK, pengadaan buku pokok SMA, pengadaan peralatan praktek dan laboratorium SMK, pengadaan meubelair SMA, pengadaan peralatan/media belajar SMA, penyelenggaraan seleksi siswa khusus, penyelenggaraan bimbingan teknis penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) SMK, pengembangan unit produksi SMK, pembangunan RKB dan rehabilitasi SMA, pembangunan ruang penunjang SMA, pembinaan peserta olimpiade sains siswa SMA, pembinaan peserta festival lomba Sekolah Standar Nasional (SSN) SMA,

pembangunan ruang kelas baru SMK, pengembangan citra SMK/gebyar SMK, pembinaan peserta lomba O2SN dan Lomba Cerdas Cermat (LCC) UUD 1945, pembangunan lanjutan SMA Pondok Meja, pengelolaan bantuan khusus murid miskin dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu SMA dan SMK, pembangunan ruang laboratorium IPA SMK, pengadaan buku pokok SMK dan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan menengah ini, telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMALB dari 69,22 % di tahun 2009 menjadi 69,42 % di tahun 2010.

4. Program Pendidikan Non-Formal

Pelaksanaan Program Pendidikan Non-Formal bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan atau sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal. Program ini dilaksanakan juga untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui berbagai keterampilan yang dimiliki.

Adapun untuk mencapai sasaran yang diinginkan telah dialokasikan dana sebesar Rp9.158.143.360,- antara lain untuk kegiatan pembinaan kursus dan magang, kegiatan pembinaan kesetaraan Paket A, B dan C, kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (BPPLS), serta kegiatan dukungan ujian nasional pendidikan kesetaraan. Keberhasilan dari pelaksanaan program ini, tergambar dari peningkatan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi anak kurang mampu dan persentase penduduk di atas 15 tahun yang tidak buta aksara saat ini sebesar 96,06%.

5. Program Pendidikan Luar Biasa

Program Pendidikan Luar Biasa diarahkan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak yang memiliki

kelemahan fisik dan mental. Dalam pelaksanaannya kegiatan yang dilakukan antara lain : Rehabilitasi dan pengadaan peralatan SDLB dan PLB, dukungan operasional SDLB dan dukungan event nasional PLB, dengan dukungan dana sebesar Rp3.999.159.200,-. Output dari pelaksanaan program pendidikan luar biasa ini, secara bertahap telah mampu meningkatkan sarana dan prasarana belajar serta dukungan operasional SLB selama 1 tahun terhadap 12 lembaga Pendidikan Luar Biasa di Provinsi Jambi.

6. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan kualitas atau mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Guna mencapai tujuan tersebut, Provinsi Jambi memfokuskan pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan alokasi dana sebesar Rp20.011.863.800,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi : Pemberian Insentif Guru SBI, pendidikan lanjutan untuk memenuhi standar kualifikasi, pelaksanaan kegiatan kompetensi guru KKG/MGMP, pelaksanaan peningkatan kompetensi kepala dan pengawas sekolah, sosialisasi PAUD non formal, sistem penghargaan dan perlindungan guru, serta kegiatan pengembangan buku referensi guru.

Capaian program ini terlihat dari peningkatan kualifikasi pendidikan guru pada berbagai jenjang pendidikan, untuk Guru SD dari 30.006 orang yang berkualifikasi D-IV/S-1 sejumlah 54,09 %, dari 10.673 Guru SMP sebanyak 68,95 % telah memiliki kualifikasi pendidikan D-IV/S-1, dari 5.598 Guru SMA sebesar 87,82 % telah memiliki kualifikasi D-IV/S-1 dari 976 guru SMK yang berkualifikasi D-IV/S-1 sebesar 82,49 %. Sedangkan tenaga

pendidik yang telah lulus sertifikasi meningkat dari 13.370 orang tahun 2009 menjadi 16.100 orang tahun 2010 atau 20,41 %.

7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program manajemen pelayanan pendidikan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan telah dilaksanakan beberapa program antara lain; Pembinaan Dewan Pendidikan, Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan Badan Akreditasi Provinsi-Sekolah/Madrasah, Dukungan Sistem Informasi Pendidikan.

Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program ini, antara lain tergambar dari jumlah sekolah yang telah terakreditasi sampai tahun 2009 sebanyak 2.350 sekolah menjadi 2.358 di tahun 2010. Untuk SD, kategori sekolah rintisan meningkat dari 1.885 di tahun 2009 menjadi 1.941 di tahun 2010, kategori potensial dari 368 di tahun 2009 menjadi 416 di tahun 2010. Rintisan sekolah bertaraf internasional mengalami peningkatan dari 28 sekolah di tahun 2009 menjadi 30 sekolah pada tahun 2010.

Pada tingkat pendidikan SMP, kategori rintisan sekolah bertaraf internasional mengalami peningkatan dari 11 sekolah menjadi 31 sekolah. Untuk kategori sekolah potensial mengalami peningkatan dari 294 sekolah di tahun 2009 menjadi 305 di tahun 2010, sedangkan untuk kategori Sekolah Standar Nasional (SSN) dari 10 sekolah menjadi 55 sekolah.

Untuk tingkat pendidikan SMA pada tahun 2010 jumlah sekolah kategori potensial sebanyak 72 sekolah dan kategori SSN sebanyak 55 sekolah. Dari 55 SSN tersebut meningkat menjadi RSBI sebanyak 14 sekolah. Begitu juga untuk SMK, kategori sekolah potensial mengalami peningkatan dari 111 sekolah pada tahun 2009 menjadi 125 di tahun 2010, untuk kategori SSN dari

25 SMK menjadi 37 di tahun 2010 dan RSBI sejumlah 13 SMK di tahun 2010.

2.2.1.2 KESEHATAN

2.2.1.2.1 DINAS KESEHATAN

Pembangunan bidang kesehatan pada tahun 2010 diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi, hal ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp16.130.004.750,-. Namun demikian, masih ditemui berbagai masalah dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, yang disebabkan karena berbagai faktor lingkungan, baik lingkungan fisik dan biologis maupun lingkungan sosial budaya yang begitu cepat berubah.

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Sasaran dari program ini antara lain terlaksananya lomba desa PHBS, Gerakan pesantren kilat, tersedianya alat cuci tangan di sekolah, advokasi kepada dunia usaha untuk mendukung PHBS dalam lima tatanan, pertemuan dengan tenaga promkes puskesmas dalam mendukung desa siaga, peralatan promkes. Kegiatan utama dalam pencapaian program ini antara lain : Pengembangan Desa Siaga, Menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Promosi Kesehatan di sekolah-sekolah serta meningkatkan peran Posyandu. Melalui pelaksanaan program tersebut dari 1.367 Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi, sebanyak 1.016 Desa/Kelurahan atau 74,32% telah memiliki Bidan Poskesdes terlatih.

2. Program Pengembangan lingkungan Sehat

Program ini ditujukan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap cakupan air bersih bantuan ADB dan masyarakat yang melaksanakan PHBS, lingkungan udara, lingkungan yang aman dan penyehatan TTU/TPM serta tempat-tempat kerja industri. Kegiatan Utama untuk pencapaian program ini antara lain Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Akses Air Bersih, Upaya Penyehatan Tempat-Tempat Umum (TTU).

Akses masyarakat terhadap air bersih untuk tahun 2010 adalah sebesar 67.04 % (angka sementara, tidak termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur) jika dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 71.82% (11 Kab/ Kota) mengalami penurunan sebesar 4.78 %. Akses terhadap air bersih tertinggi di Kota Jambi (94,61 %) dan terendah di kabupaten Muaro Jambi (53.42%). Untuk tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2010 sebanyak 2.878 tempat dari 4.624 tempat yang telah diperiksa atau 62,24 %.

3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan, pemerataan dan kualitas Pelayanan Kesehatan melalui Puskesmas dan Jaringannya serta Poskesdes. Sasarannya yakni tersedianya tenaga terampil dan teladan di Puskesmas, adanya Puskesmas berprestasi, pengembangan sekolah sehat, tersedianya Buku KIA dan Dokter kecil yang berprestasi. Kegiatan Utama untuk pencapaian program ini antara lain kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak, Peningkatan Pelayanan Dasar (Yandas). Melalui pelaksanaan program ini, sampai Triwulan tiga tahun 2010 cakupan kunjungan ibu hamil dan pelayanan ibu hamil

mengalami peningkatan, lebih tinggi dari target yaitu 85,77%, sedangkan target pada triwulan tiga adalah sebesar 71,24 %.

4. Program Upaya Kesehatan Perorangan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Provinsi Jambi, dengan sasaran antara lain terlaksananya Sosialisasi Monitoring Evaluasi program pelayanan kesehatan perorangan, terselenggaranya penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi serta terselenggaranya program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK). Kunjungan rawat inap di Rumah Sakit se Provinsi Jambi tahun 2010 sebanyak 45.716 kunjungan atau 1,45% dari jumlah penduduk Provinsi Jambi.

5. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular tertentu yang diprioritaskan. Sasaran dari program ini antara lain ditemukannya penderita TB. Paru, menurunnya angka kesakitan malaria, HIV/AIDS dan kusta serta terkendalinya kasus penyakit potensial KLB, penyakit tidak menular, menurunnya angka kematian jemaah haji, status UCI, Campak dan Bencana. Kegiatan utama untuk pencapaian program ini antara lain Surveilans Terpadu Penyakit Berbasis Puskesmas, Surveilans Terpadu Penyakit Berbasis Puskesmas Sentinel, Surveilans terpadu Penyakit yang Berbasis Rumah Sakit.

Berdasarkan Surveilans Terpadu Penyakit Berbasis Puskesmas, penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) masih menempati urutan pertama (121.653 penderita) dari 10 (sepuluh) penyakit di Puskesmas pada tahun 2009 (96.095), sedangkan terendah adalah penyakit Malaria Vivak sebesar 1.703 penderita, sedangkan untuk tahun 2009 yang terendah adalah penyakit TBC Paru BTA (+) sebanyak 1.025 penderita.

Hasil Surveilans Terpadu Penyakit Berbasis Puskesmas Sentinel ternyata penyakit ISPA menempati urutan pertama dengan jumlah penderita 3.574 orang, diikuti Influenza sebanyak 3.346 penderita pada urutan kedua dan Diare pada urutan ketiga dengan 3.135 penderita dari 10 penyakit terbesar.

Surveilans terpadu Penyakit yang Berbasis Rumah Sakit diperoleh hasil yakni ISPA masih merupakan urutan pertama dari sepuluh penyakit terbesar di rumah sakit (rawat jalan) yaitu sebesar 1.175 orang dan diikuti oleh penyakit diare (1.056) dan kecelakaan lalu lintas (561). Penyakit terbanyak yang terdapat di Rumah Sakit khususnya pasien yang mengalami rawat inap, ternyata penyakit diare menempati urutan pertama dengan jumlah pasien sebanyak 1.454 orang dan diikuti dengan kecelakaan lalu lintas sebanyak 989 orang.

Pada tahun 2010 ditemukan kasus HIV & AIDS sebanyak 492 kasus, terdiri dari 243 kasus infeksi HIV dan 249 kasus AIDS. Yang tersebar di 10 Kabupaten/ Kota yang ada dalam Provinsi Jambi, sedangkan Kota Sungai Penuh sampai saat ini belum melaporkan adanya kasus HIV/AIDS.

Berdasarkan cara penularan AIDS secara kumulatif tercatat melalui IDU 64,98%, heteroseks 25,74% dan homoseks (5,49%). Untuk proporsi kumulatif kasus AIDS tertinggi yang tercatat adalah pada kelompok umur >25 tahun sebesar 82,7% disusul kelompok umur 20-24 tahun sebesar 15,2%, kelompok umur 6-19 tahun sebesar 0,4% dan pada kelompok umur 0-5 tahun sebesar 1,7%. Proporsi kasus AIDS yang tercatat sampai bulan Oktober 2010 yang meninggal dunia sebesar 40,93%.

Kejadian Demam Berdarah Dengue telah menyebar ke seluruh kabupaten / kota di Provinsi Jambi. Kota Jambi masih mencatat kasus tertinggi sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2010, sesuai dengan *pattern of disease* dari penyakit DBD, yaitu

Urban Disease, pada beberapa kabupaten lain juga terjadinya kasus sepanjang tahun yaitu: Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Bungo) dan bahkan 3 tahun terakhir secara sporadis di Kabupaten Tebo, Sarolangun dan Merangin juga tercatat adanya kasus DBD.

6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi masalah Gizi di Indonesia terutama Provinsi Jambi. Sasaran dari program ini yaitu tersedianya laporan kegiatan SKPG, promosi keluarga sadar gizi, pemberian MP-ASI pada balita Gakin dan tambahan makanan Ibu Hamil KEK. Tahun 2010 anggaran dari program ini sebesar Rp347.008.583,-

7. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Jamkesmas di Provinsi Jambi, sasaran yang hendak dicapai yaitu diperolehnya laporan hasil kegiatan Jamkesmas, Penyelesaian masalah dalam pengelolaan program Jamkesmas, meningkatnya pelaksanaan program Jamkesmas dan tersusunnya pedoman pelaksanaan jamkesmas. Prosentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi 100%, dimana Kebersertaan JPKMM/Askeskin tahun 2007 adalah 702.000 jiwa, pada tahun 2008 yaitu 784.842 jiwa dan pada tahun 2009 yaitu 849.016 jiwa dan tahun 2010 sampai bulan oktober 1.149.858 jiwa.

8. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika. Sasarannya adalah tersedianya obat untuk pelayanan kesehatan masyarakat Kab/Kota dalam

Provinsi Jambi. Peningkatan Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan pada tahun 2006 yaitu 95,54%, Tahun 2007 yaitu 96,94 %, tahun 2008 yaitu 97,08 %, tahun 2009 yaitu 98,00%.

Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan, Ketentuan untuk penduduk miskin (Penetapan item harga obat generik oleh menteri kesehatan) pada tahun 2006 Rp458 tahun 2007 Rp454, tahun 2008 Rp455, tahun 2009 Rp455 dan tahun 2010 Rp453.

9. Sumber Daya Kesehatan (Program Evaluasi Pengendalian Data dan Tenaga Kesehatan)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan, dengan sasaran yaitu Peningkatan SDA Kesehatan dan tenaga pendidik bidang kesehatan Provinsi Jambi.

Alokasi Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp1.725,76 milyar. Untuk institusi pendidikan di Provinsi Jambi masih terpusat di ibukota Provinsi namun pada 8 Kab/Kota telah berdiri 4 institusi pendidikan yaitu AKPER Bina Insani Sei Penuh Kab. Kerinci, AKPER Setih Setio Kab. Bungo, AKPER Serentak bak Regam Kab. Batang Hari dan AKBID Merangin di Kabupaten Merangin.

Sekolah Tinggi yang ada di Provinsi Jambi ada 2 yaitu : Stikes Jambi dan Stikba Jambi, sedangkan Poltekes Jambi ada beberapa jurusan yaitu Akbid, Akper, Kesling dan Gigi. Institusi Bidang Kesehatan Swasta yang ada di Provinsi Jambi yaitu : Akademi Kebidanan : 6 institusi, Akademi Keperawatan 7 institusi, Akademi Analisa Kesehatan : 1 Institusi serta Akademi Farmasi : 1 institusi.

10. Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan (Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dan Program Evaluasi Pengendalian Data dan Tenaga Kesehatan)

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional (SKN), dengan Sasaran tersusunnya Perencanaan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih, terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Kesehatan, serta terlaksananya evaluasi dan pelaporan program pembangunan kesehatan

2.2.1.2.2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATAHER

1. Program Sistem Administrasi Rumah Sakit dan Badan Layanan Umum.

Program ini bertujuan untuk melaksanakan sistem informasi rumah sakit yang komprehensif sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memenuhi standar akreditasi sehingga sistem administrasi rumah sakit dapat ditata dengan baik. Sistem administrasi yang demikian akan sangat menunjang pelayanan rumah sakit terutama sinergisitas administrasi pelayanan pasien di ruang rawat inap maupun rawat jalan serta IGD, sehingga kronologis pengobatan terhadap pasien menjadi berkesinambungan. Program ini sangatlah penting karena jumlah kunjungan RSUD Raden Mattaher saat ini sebagai berikut : Rawat Jalan rata-rata 507 orang perhari, IGD rata-rata 45 orang perhari dan Hari Rawat inap sebesar 82.527 pertahun dan rata-rata 229 orang perhari.

Demikian juga Rumah Sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah, adalah suatu sistem administrasi yang memudahkan pihak manajemen rumah sakit dalam menjalankan sistem administrasi dan keuangan rumah sakit, sehingga Dapat

dilakukan peningkatan pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan menyehatkan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Provinsi Jambi. Disamping itu dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat serta pengamanan atas aset negara yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Raden Mattaher.

2. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit dalam menjalankan pelayanan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut : Pembangunan IGD yang memenuhi standar, Pengadaan alat-alat kesehatan kedokteran serta pengadaan alat-alat penunjang. Disamping itu juga telah dilaksanakan perbaikan peralatan, penambahan daya listrik, serta rehabilitasi gedung. Hal ini bertujuan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan di rumah sakit yang sudah semakin maju dan kompleks.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut terlihat indikator pelayanan pasien di RSUD Raden Mattaher dengan BOR 72,70 %, BTO 48,20 kali, LOS 4,5 hari, TOI 2,1 hari, GDR 6,34 % dan NDR 3 %. Kegiatan pelayanan khusus yang mencakup kegiatan elektro kardiographi (EKG) sebanyak 6.048 orang, hemodialisa sebanyak 3.645 orang dan *treadmill/Exercise test* sebanyak 59 orang. Kegiatan laboratorium sebanyak 197.535 dan kegiatan pelayanan radiodiagnostik sebanyak 14.402 kali.

Tabel 2.4. Indikator RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2007 s.d 2010

NO	INDIKATOR	2007	2008	2009	2010	KET
1	Kunjungan Rawat Jalan	147.451	150.350	142.703	158.189	Kunjungan
2	Rawat Inap	18.078	16.855	17.066	15.004	Orang
3	B.O.R	89,63	81,70	76,25	72,70	%
4	B.T.O	58,89	54,90	53,16	48,20	Kali
5	L.O.S	4,4	4,30	4,23	4,5	Hari
6	T.O.I	0,6	1,20	1,63	2,0	Hari
7	G.D.R	5,3	5.20	4,92	6,34	%
8	N.D.R	3,01	2.30	2,57	3	%
9	Kunjungan IGD	14.103	15,345	18.130	16,143	Kunjungan
10	Operasi Besar	1.749	1,637	1.774	1,827	Kali
11	Operasi Sedang	629	458	654	732	Kali
12	Operasi Kecil	4.809	4,158	5.341	6,415	Kali
13	Penderita Keluar Hidup	17.125	15.981	16,225	14,052	Orang
14	Penderita Keluar Mati < 48 Jam	408	394	402	494	Orang
15	Penderita Keluar Mati > 48 Jam	545	498	439	458	Orang
16	Jumlah TT Tersedia	307	307	321	311	TT

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher. 2010

Dilihat data pada tabel di atas, kunjungan rawat jalan pada tahun 2010 terjadi peningkatan dibanding tahun 2009, rawat inap dan BOR terjadi penurunan, hal ini disebabkan adanya tempat tidur/ruang yang tidak layak pakai sehingga harus dikosongkan untuk kenyamanan dan keamanan pasien. Untuk itu ke depan pembangunan gedung rawat inap sangat diperlukan mengingat gedung yang ada saat ini sudah berusia hampir 40 tahun.

2.2.1.2.3. RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Untuk mencapai sasaran Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang antara lain; Penyusunan standar pelayanan Kesehatan di rumah sakit jiwa. Pelaksanaan program ini telah meningkatkan standar layanan rumah sakit jiwa.

Tabel 2.5. Utilisasi/Pemanfaatan RSJ Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2009 – 2010

URAIAN	SATUAN	TAHUN	
		2009	2010
1. Jumlah Pasien R. Jalan	Kunjungan	13009	13538
2. Jumlah Pasien R. Inap	Kunjungan	2940	3711
3. Jumlah Tempat Tidur	Buah	200	200
4. BOR	%	73,72	80,40%
5. BTO	Kali	3,39	9,06
6. LOS	Hari	41,98	21,06
7. TOI	Hari	27,39	7,88
8. NDR	%	0	0
9. GDR	%	0,01	0

Sumber: RSJ Derah Provinsi Jambi, 2010

2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa

Arah Kebijakan program ini adalah upaya penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang menunjang upaya pelayanan kesehatan prima. Indikator Kinerja program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit baik kualitas maupun kuantitas yang mendukung upaya kesehatan prima. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah pembangunan rumah sakit berupa pembangunan gedung rawat inap kelas III (MPKP) dan pembuatan selasar.

2.2.1.3. PEKERJAAN UMUM

Penanganan infrastruktur merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi sangat prioritas dalam kebijakan pembangunan Provinsi Jambi menjadi bagian yang mampu menopang peningkatan perekonomian daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Selama tahun 2010, alokasi anggaran untuk urusan wajib bidang pekerjaan umum menyerap 37 % dari total belanja langsung APBD 2010 atau senilai Rp325.455.323.740,00. Dengan realisasi sebesar Rp302.991.796.256,00. atau 93,10 %.

1. Program Bidang Cipta Karya

Dalam upaya peningkatan infrastruktur permukiman, melalui Bidang Cipta Karya telah menetapkan prioritas program yang antara lain: Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pengembangan sistem penyediaan air minum di desa rawan air, pesisir dan terpencil; penyediaan sarana dan prasarana air minum pada kawasan andalan nasional; pengembangan kinerja pengelolaan sampah dan drainase; perbaikan lingkungan permukiman dan penyediaan infrastruktur primer perkotaan. Untuk melaksanakan program tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp20.712.236.200,- pada tahun 2010.

Pada tahun 2010 dilaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan gedung sebanyak 53 paket berlokasi di Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh; pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sarana air bersih sebanyak 5 paket yang di Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun; dan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan drainase perkotaan sebanyak 2 paket yang berlokasi di Kota Jambi. Dari kegiatan ini juga diharapkan nantinya secara berkesinambungan dapat mewujudkan permukiman yang layak, penataan kawasan dan pengelolaan gedung pemerintahan yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung.

Dari penyelenggaraan pembangunan bidang keciptakaryaan ini, masih ditemukan beberapa permasalahan yang pada saat operasional kerja di lapangan terutama permasalahan pembebasan lahan yang masih banyak belum tuntas. Selain itu, kebutuhan anggaran yang besar merupakan salah satu permasalahan utama dalam meningkatkan volume pekerjaan.

Melalui APBD Perubahan tahun 2010, Bidang Cipta Karya memperoleh alokasi sebesar Rp1.205.379.200 untuk kegiatan penyelesaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tanggo Rajo dan *Detailed Engineering Design (DED)* Pasar Angso Duo. Fisik kegiatan telah terlaksana 100% dengan tingkat serapan anggaran sebesar Rp985.676.000 atau 81,77%. Sedangkan untuk Pembangunan Gerbang Batas Provinsi Jambi – Sumatera Barat realisasinya baru mencapai 30 % disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan pengukuran batas bersama pemerintah Provinsi Sumatra barat. Efektivitas pelaksanaannya baru dimulai pada bulan November 2010.

2. Program Bidang kebinamargaan

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Bidang Kebinamargaan pada tahun 2010, difokuskan pada penanganan jalan dan jembatan di Provinsi Jambi melalui program pembangunan/peningkatan jalan, pembangunan/peningkatan jembatan. Adapun yang telah dilaksanakan meliputi pembangunan dan peningkatan jalan provinsi Jambi, yaitu realisasi penanganan jalan efektif sepanjang 110,17 km dan fungsional sepanjang 1.327,23 km. Panjang penanganan secara keseluruhan adalah sebesar 92,02 % dari total panjang jalan provinsi yaitu 1.481,51 km, sedangkan untuk penanganan jembatan baik pembangunan maupun peningkatan sebanyak 89 unit.

Selanjutnya, untuk program lanjutan tahun sebelumnya yaitu memperpendek jarak tempuh jalan Bangko-Sungai Penuh jalan Batanghari II-Niaso-Simpang Pelabi telah diaspal sepanjang 13,60 km; agregat kelas A sepanjang 19,4 km; dan diperkirakan akan tuntas tahun 2011, jalan simpang tuan – pematang lumut – kuala tungkal. Penanganan jalan ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan jalur barang dan jasa di Provinsi

Jambi sekaligus untuk mempermudah rentang kendali antar daerah. Namun, jika kita lihat dari upaya penanganan ini ternyata masih ditemui permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaannya seperti masih terbatasnya alokasi dana jika dibandingkan dengan tingkat kerusakan yang secara perlahan terus bertambah yang saat ini kondisi jalan provinsi yang baik hanya 27,27 %, sedang 30,38 % dan selebihnya dalam rusak ringan dan berat yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan dan akibat laju tingkat kerusakan yang disebabkan oleh *overload* nya kapasitas konstruksi dibanding muatan dan Laju Harian Rerata (LHR) pada hampir seluruh ruas jalan. Sementara kelas jalan di Provinsi Jambi hanya kelas IIIA yaitu dengan maksimum tonase 8 ton. Selain itu, umur konstruksi jalan juga sudah melewati umur rencana sehingga banyak ruas jalan yang perlu dilakukan peningkatan konstruksi jalan. Menindaklanjuti permasalahan ini, Provinsi Jambi juga telah berupaya untuk secara intensif melakukan pemanfaatan alokasi dana yang ada untuk rekonstruksi jalan dan jembatan dan di masa yang akan datang lebih ditingkatkan peran lembaga teknis untuk lebih pro aktif dalam mencegah terjadinya kerusakan jalan terutama oleh standarisasi angkutan barang yang melintasi jalan.

3. Program Bidang Sumberdaya Air

Bidang sumberdaya air bertujuan menjaga sub-sistem produksi yang berbasis air melalui program-program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa; sumur bor; dan turap/talud/bronjong pada wilayah sungai untuk mengurangi dampak kerusakan akibat banjir dan bencana alam lainnya.

Adapun capaian hasil pelaksanaan pembangunan bidang sumberdaya air ini merupakan upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk pengendalian daya rusak air, peningkatan luasan

persawahan yang beririgasi, menyediakan sarana dan prasarana air bersih yang memadai. Hal ini juga dikarenakan banyaknya alih fungsi lahan yang dahulunya adalah lahan produktif pertanian menjadi lahan perkebunan dan lemahnya sistem keirigasian dalam mendukung optimalisasi pertanian. Pada tahun 2010, dari pelaksanaan pembangunan bidang sumberdaya air ini telah dilaksanakan peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi melalui rehabilitasi seluas 14.232 Ha, pembangunan jaringan baru irigasi seluas 1.358 Ha dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 24.993 Ha.

Disamping itu, untuk jaringan rawa, yang mampu ditangani melalui rehabilitasi/peningkatan jaringan seluas 42.700 Ha, operasi dan pemeriharaan seluas 5.200 Ha. Selanjutnya juga dibangun tambatan keramba perikanan dan turap/bronjong. Untuk peningkatan jaringan air bersih juga dibangun sumur bor sebanyak 29 unit yang tersebar di kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanjung Jabung Barat, Merangin dan Kota Jambi.

Dari kondisi sumberdaya air di Provinsi Jambi saat ini masih ditemukan beberapa permasalahan yang antara lain terjadinya penurunan fungsi jaringan irigasi, rawa, dan air baku akibat kerusakan baik pada jaringannya maupun pada bendungannya yang diakibatkan oleh kondisi alam serta kurang berperannya petani dalam pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu tingginya sedimentasi akibat pesatnya alih fungsi lahan di wilayah hulu telah mengakibatkan embung, danau, dan rawa mengalami penurunan fungsi. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, telah ditempuh melalui upaya peningkatan fungsi irigasi dan membatasi alih fungsi lahan terutama pada wilayah hulu; serta menggalakkan konservasi sumberdaya air untuk menjaga ketersediaan air dalam rangka mengamankan ketersediaan pangan serta pengembangan daerah rawa.

Selanjutnya, jika dilihat pada penanganan urusan Pekerjaan Umum, dalam APBD Perubahan memperoleh alokasi anggaran terbesar dari total alokasi tersedia yang diperuntukkan pada Dinas Pekerjaan Umum, yaitu sejumlah Rp51.009.931.440. dengan pendistribusian anggaran kepada Bidang Bina Marga, Sumberdaya Air, Cipta Karya, dan Perumahan. Secara keseluruhan anggaran tersebut, telah ditingkatkan menjadi sebesar Rp325.455.3233.740. dari jumlah awal sebesar Rp274.455.392.300 atau berubah sebesar 18,59%. Bidang kebinamargaan memperoleh tambahan alokasi anggaran sebesar Rp46.200.000.000 dari 163.670.711.000 menjadi 209.870.711.000. Besaran angka perubahan ini diperuntukkan bagi Progam pembangunan dan pemeliharaan serta perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan di seluruh provinsi Jambi yang belum tertangani dalam APBD murni Tahun 2010. Untuk semua kegiatan, realisasi fisik berhasil dicapai penuh sebesar 100%, sedangkan realisasi keuangan rata-rata di atas 91%, kecuali pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan 2 unit *box culvert* di ruas jalan Bakarudin, Kota Jambi dengan realisasi fisik sebesar 88,85% dan keuangan sebesar 84%.

Hasil program jalan selama APBD Perubahan tahun 2010 adalah penyelesaian target peningkatan jalan sepanjang 17 Km dan pemeliharaan sepanjang 251,5 Km atau total sebesar 18,12% dari total panjang ruas jalan Provinsi. Sepanjang 7,7 Km jalan dalam Kota Jambi juga telah dibantu dan diselesaikan dengan total serapan Rp9.366.659.000 dari total alokasi sebesar Rp9.995.000.000. Khusus kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan 2 unit *box culvert* di ruas jalan Bakaruddin, Kota Jambi, dapat dijelaskan bahwa telah diperkirakan bahwa pekerjaan tidak dapat terserap 100% dari rencana semula akibat beberapa kendala teknis lapangan, sehingga segera diantisipasi dengan

melaksanakan amandemen kontrak menjadi setara dengan target prestasi pekerjaan yang dapat diselesaikan menjadi sebesar 88,85% atau senilai Rp1.095.995.000.

Bidang Sumberdaya Air memperoleh alokasi APBD Perubahan sebesar Rp1.100.801.440 yang diperuntukkan bagi pekerjaan penyelesaian gorong-gorong untuk menjamin berfungsinya saluran primer irigasi Semabu, Kabupaten Tebo, dan telah diselesaikan 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 1.022.000.000 atau sebesar 92,84% dari pagu tersedia. Sedangkan pada Bidang Cipta Karya memperoleh alokasi sebesar Rp1.205.379.200 untuk kegiatan penyelesaian RTH Tanggo Rajo, *Detailed Engineering Design (DED)* Pasar Angso Duo, dan Pembangunan Gerbang Batas Provinsi Jambi – Sumatera Barat. Fisik ketiga kegiatan tersebut telah terlaksana 100% dengan tingkat serapan anggaran sebesar Rp985.676.000 atau 81,77%.

Tabel 2.6. Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Perubahan Bidang Kebinamargaan.

LAPORAN REALISASI APBD-PERUBAHAN TAHUN 2010
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAMBI

BIDANG BINA MARGA

NO	NAMA KEGIATAN DAN PEKERJAAN	DANA DPA-SKPD Rp.	NILAI KONTRAK Rp.	SISA TENDER Rp.	Realisasi (%)	
					Keu	Fisik
I	Pembangunan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur dan Ma. Jambi)					
1	- Jalan Sp. Lagan - Sp. Zona Lima (Sp. Pelabi)	2.200.000.000,00	2.058.010.000,00	141.990.000,00	93,55%	100,00
2	- Jalan Sp. Pudak - Suak Kandis	1.100.000.000,00	1.035.482.000,00	64.518.000,00	94,13%	100,00
II	Pembangunan Jalan di Wilayah III (Kab. Bungo dan Tebo)					
3	- Jalan Peninjauan - TKA (Bts. Sumbang)	1.100.000.000,00	1.043.092.000,00	56.908.000,00	94,83%	100,00
III	Pembangunan Jalan di Wilayah IV (Kab. Batanghari dan Ma. Jambi)					
4	- Pnk. Jalan Tempino - Ma. Bulian	7.000.000.000,00	6.630.255.000,00	369.745.000,00	94,72%	100,00
5	- Pnk. Jalan Sei. Duren - Sei. Buluh	7.500.000.000,00	7.188.888.000,00	311.112.000,00	95,85%	100,00
IV	Pembangunan Jalan di Wilayah VI (Kab. Kerinci)					
6	- Pnk. Jalan Bangko - Bts. Kerinci	2.200.000.000,00	2.101.000.000,00	99.000.000,00	95,50%	100,00
V	Pembangunan Jalan di Wilayah VII (Kab. Merangin dan Sarolangun)					
7	- Pnk. Jalan Sp.Ma.Siau - Dusun Tuo	1.590.050.000,00	1.463.442.000,00	126.608.000,00	92,04%	100,00
8	- Pnk. Jalan Dusun Tuo - Jangkat	2.750.000.000,00	2.569.943.000,00	180.057.000,00	93,45%	100,00
9	- Pnk. Jalan Sp. Pelawan - Sei. Salak	1.375.000.000,00	1.313.152.000,00	61.848.000,00	95,50%	100,00
10	- Pnk. Jalan Sei. Salak - Pekan Gedang/Batang Asai	1.814.450.000,00	1.705.567.000,00	108.883.000,00	94,00%	100,00
11	- Pnk. Jalan Pekan Gedang - Ma. Talang	1.787.500.000,00	1.678.050.000,00	109.450.000,00	93,88%	100,00
VI	Pemb. Jembatan di Wilayah VII (Kab. Merangin dan Sarolangun)					
12	- Pembangunan Jembatan Pangkal Bulian	1.000.000.000,00	941.428.000,00	58.572.000,00	94,14%	100,00
VII	Rehab/Pemel Jalan di Wilayah III (Kab. Bungo dan Tebo)					
13	- Rehab./Pemeliharaan Jalan Ma. Tebo - Pulau Temiang - Tanjung	2.000.000.000,00	1.895.922.000,00	104.078.000,00	94,80%	100,00
VIII	REHAB/PEMELIHARAAN JEMBATAN					
14	- Rehab/Pemel Jembatan di Jalan Propinsi Jambi	1.140.000.000,00	1.139.671.000,00	329.000,00	99,97%	100,00
15	- Pengecatan Railling Jembatan Batanghari II	98.000.000,00	95.291.000,00	2.709.000,00	97,24%	100,00
IX	REHAB/PEMELIHARAAN JALAN WILAYAH PERKOTAAN					
16	- Rehab./Pemel. Jalan Abdul Majid Jambi (Lanjutan)	1.100.000.000,00	1.015.360.000,00	84.640.000,00	92,31%	100,00
17	- Rehab./Pemel. Jalan Selamat Riady	1.100.000.000,00	1.036.218.000,00	63.782.000,00	94,20%	100,00
18	- Rehab./Pemel. Jalan S. Parman - Jln. Depati Parbo (Atah RS. Jiwa)	2.200.000.000,00	2.069.359.000,00	130.641.000,00	94,06%	100,00
19	- Rehab./Pemel. Jalan K.S. Tubun	150.000.000,00	141.647.000,00	8.353.000,00	94,43%	100,00
20	- Rehab./Pemel. Jalan Sultan Hasanuddin	1.800.000.000,00	1.709.214.000,00	90.786.000,00	94,96%	100,00
21	- Rehab./Pemel. Jalan Raden Wijaya	1.500.000.000,00	1.426.372.000,00	73.628.000,00	95,09%	100,00
22	- Rehab./Pemel. Jalan Hibah Ibrahim	1.650.000.000,00	1.517.709.000,00	132.291.000,00	91,98%	100,00
23	- Rehab./Pemel. Jalan A. Chatib, Telanaipura	495.000.000,00	450.780.000,00	44.220.000,00	91,07%	100,00
24	- 2 Unit Box Culvert Jalan Bakaruddin	1.300.000.000,00	1.095.995.000,00	204.005.000,00	84,31%	88,85
X	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI JAMBI (P2 TP)					
25	- Perencanaan Pembangunan Jembatan Sei. Sebu, Kec. Sadu (50 M)	250.000.000,00	246.246.000,00	3.754.000,00	98,50%	100,00
JUMLAH TOTAL		46.200.000.000,00	43.568.093.000,00	2.631.907.000,00	94,30%	99,55

2.2.1.4. PENATAAN RUANG

Penataan ruang merupakan dasar dalam menyusun konsep perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Konsep penataan Ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan

berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah. Penataan ruang itu sendiri merangkum pendekatan sistem yang melibatkan input, proses dan output. Input yang digunakan adalah keadaan fisik seperti kondisi alam dan geografis, sosial budaya seperti demografi sebaran penduduk, ekonomi seperti lokasi pusat kegiatan perdagangan yang ada maupun yang potensial dan aspek strategis nasional lainnya. Keseluruhan input ini diproses dengan menganalisis input tersebut secara integral baik kondisi saat ini maupun kedepan untuk masing-masing hirarki penataan ruang baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga menghasilkan output berupa Rencana Tata Ruang Wilayah yang mampu mengakomodir segala aspek dan impian dalam pembangunan daerah.

Berkaitan dengan Rencana tata Ruang Provinsi Jambi, dengan adanya usulan alih fungsi hutan yang sangat berpengaruh pada rencana pola ruang yang akan ditetapkan, melalui Kementerian Kehutanan telah dibentuk Tim Terpadu dalam rangka verifikasi usulan tersebut. Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan oleh Tim Terpadu ke Kabupaten/Kota yang telah menyusulkan ke Provinsi Jambi untuk cross check data secara langsung melibatkan anggota dari Pemerintah dan Instansi terkait dari Provinsi Jambi serta didampingi oleh Bappeda dan dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

Jika dilihat dari kondisi geografis Provinsi jambi, tahun 2010 telah dilaksanakan penyempurnaan hasil evaluasi Ranperda RTRW Provinsi Jambi dan substansi materi yang secara sinergi mengakomodir masukan dan kebutuhan dari Kabupaten/Kota sekaligus penyempurnaan RTRW kabupaten/Kota agar nantinya tetap mengacu pada RTRW Provinsi Jambi.

Dari pelaksanaan urusan penataan ruang ini sesungguhnya masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan yang antara lain belum optimalnya

sinergitas rencana, program dan kegiatan dari berbagai sektor, lemahnya fungsi penataan ruang dalam menyelaraskan pembangunan secara terpadu serta adanya penyimpangan dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, kita berharap untuk ke depan RTRW Provinsi Jambi dapat dijadikan landasan baku dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengedepankan aspek ekologi, ekonomi dan sosial yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.

2.2.1.5. PERUMAHAN

Salah satu upaya dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana perumahan permukiman adalah dengan meningkatkan dan mengembangkan kawasan-kawasan permukiman yang layak huni dengan dilengkapi oleh pemenuhan utilitas lingkungan permukiman itu sendiri. Untuk itu, melalui penanganan urusan perumahan melalui Bidang Perumahan telah diarahkan pada Program pengembangan perumahan dengan kegiatan utama pada pembangunan sarana dan prasarana rumah swadaya dan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat.

Adapun hasil yang dicapai meliputi penanganan jalan lingkungan 11.282 M', jalan rabat beton 1.800 M', saluran drainase 4.100 M' dan bedah rumah sebanyak 4 paket. Lokasi pembangunan ini menyebar pada Kabupaten/Kota dalam mendukung pemenuhan pelayanan dasar pada perumahan swadaya. Sedangkan untuk rumah sederhana sehat dilaksanakan pembangunan jalan lingkungan (atb) 4.300 M' dan saluran drainase sepanjang 688 M'.

Permasalahan dalam urusan perumahan ini terlihat dari tingginya intensitas permintaan rumah dan tingginya pembangunan pada kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi sehingga terjadi

pergeseran yang mengakibatkan berkembangnya kawasan-kawasan kumuh yang baru. Untuk mengantisipasi permasalahan ini tentunya akan secara berkesinambungan dilaksanakan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar terutama pada kawasan-kawasan perumahan dan permukiman.

Berkaitan dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2010, pendistribusian anggaran pada Bidang perumahan telah menyelesaikan 100% secara fisik dari 24 paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah swadaya termasuk 2 paket perencanaan dan pengawasannya yang dialokasikan dalam APBD Perubahan tahun 2010 sebesar Rp2.503.750.800. Sedangkan realisasi keuangannya adalah sebesar Rp2.197.920.000 atau sebesar 87,78%.

2.2.1.6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa Bappeda merupakan institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam mempersiapkan dan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) serta melakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan.

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan mempersiapkan rencana pembangunan daerah untuk tahun 2010, serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan tahun sebelumnya. Hasil dari program ini adalah terlaksananya kegiatan forum SKPD

dan Musrenbang Provinsi Jambi; tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan APBD dan terlaksananya rapat koordinasi APBN di Provinsi Jambi; Tersusunnya LKPJ Gubernur Jambi Tahun 2009; tersusunnya majalah perencanaan pembangunan daerah dan penataan katalog buku perpustakaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan diatas terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain jadwal Musrenbang Provinsi harus menunggu hasil Musrenbang Kab/Kota; sebagian tim Monev belum memasukkan indikator evaluasi dan tidak semua SKPD memberikan informasi yang lengkap sehingga pelaksanaan monev tidak maksimal; data dan bahan LKPJ sering terlambat disampaikan dan perkembangan data tidak dilengkapi narasi penjelasan yang baik.

Solusi terhadap permasalahan tersebut di atas adalah dengan membuat jadwal musrenbang dengan mengikuti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 secara konsisten; memberikan pelatihan tentang indikator evaluasi dan berkoordinasi dengan SKPD terkait sebelum melakukan Monev.

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Program ini bertujuan terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, khususnya bahan perencanaan bidang ekonomi. Dalam rangka mencapai program tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan; Koordinasi Pemantapan Perencanaan Anggaran Daerah; Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Ekonomi; Koordinasi Perencanaan Bidang Pertanian, SDA dan Lingkungan; Penyusunan Draft Rancangan RPJMD 2010 – 2015.

Dengan terlaksananya program ini dapat tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran Daerah Provinsi Jambi tahun 2011, berupa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam program ini juga dapat memberikan informasi tentang Data Base Ekonomi, keuangan dan Investasi Industri Provinsi Jambi Tahun 2010, rencana pengembangan Ekonomi kreatif, tersusunnya laporan 6 Januari serta tersusunnya indeks gini rasio dan indeks Williamson Provinsi Jambi; tersusunnya sistem informasi manajemen komoditas daerah berbasis telepon genggam, tersusunnya daya saing Provinsi Jambi Tahun 2010, serta terlaksananya pengembangan kelompok mitra pengelola ternak sapi Pemerintah (*Buffer Stock*) untuk kebutuhan stabilisasi harga daging, juga telah tersusun draft RPJMD Provinsi Jambi 2010 - 2015.

Dalam pelaksanaan program tersebut, ditemukan beberapa masalah antara lain sulitnya dalam mensinkronkan program SKPD dengan program yang termuat dalam RPJMD, lambatnya pengembalian usulan hasil pembahasan dari SKPD, sehingga mengganggu kelancaran penyusunan perencanaan kedepan secara lebih baik; sulitnya dalam mensinkronkan program SKPD dengan program yang termuat dalam RPJMD serta lambatnya pengembalian usulan hasil pembahasan dari SKPD; data yang tersedia kurang lengkap.

Solusi terhadap permasalahan tersebut dengan melakukan koordinasi antar SKPD dan koordinasi intern antara Bappeda Provinsi dengan Bappeda Kabupaten/Kota secara lebih intensif. Sejalan dengan itu, juga telah dilakukan perubahan mendasar dalam pembahasan program dan kegiatan pembangunan dimana Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan pembahasan secara bersama terhadap masing-masing SKPD. Kedepan dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan tersebut perlu

dibuat aturan yang baku dan sistem punishment/sanksi bagi SKPD yang terlambat. Disamping itu, Bappeda juga akan lebih mengefektifkan kegiatan evaluasi dan monitoring dengan melibatkan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.

3. Program Perencanaan Sosial Budaya

Program ini bertujuan tercapainya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan program perencanaan sosial budaya melalui beberapa kegiatan antara lain; Perencanaan dan koordinasi Bidang Pemerintahan dan SDM; Perencanaan dan Koordinasi program penanggulangan kemiskinan dan program sosial.

Dalam pelaksanaan program ini dapat menciptakan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan perkembangan Demokrasi Provinsi Jambi, tersusunnya Renstra Pengembangan SDM Provinsi Jambi, tersusunnya Rancangan Aksi Daerah-Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Jambi, tersusunnya laporan PNPM (PISEW, Perkotaan, Perdesaan, Rice), tersusunnya laporan TK-PKD, tersusunnya laporan kegiatan penanggulangan pengangguran, Bidang Sosbud dan Kemasyarakatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu belum optimalnya kinerja Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi, belum optimalnya sinkronisasi dan integrasi program bidang pemerintahan dan SDM dalam APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota; belum optimalnya sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan PNPM, baik antar PNPM maupun PNPM dengan APBD Kab/Kota dengan Provinsi dalam rangka pencapaian target MDG's, belum optimalnya kinerja (TKPKD) Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dalam sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan APBN/APBD dalam penanggulangan Kemiskinan.

Solusi yang perlu dilakukan dalam program ini yaitu perlu penguatan kelembagaan tingkat pemberantasan korupsi melalui peningkatan rapat/pertemuan, optimalisasi Implementasi PP 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil pemerintah di Wilayah Provinsi.

4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Program ini bertujuan tercapainya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan program perencanaan bidang sarana dan prasarana wilayah melalui kegiatan antara lain; kegiatan Koordinasi perencanaan infrastruktur dan penataan ruang Provinsi Jambi disediakan anggaran sebesar Rp273.280.000.

Hasil yang dicapai dari program ini adalah tersusunnya Laporan Koordinasi BKPR Pusat-Provinsi-Kab/Kota, laporan pembinaan pelaksanaan DAK TA 2009 bidang Infrastruktur Kab/Kota dan Provinsi Jambi, laporan koordinasi dan perencanaan transportasi, tersusunnya buku RTRWP Provinsi Jambi.

Permasalahan yang dihadapi yaitu belum selesainya RTRWP Provinsi karena masih menunggu penetapan status kawasan hutan oleh menteri kehutanan. Upaya yang dilakukan dalam pemecahan yang dihadapi adalah telah mengajukan kepada Menteri Kehutanan tentang penetapan status kawasan hutan.

5. Program Kerjasama Pembangunan.

Program ini bertujuan terjalinnya koordinasi, kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung pembangunan daerah Provinsi Jambi. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2010 adalah kegiatan pengembangan kerjasama sub regional IMS/IMT GT dan LN yang dianggarkan sebesar Rp24.000.000.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program ini yaitu pelaku utama dalam kerjasama IMT/IMS GT adalah pihak swasta dan dunia usaha dimana peran pemerintah adalah sebagai fasilitator dan pembuat kebijakan. Sampai saat ini peran dunia usaha untuk memanfaatkan forum IMT-GT masih belum optimal.

Upaya yang dilakukan yaitu mendorong KADIN dan dunia usaha untuk berperan aktif dan memanfaatkan forum IMT-GT dalam rangka mengembangkan usaha.

6. Program Pengembangan Data dan Informasi

Program ini bertujuan untuk membangun pusat data dengan kegiatan pembangunan sistem pemusatan data. Pada tahun anggaran 2010 telah dialokasikan anggaran Rp297.150.000 pelayanan data dan publikasi Rp238.260.000 dengan kegiatan antara lain pembelian server dan pembuatan buku Jambi Dalam Angka (JDA).

2.2.1.7. PERHUBUNGAN

Pembangunan urusan Perhubungan pada Tahun 2010, lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan perhubungan yang cepat, tertib, efektif dan efisien. Dalam penanganannya, dititik beratkan pada pengaturan lalu lintas dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas armada lalu lintas di Provinsi Jambi. Selain itu, diharapkan mampu menciptakan tertib berlalu lintas sehingga nantinya akan mampu meningkatkan dan mengakselerasi tumbuhnya rasa kenyamanan dan keamanan berlalu lintas, serta tersedianya prasarana dan sarana yang mendukung mobilitas angkutan. Dengan demikian upaya mencapai mobilitas yang aman, nyaman dan cepat dapat dilakukan khususnya di kawasan perkotaan.

Tahun 2010, urusan perhubungan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.999.919.500,00 dengan realisasi sebesar Rp10.151.992.947,00 atau penyerapan sebesar 92,29 %. Yang menjadi prioritas utama adalah Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Peningkatan Pelayanan Angkutan, dan Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas serta peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

Saat ini, lalulintas di Provinsi Jambi, terutama pada jalan nasional dan jalan provinsi masih ditemui permasalahan yang sangat mendasar berkaitan dengan tingginya tingkat kerusakan jalan yang diakibatkan adanya overload angkutan dan kurangnya pengawasan angkutan yang sesuai dengan standar angkutan yang sesuai dengan kelas jalan. Oleh karena itu, secara bertahap terus dilakukan pembangunan jembatan timbang pada titik simpul lalu lintas antar daerah sehingga pengawasan terhadap kelebihan tonase angkutan dapat terlaksana secara optimal. Selain itu, perlu ditingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia personil lapangan dan peningkatan kemampuan dan pemahaman teknis dengan mengikuti pada diklat-diklat perhubungan.

2.2.1.8. LINGKUNGAN HIDUP

Program yang dilakukan BLHD Provinsi Jambi pada tahun 2010 adalah 1) Program Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, 2) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup. Pada tahun anggaran 2010 untuk bidang lingkungan hidup melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah dianggarkan APBD Provinsi Jambi seperti tertera pada tabel 4.12 yang dipergunakan untuk mendanai program berikut;

1. Program Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Kegiatan yang dilakukan antara lain, memantau dan menguji kualitas air sungai Batanghari pada program batanghari bersih 7 kali per kabupaten/kota, memantau kandungan mercury pada lumpur dan ikan-ikan di sungai batanghari sebanyak 1 kali per Kabupaten/Kota, memantau kualitas udara *ambient* di wilayah Provinsi Jambi sebanyak 2 kali per kabupaten/kota. Hasil pemantauan periode I pada 16 titik sampel air sungai lintas kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi diperoleh hasil pada 16 titik yaitu :

1. Untuk kriteria mutu air 1 : 11 parameter memenuhi baku mutu dan 9 parameter berada di atas baku mutu dengan presentase pemenuhan PP 82 tahun 2001.
2. Untuk kreteria mutu air II : 14 parameter memenuhi baku mutu.
3. Parameter yang memenuhi baku mutu (KMA I dan KMA II) adalah TDS, SO₄, NH₂N, NO₃, NO₂, CL, F, Mn, Pb, M/L dan detergen.
4. Parameter yang di atas baku mutu (KMA I dan KMA II) adalah TSS, PH, BOD, PO₄, dan fenal.
5. Kualitas udara Provinsi Jambi dari parameter yang diperiksa pada kondisi sehat atau tidak terjadi penurunan kualitas udara dari tahun sebelumnya.

Untuk pengkajian dampak lingkungan, telah dilakukan pengkajian tentang daya dukung dan daya tampung Sungai Batanghari terhadap beban pencemaran, melaksanakan Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER). Dalam pengelolaan lingkungan sebanyak 60 perusahaan, pengawasan terhadap perizinan bidang lingkungan hidup sebanyak 60 perusahaan, pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran Bahan Perusak Ozon (BPO) di 4 kabupaten dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.7. Pengawasan Terhadap Penggunaan Bahan Perusak Ozon

No	Kabupaten	Perusahaan	Hasil
1	Ma. Jambi	emp gelam	100% R22. freon tidak menggunakan BPO
2	Batanghari	Conoco phillips	100%/ R22 tidak menggunakan BPO
3.	Tanjab barat	Petrochina	Ditemukan BPO pada 1 unit sample AC berupa R12 yang dilarang.
4	Tebo	Pearl oil	100% R22. freon tidak menggunakan BPO

Sumber: BLHD Provinsi Jambi 2010

Untuk penilaian dokumen AMDAL, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 10 perusahaan, terealisasi sampai dengan bulan Nopember sebanyak 7 Perusahaan dan dalam proses sebanyak 19 perusahaan, ini berarti BLHD Provinsi Jambi telah menjalankan peranya dalam pembinaan terhadap dunia usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan. Pada tahun 2009 perusahaan yang wajib memiliki dokumen AMDAL sebanyak 135 perusahaan dan yang telah memiliki sebanyak 124 perusahaan. Pada tahun 2010 jumlah perusahaan yang wajib memiliki dokumen AMDAL sebanyak 162 dan yang telah memiliki dokumen AMDAL sebanyak 138 perusahaan. Jika dilihat dari jumlah tersebut tugas dari BLHD Provinsi Jambi pada tahun mendatang tentunya semakin berat karena masih ada 24 perusahaan yang belum memiliki dokumen AMDAL ditambah lagi nantinya diprediksi akan bermunculan dunia usaha baru.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan penilaian Kota bersih pada 10 Kabupaten/Kota, pemenangnya telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jambi, dan telah diberikan penghargaan dan trophy oleh Gubernur Jambi serta melaksanakan penilaian Kalpataru tingkat Provinsi

Dalam rangka mengoptimalisasikan fungsi Laboratorium Lingkungan Daerah, BLHD Provinsi Jambi pada tahun 2010 telah melakukan pengujian kualitas lingkungan, pengadaan bahan dan peralatan serta perbaikan beberapa peralatan untuk menunjang kegiatan pemantauan kualitas lingkungan khususnya pengujian kualitas air dan udara.

2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.

Kegiatan yang dilakukan antara lain Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA dan penyuluhan lahan dan hutan serta koordinasi dan sosialisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan pada 10 Kabupaten/Kota dan tersedianya data hotspot sampai dengan bulan Nopember 2010. Dari kegiatan ini juga dilakukan penilaian terhadap Kabupaten/Kota menuju Indonesia Hijau.

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA

Dengan Melaksanakan Hosting dan updating website BLHD sehingga tersedianya jaringan internet yang memuat informasi tentang lingkungan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2010 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi mengalami hambatan-hambatan , antara lain, 1) Masih minimnya anggaran yang ada pada BLHD Provinsi Jambi, dan belum seimbang besarnya masing-masing anggaran kegiatan yang tersedia; 2) Sarana mobilisasi dalam rangka pemantauan dan pengawasan lingkungan sangat terbatas, untuk tahun 2010 BLHD hanya memiliki 1 (satu) kendaraan operasional yang layak pakai, sementara volume kegiatan sangat tinggi; 3) Kesadaran dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab masih sangat rendah dalam menjaga kualitas sungai terutama masalah pertambangan tanpa izin (PETI); 4) Belum optimalnya koordinasi pemantauan dan pengawasan serta

pengelolaan terhadap dampak lingkungan antara lain, kebakaran lahan dan hutan serta pencemaran sungai batanghari akibat kegiatan PETI, industri, limbah domestik dsb.

Selanjutnya data indikator kinerja bidang Lingkungan Tahun 2009-2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8. Indikator Bidang Lingkungan Tahun 2009-2010

No	Indikator	2009	2010
1.	Titik Api	1.784	99
2.	Pembahasan AMDAL	18	10
3.	Pengujian Kualitas Air (titiK)	38	38
4.	Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan	90	60
5.	ISPU	45,02	40
6.	Pengawasan implementasi izin pembuangan limbah cair (kali)	33	6
7.	Pengawasan implementasi izin Land aplikasi (perusahaan)	8	2
8.	Pengawasan implementasi izin limbah B3 (perusahaan)	34	3
9.	Penilaian Adipura	Sarolangun Merangin	Sarolangun Merangin

2.2.1.9. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan anak dalam struktur pemerintahan daerah Provinsi Jambi dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jambi. Sebagian urusan ini juga dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang dijelaskan lebih rinci pada urusan tugas pembantuan.

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

Tujuan Program ini adalah meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan desa, penanaman nilai kegotongroyongan, pemanfaatan dan penerapan teknologi tepat guna. Melalui program ini dilakukan pembinaan terhadap desa dan kelurahan dalam penmgelolaan pemerintahannya. Pada tahun 2010 berdasarkan

hasil penilaian lomba desa, Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin masuk ke dalam 10 besar desa terbaik seluruh Indonesia, yang selama ini belum pernah diraih oleh Provinsi Jambi. Dalam pemanfaatan dan penerapan Teknologi Tepat Guna, pada gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Nasional, beberapa produk yang berasal dari Provinsi Jambi memperoleh apresiasi yang baik dengan terjualnya beberapa alat-alat hasil penerapan TTG seperti alat deteksi gempa dan alat press kelapa sawit.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Perdesaan

Melalui program ini sebagai bagian dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan telah memberikan dampak pada penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam membangun di wilayah perdesaan. Mendukung perencanaan pembangunan, telah tersusun RPJM Desa pada desa-desa di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan untuk mengintegrasikan perencanaan di tingkat desa, sebanyak 912 desa,. Selain itu, masyarakat juga telah menunjukkan partisipasinya dalam pembangunan sebesar 2,56 % dari jumlah keseluruhan kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

4. Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan

Melalui program ini, telah dibentuk kelompok-kelompok perempuan peduli lingkungan, yang turut aktif dalam pelestarian lingkungan termasuk dalam memprakarsai gerakan tanam danelihara pohon. Selain itu, juga dilakukan pembinaan melalui pendekatan sosial budaya kepada masyarakat mengenai kesetaraan dan keadilan gender, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran dan tugas perempuan langsung di masyarakat melalui pendekatan sosial budaya yang berlaku di masyarakat itu sendiri.

5. Program Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Sampai dengan saat ini melalui program P2TP2A sebagai unit pelayanan terpadu untuk menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, telah ditangani sebanyak 33 kasus selain pendampingan apabila berkaitan dengan hukum. Melalui kegiatan P2TP2A juga berhasil mengembalikan seorang anak yang diterlantarkan kepada keluarganya dari Provinsi Kepulauan Riau.

6. Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

Dalam upaya mendukung penyusunan anggaran yang responsif gender, telah dilatih 20 orang focal point dari setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, selain 25 orang focal point yang ada di SKPD Provinsi Jambi. Pokja PUG Provinsi Jambi juga telah terbentuk, sehingga koordinasi penyusunan anggaran responsif gender dapat dilakukan dengan baik. Dalam penguatan kelembagaan perlindungan anak juga telah terbentuk Forum Anak Daerah Provinsi Jambi, yang bertujuan untuk memberikan hak-hak anak dalam kehidupannya, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak untuk berekspresi dan hak untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Melalui Forum Anak Nasional, salah seorang anak utusan Provinsi Jambi berhasil dikukuhkan sebanyak 5 Duta anak Indonesia.

7. Peningkatan Partisipasi Perempuan di Daerah Perdesaan

Program ini ditujukan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif perempuan yang dilakukan secara terpadu oleh SKPD terkait. Melalui Forum Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) telah ditentukan rencana pengembangan usaha ekonomi produktif perempuan pada masing-masing kabupaten/Kota, pengembangan ekonomi perempuan sejak awal sudah dapat diintegrasikan.

2.2.1.10. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Program Peningkatan Keluarga Berencana

Dalam rangka pengendalian jumlah penduduk maka salah satu Program yang dilaksanakan adalah Peningkatan Keluarga Berencana, dengan capaian Program pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : akseptor KB aktif mencapai 493.416 dari jumlah PUS sebanyak 615.826 atau sebesar 80,12 %, dengan 4.480 peserta KB baru dari 4.487 PPM atau sebesar 99,84 %. Sementara peserta KB baru pria mencapai 349 akseptor. Pelayanan KB juga dilakukan kepada akseptor-akseptor yang berada di wilayah-wilayah perbatasan dengan provinsi tetangga, untuk memperluas jangkauan pelayanan

2. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, juga dilakukan pembinaan melalui Gerakan Sayang Ibu (GSI), yang dilaksanakan di Kecamatan-kecamatan melalui pembentukan Satuan Tugas GSI pada setiap kecamatan.

2.2.1.11. SOSIAL

Pada tahun 2010 angka kemiskinan Provinsi Jambi sebesar 257.539 jiwa atau 8,34 %, jumlah tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,77% dari jumlah penduduk atau sekitar 270.817 jiwa, begitu juga dengan jumlah angka pengangguran tahun 2009 : 69.857 orang, dengan berbagai program kegiatan angka tersebut diakhir tahun 2010 dapat ditekan menjadi 60.055 jiwa.

Permasalahan yang dihadapi Provinsi Jambi dalam mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran, secara fungsional, kewenangan dan keuangan yang terbatas. Untuk itu perlu adanya sinergisitas program dan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.

1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini didukung oleh kegiatan Pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN), peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN), peningkatan kapasitas Badan Kerjasama Koordinasi Kesejahteraan Sosial (BKKS) Provinsi Jambi, adapun hasil dari program ini adalah tersedianya data PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), terpeliharanya TM dan MP, terlaksananya peringatan HKSAN di Provinsi Jambi serta, terlaksananya peningkatan kapasitas BKKS Provinsi Jambi.

2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

Untuk mencapai sasaran program ini didukung Kegiatan Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (pendampingan), pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di lokasi Bina Purna. Dengan terlaksananya program ini dapat memberdayakan keluarga fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan 1.000 KK serta memberdayakan KAT sebanyak 32 KK.

3. Program Pembinaan Anak Terlantar

Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, melakukan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan korban bencana dan orang terlantar, melalui program ini telah dilaksanakan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar sejumlah 60 orang anak terlantar.

4. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti jompo

Untuk mencapai sasaran program ini dilakukan kegiatan pelayanan kebutuhan panti Asuhan/Panti Jompo, dengan

melakukan pembinaan kepada 70 orang Lansia di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Luhur” Jambi.

5. Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba)

Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan usaha bagi eks penyandang penyakit sosial dengan tujuan para penyandang masalah sosial dapat berperan ditengah masyarakat sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

2.2.1.12. KETENAGAKERJAAN

Bidang ketenagakerjaan pada tahun 2010 melaksanakan tiga program yang meliputi Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Program perluasan dan pengembangan kesempatan Kerja dan program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2010 sebesar 1.350.761 orang atau meningkat dari tahun 2009 sebesar 1.342.377, begitupula dengan angka kesempatan kerja pada Provinsi Jambi sebesar 1.290.706 orang atau meningkat dari tahun 2009 sebesar 1.272.520. sedangkan jumlah angka pengangguran sebesar 60.055 orang atau menurun dari tahun lalu sebesar 69.857.

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini didukung oleh kegiatan peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK, pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja, bekerja sama dengan Lembaga pelatihan swasta dalam pendidikan dan pelatihan, melaksanakan penyuluhan dan publikasi program pelatihan dan produktivitas

Capaian dari program tersebut telah menghasilkan tersedianya peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja sehingga pencari kerja yang terampil dengan didukung oleh

peralatan yang lengkap, menciptakan tenaga kerja yang berdaya guna, terlaksananya pelatihan kerjasama yang baik dengan pihak swasta dengan harapan menciptakan tenaga kerja terampil, terciptanya sosialisasi dan promosi program melalui klinik produktivitas, bertambahnya pengetahuan bagi para tenaga kerja, terlaksananya Bimbingan Tehnis Total Faktor Produksi untuk menambah pengetahuan bagi para tenaga kerja, terlaksananya Bimbingan Tehnis Konsultasi dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja UKM agar tenaga kerja lebih berproduktivitas dengan cara UKM, bertambahnya pengetahuan para tenaga kerja dalam bidang manajemen usaha dan para pencari kerja dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh kegiatan pengembangan kesempatan kerja dalam dan luar negeri, memonitoring kesempatan kerja sektoral dan berkoordinasi penanggulangan pengangguran, menyusun profil ketenagakerjaan, menyusun program RTKD dan menganalisa keberhasilan program, sosialisasi Peraturan penempatan tenaga kerja asing, membentuk kelompok usaha mandiri produktifitas paska penempatan tenaga kerja Indonesia purna tugas.

Melalui program ini telah terkelolanya data ketenagakerjaan yang memudahkan para pencari kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilannya, terlaksananya Pengembangan Kesempatan Kerja baik di Dalam maupun di Luar Negeri, tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Daerah, terlaksananya monitoring Kesempatan Kerja Sektoral dan Koordinasi Penanggulangan Pengangguran dengan tersusunnya profil ketenagakerjaan.

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja melalui kegiatan Sosialisasi dan monitoring Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Tunjangan Hari Raya (THR), pembahasan dan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sosialisasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan Pengembangan mekanisme lembaga kerjasama Tripartit.

Hasil yang dicapai dari program ini antara lain terlaksananya sosialisasi dan monitoring UMP serta THR dan semakin meningkatnya mekanisme kerjasama lembaga tripartit.

2.2.1.13. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan profesionalisme SDM guna meningkatkan daya saing UMKM. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini yaitu: 1) Sharing Informasi UMKM luar daerah, 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan bagi KUKM, 3) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi /KUD, 4) Pelatihan Manajemen Usaha kecil.

Capaian dari program ini, meningkatnya penerapan teknologi tepat guna, keterampilan dan kelembagaan UMKM, meningkatnya pengetahuan pengurus dan anggota KUKM tentang manajemen kewirausahaan, meningkatnya pengetahuan pengurus dan anggota KUKM tentang manajemen pengelolaan koperasi/KUD.

Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program ini diantaranya yaitu rendahnya tingkat penerapan atau aplikasi

dari hasil sharing dan pelaksanaan pelatihan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya inovasi serta pola pembelajaran dan perlu memperbanyak kegiatan praktek dari teori.

2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM.

Tujuan program ini adalah untuk mempermudah dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan setiap peluang dan potensi sumber daya lokal yang ada secara optimal sesuai tuntutan pasar. Kegiatan yang mendukung program ini : 1) Perkuatan perkembangan permodalan dana bergulir bagi kelompok usaha produktif, 2) Pemberdayaan dan pengembangan KSP/USP Kop. Penerima dana bergulir, 3) Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi PMK, 3) Pemberdayaan KSP/USP Koperasi dan LKM Berwawasan Gender penerima dana bergulir, 4) Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Tingkat Nasional, 5) Pengembangan sentra dan sentra unggulan

Capaian dari program tersebut yaitu bertambahnya modal atau aset KSP/USP penerima bantuan bergulir, serta tercapainya kepemilikan sertifikat tanah oleh pengusaha kecil menengah (PKM), yang dapat dijadikan agunan dalam pengajuan pinjaman permodalan ke pihak perbankan.

Adapun kendala yang timbul dari pelaksanaan program ini yaitu masih lemahnya sistem pencatatan yang dilakukan oleh penerima bantuan dana bergulir, sehingga perguliran berikutnya sering terjadi keterlambatan. Untuk mengantisipasinya yaitu dengan melakukan koordinasi dengan petugas lapangan atau sarjana penggerak pembangunan pedesaan, untuk melakukan pendampingan kepada PKM yang menerima bantuan dana bergulir, untuk memberikan asistensi dalam pencatatan laporan keuangan.

3. Program Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif. Secara organisasi usaha, diharapkan memiliki daya saing ekonomi sebanding dengan badan usaha lainnya. Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder tertata dan berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktek berkoperasi yang baik (*best practices*) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas.

Kegiatan yang mendukung program ini yaitu: 1) Pengembangan jaringan kemitraan Usaha Koperasi, 2) Sosialisasi fungsi RAT (Rapat Anggota Tahunan), 3) Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Koperasi, 4) Pembinaan dan pengembangan kader koperasi

Capaian dari program ini yaitu: 1) Meningkatnya jumlah koperasi yang memanfaatkan kemitraan dalam pengembangan usahanya, 2) Meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT, 3) Terwujudnya koperasi wanita dan pemuda yang mandiri. 4) Meningkatnya anggota koperasi di setiap kecamatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini diantaranya belum efektifnya kinerja koperasi yang melakukan kemitraan, serta masih lemahnya kemampuan pengurus dan pengelola koperasi dalam menyusun laporan keuangan, sehingga hal tersebut menyebabkan tertundanya pelaksanaan RAT. Sedangkan solusi yang diberikan yaitu melakukan evaluasi untuk memilih jenis perusahaan yang tepat untuk dijadikan

tempat bermitra, serta memberikan pelatihan manajemen koperasi/UKM dengan materi yang lebih spesifik tentang penyusunan laporan keuangan.

4. Program Pengembangan/Penguatan Kelembagaan

Tujuan yang ingin dicapai dari program ini yaitu terwujudnya kelembagaan koperasi dan UMKM yang tangguh dan efektif, yang dapat memberikan kesejahteraan kepada anggotanya. Adapun kegiatan yang mendukung program ini yaitu 1) Penataan Kelembagaan Koperasi, 2) Penataan Usaha Koperasi adalah meningkatnya perkembangan usaha koperasi, 3) Penyusunan Direktori Koperasi, 4) Sharing Informasi Koperasi Prospek Mandiri.

Capaian dari program ini yaitu tertatanya kinerja dan kelembagaan koperasi, tersedianya data base koperasi, bertambahnya wawasan dan usaha koperasi prospek mandiri. Secara keseluruhan perkembangan Koperasi dan UMKM dapat dilihat pada Tabel 4.18.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, masih rendahnya kualitas maupun kuantitas sumberdaya manusia, pada SKPD yang menangani koperasi di Kabupaten/Kota, serta sering terjadinya mutasi pada petugas koperasi. Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai yang menangani koperasi wilayah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.9. Perkembangan Koperasi, UMKM tahun 2009 dan 2010

NO	U R A I A N	SATUAN	CAPAIAN TAHUN		PERKEMBANGAN (%)
			2009	2010	
1	Perkembangan Koperasi				
	Jumlah Koperasi	Unit	3.155	3.275	3,8
	Koperasi Aktif	Unit	2.263	2.368	4,6
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	892	907	1,6
	Jumlah Anggota	Orang	336.587	353.028	4,9
	Koperasi yg melaksanakan RAT	Unit	951	902	(5,4)
	Jumlah Manajer	Orang	501	510	1,8
	Modal Sendiri	Rp000	270.897.310	258.703.358	(4,5)
	Modal Luar	Rp000	159.790.675	256.608.385	37,7
	Volume Usaha	Rp000	1.108.684.002	1.167.622.089	5,3
	SHU	Rp000	51.728.266	48.638.159	(6,3)
	Pelaksanaan Klasifikasi Kop.	Unit	250*	200*	-
	Dana perkuatan bagi Kop. Pemuda	Rp000	-	1.300.000	-
	Dana Perkuatan Bagi Kop. Wanita	Rp000	-	1.150.000	-
2	Perkembangan KSP/USP Koperasi				
	Jumlah KSP	Unit	39	56	42,5
	Jumlah USP Koperasi	Unit	1.007	1.151	14,3
	Penilaian Kesehatan KSP/SUP-Kop	Unit	169 *	201*	-
	Sertifikasi Hak Atas Tanah UKM	Unit	1000*	1000*	-
	Perkuatan Permodalan Dana Bergulir Bagi KSP/USP-Kop	Rp000	44.163.500	45.163.500	2,2
3	Perkembangan UMKM				
	Jumlah PK Perdagangan	Unit	31.103	31.209	0,3
	Jumlah PK Industri Pertanian	Unit	14.010	14.320	2,2
	Jumlah PK Industri Non Pertanian	Unit	8.347	8.854	6,07
	Jumlah PK Aneka Usaha		11.780	11.975	1,65
	Jumlah Tenaga Kerja Terserap	Unit	71.242	73.169	2,7
	Penumbuhan Unit UMKM Baru	Unit	65.240	66.358	1,7
4	Pelaksanaan Diklat Teknis Koperasi dan UMKM	Orang	550*	500*	-

Ket : * Program tahunan sesuai dengan alokasi dana

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, 2010

Selama tahun 2010 berbagai penghargaan telah diterima baik oleh gerakan Koperasi dan UMKM maupun oleh aparat pembina Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota. Nama-nama Koperasi dan UMKM terbaik tahun 2010 seperti tabel 4.19 berikut :

Tabel 2.10. Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010

No	Kelompok Koperasi Nama Koperasi	Alamat Kel / Desa / Kec.	Kab/Kota	Ket
1.	KUD MUKTI TAMA	Kec. Sungai Bahar	Muaro Jambi	
2.	KUD SUMBER MAKMUR	Kec. Tabir Timur	Merangin	
3.	KUD SUKA MAKMUR	Kec. Tebing Tinggi	Tanjab Barat	

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, 2010

2.2.1.14. PENANAMAN MODAL

Untuk mendanai program yang terkait dengan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 4.20. Dana tersebut digunakan untuk mendanai program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah penanaman modal dalam negeri maupun modal asing serta meningkatkan pemasaran produk unggulan Provinsi Jambi.

Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yaitu : 1) Kegiatan Peningkatan Kerjasama strategis (kemitraan) untuk pengembangan investasi dan pemutakhiran data informasi investasi daerah, 2). Kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman Modal., 3).Kegiatan peningkatan pembinaan dan evaluasi Perusahaan PMA/PMDN., 4). Kegiatan Pameran dan Temu usaha di dalam negeri, 5) Kegiatan Pameran dan Temu usaha di Luar Negeri.,serta 6). Penyelesaian tunggakan pembayaran pada Sumatera Promotion Centre (SPC) Batam. Mulai tahun 2010 kerjasama pengelola SPC di Batam ini telah diputuskan, sehingga pada tahun mendatang pembiayaan untuk pengelolaan SPC tidak perlu dianggarkan.

Capaian dari program ini yaitu Peningkatan kerjasama strategis (kemitraan) untuk pengembangan investasi dan

pemutakhiran data informasi investasi daerah dengan kegiatan sebagai berikut : Terlaksananya temu usaha kemitraan pengusaha besar dengan UKM pada 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan ini mempertemukan antara pengusaha kecil, menengah dan besar serta diikuti sektor perbankan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu Adanya keengganan para pelaku UMKM untuk meminjam modal usaha melalui perbankan, ini disebabkan karena suku bunga yang tinggi dan persyaratan yang ditentukan oleh pihak perbankan sangat memberatkan bagi pelaku UMKM. Serta tidak semua Kabupaten/Kota mempunyai institusi penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai layanan kemudahan bagi investor untuk mengurus perizinan dalam rangka menanamkan modalnya di Provinsi Jambi. Adapaun solusinya yaitu mensosialisasikan beberapa skim kredit perbankan tanpa agunan serta dengan bunga ringan, misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta menghimbau kepada semua Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi investor lokal maupun asing. Sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini, yaitu: Fasilitasi kemudahan dan sosialisasi peraturan terkait penanaman modal dengan capaian terbinanya kegiatan pelayanan perizinan penanaman modal, penerbitan Izin tenaga Kerja Asing (IMTA), tersedianya bahan Peraturan terkait dalam rangka peningkatan pelayanan penanaman modal serta

tersedianya kajian akademik Ranperda pemberian intensif dan kemudahan penanaman modal di Provinsi Jambi.

Permasalahan yang dihadapi yaitu tidak semua Kabupaten/Kota telah melaksanakan Rapar Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD), sehingga sampai saat ini Hasil Rumusan dan Proseding RKPPMD belum bisa dilaksanakan. Solusi yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mengirim surat himbauan kepada Bupati/Walikota agar melaksanakan RKPPMD.

3. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal.

Program ini bertujuan memberikan pelayanan yang maksimal kepada calon investor atau kepada investor dalam mengurus masalah perizinan dengan harap dapat meningkatkan nilai investasi di Provinsi Jambi.

Kegiatan pokok yang telah dilaksanakan untuk mendukung program ini yaitu 1) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, 2) Penyusunan Buku Juklak dan Juknis penanaman modal.

Capaian dari program ini yaitu terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, yang menghasilkan konsep dan cara pengurusan perizinan yang cepat, tepat dan efektif serta efisien dan memberikan informasi kepada calon investor tentang pengajuan proses perizinan penanaman modal.

Selama tahun 2010 peningkatan investasi dalam bentuk PMDN dan PMA sebagai berikut :

- a. Persetujuan baru PMDN sebanyak 2 (dua) perusahaan dengan rencana investasi sebesar Rp36,763 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 21.156 orang.
- b. Persetujuan baru PMA sebanyak 11 (sebelas) perusahaan dengan rencana realisasi sebesar US\$.678.134,30 dan

Rp2,009 triliyun dengan rencana penyerapan tenaga kerja 22.903 orang.

Pencapaian investasi perusahaan PMDN/PMA sampai dengan akhir tahun 2010 sebagai berikut :

- a.PMDN dengan rencana investasi sebesar Rp 73,17 triliyun dengan realisasi Rp11,83 triliyun.
- b.Rencana investasi PMA dalam bentuk Rupiah ditargetkan sebesar Rp7,95 triliyun dengan realisasi Rp2,98 triliyun.
- c. Rencana investasi PMA ditargetkan sebesar US \$ 2.503.955,84 dengan realisasi sebesar US \$ 741,64 juta.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, yaitu masih adanya investor yang belum memahami prosedur dan persyaratan yang telah disederhanakan, sebagai cara mengantisipasinya yaitu memberikan penjelasan serta sosialisasi tentang prosedur pengurusan perizinan.

2.2.1.15. KEBUDAYAAN

Kebudayaan merupakan bagian penting dalam pembangunan. Kebudayaan terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya sasaran pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur adalah: Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat; Semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika; Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan; dan Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya.

1. Program Pengelolaan kekayaan Budaya

Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan Nilai-nilai budaya, seni dan film yang dapat memberikan makna pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan masyarakat serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Selain itu juga guna meningkatkan apresiasi masyarakat terutama kalangan pendidikan terhadap nilai sejarah dan budaya daerah Jambi. Dengan dukungan dana sebesar Rp650.000.000,- program ini dilaksanakan pada Tahun

2010 dengan kegiatan-kegiatan yaitu: Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah, Meningkatkan fungsi Museum Negeri Jambi, Meningkatkan fungsi Taman Budaya Jambi, Meningkatkan fungsi Museum Perjuangan Rakyat Jambi, Workshop bidang Permuseuman.

Realisasi program ini mendorong terlaksananya Konferensi Internasional tentang Warisan Budaya Jambi (International Conference on Jambi Heritage), Pendataan Kepurbakalaan Situs Merangin menuju pengembangan menjadi Geo Park, Pendataan Situs Percandian Muaro Jambi menuju pengakuan World Heritage di Lembaga Dunia Unesco, Survei pengumpulan data dokumentasi koleksi di Pematang Kabau dan Air Hitam, Pameran keliling ragam alat perikanan tradisional dalam rangka MTQ Provinsi Jambi, Workshop bidang Permuseuman, berbagai pertunjukan seni pertunjukan, pengadaan benda berkorak kebudayaan, konservasi, fumigasi dan perawatan koleksi.

Capaian tersebut juga tampak dari data pengunjung Museum Negeri Jambi pada Tahun 2009 sebanyak 7563 orang meningkat menjadi 33.029 pada Tahun 2010. Demikian pula dengan Museum Perjuangan Rakyat Jambi terjadi peningkatan pengunjung dari 9327 orang pada Tahun 2009 menjadi 18.251

orang pada Tahun 2010. Peningkatan ini terjadi karena adanya pencairan “Tahun Kunjungan Museum 2010”.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain, Belum terjabarnya secara jelas kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama menyangkut klausul yang mengatakan kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dapat diserahkan ke Provinsi, namun kenyataannya apapun kondisi kabupaten dan kota mereka belum mau menyatakan ketidakmampuannya. Selain itu masih terbatasnya dana yang tersedia untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata juga menjadi problem yang harus dicari solusinya secara kreatif.

Adapun upaya terhadap permasalahan tersebut antara lain yaitu; memberi peluang kepada investor untuk ikut melaksanakan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata, mengikutsertakan Kabupaten/Kota dalam berbagai event dalam dan luar negeri, mengkoordinasikan dan mendukung setiap program Kabupaten/Kota bidang Budpar, serta melaksanakan program dengan mengikutsertakan Dinas/Instansi terkait dan stakeholder bidang kebudayaan dan pariwisata.

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Sasaran program ini adalah agar keragaman nilai budaya, seni dan film untuk ditumbuhkan kemampuannya dalam menyerap nilai budaya yang positif dalam upaya memperkaya keragaman budaya bangsa yang berlandaskan spiritual-moral, etika. Program ini didukung dana sebesar Rp520.000.000,- yang dijabarkan melalui kegiatan: Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.

Dengan program ini telah terlaksana Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah antara lain melalui event Kemah Budaya Jambi, Workshop Teater di Taman Budaya Jambi, Festival Kain Songket Tradisional dan Festival Teater Remaja 2010 di TMII Jakarta, Festival Maulid Nusantara di Palu Sulawesi serta Pameran dan Pagelaran Seni se Sumatera di Lampung.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain, masih rendahnya minat masyarakat khususnya pemuda terhadap keragaman budaya, di sisi lain budaya luar semakin tak terbendung bersaing dengan budaya lokal.

Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut meningkatkan minat masyarakat khususnya pemuda dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai, selain itu juga meningkatkan kualitas keragaman budaya yang kita miliki sehingga mampu bersaing dengan budaya luar.

4. Program Pengembangan Kemitraan

Sasaran program ini adalah meningkatnya koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata (stakeholder) dan peran serta masyarakat. Program ini didukung oleh kegiatan berupa Pengembangan Sumber Daya dan Profesionalisme bidang Pariwisata dan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Kemitraan Pariwisata.

Melalui program ini, telah dilaksanakan upaya pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata antara lain dengan mengadakan Bintek Front Liner bagi pengelola/staf hotel se Provinsi Jambi. Selain itu dengan program ini diharapkan mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kemitraan Pariwisata dengan cara Penyuluhan/Sosialisasi Sadar Wisata penerapan Sapta Pesona di 4 kabupaten dan kota seProvinsi Jambi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain, masih rendahnya SDM bidang kepariwisataan, koordinasi antar stakeholder yang masih kurang, dan pemanfaatan teknologi yang belum optimal.

Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain, pemanfaatan jaringan internet dalam pengembangan kemitraan pariwisata, meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait baik secara formal dan informal, peningkatan kemampuan SDM bidang pariwisata melalui bintek, seminar, workshop dan lain-lain. Misalnya sosialisasi dan kampanye sadar wisata dan sapta pesona, pelatihan teknis pengelola hotel dan lain-lain.

2.2.1.16. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga telah disusun 4 program pokok yaitu 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; 3) Program Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga Instansi Lain; 4) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini bertujuan agar pemuda memiliki wawasan kebangsaan yang luas dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, menghormati supremasi hukum dan ikut menegakan demokrasi. Untuk mendukung program ini pada tahun 2010 dianggarkan dana sebesar Rp1.084.956.000,-.

Dengan alokasi anggran tersebut telah dilaksanakan pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan kegiatan memberikan bantuan biaya operasional kepada 23 OKP, terlaksananya pelatihan terhadap anggota Paskibraka sebanyak 58 orang (56

peserta untuk Tingkat Provinsi dan 2 peserta untuk Tingkat Nasional) serta Penyuluhan bahaya Narkoba dan Napak Tilas Jejak Pahlawan.

2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Kecakapan Hidup Pemuda

Program ini bertujuan memberikan keterampilan kepada para pemuda agar mereka dapat meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan dan menunjang ekonomi pemuda agar dapat mengurangi ketergantungan pada orang lain serta ikut bersaing dalam pasar kerja. Untuk mendukung program ini pada tahun 2010 dianggarkan dana sebesar Rp636.605.000,-.

Melalui program ini telah menumbuhkan kegiatan kewirausahaan di kalangan pemuda sebanyak 30 orang. Terlaksananya pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3) dan menempatkan 30 orang SP-3 di 10 Desa Kabupaten Kerinci dan Merangin. Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) terselenggara pada tanggal 25 s/d 26 Maret 2010 sebanyak 40 Peserta dan terpilih untuk mewakili Provinsi Jambi 1 orang peserta dan berhak mengikuti pendidikan dan latihan di DKI Jakarta selama 3 bulan dan selanjutnya akan dikirim ke Negara Canada selama 3 bulan. Serta terlaksananya Pembinaan kepada 15 Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP).

3. Program Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga Instansi Lain

Program ini bertujuan memberikan pembinaan dan meningkatkan prestasi para atlit terutama atlit cabang olahraga prestasi, kegiatan ini mulai dari latihan sampai mengikuti even-even olahraga Nasional maupun regional. Untuk mendukung program ini pada tahun 2010 dianggarkan dana sebesar Rp5.100.219.000,-

Program dan kegiatan ini diperuntukan bagi pembinaan terhadap 45 cabang olah raga. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan kompetisi Olahraga Tradisional yaitu mencari dan menggali olahraga khas dari kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi untuk diperlombakan di Tingkat Provinsi dan selanjutnya di perlombakan ditingkat Nasional. Dari Kompetisi ini yang berhasil menjadi juara dari Kabupaten Sarolangun dengan Olahraga Khas Daerah Sepak Bola Limau dan berhak mewakili Provinsi Jambi Ke Tingkat Nasional di Provinsi Maluku.

4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program ini bertujuan menanamkan pengertian/ pemahaman tentang fungsi dan peranan olahraga bagi kehidupan manusia secara individu maupun secara masyarakat dengan semboyan memasyarakatkan olahraga dan mengolah-ragakan masyarakat. Untuk mencapai sasaran program ini didukung dana sebesar Rp2.363.795.500,-. Pada tahun 2010 Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) menampung atlit pelajar sebanyak 70 orang dengan cabang olahraga Pencak Silat, Renang, Gulat, Panahan, Tinju, Dayung, Senam, Atletik. Adapun Cabang Olahraga yang dibina yaitu : Gulat, Renang, Tinju, Panahan sebanyak 32 Orang.

Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) pada bulan Juni 2010 dengan memperlombakan 14 Cabang Olahraga diikuti oleh pelajar Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.

Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Cacat Daerah (POPCADA) yaitu olahraga Pelajar bagi penyandang Cacat dan diikuti 100 Atlit Penyandang Cacat Pelajar Kabupaten/kota Provinsi Jambi. adapun cabang Olahraga yang diperlombakan yaitu Atletik, Renang, dan Tenis Meja.

Secara umum masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kepemudaan ialah masih kurangnya

perhatian masyarakat terhadap fungsi dan peranan pemuda dalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dari terbatasnya jumlah pemuda yang terlibat dalam proses pembangunan terutama di daerah pedesaan.

Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan koordinasi dan sosialisasi agar Kabupaten dapat meningkatkan atau mempertajam program kerja yang benar-benar menyentuh akar permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di daerah Jambi.

2.2.1.17. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Ruang lingkup program kegiatan dalam melaksanakan peran dan fungsi peningkatan kesatuan bangsa dan pembinaan politik dalam negeri antara lain dengan melakukan program : perwujudan demokrasi yang makin kokoh, pendidikan politik masyarakat, pengembangan wawasan kebangsaan, kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal.

1. Program Perwujudan Demokrasi Yang Makin Kokoh

Program ini dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan antara lain memfasilitasi pemilukada gubernur serta pengembangan partisipasi politik. Dalam kaitan dengan pemilukada gubernur tahun 2010 telah terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2010 - 2015. Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung dalam satu putaran pada tanggal 19 Juni 2010. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan relatif tinggi dengan penduduk terdaftar sebagai pemilih sejumlah 2.231.990 jiwa, sedangkan yang menggunakan hak pilih sejumlah 1.638.128 jiwa. Suara sah pada pemilihan tersebut sebanyak 1.495.051 suara dan tidak sah sebanyak 35.069 suara, Sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sejumlah 701.870 jiwa.

2. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Melalui program ini telah terlaksana forum-forum diskusi kelompok dan dialog generasi muda dengan para pelaku sejarah, telah dilakukan Koordinasi forum diskusi politik dan tersusunnya data base (Parpol/ Ormas/ OKP/ LSM dan Keagamaan).

3. Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dialog generasi muda tentang sejarah perjuangan bangsa, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, gebyar merah putih meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara, penataran ketahanan bangsa, memfasilitasi hubungan antar lembaga keagamaan dengan pemerintah daerah dalam perannya sebagai agen perubahan sosial di masyarakat. Di samping itu terdapat kegiatan lainnya yaitu memfasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran bela negara dan orientasi pembauran bagi pramuka dan pelajar serta pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.

4. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal.

Pada tahun 2010 dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantapan eksistensi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), peningkatan pembinaan kapasitas dan kualitas proses politik dan lembaga perwakilan, memperbaiki dan meningkatkan kesadaran politik warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan, memelihara kewaspadaan nasional di daerah agar terhindar dari upaya pemecah belahan bangsa. Gambaran

keberhasilan dalam pelaksanaan program ini ditandai dengan kehidupan masyarakat yang lebih tenang dan terhindar dari konflik-konflik meskipun terjadi unjuk rasa atau demonstrasi yang di tahun 2009 sejumlah 49 demonstrasi di tahun 2010 menjadi 81 kali.

2.2.1.18. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2.2.1.18.1. Sekretariat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang menyangkut pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, maka pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp72.426.765.078,- dengan tingkat realisasi sebesar 94,33 % atau setara dengan Rp68.318.352.792,-. Dari total dana tersebut, tersebar pada 9 (sembilan) Biro Dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.11. Alokasi dan Realisasi Anggaran Setda Provinsi Jambi Tahun 2010

No	BIRO	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Ekonomi Pembangunan	1.624.525.000	1.584.491.200	97,54
2	Hukum	2.712.638.000	2.542.881.100	93,74
3	Humas Dan Protokol	7.961.970.000	7.588.142.850	95,30
4	Pemerintahan	2.903.324.800	2.005.054.650	69,06
5	Kesramas	5.584.420.500	5.472.732.090	98,00
6	Organisasi	1.912.794.500	1.830.589.276	95,70
7	Keuangan Dan Aset	7.475.241.300	7.176.231.648	96,00
8	Umum	40.602.125.978	38.932.250.078	95,89
9	Sumberdaya Alam	1.649.725.000	1.185.979.900	71,89
Jumlah		72.426.765.078	68.318.352.792	94,33

Sumber : Laporan dari Biro Lingkup Setda Prov. Jambi

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari alokasi yang telah disediakan Biro Umum mendapat alokasi terbesar yaitu 56,06 % dari

total anggaran yang disediakan, sementara Biro Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Jambi mendapat alokasi terkecil yaitu sebesar 2,24 % dari total anggaran yang disediakan. Sementara jika dilihat dari tingkat realisasinya, Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Jambi merupakan biro dengan tingkat penyerapan keuangan yang tertinggi, yaitu dengan tingkat realisasi sebesar 98,00 % dan Biro Pemerintahan dengan tingkat realisasi terendah yaitu sebesar 69,06 %.

A. Biro Ekonomi dan Pembangunan

Untuk tahun 2010, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.624.525.000,- diarahkan untuk melaksanakan 5 (lima) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan

Pada tahun 2010 dialokasi anggaran untuk program ini Rp445.650.000 dengan tingkat realisasi mencapai Rp442.675.000,- atau 99,33 %. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terhimpunnya data program kegiatan pembangunan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai bahan masukan pelaksanaan APBD.
- b. Tersedianya data hasil pengendalian dan monitoring fisik APBD sebagai bagian dari tahapan proses penyelenggaraan pembangunan daerah.
- c. Terhimpunnya data pelaporan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan pelaksanaan program APBD.

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih adanya pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan Renja Biro, sehingga kurang efisien dalam penggunaan Sumberdana yang tersedia.

- b. Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dalam menunjang intensitas kerja.
- c. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
- d. Belum adanya standar pelayanan minimal dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan APBD.
- e. Masih sering terlambatnya penyampaian Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) dari masing-masing SKPD sebagai bahan evaluasi.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Meningkatkan kemampuan SDM yang tersedia, dengan mengikuti diklat dan Bimtek di dalam maupun luar Provinsi Jambi.
- c. Melaksanakan Rapat Teknis Bidang Administrasi Pembangunan Kab/Kota dalam Provinsi Jambi, sebagai forum dalam menyampaikan informasi yang menunjang akselerasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi Jambi.
- d. Perlu dibuat suatu standar minimum dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan APBD.
- e. Perlu adanya koordinasi/tindak lanjut dalam pelaksanaan penyampaian bahan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK).

2. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Ekonomi di Bidang Penanaman Modal, BUMD/BUMN dan Pendapatan Keuangan

Alokasi anggaran untuk program ini pada tahun 2010 berjumlah Rp314.725.000,- dengan tingkat realisasi mencapai

Rp307.611.000,- atau 97,74 %. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terhimpunnya data hasil pelaksanaan pembangunan bidang Pendapatan dan Keuangan.
- b. Terhimpunnya data hasil pelaksanaan pembangunan bidang Penanaman Modal.
- c. Terhimpunnya data hasil pelaksanaan pembangunan bidang BUMD/BUMN dan Kerjasama

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih sulitnya memperoleh data tentang perkembangan BUMD/BUMN di Provinsi Jambi.
- b. Penyampaian laporan penanaman modal yang tidak tepat waktu oleh instansi terkait.
- c. Tidak tersedianya beberapa data penanaman modal di kab/kota atau instansi terkait.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Perlunya meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara pihak pemerintah dengan BUMD/BUMN.
- b. Perlunya himbauan dan peningkatan koordinasi terhadap instansi terkait agar menyampaikan laporan penanaman modal tepat waktu.
- c. Perlunya himbauan dan peningkatan koordinasi kepada kab/kota atau instansi terkait agar aktif dalam pengumpulan data penanaman modal.

3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi dibidang BUDPAR dan KOPERINDAG

Pada tahun 2010 dialokasi anggaran untuk program ini Rp110.000.000,- dengan tingkat realisasi mencapai

Rp103.915.000,- atau 94,47 %. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- Terhimpunnya data pelaporan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan pelaksanaan program APBD.

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sering terjadinya fluktuasi harga kebutuhan bahan pokok masyarakat dipasar.
- b. Ditemukannya beberapa produk yang tidak layak konsumsi di pasar.
- c. Masih kurangnya dukungan infrastruktur jalan menuju sentra produksi industri (pertanian, kerajinan, UMKM dan lainnya) baik di dalam daerah maupun luar daerah.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Perlu dilakukan Rapat Koordinasi yang secara rutin untuk menangani fluktuasi harga bahan pokok.
- b. Membuat himbauan kepada instansi terkait untuk melakukan usaha-usaha penstabilan harga bahan kebutuhan pokok dipasar (operasi pasar dan pasar murah).
- c. Membuat himbauan kepada instansi agar menangani masalah produk yang tidak layak konsumsi di pasar.
- d. Bekerja sama dengan instansi terkait guna meningkatkan infrastruktur jalan untuk memfasilitasi sentra produksi industri.

4. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Ekonomi di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Alokasi anggaran untuk program ini pada tahun 2010 berjumlah Rp464.150.000,- dengan tingkat realisasi mencapai

Rp450.199.400,- atau 96,99 %. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

a. Terhimpunnya data pelaporan hasil pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembangunan dan pengembangan bidang kebudayaan dan pariwisata.

b. Laporan administrasi pembangunan Biro Ekbang.

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Masih lemahnya Koordinasi, dan Sinergitas antar Lintas Sektoral dan Dinas/Instansi terkait.

2. Masih lemahnya upaya dalam mensinkronisasikan Program Pengembangan Pembangunan Ekonomi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

3. Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan baik kualitas dan kuantitas infrastruktur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

4. Belum optimalnya upaya pensosialisasian pemahaman tentang Konsep Cagar Budaya.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

a. Meningkatkan kualitas dan intensitas Rapat Koordinasi dengan dan antar Dinas/Instansi dan dengan Pemerintah Kab/Kota dalam rangka pengembangan Bidang Kebudayaan dan Kepariwisata.

b. Membentuk Forum Koordinasi Pengembangan Pembangunan Bidang Kebudayaan Pariwisata dan Promosi Industri Kepariwisata.

c. Melaksanakan secara intensif Sosialisasi tentang Konsep Cagar Budaya serta Sapta Pesona Wisata (Aman, Terkait, Bersih, Sejuk, Indah, dan Ramah Tamah dan Kenangan).

5. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Ekonomi di Bidang Perhubungan dan Kimpraswil

Pada tahun 2010 dialokasi anggaran untuk program ini Rp290.000.000,- dengan tingkat realisasi mencapai Rp280.000.000,- atau 96,58 %. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terkoordinirnya rencana tata ruang wilayah Provinsi, kabupaten serta tercapainya pembinaan penyelenggaraan JAKON di Provinsi Jambi.
- b. Terhimpunnya Data ruas jalan Provinsi Jambi dan rencana pengembangan infrastruktur jalan dan sektor penunjang lainnya.
- c. Terhimpunnya data perhubungan dan penyelenggaraan sektor jasa transportasi umum serta meningkatkan pembinaan pengelolaan bidang kepelabuhan.

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Belum terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi dan kab/kota, disebabkan kab/kota belum membentuk Tim Pembinaan Jasa Konstruksi.
- b. Belum terakomodirnya Pembinaan dan Fasilitas Bidang infrastruktur jalan yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi, karena terbatasnya personil dan anggaran.
- c. Masih banyaknya masalah dalam Pembinaan Sektor Perhubungan dan Jasa Transportasi.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Menjadualkan secara periodik Rapat Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota.

- b. Mengkoordinir dan mensinergikan program dan kegiatan dinas/instansi untuk kelancaran lalu lintas angkutan barang dan orang.

B. Biro Hukum

Pada tahun 2010, Biro Hukum Setda. Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.712.638.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar Rp2.542.881.100,- atau 93,74% yang diarahkan untuk melaksanakan 5 (lima) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pembentukan Hukum

Program ini, secara umum bertujuan untuk menyelenggarakan berbagai forum publik menyusun Ranperda, diskusi dan konsultasi. Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, dialokasikan anggaran sebesar Rp300.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp284.224.500,- atau 94,74 %. Adapun output dari program ini adalah tersusunnya naskah rancangan Peraturan Daerah.

Dalam rangka pencapaian efektifitas tujuan dari program tersebut, secara umum terdapat permasalahan, bahwa belum seluruhnya SKPD mengetahui prosedur penyusunan produk Hukum Daerah sesuai dengan Permendagri No. 16 Tahun 2006. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada masa yang akan datang, maka sebagai solusinya adalah melaksanakan sosialisasi Permendagri No. 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, yang dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan.

2. Program Perencanaan Hukum

Secara umum, program ini bertujuan untuk menciptakan produk-produk Hukum yang sesuai dan selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam

pelaksanaannya, pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp841.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp815.748.600,- atau 97,00 %. Dari penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut:

- a. Tersusunnya Peraturan/Keputusan/Instruksi Gubernur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Terinventarisir dan terevaluasinya peraturan daerah kab/kota, peraturan bupati/walikota sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Terciptanya koordinasi lintas instansi terkait dalam penyusunan penyempurnaan produk hukum dan korelasinya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program ini, maka permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Draf Pergub/Kep.Gub/Instruksi Gubernur yang diajukan instansi terkait kurang mempedomani UU Nomor 10 Tahun 2004.
- b. Belum seluruhnya SKPD menyampaikan perda-perda yang tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk dievaluasi.
- c. Belum seluruhnya SKPD menyampaikan format tentang bentuk dan tata cara pengisian PROLEGDA yang sesuai dengan Kepmendagri No. 169 Tahun 2004 ke Biro Hukum.

Dari permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka solusi untuk pemecahannya adalah :

- a. Melaksanakan sosialisasi UU Nomor 10 Tahun 2010 kepada SKPD untuk memperhatikan dalam menyampaikan Draf Pergub/Kep.Gub/Instruksi Gub harus mempedomani ketentuan.

- b. Meningkatkan koordinasi baik dengan SKPD Lingkup Pemprov Jambi maupun dengan Pemerintah Kab/Kota untuk menyampaikan Perda-perda atau peraturan lainnya yang akan dievaluasi ke Biro Hukum Setda. Provinsi Jambi.
- c. Secara berkala perlu untuk melaksanakan sosialisasi terhadap Kepmendagri Nomor 169 Tahun 2004.

3. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akses Publik Terhadap Informasi Hukum

Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan metode pengembangan kesadaran hukum dan HAM serta menyediakan produk hukum melalui lembaran daerah dan berita daerah. Untuk mencapai tujuan dari program ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.252.638.000,- yang terealisasi sebesar Rp1.137.522.000,- atau 90,81 %. Dari penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung program ini, diperoleh output sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya lokakarya HAM dan tersosialisasinya produk-produk hukum kepada para stakeholders serta terhimpunnya produk hukum daerah.
- b. Terselenggaranya Binmatkum di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dan penyelesaian permasalahan dan keluhan hukum.
- c. Tersedianya data dan informasi Peraturan Perundang-undangan.

Dari hasil penlaksanaan kegiatan tersebut, ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Produk-produk yang telah ditetapkan belum seluruhnya diketahui oleh masyarakat dan aparatur.
- b. Masih rendahnya kesadaran hukum dan HAM para aparatur dan masyarakat dan adanya kecenderungan masyarakat tidak

tahu dan mengerti akan hukum serta sanksi-sanksi yang berlaku ditengah masyarakat.

- c. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum antara pusat dan anggota jaringan serta masyarakat.

4. Program Pengkajian Kasus HAM

Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM. Untuk mencapai tujuan dari program ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp125.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp114.750.000,- atau 91,81 %. Dari penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung program ini, diperoleh output terinventarisasi dan telah terlaksananya pengkajian terhadap kasus pelanggaran HAM. Secara umum, permasalahan yang ditemui dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah masih banyaknya masyarakat dan aparatur pemerintah yang tidak mengetahui didasari dengan hukum terhadap persoalan atau kasus yang bersentuhan dengan HAM. Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang HAM melalui sosialisasi terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan HAM.

5. Program Pendataan dan Pembinaan PPNS

Program ini bertujuan untuk melaksanakan pendataan dan penyegaran bidang tugas PPNS. Untuk mencapai tujuan dari program ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp194.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp190.632.000,- atau 98,26 %. Dari penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung program ini, diperoleh output terlaksananya pendataan dan penyegaran tugas PPNS. Secara umum, permasalahan yang ditemui dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah para PPNS Daerah banyak yang belum mengetahui bidang tugasnya selaku pengaman kebijakan dan penegakan perda serta trantib. Untuk menjawab

permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan serta kompetensi para PPNS Daerah untuk masa yang akan datang.

C. Biro Humas dan Protokol

Pada tahun 2010, Biro Humas dan Protokol Setda. Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7.961.970.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar Rp7.588.142.850,- atau 95,30 % yang diarahkan untuk melaksanakan 4 (empat) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pembinaan media lokal, sehingga output yang dari dari program ini adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, dengan alokasi anggaran Rp1.207.777.240,- dan terealisasi sebesar Rp1.095.866.500,- atau 90,73 %, adapun kegiatan utamanya adalah penyediaan bahan bacaan bagi pejabat eselon II dan III seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Jambi dengan total 42 media cetak dan belanja modal dalam rangka peningkatan kualitas kehumasan dan keprotokolan.

2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Secara umum tujuan dari proram ini adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi dengan Dinas Instansi baik ditingkat Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Pusat dan dalam rangka mencapai kinerja yang optimal dari tugas keprotokolan. Untuk mencapai tujuan dari program ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp849.925.760,- dengan tingkat penyerapan sebesar Rp829.987.100,- atau setara dengan 97,68

%. Adapun output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah.

Dari kegiatan ini telah terlaksana kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur sebanyak 52 Kali, kunjungan pejabat Negara 43 kali dan fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat kepala daerah sebanyak 741 kali.

3. Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah Provinsi Jambi

Program ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dalam tentang pembangunan di Provinsi Jambi, melalui penyediaan sarana publikasi dan informasi kepada masyarakat, untuk itu dialokasikan dengan sebesar Rp5.410.944.000,- dengan tingkat realisasi Rp5.191.047.800,- atau setara dengan 95,94 %. Dari hasil pelaksanaan kegiatan ini, output yang dihasilkan media cetak baik berupa majalah, tabloid dan lain-lain serta sosialisasi penggunaan internet sebagai media publikasi pembangunan.

4. Program pengembangan pemetaan dan peningkatan kualitas sarana prasaran teknologi informasi

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan telekomunikasi serta penerimaan, pengiriman dan penyampaian berita sandi dan berita biasa. Adapun kegiatannya berupa peningkatan sarana dan prasarana komunikasi, untuk tahun 2010 penerimaan berita mencapai 2.207 surat dan pengiriman berita sebanyak 2.841 surat.

D. Biro Pemerintahan

Untuk tahun 2010, Biro Hukum Setda. Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.903.324.800,- dengan tingkat penyerapan sebesar Rp2.005.054.650,- atau 69,06 % yang diarahkan untuk melaksanakan 3 (tiga) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Fasilitas Pemerintahan dan Otda di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Kesatuan Bangsa

Tujuan program ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang berkualitas dan bertanggung jawab, menanamkan semangat kebangsaan, keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung program ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp2.253.884.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp1.379.849.750,- atau setara dengan 61,22 %.

Relatif rendahnya penyerapan anggaran tersebut dikarenakan, pada kegiatan Penataan Batas Wilayah, dari alokasi dana sebesar Rp857.900.000,- hanya terealisasi sebesar Rp126.415.050,- atau hanya 14,74 % dari pagu yang disediakan. Hal ini dikarenakan tidak dilaksanakannya Belanja Modal pembangunan tapal batas antar wilayah. Pelaksanaan kegiatan tersebut diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terciptanya kondisi daerah yang tentram, tertib, teratur serta terciptanya stabilitas daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Diketuinya batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik dilapangan.
- c. Meningkatnya pemahaman aparat penyelenggara administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- d. Meningkatnya optimalisasi dan sinkronisasi pengelolaan SIAK di Kab/Kota sehingga diperoleh persamaan persepsi dalam meningkatkan pelayanan dibidang kependudukan.
- e. Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa dalam provinsi Jambi.

Secara umum, permasalahan yang ditemui dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Dasar hukum yang digunakan untuk pelacakan dan pengukuran dilapangan belum pasti serta singkatnya waktu dalam pelaksanaan pelacakan, pengukuran dan pembuatan pilar batas utama.
- b. Belum seluruh Kabupaten/Kota dalam provinsi Jambi dalam penataan dokumen kependudukan dan catatan sipil berpedoman kepada Kepres No. 025 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
- c. terbatasnya kapasitas SDM aparatur yang capable dan professional, permasalahan atau kendala teknis dilapangan.
- d. Kurang maksimalnya kinerja camat dikarenakan sebagian besar camat tidak berlatar belakang pendidikan di bidang pemerintahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan BinteK untuk meningkatkan kinerja aparat ranting kab/kota se-Provinsi Jambi.
- b. Mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang PERDA dan Keputusan Kepala Daerah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Melaksanakan BinteK bagi para aparatur pengelola SIAK, pemahaman yang komprehensif terhadap system dan peraturan pelaksanaan administrasi kependudukan.
- d. Melaksanakan BinteK dan pelatihan bagi camat dan calon camat yang tidak berlatar belakang pendidikan pemerintahan.
- e. Meningkatkan koordinasi baik antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi maupun antar Pemerintah Perbatasan dalam rangkaantisipasi permasalahan-permasalahan pemerintahan secara umum.

2. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Dalam rangka mendukung peningkatan dan kelancaran tugas-tugas kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, untuk mewujudkan Provinsi, Kabupaten/Kota yang mandiri melalui kerja sama antar unsur Muspida, pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah lainnya. Pada tahun 2010, untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp568.950.800,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp545.014.900,- atau 95,79 %. Dari pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian program tersebut, diperoleh output yaitu terkoordinasi dan terkendalanya program/kegiatan lintas sektor dan kegiatan pusat dan daerah. Untuk meningkatkan sinergi pembangunan kedepan, maka perlu untuk meningkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas koordinasi antar Unsur Muspida dan antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personal aparat pemerintah. Alokasi anggaran pada tahun 2010 untuk program ini berjumlah Rp80.490.000,- yang terealisasi sebesar Rp80.190.000,- atau sebesar 99,63 %. Output dari program ini adalah tersedianya sarana pengelolaan administrasi untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

E. Biro Kesejahteraan Masyarakat

Pada tahun 2010, Biro kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda. Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.584.420.500,- dengan tingkat penyerapan sebesar

Rp5.239.781.667,- atau 93,83 % yang diarahkan untuk melaksanakan 2 (dua) program pembangunan sebagai berikut :

1. **Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama**

Program ini, secara umum bertujuan untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama, terpelihara dan termanfaatnya rumah ibadah serta kenyamanan para jamaah dalam beribadah sehingga terciptanya hubungan silaturahmi antar umat beragama dan antar umat seagama, terwujud dan terciptanya SDM yang islami. Untuk mencapai tujuan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp3.487.038.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp3.308.985.520,- atau terealisasi sebesar 94,89 %. Adapun output yang dihasilkan adalah terlaksanakannya Rakerda KUB dan temu tokoh-tokoh agama, terciptanya hubungan yang harmonis antar, intern dan antara umat beragama, terpantaunya dan koordinasi pelaksanaan pendidikan di PKP Al Hidayah dan terbinannya tahsinul quro' di Provinsi Jambi.

2. **Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat**

Program ini, secara umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera serta peningkatan wawasan nasionalisme masyarakat sebagai warga NKRI. Untuk mencapai tujuan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp2.097.382.500,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp1.930.796.147,- atau 92,06 %. Adapun output yang dihasilkan adalah terlaksananya penyuluhan tentang bahaya narkoba terhadap pelajar dan mahasiswa di kab/kota dalam Provinsi Jambi, terkoordinasinya bidang ketenaga kerjaan di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

F. Biro Organisasi

Pada tahun 2010, Biro Organisasi Setda. Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.912.794.500,- dengan tingkat penyerapan sebesar Rp2.542.881.100,- atau 95,70 % yang diarahkan untuk melaksanakan 8 (delapan) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini, secara umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi bidang kepegawaian di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp150.000.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp149.657.850,- atau terealisasi sebesar 99,77 %. Adapun output yang dihasilkan adalah terinventarisirnya data tentang PNS dilingkup Sekretaris Daerah baik tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, jumlah pegawai yang mutasi, jumlah PNS yang pensiun dan yang diberhentikan.

Secara umum permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kinerja program adalah belum disusunnya SOP pelayanan Administrasi. Untuk itu, sebagai solusi kedepan diupayakan melalui penyusunan SOP pelayanan administrasi.

2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi jabatan dan analisis jabatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp336.158.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp333.858.000,- atau 99,32 %. Adapun output yang dihasilkan adalah tersusunnya Peraturan Gubernur tentang instrumen analisis jabatan, tentang jenis dan jumlah tenaga fungsional. Permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya minat PNS untuk menduduki jabatan fungsional. Untuk itu, sebagai

solusinya dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan melaksanakan sosialisasi tentang peran dan fungsi jabatan fungsional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan disiplin aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp277.076.500,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp267.568.500,- atau 96,57 %. Adapun output yang dihasilkan adalah tersedianya sarana dan prasarana peningkatan disiplin aparatur. Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran aparatur untuk bersikap disiplin dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku. Untuk itu, sebagai upaya solusi pemecahan masalah tersebut, adalah dengan mengintensifkan Pengawasan Melekat dan melaksanakan peraturan tentang disiplin PNS secara proporsional.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur lingkup Setda Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp250.000.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp246.438.700,- atau 98,58 %. Adapun output dari pelaksanaan anggaran tersebut adalah terkirimnya PNS dilingkungan Setda Provinsi Jambi yang mengikuti diklat, kursus dan lain-lain.

5. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan kelembagaan daerah dan ketatalaksanaan yang professional dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp280.000.000,- yang teralisasi sebesar Rp268.806.600,- atau 96,00 %. Adapun output dari pelaksanaan kegiatan pada

program ini adalah tersusunnya Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Tupoksi OPD. Dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut, masih adanya TUPOKSI yang harus dikaji ulang agar jangan tumpang tindih. Sebagai upaya pemecahan masalahnya, maka perlu untuk dilaksanakan evaluasi tentang TUPOKSI SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

6. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp280.000.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp275.152.500,- atau 98,27 %. Adapun output dari pelaksanaan anggaran tersebut adalah tersusunnya LAKIP, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan terlaksananya Bintek SAKIP. Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah kedepan, dilakukan dengan melaksanakan koordinasi dan pembinaan secara intensif.

7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan dari program ini adalah untuk kualitas pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparatur pelayanan publik dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp194.600.000,- yang teralisasi sebesar Rp151.007.626,- atau sebesar 77,60 %. Rendahnya realisasi pelaksanaan anggaran pada program ini, dikarenakan tidak diselenggarakannya kegiatan sosialisasi Perda Pelayanan Publik. Adapun output dari pelaksanaan kegiatan pada program ini adalah terlaksana dan tersusunnya laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

8. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi dan Kab/Kota. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp144.960.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp138.099.500,- atau 95,27 %.

G. Biro Sumberdaya Alam

Untuk tahun 2010, Biro Sumberdaya Alam mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.624.525.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp1.185.979.900,- atau 95,85 % yang diarahkan untuk melaksanakan 7 (tujuh) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Alam Dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran untuk program ini Rp370.000.000,- dengan tingkat realisasi mencapai Rp350.065.000,- atau setara dengan 94,61 %. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terlaksananya kegiatan Agro Expo, keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Se Dunia di NTB, terlaksananya Hari Krida Pertanian Tingkat Provinsi, Pra Penas di Kaltim.
- b. Terlaksananya Sosialisasi UU No. 16 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terlaksananya Kegiatan Pembinaan Penyuluhan di 11 Kabupaten/Kota.
- c. Terpantaunya penyaluran pupuk bersubsidi serta kegiatan lingkup pertanian.

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pembinaan terhadap kelompok Desa Mandiri Pangan.

- b. Kurangnya Koordinasi Instansi terkait dalam peningkatan ketahanan pangan di Kab/Kota dalam Provinsi Jambi.
- c. Kurangnya Tenaga Penyuluh di Kab/Kota baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya.
- d. Belum terlaksananya pengembangan komoditi tanaman pangan yang merata di Provinsi Jambi.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Agar Pemerintah Kab/Kota mengadakan pembinaan terhadap kelompok Desa Mandiri Pangan serta mengadakan Koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kab/Kota dalam Provinsi Jambi.
- b. Agar Pemerintah Kab/Kota mengusulkan tenaga Penyuluh pada penerimaan pegawai agar dapat dimasukan formasi tenaga penyuluh pada penerimaan pegawai yang akan datang.
- c. Pemerintah Kab/Kota bekerjasama dengan Instansi terkait agar dapat mengawasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada pengecer yang ada di daerah.

2. **Pembinaan, Fasilitas Pembangunan di Bidang Pertambangan dan Energi**

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran untuk program ini Rp420.000.000,- dengan tingkat realisasi mencapai Rp401.987.300,- atau 95,71 %. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut:

- a. Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sektor pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- b. Terlaksananya rapat fasilitasi instansi terkait pengaduan masyarakat atas kerusakan jalan dan jembatan diakibatkan

pengangkutan batu bara PT. NTC di daerah Lubuk Mengkuang Kab. Bungo.

- c. Terlaksananya peninjauan dan pemantauan aktivitas penambangan emas ilegal (PETI) di Desa Tambun Arang Kec. Muara Tabir Kab. Bungo.
- d. Terlaksananya koordinasi dan monitoring pengelolaan SDA Pertambangan Mineral dan Batu Bara ke Kabupaten Sarolangun, Merangin, Tanjab Barat, Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pendistribusian paket LPG 3 Kg di Provinsi Jambi belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2010.
- b. Masih kurang lengkapnya data yang berkaitan dengan permasalahan pertambangan mineral dan batu bara yang ada didaerah.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke Ditjen. Migas Kementerian ESDM selaku penanggung Jawab Program Konversi Minyak Tanah ke Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg.
- b. Memfasilitasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Bidang Geologi dan SDM di Provinsi Jambi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta tercapainya pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan serta pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pengembangan listrik pedesaan, pengembangan desa

mandiri dan pengembangan energi baru dan terbarukan, melaksanakan sosialisasi penyusunan FS PLTMH.

3. **Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Ekonomi di Bidang Kelautan dan Perikanan**

Untuk mendukung pencapaian program, tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp125.000.000,- dengan tingkat realisasi mencapai Rp119.787.500,- atau 95,83 %. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Koordinasi Bantuan Benih Ikan dan Perikanan Budidaya.
- b. Terfasilitasinya Kerjasama Kemitraan antara Pemprov. Jambi dengan PT. Pertamina (Perseroan).

Untuk lebih meningkatkan kinerja program pada masa yang akan datang, diupayakan untuk meningkatkan peran melalui fasilitasi, koordinasi dan evaluasi pengelolaan Sumber Daya Alam di Bidang Kelautan dan Perikanan dan terlaksananya pembangunan Sumber Daya Alam Bidang Kelautan dengan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Jambi dan seluruh stakeholders terkait lainnya.

4. **Program pembinaan dan fasilitas pembangunan ekonomi di bidang Lingkungan Hidup**

Untuk mendukung pencapaian program, tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp125.000.000,- dengan tingkat realisasi mencapai Rp111.737.500,- atau 89,39 %. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terjalinnnya koordinasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam pengendalian pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Terjalinnnya konsultasi dengan Pemerintah Pusat dalam pengendalian pengelolaan lingkungan hidup.

- c. Memfasilitasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan dinas/instansi terkait.

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berkaitan erat dengan kegiatan pembangunan ekonomi yang dikelola tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- b. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan hidup.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota dalam upaya pengelolaan lingkungan guna terciptanya kegiatan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.
- b. Melakukan peningkatan pendekatan masyarakat terus menerus pentingnya kelestarian lingkungan.

5. Program Pengembangan Bidang Pertanian

Untuk mendukung pencapaian program, tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp125.000.000,- dengan tingkat realisasi mencapai Rp124.975.000,- atau 99,98 %. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terfasilitasinya kegiatan integrasi peternakan dengan tanaman Komoditi Sawit (PT.PN VI) sebanyak 40 ekor bibit ternak Sapi Bali Betina.
- b. Terfasilitasinya kerjasama PT. Jamsostek dengan Pemprov. Jambi dalam bentuk paket kredit bunga rendah (6 %/tahun), untuk pengembangan dan pembangunan peternakan.

- c. Memfasilitasi perubahan pola gaduhan ternak agar lebih memberikan keuntungan bagi petani yaitu berupa Pergub No. 7 Tahun 2010 tentang Pola Gaduhan Ternak Pemerintah di Prov, Jambi.

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah masih banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit, migas dan pertambangan lainnya yang belum memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)/ Community Development (CD)* untuk membantu dalam pengembangan pembangunan peternakan di Prov. Jambi.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi percepatan pencapaian swasembada daging di Provinsi Jambi dengan mencari sumber pendanaan dari pihak ketiga dengan pola integrasi Peternakan dengan Perkebunan dan Tanaman dan Ketahanan Pangan.

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Sumber Daya Alam di Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Untuk mendukung pencapaian program, tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp305.000.000,- dengan tingkat realisasi mencapai Rp302.312.400,- atau 99,12 %. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terfasilitasinya upaya penyelesaian konflik lahan perkebunan yang meliputi : penyelesaian masalah LU II Kuamang Kuning Unit XIII Desa Kota Raja Kab. Merangin, antara PT. TLS dengan KUD Sadar, Kab. Ba tang Hari dan

penyelesaian masalah antara SAD dengan PT. Asiatic Persada.

- b. Terkoordinasinya Pengendalian kebakaran hutan dan gangguan usaha perkebunan.
- c. Terpantaunya dan terevaluasinya pelaksanaan penetapan harga TBS Kepala Sawit di Provinsi Jambi sebanyak 6 PKS yaitu ; PKS Inti Indosawit Subur, PT. Agrowiyana, PT. Kirana Sekernan, PT.Perkebunan Nusantara VI, PT. Kresna Duta Agroindo dan PT. Satya Kisma Utama.

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah :

- a. Kurang dipahaminya aturan kehutanan oleh aparat yang berkedudukan disekitar kawasan hutan, sehingga ada aparat yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah di kawasan hutan tersebut.
- b. Data Pendukung dalam rangka lahan penyelesaian permasalahan perkebunan di beberapa Kab. masih kurang.
- c. Koordinasi antar Instansi terkait bidang perkebunan masih kurang optimal.
- d. Masih lemahnya pemahaman tentang aturan-aturan terkait tentang kehutanan baik oleh masyarakat maupun aparat terkait.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Meningkatkan fasilitasi penyelesaian konflik kawasan hutan dengan pemilik izin Hutan.
- b. Memfasilitasi penyelesaian penggunaan kawasan hutan dengan bidang usaha pertambangan dan perkebunan.

- c. Memfasilitasi penyelesaian lahan perkebunan dan masalah Lahan Usaha (LU) II Kuamang Kuning dan konflik lahan perkebunan lainnya di Kab/Kota dalam Provinsi Jambi.

7. Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Sumber Daya Alam

Untuk mendukung pencapaian program, tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp179.725.000,- dengan tingkat realisasi mencapai Rp170.441.100,- atau 94,83 %. Dari pelaksanaan program tersebut, output yang dihasilkan adalah terkoordinirnya dan terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan pada Biro Sumberdaya Alam Setda. Provinsi Jambi sesuai dengan TUPOKSI. Secara umum tidak ada permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas-tugas pada Biro Sumberdaya Alam Setda. Provinsi Jambi.

2.2.1.18.2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Untuk mencapai sasaran program ini antara lain dilaksanakan melalui Bintek dan implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan terlaksananya program ini adalah meningkatnya kemampuan profesionalisme dan keterampilan teknis untuk aparatur Sekretariat DPRD.

2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

Untuk mencapai sasaran program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD didukung oleh kegiatan Pembahasan Ranperda, kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, Kegiatan Rapat-rapat Paripurna Dewan, kegiatan Kunjungan Kerja dan Peninjauan Lapangan Pimpinan dan

Anggota DPRD, kegiatan Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan, kegiatan Reses, kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan.

Tujuan terlaksananya program ini adalah terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah, terakomodirnya aspirasi masyarakat dan terhimpunnya berbagai bahan masukan dari mitra kerja untuk dicarikan solusinya, terwujudnya Keputusan Dewan Hasil Rapat, terlaksananya rapat-rapat Paripurna Dewan, terwujud hasil penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai input dalam penetapan kebijakan pembangunan tahun yang akan datang, dapat diwujudkan fungsi terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi Jambi, bertambahnya pengetahuan/wawasan, serta meningkatnya kemampuan profesionalisme bagi Anggota DPRD.

2.2.1.18.3. Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1. Program Kajian dan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Untuk mencapai sasaran program Penelitian dan Pengembangan didukung oleh kegiatan identifikasi sumberdaya lokal dalam menunjang program penganekaragaman pangan di Provinsi Jambi; kegiatan studi konservasi lahan sawah di Provinsi Jambi ; Kegiatan Kajian trend dan Estimasi Anggaran Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan di Provinsi Jambi; Kegiatan kajian pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jambi ; Kegiatan sinkronisasi dan evaluasi tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang terhadap kepuasan pelanggan; Kegiatan kajian sosio demografi dan Keluarga Berencana dengan kesehatan reproduksi di Kabupaten Muaro Jambi; kajian dampak pengeluaran dana pembangunan pada sektor pertanian terhadap output sektoral di Provinsi Jambi; kegiatan Analisa respon petani terhadap penerapan teknologi

trichokompos di provinsi Jambi; Kajian warisan terhadap anak perempuan.

Dengan terlaksananya program ini maka teridentifikasi estimasi anggaran sumberdaya manusia bidang pendidikan; dapat memberikan rekomendasi kepada PEMDA tentang berbagai Isue yang bersifat aktual dan mendesak menyangkut suatu kebijakan; dapat mengarahkan masyarakat tentang perlunya Keluarga berencana dan perawatan alat reproduksi; dapat diketahui permasalahan yang ada dilapangan dalam penerapan tehnologi pupuk organik, dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang dampak pengeluaran dana pembangunan sektor pertanian. Permasalahan yang dihadapi dalam program ini adalah keterbatasan dan kurangnya tenaga fungsional peneliti dalam melaksanakan kegiatan dengan solusinya adalah merekrut dari CPNS dijadikan tenaga fungsional peneliti dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi melalui usulan Gubernur Jambi.

2. Program Kelembagaan/koordinasi dan kerjasama

Untuk mencapai sasaran program kelembagaan,koordinasi dan kerjasama dilakukan beberapa kegiatan yaitu ;

1. Rakornas dan Rakorlitbangda yang bertujuan meningkatkan peran dan fungsi balitbangda serta isu-isu strategis nasional.
2. Pengembangan kelembagaan HKI di provinsi Jambi yang bertujuan terlaksananya data inventarisasi hak paten dan hak cipta dalam provinsi Jambi.
3. Operasional pengembangan kelembagaan sentra promosi dan pemasaran IPTEK yang bertujuan terlaksananya promosi hasil-hasil teknologi dalam provinsi Jambi.
4. Forum Komunikasi Kelitbangan Daerah (FKKD) yang bertujuan terhimpunnya data kegiatan penelitian yang dilaksanakan baik oleh perguruan tinggi maupun pihak swasta.

2.2.1.18.4. Inspektorat Provinsi Jambi

Guna mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, efisien, efektif melalui pengawasan yang profesional sebagaimana visi Inspektorat Provinsi Jambi pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp5.749.780.500,00 yang tersebar pada 7 program kerja inspektorat yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sistem Pengawasan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Selanjutnya guna mendukung program tersebut telah dilaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam rangka mencapai misi Inspektorat Provinsi Jambi yaitu 1) mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen pemerintah yang efisien dan efektif, 2) mendorong terwujudnya akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah serta terciptanya aparatur yang bersih, 3) meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan, 4) menumbuhkembangkan sinergi pengawasan di Provinsi Jambi.

Secara keseluruhan program tersebut telah dilaksanakan dengan capaian sebesar Rp4.620.569.988,00 atau 80,36%. Secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.12 Capaian Program Inspektorat Tahun 2010

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.329.985.800	1.856.671.988	79,69
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	256.700.500	86.361.000	33,64
3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	306.958.500	158.385.500	51,60
4	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1.821.243.500	1.537.907.000	84,44
5	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan System Pengawasan	221.170.000	204.330.000	92,39
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	773.722.200	737.314.500	95,29
7	Program peningkatan disiplin aparatur	40.000.000	39.600.000	99,00
Jumlah		5.749.780.500	4.620.569.988	80,36

Kegiatan Pemeriksaan Reguler yang termasuk dalam program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan merupakan salah satu tugas dan fungsi inspektorat dialokasikan anggaran sebesar Rp1.641.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.502.315.000,00 atau 91,54 %. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dengan tujuan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah, disiplin aparatur dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta mendeteksi secara dini terhadap kecurangan pengelolaan keuangan daerah. Hasil pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan pemeriksaan/pembinaan terhadap 107 objek pemeriksaan (Obrik) dengan 107 penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau 94,69% dari target yang telah ditetapkan. Secara rinci dapat digambarkan pada berikut.

Tabel 2.13. Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2010

No	PROV/KAB/KOTA	Pelaksanaan	Realisasi	
			Obrik	LHP
A.	Pemeriksaan Kas dan Stock Opname	Januari	39	39
B.	Reviu Laporan Keuangan	Maret	1	1
C.	Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi	Maret s/d April	2	2
D.	Reguler Pemrov Jambi	April s/d Des	44	44
E.	Reguler Kab/Kota	Mei s/d Sept	11	11
	1.Kabupaten Muaro Jambi	September s/d Oktober	1	1
	2.Kabupaten Batanghari	Juli s/d Agust	1	1
	3.Kabupaten Merangin	September	1	1
	4.Kabupaten Tanjab-Bar	Mei	1	1
	5.Kabupaten Bungo	September	1	1
	6.Kabupaten Tebo	Juni s/d Juli	1	1
	7.Kabupaten Tanjab-Tim	-	-	-
	8.Kabupaten Sarolangun	September s/d Oktober	1	1
	9.Kabupaten Kerinci	September	1	1
	10.Kota Jambi	September s.d Oktober	1	1
			107	107

Pemeriksaan dari Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan BPK di Provinsi Jambi yang dituangkan dalam rekomendasi terhadap temuan telah diupayakan tindaklanjutnya dengan dengan tujuan untuk memperoleh status hasil pemeriksaan. Adapun Tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Provinsi Jambi pada tahun 2010 pada SKPD Provinsi Jambi diperoleh status penyelesaian tindak lanjut sebesar 20,05%, dalam proses sebesar 11,74% dari 188 temuan dengan 373 rekomendasi, jumlah kerugian negara telah ditarik sebesar Rp31.515.873,00, dan jumlah kewajiban setor kepada negara/daerah hanya terealisasi sebesar Rp9.560.000,00 atau sebesar 9,1% dari seharusnya kewajiban setor sebesar Rp960.716.152,76.

Pada tahun 2009 tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi pada Pemerintah Kabupaten/Kota telah selesai ditindaklanjuti sebesar 4,02%, dalam proses sebesar 1,11% dari jumlah temuan sebanyak 447 temuan dengan 784 rekomendasi, sedangkan kewajiban setor kepada negara/daerah hanya terealisasi sebesar Rp1.445.236,00 atau sebesar 0,14% dari Rp1.040.754.226,35 kewajiban setor. Begitupula tindak lanjut hasil pemeriksaan pada tahun 2010 hanya dapat diselesaikan sebesar 12,41%, dalam proses sebesar 9,98% dari 282 temuan dengan 505 rekomendasi, sedangkan untuk kewajiban setor kepada Negara/Daerah belum ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota sebesar Rp528.870.839,00.

Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri periode 2010 pada SKPD Provinsi Jambi terdapat 82 temuan dengan 120 rekomendasi telah ditindaklanjuti sebesar 21,95% dan dalam proses sebanyak 14,63%. Untuk hasil pemeriksaan BPK-RI dalam periode tahun 2005-2009 telah dilakukan tindak lanjut dengan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.14. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2005 s.d 2009

No	Jenis Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Temuan Pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti		
		JML	NILAI	JML	NILAI	JML	ADM	Keuangan
1.	Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi TA 2005	22	29.198.453.987,17		29.198.453.987,17	2	1	178.560.972,00
2.	Belanja Provinsi Jambi TA 2007	16	-		27.917.448.520,88	1	0	273.895.070,00
3.	Laporan Keuangan Daerah Tahun 2007	28	34.813.191.954,76	72	34.813.191.954,76	3	2	5.879.869.208,83
4.	Laporan Keuangan Daerah Tahun 2008	14	2.792.103.273,33	44	2.792.103.273,33	3	1	517.196.182,36
5.	Pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi TA 2007/2008	13	203.722.563.227,20	27	1.056.087.719,00	2	1	163.429.000,00
6.	Belanja Provinsi Jambi TA 2009	7	4.835.300.459,10	28	4.835.300.459,10	5	0	1.916.690.398,96
7.	Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi TA 2009	28	1.309.837.939,12	64	1.309.837.939,12	10	5	744.114.578,49
Jumlah		128	276.671.450.840,68	322	101.922.423.853,36	26	10	9.673.755.410,64

Selain kegiatan yang bersifat rutinitas dan terjadual, Inspektorat Provinsi Jambi juga melaksanakan tugas yang bersifat insidental

berupa penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat baik yang ditujukan kepada Gubernur maupun kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri yang penanganannya dilimpahkan oleh MenPAN dan Inspektorat Jendral Depdagri, BKN, Sekretariat Negara kepada Gubernur Jambi. Adapun jumlah surat pengaduan sebanyak 48 kasus dengan tingkat penyelesaian sebanyak 5 kasus pengaduan dalam katagori terbukti.

Beberapa penyebab utama yang menjadi permasalahan selama melakukan program dan kegiatan prioritas Inspektorat Provinsi Jambi selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Jumlah Personil yang memahami kasus-kasus tertentu.
2. Adanya tahapan penyelesaian kasus yang memerlukan pendalaman sehingga memerlukan waktu yang relatif lama.
3. Masih terdapat Objek Pemeriksaan (SKPD) yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap Obrik yang tidak/belum melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Kurangnya pemahaman Obrik terhadap Rekomendasi/saran dari temuan pemeriksaan.
5. Sulitnya menindaklanjuti temuan yang berhubungan dengan pihak ketiga

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Mengikutkan personil Inspektorat Provinsi Jambi mengikutkan Diklat khusus seperti Diklat Audit investigasi.
2. Mengupayakan penyelesaian kasus tahapan dan waktu yang lebih singkat
3. Perlu adanya sanksi yang jelas dan tegas sehubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan, baik yang berhubungan dengan pemeriksaan oleh BPK maupun oleh APFP.

4. Menyarankan SKPD agar lebih pro aktif berkoordinasi dengan Lembaga pemeriksa, baik APFP maupun BPK sehingga tindak lanjut dapat dilaksanakan dengan cepat
5. Mengupayakan pola yang tepat menghubungkan antara Obrik/SKPD dengan pihak ketiga dalam menindaklanjuti temuan yang ada.

2.2.1.18.5. Kantor Perwakilan

Kantor Perwakilan Pemerintahan Provinsi Jambi di Jakarta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga provinsi (desentralisasi) dalam bidang penghubung yang menjadi kewenangan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugas pembantuan (desentralisasi) yang diberikan oleh pemerintahan kepada Gubernur.

Pada tahun 2010 program yang dilaksanakan berupa kegiatan rutin pemeliharaan dan lain-lain yang bersifat administrasi. Dalam hal kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui retribusi sewa mess Jambi di Jakarta menunjukkan hasil yang meningkat dua tahun terakhir, dimana pada tahun 2008, dari target Rp1.600.000.000,- terealisasi sebesar Rp1.708.050.000 atau meningkat 6,75 %. Kemudian pada tahun 2009, dari target Rp1.650.000.000,- terealisasi sebesar Rp1.721.625.000,- atau meningkat sebesar 4,0 %. Pada tahun 2010 target Rp1.700.000.000,- terealisasi sebesar Rp1.913.425.000,- meningkat 12,5 % dari target.

Tabel 2.15. Data Kontribusi Retribusi Sewa MESS Jambi Tahun 2008 – 2010

Tahun	Target	Realisasi	%tase Peningkatan
2008	1.600.000.000.	1.708.050.000.	6,75 %
2009	1.650.000.000.	1.721.625.000.	4,0 %
2010	1.700.000.000.	1.913.425.000.	12,5 %

Setelah melihat perkembangan selama tahun 2008-2010, maka terdapat beberapa hal yang mendesak untuk dibenahi antara lain :

1. Perlu adanya Perda tentang pengelolaan Mess Jambi sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset yang berimplikasi terhadap peningkatan penerimaan aset daerah. Terkait dengan asrama mahasiswa yang ada di Jakarta, Bandung, Bogor dan Yogyakarta, perlu juga dipertimbangkan untuk membuat Perda tentang pengelolaannya agar jelas dalam hal pembiayaan operasional asrama-asrama tersebut.
2. Peningkatan sarana dan prasarana Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi dan Anjungan Jambi di TMII Jakarta, mengingat kebutuhan yang tinggi akan penyewaan kamar mess dan untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor wisata dari hasil pelaksanaan promosi wisata dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

2.2.1.18.6. Dinas Pendapatan Daerah

Dalam rangka menunjang dan membantu program kerja menuju suksesnya Jambi EMAS (ekonomi maju, aman, adil dan sejahtera) Dinas Pendapatan Provinsi Jambi menetapkan visi yaitu pendapatan daerah 2,5 trilyun tahun 2015, visi tersebut merupakan pernyataan Dinas Pendapatan Provinsi Jambi untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah. Guna mewujudkan visi tersebut

maka telah ditetapkan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jambi yaitu 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan Menggali potensi Pajak dan Retribusi Daerah 2) Meningkatkan objek Pajak dan Retribusi Daerah 3) Pelayanan Prima kepada Wajib Pajak, Retribusi, Sumbangan Pihak Ke III dan Penerimaan Lainnya 4) Peningkatan kualitas aparatur 5) Peningkatan kualitas sistem informasi.

Strategi yang ditetapkan dalam pencapaian misi Dinas Pendapatan Provinsi Jambi sehingga sehingga realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dapat melebihi target yang telah ditetapkan adalah 1) Pendekatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi daerah, 2) Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 3) Meningkatkan sumber daya aparatur melalui pelatihan, penataran dan kursus dan 4) Meningkatkan pendapatan daerah sedangkan kebijakan guna mendukung strategi dimaksud maka telah ditetapkan kebijakan yang akan diambil yaitu 1) Intensifikasi pemungutan pendapatan daerah melalui pelaksanaan kegiatan operasional, 2) Ekstensifikasi jenis penerimaan berdasarkan potensi ekonomi daerah 3) Pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan pemungutan pendapatan daerah 4) Meningkatnya kualitas perencanaan penerimaan secara optimal berdasarkan potensi penerimaan, 5) Melakukan pengkajian terhadap situasi ekonomi dan sosial dalam rangka penerapan berbagai kebijakan dinas agar sesuai dengan kondisi masyarakat 6) Meningkatkan kualitas data secara optimal sebagai bahan penyusunan kebijakan bahan laporan.

Pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran belanja langsung pada Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp10.346.275.000,00 yang tersebar pada 5 program kerja Dinas Pendapatan Daerah yaitu 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur, 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya guna mendukung program tersebut telah dilaksanakan 19 kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Provinsi Jambi sebagai Instansi Pengelola Pungutan Pendapatan Daerah telah melakukan langkah-langkah dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan eksensifikasi sumber-sumber penerimaan yaitu melalui :

- 1) Menjaring kendaraan yang tidak membayar pajak, dilaksanakan dengan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Melakukan pemantauan, meneliti dan mengevaluasi seluruh aktivitas peningkatan Pajak/Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Aparat Dinas Pendapatan Provinsi Jambi maupun Instansi terkait, baik yang berada di Kabupaten/Kota dengan cara administratif maupun turun langsung ke lapangan.
- 3) Melaksanakan pendataan ulang objek PBB.
- 4) Melaksanakan pendataan ulang objek air permukaan dan air bawah tanah
- 5) Membuat surat kepada seluruh Dinas/Instansi agar dapat melaporkan pembayaran PBB seluruh karyawan / karyawan kepada Gubernur Jambi.
- 6) Melakukan upaya jemput bola melalui Samsat keliling ke beberapa kecamatan yang potensial Wajib Pajak
- 7) Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan juga melalui surat Bupati/Walikota, Brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya antara lain agar masyarakat mengetahui, mengerti dan patuh terhadap kewajibannya akan pajak.

- 8) Pendataan penjualan bahan bakar minyak dalam upaya peningkatan PBB-KB
- 9) Sosialisasi melalui baleho mendata objek kekayaan daerah yaitu sebagai objek retribusi
- 10) Mensosialisasikan produk hukum Peraturan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 11) Akurasi dan pemuktahiran data untuk menggali sumber penerimaan yang pelaksanaan pungutannya masih belum optimal.
- 12) Melaksanakan penagihan melalui Samsat bertandang

Disamping itu Dinas Pendapatan Daerah telah melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi dan mitra kerja, serta melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat kewilayahan berupa :

- 1) Mengadakan pertemuan dengan dealer kendaraan bermotor, alat berat, dan perusahaan perkreditan serta pengusaha show room kendaraan bekas se-Provinsi Jambi.
- 2) Melaksanakan Rapat Tim Pembina SAMSAT dan Tim Intensifikasi PBB.
- 3) Bekerja sama dengan Pihak Kepolisian (Ditlantas Polda) melaksanakan razia kendaraan bermotor untuk menjaring kendaraan bermotor yang masih bernomor polisi luar daerah
- 4) Membentuk pos pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 5) Melaksanakan Raker Tim Intensifikasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dengan PT.Pertamina UP II Palembang.
- 6) Mengadakan pertemuan dengan Dealer Kendaraan Bermotor (Show Room)
- 7) Peningkatan status kantor Samsat

- 8) Melaksanakan koordinasi secara berkelanjutan dengan dinas/instansi yang melaksanakan pungutan retribusi daerah.
- 9) Memberikan informasi kepada seluruh dinas/instansi yang terkait dengan retribusi daerah agar dnas/instansi yang bersangkutan dapat mengevaluasi penerimaannya pada setiap bulan.
- 10) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait pada kantor SAMSAT yaitu dengan bekerjasama dengan Pihak Kepolisian dan PT. Jasa Raharja (Persero) dengan menyelenggarakan Razia Pajak Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan razia ini sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak (WP) yang menunggak atau tidak membayar pajak tepat pada waktunya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi.

2.2.1.18.7. SEKRETARIAT KORPRI

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah suatu wadah aktualisasi bagi anggota Korpri, keberlangsungan, dan kesinambungan pemerintahan sangat bergantung pada profesionalisme para anggota Korpri dalam menjalankan rencana, program dan kebijakan pemerintah.

Korpri Provinsi Jambi dibentuk sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan pelantikan telah dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2010.

Anggota Korpri Provinsi Jambi pada Tahun 2010 berjumlah 6341 orang yang sangat potensial jika diberdayakan dengan optimal. Dalam hal ini korpri menjadi sarana sosialisasi peraturan-peraturan terpadu dalam bidang administrasi, Pemerintah dan pembangunan sehingga para anggota korpri senantiasa berada selangkah didepan dalam menyikapi perubahan dan perkembangan pemerintah yang dewasa ini terus berkembang secara dinamis.

1. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur.

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kualitas dari aparatur pemerintah dengan meningkatkan pengetahuan dan wawasan berfikir dari aparatur.

Kegiatan ini direalisasikan dengan mengikuti pelatihan PPK, PPTK dan bendaharawan pengeluaran, menghadiri rapat koordinasi dewan pengurus Korpri Nasional.

Dengan terlaksananya program ini diharapkan aparatur korpri dapat lebih potensial dalam menunjang roda pemerintahan di provinsi Jambi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam pelaksanaan program ini diadakan pengadaan kendaraan Dinas untuk menunjang operasional kegiatan di kantor Korpri.

Sehubungan dengan baru terbentuknya Sekretariat KORPRI di Provinsi Jambi maka di Tingkat Kabupaten belum ada sekretariat Korpri yang merupakan perpanjangan tangan dari Korpri provinsi sehingga sulit dalam mengadakan pembinaan di kabupaten, untuk mengatasi permasalahan tersebut Dewan Pengurus Korpri provinsi telah melakukan upaya sosialisasi agar membentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

2.2.1.19.KEPEGAWAIAN

2.2.1.19.1. Badan Kepegawaian Daerah

Pada TA 2010 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mendapat anggaran APBD Provinsi Jambi, sebagaimana tertera pada tabel 4.36 yang digunakan untuk mendanai program;

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Untuk mencapai sasaran program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu

kegiatan Seleksi Calon Pejabat Struktural serta kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah. Tujuan program ini adalah untuk pengembangan kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) aparatur yang profesional dan terampil guna mewujudkan pedoman kerja bagi seluruh aparatur.

Kepesertaan Diklatpim Tk. II Provinsi Jambi dilaksanakan oleh Bidang SPIMNAS Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI bekerjasama dengan Bandiklatda Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah Pejabat Eselon II yang mengikuti Diklatpim Tk. II sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, dan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Untuk mencapai sasaran program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur didukung delapan kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.

Pada kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, telah dibangun Sistem Informasi Kepegawaian dengan bentuk keluaran satu laporan, yaitu DUK. Untuk pengembangan selanjutnya adalah membangun aplikasi yang dapat menghasilkan berbagai laporan yang akan dipergunakan oleh pimpinan dalam mengambil keputusan. Untuk itu terdapat anggaran belanja yang direvisi, dan akan digunakan pada triwulan ke-4 tahun anggaran 2010. Pada Anggaran perubahan ini terdapat anggaran sebesar Rp219.769.750,- untuk belanja modal pengadaan perangkat Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Sesuai amanah Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008, bahwa untuk proses pemberian Nomor Indentitas PNS (NIP), Pemberian

Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat PNS, Penetapan Keputusan Pensiun PNS dan Peremajaan Data Kepegawaian PNS dilakukan menggunakan Sistem Aplikasi Komputer yang terintegrasi antara BKN, Kantor Regional BKN dan Instansi Pemerintah Daerah (BKD). Diharapkan setelah proses pengadaan perangkat pendukung SAPK dan jaringan bersama dengan PT. Telkom, akan dilanjutkan dengan validasi data PNS berdasarkan Unit organisasi dan pangkat.

2. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS

Pada keadaan sampai dengan bulan Juli 2010, kegiatan seleksi CPNS belum dimulai, tetapi penyusunan formasi dan penyampaian usulan tambahan formasi CPNS telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Yang perlu dilaksanakan sampai dengan akhir Bulan Agustus 2010 adalah pendataan tenaga honorer dengan ketentuan berpedoman kepada surat edaran Menpan nomor 5 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah dengan persetujuan tambahan formasi sebanyak 371 orang, terdiri dari Tenaga Kesehatan sebanyak 11 orang, Tenaga Kesehatan 90 orang dan Tenaga Teknis 270 Orang.

3. Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi

Kegiatan pemberian satyalancana karya satya sampai dengan akhir bulan Juni 2010 telah diusulkan untuk 10 tahun sebanyak 114 orang, 20 tahun sebanyak 181 orang, dan 30 tahun sebanyak 37 orang.

4. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS.

Terhadap penyelesaian kasus-kasus PNS, dapat dikategorikan 3 (tiga) jenis; antara lain hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan sebanyak 2 (dua) orang dan teguran tertulis

sebanyak 2 (dua) orang. Hukuman disiplin sedang tidak ditemukan serta hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebanyak 2 (dua) orang.

Proses pemeriksaan terdapat 2 (dua) kasus berdasarkan laporan/pengaduan, dimana kedua kasus tersebut dugaan melakukan perkawinan kedua tanpa izin atasan. Pada pemberhentian pembayaran gaji, terdapat 2 (dua) orang PNS yang keduanya masih dalam proses pemberhentian. Penetapan kembali tenaga honorer Pemerintah Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2010 meliputi 14 SKPD selesai diproses, 3 SKPD masih dalam proses

5. Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Sampai dengan pertengahan bulan Juli 2010, seleksi penerimaan Calon Praja IPDN telah melalui 5 (lima) tahapan, dengan rincian calon seleksi yang memenuhi syarat administrasi sebanyak 365 orang, yang memenuhi syarat psikologi sebanyak 192 orang, yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 180 orang, yang memenuhi syarat kesemaptaaan sebanyak 125 orang. Sedangkan hasil tes akademik sebanyak 38 orang dan berhak mengikuti PANTUKHIR di Kampus IPDN Jatinangor. Setelah pelaksanaan PANTUKHIR, jumlah putra-putri asal Provinsi Jambi yang dinyatakan lulus sebagai Calon Praja IPDN sebanyak 38 orang.

6. Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang meliputi sub kegiatan Ujian Dinas yang diikuti oleh 188 orang Ujian Dinas Tingkat I dan 143 orang untuk peserta Ujian Dinas Tingkat II, pada sub kegiatan pemberian bantuan mahasiswa tugas belajar meliputi 1 orang untuk PNS tugas belajar S.1, 14 orang untuk PNS tugas belajar S.2, dan 9 orang untuk PNS tugas belajar S.3.

7. Kegiatan Seleksi Kenaikan Pangkat dan Proses Seleksi Pensiun Bagi PNS

Sampai dengan periode 1 April 2010, jumlah PNS yang diusulkan kenaikan pangkat meliputi Pemerintah Provinsi Jambi terdiri dari pangkat/golongan IV/b kebawah sebanyak 764 orang sedangkan untuk pangkat/golongan IV/c keatas sebanyak 7 orang.

PNS Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi terdiri dari pangkat/golongan IV/b kebawah sebanyak 905 orang sedangkan untuk pangkat/golongan IV/c keatas sebanyak 37 orang. Jumlah keseluruhan sebanyak 1.713 orang. Penyelesaian usul pensiun PNS dilakukan ke BKN Regional VII Palembang sebanyak 270 orang dan BKN Pusat dan Sekretariat Negara sebanyak 24 orang.

8. Kegiatan Pengambilan Sumpah Janji PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

2.2.1.19.2. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Diklat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan program dan kegiatannya mengacu pada visi kerjanya.

Pada tahun anggaran 2010 telah dianggarkan dana APBD Provinsi Jambi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi seperti tertera pada tabel 4.37, yang digunakan untuk mendanai program;

1. Program Diklat Manajemen Pemerintahan

Program Diklat Manajemen Pemerintah ditujukan untuk mendukung kapasitas dan kemampuan aparatur di dalam

mengemban tugas penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat, penegak disiplin dan Akuntabilitas kinerja, dengan didukung kegiatan Diklat Standar Pelayanan Prima; Diklat PPNS; Diklat Manajemen Pemerintah Kepala Desa/Kelurahan; Diklat Peningkatan Kompetensi Camat dan Calon Camat.

Dengan terlaksananya program ini, dapat melatih peserta sebanyak 120 Orang sehingga meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur di dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat, penegak disiplin dan Akuntabilitas kinerja.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini kurangnya minat aparatur untuk mengikuti Diklat dan masih kurangnya koordinasi program kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain, mengadakan sosialisasi pada aparatur dan meningkatkan koordinasi program kegiatan yang dilaksanakan.

2. Program Diklat Fungsional

Program ini bertujuan untuk mendukung kapasitas maupun kemampuan teknis para pejabat fungsional Diklat fungsional, dengan didukung kegiatan Diklat TOT Substansi Materi Diklat Pim TK IV; Diklat Peningkatan Kompetensi PPTK SKPD; Diklat Peningkatan PPK SKPD; Diklat Penyusunan dan Pengembangan serta silabi; dan Diklat TOT Mind set.

Dengan terlaksananya program ini, dapat melatih peserta sebanyak 150 Orang sehingga meningkatnya kapasitas maupun kemampuan teknis para pejabat fungsional Diklat fungsional.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, secara umum adalah masih kurangnya minat aparatur dalam mengikuti diklat.

Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut yaitu mengadakan sosialisasi pada aparatur.

3. Program Diklat Teknis

Untuk mencapai sasaran Program Diklat Teknis didukung oleh kegiatan, Diklat Teknis Standar Akutansi Keuangan Daerah; Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Lelang dan Kontrak; Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Diklat Teknis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; Diklat Teknis Perencanaan Anggaran.

Dengan terlaksananya program ini, dapat melatih peserta sebanyak 150 Orang sehingga meningkatnya kapasitas maupun kemampuan aparatur dalam penatausahaan keuangan daerah, penyusunan Dokumen Lelang dan Kontrak, dan Perencanaan anggaran.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, masih kurangnya minat aparatur yang ikut serta dalam diklat tersebut.

Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain, perlu dilakukan koordinasi tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan pada SKPD, Harus mengadakan sosialisasi pada aparatur.

4. Program Diklat Struktural

Tujuan dari program Diklat Struktural adalah untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas aparatur para pejabat struktural dan mengemban tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, dengan didukung kegiatan, Diklat Pim Tk IV, Diklat Pim Tk III, Diklat Prajabatan Gol I dan II, Diklat Prajabatan Gol III.

Dengan terlaksananya program ini, dapat melatih peserta sebanyak 627 Orang sehingga meningkatnya perkuatan kelembagaan dan kapasitas aparatur pejabat struktural dan mengemban tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

2.2.1.20. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.2.1.20.1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain telah membentuk Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi, pada tanggal 10 Juni 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 821.22/291/BKD tanggal 10 Mei 2010.

KPID mempunyai tupoksi menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap perizinan lembaga penyiaran. Tabel 4.38 berikut memberikan informasi dana yang digunakan KPID Provinsi Jambi untuk melaksanakan program;

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur.

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional pelaksanaan tugas sehari-hari di Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah, dengan terlaksananya pengadaan kendaraan roda 4 serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan Sosialisasi Kelembagaan KPID Jambi yaitu untuk Pemberlakuan Undang Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai pengganti Undang Undang No. 24 Tahun 1997.

Dari Undang-undang tersebut dapat kita maknai dua hal, *pertama* pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan

digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. *Kedua* adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjangkaran sebagai ujud dalam pelaksanaan Program .

Mengingat pembetukan Sekretariat KPID pada tanggal 10 Juni 2010, dan belum terbentuknya anggota KPID, maka pada tahun 2011 akan memprioritaskan proses pembentukan anggota KPID Provinsi Jambi masa Jabatan 2011-2015. Pemilihan anggota tersebut dilaksanakan melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka oleh DPRD Provinsi Jambi. Selanjutnya akan ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi.

2.2.1.20.2. Kantor Pengolahan Data Elektronik

Pada tahun anggaran 2010 Kantor PDE Provinsi Jambi memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi seperti tertera pada tabel 4.39 berikut yang dipergunakan untuk mendanai program;

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan serta kinerja pegawai maka dilaksanakan pendidikan dan pelatihan/kursus-kursus yang berkenaan dengan IPTEK dan peningkatan sumber daya manusia, telah dilaksanakan beberapa kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE) dimana saat ini Sistem LPSE dapat dimanfaatkan sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Program Pengembangan Komunikasi dan Media Masa

Untuk mencapai sasaran program pengembangan komunikasi dan media massa didukung kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, berupa penambahan jaringan intranet di SKPD dilingkup Pemerintah

Provinsi Jambi, hingga saat ini telah mencapai 42 SKPD telah terkoneksi dengan baik dan 13 unit hostpot dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Dalam mengakses Internet Pemerintah Provinsi Jambi bekerja sama dengan PT. Telekomunikasi, Tbk.

Serta kegiatan pembuatan Blueprint e-Government berupa Rencana Pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011-2015 sebagai pedoman Tahunan dalam pengembangan jaringan menuju e-Government di Provinsi Jambi.

Dengan terselenggaranya program ini tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana peralatan yang ada dan kerja sama antar instansi terkait, guna pemanfaatan Aplikasi yang telah dibangun.

2.2.1.21. KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Pada tahun anggaran 2010 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi seperti tertera pada tabel 4.40 berikut yang dipergunakan untuk mendanai program;

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Tujuan dari program ini adalah untuk pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia kearsipan di Provinsi Jambi. Sasarannya adalah melakukan pembinaan terhadap sumberdaya di bidang kearsipan.

Dalam melaksanakan program ini didukung oleh kegiatan utama yaitu Pemilihan Tenaga Pengelola Arsip Berprestasi Terbaik di Tingkat Provinsi Jambi. Dengan adanya program ini telah terlaksana peningkatan penyusunan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terlaksananya kegiatan kajian sistem administrasi kearsipan.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan program ini yaitu kurangnya tenaga pengelola arsip di setiap SKPD. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini telah diadakan program Bintek Kearsipan antar setiap SKPD.

2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Tujuan dari program ini adalah untuk menghimpun arsip-arsip statis dan in aktif, mendata dan menata arsip statis dan in aktif dalam Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan tersebut program ini didukung oleh beberapa kegiatan utama yaitu : 1) Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, dan 2) Pelaksanaan akuisisi dan penelusuran arsip.

Melalui program ini telah terlaksana peningkatan penyusunan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatnya SDM bidang kearsipan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah kurangnya tenaga pengolah arsip dan tenaga penterjemah arsip khususnya untuk arsip-arsip berbahasa Belanda. Sedangkan solusi untuk permasalahan tersebut yaitu terus diupayakan untuk mengikuti bintek-bintek arsiparis dan menambah jumlah tenaga pengolah arsip.

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

Tujuan pelaksanaan program ini adalah untuk meningkatkan apresiasi dan pengetahuan masyarakat terhadap arsip sejarah Jambi. Untuk mencapai tujuan program ini dilaksanakan beberapa kegiatan utama yaitu : 1) Sosialisasi JRA Keuangan dan Pameran Kearsipan, 2) Rapat Koordinasi kearsipan, dan 3) Pelaksanaan layanan kearsipan Pemerintah Provinsi Jambi.

Melalui program ini telah terlaksana sosialisasi dan pameran kearsipan sehingga masyarakat mengetahui mengenai sejarah Jambi melalui arsip-arsip yang telah dihimpun, ditata dan

dipamerkan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain kurangnya tenaga pengolah arsip serta kurangnya tenaga penterjemah arsip. Adapun solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan peningkatan SDM di bidang kearsipan melalui pelatihan dan bintek tingkat nasional.

4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Tujuan dari program ini adalah untuk menumbuhkan kembangkan kegemaran membaca melalui berbagai bacaan dan media untuk menanamkan cinta budaya bangsa, persatuan dan kesatuan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sejarah perjuangan pahlawan bangsa terutama sejarah pahlawan Jambi melalui buku-buku sejarah di perpustakaan serta membangun masyarakat menjadi masyarakat belajar (*learning society*), masyarakat gemar membaca (*reading society*) menuju budaya baca (*reading culture*).

Sasaran dari proram ini adalah mahasiswa, pelajar, peneliti, budayawan, sejarawan, pemerhati perpustakaan serta masyarakat umum. Dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp1.309.364.900,- dengan realisasi sebesar 97,53%. Sedangkan kegiatan utama dalam program ini adalah : 1) Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, 2) Pengembangan minat baca dan pengkajian budaya baca, 3) Pengembangan koleksi deposit dan pelestarian karya cetak/karya rekam khazanah budaya rakyat Jambi, dan 4) Pengembangan pengolahan system otomasi dan koleksi bahan perpustakaan.

Dengan terlaksananya program ini dapat dilihat pada peningkatan secara signifikan jumlah Perpustakaan

Desa/Kelurahan dari 216 unit pada tahun 2009 menjadi 678 unit pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 314%, peningkatan pada jumlah Taman Bacaan Masyarakat dari 34 unit pada tahun 2009 menjadi 45 unit pada tahun 2010, dan peningkatan jumlah Mobil Perpustakaan Keliling dari 1 unit pada tahun 2009 menjadi 4 unit mobil pada tahun 2010.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain masih terbatasnya koleksi buku perpustakaan, kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung layanan, belum optimalnya jangkauan layanan, masih kurangnya SDM pustakawan serta masih rendahnya minat baca masyarakat.

Adapun upaya permasalahan tersebut antara lain dengan mengupayakan bantuan buku dari perusahaan-perusahaan swasta sehingga dapat menambah jumlah koleksi buku di perpustakaan, peningkatan layanan perpustakaan serta mensosialisasikan budaya baca dan menanamkan kecintaan anak terhadap perpustakaan.

2.2.1.22. KETAHANAN PANGAN

Pada tahun anggaran 2010 bidang ketahanan pangan melalui Bakorluh KP Daerah Provinsi Jambi memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi seperti tertera pada tabel 4.41 yang dipergunakan untuk mendanai program;

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan Ketahanan Pangan sampai ke tingkat rumah tangga. Dengan sasaran 1) stabilnya ketersediaan pangan di tingkat wilayah, 2) Berkembangnya diversifikasi produksi dan konsumsi pangan. 3) Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat, 4) Terbangunnya kesadaran

aparatus, petani dan swasta dalam upaya peningkatan Ketahanan Pangan.

Kegiatan yang mendukung program ini yaitu: 1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan, 2) Bantuan usaha produktif, 3) Pembinaan lembaga permodalan dan 4) Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan

Capaian dari program ini antara lain adalah Berkembangnya usaha produktif berbasis sumber daya lokal, Berkembangnya lembaga layanan permodalan dan Meningkatnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan program ini yaitu masih rendahnya tingkat partisipasi dan keterpaduan dari beberapa sektor teknis terkait, dalam mengimplementasikan kegiatannya di desa Mandiri Pangan, sehingga dengan demikian program ini lambat berkembangnya. Untuk mengantisipasinya yaitu dengan mengaktifkan kembali koordinasi pokja ketahanan pangan yang lebih bersinergi sehingga semua SKPD terkait memprogramkan kegiatannya pada Program Aksi Desa Mandiri Pangan.

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat pertanian (petani dan nelayan) dalam upaya peningkatan Ketahanan Pangan. Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah Meningkatnya kemampuan petani dalam mengakses pangan di wilayahnya dengan harga dan lokasi terjangkau serta pangan yang bermutu dan pola konsumsi yang lebih baik di wilayah marjinal atau daerah rawan pangan, Meningkatnya kemampuan peran aktif petani dalam peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan wilayah, Meningkatnya permodalan bagi petani dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Capaian dari program ini yaitu telah diberdayakan 215 kelompok dengan jumlah KK miskin sebanyak 4.210 KK di 70 Desa yang tersebar 11 Kabupaten/Kota. Serta telah diberdayakan 6 Desa yang beresiko rawan pangan melalui Program Desa mandiri Pangan dengan jumlah anggaran Penguatan Modal Usaha Kelompok sebesar Rp600.000.000 serta 15 desa replikasi dengan bantuan dana Bansos 15 juta serta bantuan saprodi 10 juta per desa.

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program ini rendahnya tingkat keberlanjutan dari kegiatan suatu program, sehingga setelah bantuan tidak ada, maka penerima bantuan tidak bisa lagi melanjutkan kegiatan usaha dalam kelompok tersebut. Hal ini disebabkan belum ada kesadaran serta belum adanya kemampuan manajerial dari ketua kelompok, untuk menggerakkan anggotanya. Upaya yang ditempuh untuk mengatasinya yaitu dengan memperbaiki mekanisme penunjukkan ketua kelompok, serta dipadukan dengan penunjukkan petugas atau tenaga pendamping.

Pengembangan Desa Mandiri Pangan per kabupaten dalam Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.;

Tabel 2.16 Daftar Desa Mandiri Pangan dalam Provinsi Jambi sampai Tahun 2010.

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota	KK Miskin Diberdayakan	Jumlah Dana PMUK (Rp)
1.	Sungai Penuh	3	6	178	178	100.000.000
2.	Kerinci	5	12	316	316	300.000.000
3.	Merangin	7	24	672	567	560.000.000
4.	Sarolangun	8	7	907	180	560.000.000
5.	Bungo	7	18	822	260	660.000.000
6.	Tebo	6	26	688	150	560.000.000
7.	Batanghari	8	13	523	259	200.000.000
8.	Muara Jambi	7	21	841	201	660.000.000
9.	Tanjab Barat	6	57	2.169	1.238	400.000.000
10.	Tanjab Timur	7	18	1.213	517	300.000.000
11.	Kota Jambi	6	13	1.265	344	200.000.000
	Jumlah	70	215	9.594	4.210	4.500.000.000

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2010

Bagi desa Mandiri Pangan yang dianggap telah cukup baik dan mandiri, maka dijadikan Desa Inti dengan membina 3 (tiga) Desa Replikasi disekitarnya. Adapun Desa Inti dan Desa Replikasi dimaksud sebagaimana terlihat pada Tabel 2.17 berikut;

Tabel 2.17 Desa Inti dan Desa Replikasi Tahun 2010

NO	KABUPATEN	DESA INTI 2006	DESA PLASMA
1.	Muaro Jambi	Desa Muaro Pijoan	1. Desa Pematang Jering 2. Desa Simpang Sei. Duren 3. Kelurahan Pijoan
2.	Merangin	Desa Pulau Raman	1. Desa Sekancing 2. Desa Sekancing Ilir 3. Desa Beringin Sanggul
3.	Sarolangun	Desa Batu Kucing	1. Desa Danau Serdang 2. Desa Pengedaran 3. Desa Batu Ampar
4.	Tebo	Desa Lebak Bungur	1. Desa Punt Kalo 2. Desa Kebun Arang 3. Desa Teluk Sengkawang
5.	Bungo	Desa Simpang Babeko	1. Desa Air Gemuruh 2. Desa Sei. Mengkuang 3. Desa Teluk Panjang

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2010

Hasil penilaian kebun dan hasil pengujian laboratorium tersebut disampaikan ke Komisi Teknis OKKP-D Jambi untuk diputuskan komoditi yang menerima sertifikat Prima 3 sebagaimana terlihat pada tabel 2.18 dibawah ini:

Tabel 2.18 Penerima Sertifikat Prima 3

No	Komoditi	Nama Penerima	Alamat	No Sertifikat
1	Timun Suri	A Benyamin	Telun Berasap Kab Kerinci	005-01-040
2	Seledri	Agung Susilo	Desa Jernih Jaya Kab Kerinci	005-02-041
3	Cabe Rawit	Yuhendri	Kel Tebing Tinggi Kab tebo	005-02-043
4	Cabe Keriting	Yuhendri	Kel Tebing Tinggi Kab tebo	005-02-044
5	Bayam Merah	Suparmin	Dea Payo Lebar Kab Sarolangun	005-02-045
6	Bawang Daun	Nur Ikhsan	Kel Palmerah Kota Jambi	005-02-046
7	Kacang Panjang	Sudardi	Kel Palmerah kota Jambi	005-02-045

2.2.2. URUSAN PILIHAN

2.2.2.1. PERTANIAN

2.2.2.1.1. PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Pada tahun anggaran 2010 bidang pertanian melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi seperti tertera pada tabel 4.45 yang dipergunakan untuk mendanai program;

1. Program Peningkatan Kesejahteraan petani

Kegiatan dari program ini antara lain peningkatan Pembelajaran SPMA, Diklat Pasca Panen dan Sertifikasi Benih Padi dengan melatih petugas pertanian dibidang pasca panen dan sertifikasi benih dari kab/kota sebanyak 50 orang; Diklat Pertanian Organik dan Tricho Kompos bagi Petani dan Petugas dengan melatih petani dan petugas dibidang pertanian organik dan Tricho Kompos dari kabupaten.

2. Program Peningkatan ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

Beberapa Kegiatan penting yang dilakukan antara lain pembinaan dan koordinasi pengembangan jagung.

3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan yang dilakukan antara lain Pembinaan dan pengembangan pasca panen

4. Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/perkebunan

Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pembinaan kelompok pengembangan TAM/P3A.

5. Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan yang dilakukan antara lain Akselerasi Peningkatan Produksi Padi dalam rangka peningkatan produksi padi, Pengembangan Kacang – kacang dan umbi – umbian.

Indikator capaian program tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut 2.19.

Tabel 2.19 Perkembangan Realisasi Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2009 dan 2010 (Ha)

No	Uraian	2009	ARAM III 2010	Perkembangan 2010 (ARAM 3) thd 2009)	
				(+/-)	%
1	2	4	5	8	9
1	Luas Panen (Ha)				
	Padi	155802	158731	2929	1.879950193
	- Padi sawah	127981	129897	1916	1.497097225
	- Padi Ladang	27821	28834	1013	3.641134395
	- Jagung	10112	7235	-2877	-28.45134494
	- Kedelai	7238	4852	-2386	-32.96490743
	- Kacang Tanah	1843	1617	-226	-12.2626153
	- Kacang Hijau	442	453	11	2.488687783
	- Ubi Kayu	2860	2952	92	3.216783217
	- Ubi Jalar	2004	1848	-156	-7.784431138
2	Produksi (Ton)				
	Padi	644947	658271	13324	2.065906191
	- Padi sawah	556007	568167	12160	2.187022825
	- Padi Ladang	88940	90104	1164	1.30874747
	- Jagung	38168	27294	-10874	-28.48983442
	- Kedelai	9132	6285	-2847	-31.1760841
	- Kacang Tanah	2276	1982	-294	-12.91739895
	- Kacang Hijau	491	505	14	2.851323829
	- Ubi Kayu	39067	40343	1276	3.266183736
	- Ubi Jalar	19385	17839	-1546	-7.975238587
3	Produktivitas (Kw/ha)				
	Padi	41.3953	41.4708532	0.07	0.169101337
	- Padi sawah	43.4445	43.7398092	0.295313566	0.679749095
	- Padi Ladang	31.96866	31.2492197	-0.719437099	-2.250445191
	- Jagung	37.74525	37.7249482	-0.020304996	-0.053794833
	- Kedelai	12.61674	12.9534213	0.336676312	2.668487899
	- Kacang Tanah	12.34943	12.2572665	-0.092163734	-0.746299478
	- Kacang Hijau	11.1086	11.1479029	0.039305585	0.353830314
	- Ubi Kayu	136.5979	136.663279	0.065377035	0.047860936
	- Ubi Jalar	96.73154	96.5313853	-0.200151645	-0.206914571

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2010

Disamping itu beberapa kegiatan lainnya berada pada UPT Dinas Pertanian yaitu : 1) Operasional BBI Palawija dengan harapan dapat meningkatkan ketersediaan benih sumber kedele, jagung dan kacang tanah,, 2) Operasional BBI Alai Ilir, dimana hasilnya akan meningkatkan jumlah ketersediaan ubi kayu dan ubi jalar sebanyak 20 ton, 3) Operasional BBI Padi sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan benih padi unggul bersertifikasi; 4) Peningkatan Pembinaan Pengawasan Peredaran, Penyimpanan Pupuk dan Pestisida, dengan melakukan pengawasan pupuk dan pestisida dilapangan secara tepat untuk menunjang peningkatan produksi tanaman pangan; 4) Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran, Tanaman Hias, 5) Operasional Pengembangan Kelembagaan BBI Hortikultura dengan kegiatan perbanyak bibit tanaman dan perbanyak benih sumber BPMT; 6) Operasional Pengembangan Kelembagaan BBI Kentang Kayu Aro dan BBI Jangkat sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan benih sumber G1 dan G2; 7) Operasional Kelembagaan Taman Anggrek Jambi, kegiatan pada tahun ini dengan melaksanakan pengembangan taman anggrek dan pameran flori dan flora. Selain itu Pembinaan Sentra Produksi Buah – Buahan juga dilakukan dengan kegiatan pengembangan kawasan sentra hortikultura dan buah khas Jambi serta promosi produk buah – buahan Jambi melalui pameran.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi pada tahun 2010 menargetkan PAD dari hasil retribusi jasa usaha berupa retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp56.000.000,- dengan perincian seperti tertera pada tabel 2.17 berikut;

Tabel 2.20 Penjualan Produksi Usaha Daerah Dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov, Jambi Tahun 2010

UPT Distan	Penjualan produksi usaha daerah (Rp)	
	Target	Realisasi
Taman Anggrek Telanaipura	2.500.000	2.500.000
BBI Palawija Sebapo	14.500.000	29.150.000
BBI Hortikultura Sungai Tiga	10.000.000	10.625.000
BBI Padi Sukajaya Lubuk Ruso	15.000.000	15.530.000
BBI Alai Ilir Bungo	3.000.000	3.780.000
BBI Kentang Kayu Aro Kerinci	9.000.00	9.020.000
BBI Kentang Jangkat	2.000.000	2.000.000
Jumlah :	56.000.000	72.605.000

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Jambi, 2010

Kontribusi subsektor bahan Tanaman bahan makanan secara ekonomi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2009 atas dasar harga berlaku cukup besar yaitu : 9,14 % . Pertumbuhan Sub sektor bahan Tanaman bahan makanan (7,64 %) lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi (6,37 %). Sedangkan nilai tukar petani (NTP) rata – rata Bulan Januari – Oktober 2010 , Sub Sektor Tanaman Pangan adalah : 98,29 dan nilai tukar petani (NTP) rata – rata Bulan Januari – Oktober 2010 Sub Sektor Hortikultura adalah : 96,11. Perkembangan NTP tahun 2010 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.21 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) selama tahun 2010

BULAN	NTP	
	Sub Sektor Tanaman Pangan	Sub Sektor Hortikultura
Januari	97.00	93.84
Pebruari	98.19	95.53
Maret	99.63	95.54
April	98.97	94.35
Mei	99.32	93.71
Juni	99.22	94.49
Juli	98.41	100.76
Agustus	97.89	100.11
September	97.30	97.49
Oktober	96.94	95.27
Nopember		
Desember		
Rata-Rata	98.29	96.11

Sumber : Berita resmi BPS Provinsi Jambi, 2010.

Selanjutnya Indikator keberhasilan pertanian tanaman pangan pada tahun 2010 ditandai dengan peningkatan produksi sebesar 658.271 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau mengalami kenaikan sebesar 13.324 ton (2,07 %) jika dibandingkan produksi tahun 2009 sebesar 644.947 ton GKG. Kenaikan produksi padi ini terjadi karena adanya peningkatan produktivitas sebesar 0.07 Kw/Ha (0,17 %), serta didukung oleh peningkatan luas panen sebesar 2.929 Ha (1,88 %). Produksi padi tahun 2010 terdiri dari padi sawah sebesar 568.167 Ton GKG dan produksi padi ladang sebesar 90.104 Ton GKG. Persentase laju kenaikan produksi padi sawah adalah sebesar 2,19 %, sedangkan padi ladang persentasenya lebih kecil yaitu sebesar 1,31 %. Peningkatan produksi padi tahun 2010 pada dasarnya dapat ditingkatkan lebih besar jika curah hujan tidak tinggi sepanjang tahun, yang membuat lahan – lahan sawah, terutama lahan rawa lebak tergenang, sehingga menyebabkan terjadinya penundaan jadwal tanam dan pergeseran musim tanam.

2.2.2.1.2. PERKEBUNAN

Pada tahun anggaran 2010 sektor perkebunan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Jambi memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi seperti tertera pada tabel 4.49 yang dipergunakan untuk mendanai program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kegiatan yang dilakukan antara lain Pembinaan Perusahaan Perkebunan Besar dan RSPO, Pengembangan Asosiasi Petani Perkebunan, Pelatihan Petani dan Petugas dalam Penentuan Kadar Karet Kering, Pembinaan Penangkar Benih Perkebunan dan Pelatihan Petugas Pengawas Benih Tanaman serta pemberdayaan pondok Pesantren di bidang perkebunan juga pembibitan Kelapa Sawit Bersubsidi.

2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

Kegiatan yang dilakukan program ini adalah dengan meningkatkan promosi dan Peluang Pasar serta Kerjasama IMT-GT, peningkatan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan (Model UPPB), Pembinaan dan Informasi Harga Pasar Lelang Karet serta Agribisnis Pemanfaatan Sabut dan Tempurung Kelapa, Pengawasan Peredaran Mutu Bibit Perkebunan dan Tata Niaga TBS serta Penerapannya, juga pengembangan / Peningkatan Jalan Produksi.

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Untuk peningkatan penerapan teknologi pertanian telah dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan (GUP), Pelatihan SID Aspek Pengelolaan Lahan dan Air, Pembinaan, Pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UPTD dan LH, Perbanyakan, Penyebaran dan Bintel Perbanyakan Agens Hayati, Pembinaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan serta Percontohan Penerapan PLTB, Penyediaan Sarana Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan.

4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Kegiatan utama yang dilakukan dengan anggaran yang cukup besar, antara lain :

- 1) **Pengembangan Karet Rakyat seluas 9.900 Ha.** Kegiatan ini telah dimulai tahun 2006 yang lalu sampai dengan tahun 2010 telah dilaksanakan peremajaan dan pengembangan karet rakyat melalui berbagai sumber pembiayaan seluas 84.627,4 Ha. Pengembangan karet sumber dana APBD Provinsi tahun 2010 ini, dilaksanakan seluas 9.900 Ha yang didistribusikan

bagi 7 kabupaten yaitu : Ma. Jambi, Batanghari, Bungo, Tebo, Sarolangun, Merangin dan Tanjab Barat.

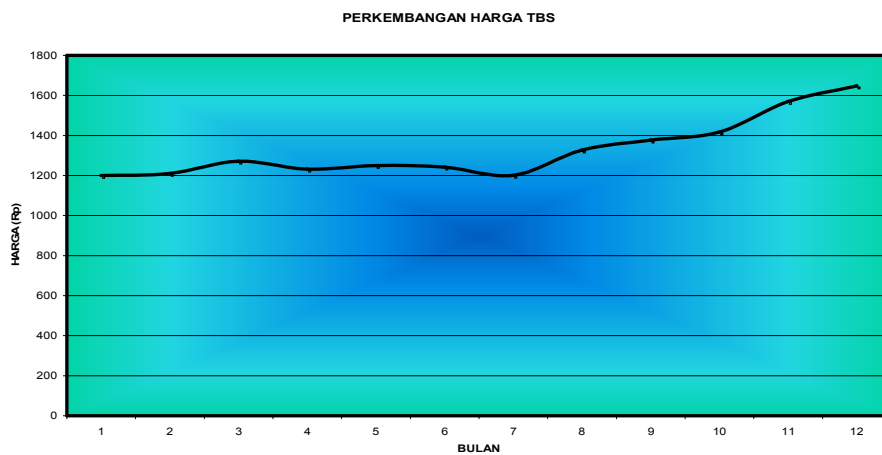
- 2) **Pengembangan Kopi Robusta seluas 90 Ha** yang dipusatkan di Kabupaten Kerinci memberikan dampak multi efek juga bagi peremajaan kebun kopi rakyat, meningkatkan penggunaan benih unggul kopi, meningkatkan produktivitas kopi rakyat, meningkatkan pendapatan petani kopi serta menggerakkan ekonomi di pedesaan wilayah sentra kopi. Adapun sejak tahun 2006 s/d tahun 2010 kebun kopi rakyat yang telah diremajakan adalah seluas 490 Ha.
- 3) **Pengembangan/Peningkatan Jalan Produksi sepanjang 104,5 km** melalui berbagai sumber dana (APBD dan Ditjen PLA) sejak 2006 telah dilaksanakan Pengembangan/peningkatan Jalan Produksi sepanjang 149,5 km. Jalan Produksi ini dilaksanakan di wilayah perkebunan rakyat, kondisi fisik jalan berupa pembentukan badan jalan selebar 6 m termasuk bahu dan parit dikedua sisinya serta diberi pengerasan. Adapun kegiatan ini memberikan manfaat bagi petani perkebunan berupa : membuka akses ke areal perkebunan rakyat, melancarkan transportasi dari dan ke kebun dalam pengangkutan sarana produksi dan produk hasil, serta membuka peluang pemasaran, sehingga meningkatkan harga jual dan menambah pendapatan petani, selain itu juga meningkatkan nilai harga lahan/kebun.
- 4) **Pengembangan Sarana Irigasi Tata Air Mikro seluas 950 Ha** melalui berbagai sumber dana (APBD dan Ditjen PLA) sejak 2006 s/d 2010 telah dilaksanakan Pengembangan /peningkatan Sarana Irigasi Tata Air Mikro seluas 2.302 ha. Tata Air Mikro ini dilaksanakan di wilayah perkebunan kelapa rakyat di areal pasang surut, kondisi fisik Tata air mikro berupa pembentukan parit-parit dan pintu air sederhana

diantara blok-blok kebun kelapa. Hal ini dapat memberikan manfaat bagi petani kelapa dalam mengatur keluar masuknya air pasang, mengurangi dampak mengendapnya zat logam yang beracun bagi tanaman kelapa dan menghindari tergenangnya lahan.

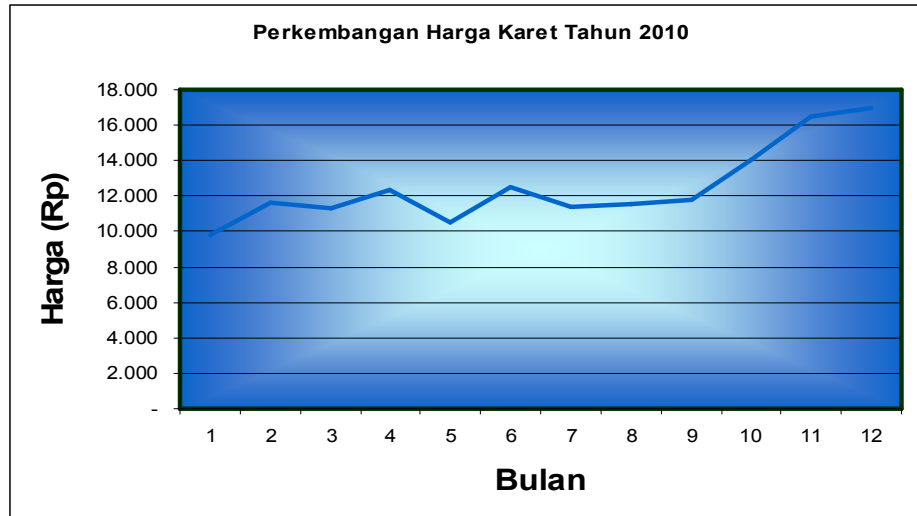
- 5) **Pembibitan Kelapa Sawit Bersubsidi sebanyak 35.000 batang.** Adapun manfaat kegiatan ini adalah menekan penggunaan dan peredaran bibit kelapa sawit palsu, memenuhi kebutuhan petani akan benih unggul dengan harga terjangkau serta meningkatkan produktivitas kelapa sawit rakyat.

Komoditi kelapa sawit dan karet mempunyai harga yang cukup baik sepanjang tahun 2010 dan tidak terlalu berfluktuasi, gambaran tentang perkembangan harga kedua komoditi tersebut dapat dilihat melalui grafik berikut ini.

Gambar 1. Grafik Perkembangan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Tahun 2010.



Gambar 2. Grafik Perkembangan Harga Karet Tahun 2010.



2.2.2.1.3. PETERNAKAN

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program ini bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan penyakit hewan yang bersifat zoonosis (menular kepada manusia) strategis. Penyakit hewan strategis yang ditangani adalah SE (*Septicaemia epizooticae*), *Brucellosis*, AI (*Avian Influenza*), *Anthrax* dan *Rabies*. Untuk itu melalui program ini telah dilaksanakan vaksinasi SE terhadap ternak besar sebanyak 13.000 dosis; sosialisasi tentang penyakit zoonosis ke sekolah-sekolah sebanyak 30 kali dan desinfeksi lingkungan kandang untuk pencegahan penyakit AI sebanyak 100 liter.

Dalam menunjang kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan maka difungsikan laboratorium kesehatan hewan dan kesmavet (kesehatan masyarakat veteriner). Kegiatan yang dilakukan berupa pemeriksaan spesimen hewan, pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan yang dikirimkan oleh instansi teknis Kabupaten/Kota. Selain itu juga dilakukan pengambilan

sampel secara langsung untuk jenis penyakit tertentu pada daerah yang diduga berpotensi sebagai sumber penular penyakit hewan strategis. Kegiatan laboratorium pada tahun 2010 antara lain berupa pemeriksaan sampel parasitologi sebanyak 5.000 sampel; ND (tetelo) 200 sampel, mikoplasma 200 sampel, *Brucellosis* sebanyak 1.200 sampel, *Rabies* sebanyak 77 sampel dan pengambilan sampel produk hewan berupa telur, susu, bakso, sosis, abon dan nugget di supermarket sebanyak 90 sampel.

Pada tahun 2010 penyakit *Brucellosis* dan *Anthrax* sudah tidak ditemui lagi kasusnya. Dengan demikian maka Provinsi Jambi sejak tahun 2009 sampai dengan akhir 2010 dapat dinyatakan sebagai wilayah bebas *Brucellosis*. Untuk kasus Avian Influenza pada tahun 2010 sampai dengan September 2010 ditemui 42 sebanyak 57 kasus. Masih tingginya kasus ini memberikan gambaran bahwa AI masih merupakan salah satu ancaman bagi Provinsi Jambi. Selain itu tinggi kasus ini sangat dipengaruhi oleh semakin intensifnya kegiatan pemantauan kasus AI, yang dilakukan melalui kegiatan Pengendalian Penyakit Avian Influenza dengan mendapatkan bantuan dari FAO (*Food Agriculture Organization*). Sedangkan untuk kasus *Rabies* memperlihatkan adanya penurunan, dimana ditemui positif *Rabies* sebanyak 73 kasus dan SKB (hewan yang diduga sebagai penular *Rabies* tidak bisa ditemukan) sebanyak 24 kasus; dengan jumlah korban gigitan sebanyak 112 orang. Angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu positif *Rabies* 84 kasus dan SKB sebanyak 20 kasus dengan jumlah korban gigitan sebanyak 154 orang.

2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pada program ini dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan penyediaan daging ternak besar (sapi dan kerbau) dalam menunjang program nasional swasembada daging sapi 2014. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah

pengembangan kawasan peternakan. Khusus untuk kawasan peternakan sapi potong, kegiatan utama yang dilakukan adalah peningkatan populasi melalui pemasukan sapi betina bibit serta perbaikan mutu genetis ternak melalui penerapan IB (Inseminasi Buatan).

Pada tahun 2010 melalui dana APBD Provinsi Jambi telah dilakukan penyebaran ternak sapi bibit sebanyak 220 ekor. Lokasi penyebaran ternak ini meliputi Kabupaten Muaro Jambi 60 ekor dan Tanjab Barat 160 ekor. Selain itu juga dilakukan penyebaran ternak bibit melalui dana Tugas Pembantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial kepada petani untuk pengadaan ternak. Pada tahun 2010 telah disalurkan dana bantuan sosial sebesar Rp695 juta yang digunakan untuk pengadaan 86 ekor sapi oleh tiga kelompok tani. Sedangkan upaya untuk menjaga gejolak harga daging menjelang lebaran telah dilakukan pengadaan sapi penggemukan untuk penyangga kebutuhan lebaran, yang disebarkan di Kabupaten Muaro Jambi 150 ekor dan Kota Jambi 150 ekor. Berkaitan dengan penyebaran ternak pemerintah maka diperoleh PAD (Pemasukan Asli Daerah) yang bersumber dari gaduhan ternak sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Capaian Target PAD dari Ternak Pemerintah Tahun 2010

Jenis Penarikan	Jumlah (Rp)		%
	Target	Realisasi	
Penjualan ternak tidak layak bibit	117.600.000	125.641.750	106,84
Penjualan ternak penggemukkan	633.000.000	639.689.500	101,06
Jumlah	770.600.000	785.466.750	101,93

Sumber : Disnakkeswan Provinsi Jambi, 2010

Kegiatan Pengembangan UPTD Balai Pembibitan Ternak ditujukan untuk menunjang program IB berupa produksi semen beku serta pemeliharaan sapi perah sebagai percontohan. Pada

tahun 2010 produksi semen beku dari UPT Pembibitan sebanyak 7.000 dosis. Hanya saja kualitas semen yang diproduksi ini masih pada tahap sedang (motilitas 2), belum mampu mencapai tingkat kualitas baik (motilitas 3). Capaian ini terutama disebabkan manajemen pemeliharaan sapi pejantan penghasil semen yang belum baik serta terbatasnya peralatan untuk pemrosesan semen beku yang digunakan. Guna memenuhi kekurangan semen beku yang diperlukan untuk pelaksanaan IB di Provinsi Jambi maka dilakukan pengadaan semen beku dari Balai IB yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Realisasi IB pada tahun 2010 dapat dilihat dari jumlah inseminasi sebanyak 14.081 dosis dari sasaran 24.119 dosis; akseptor 11.718 ekor dari sasaran 15.600 ekor dan kelahiran 5.353 ekor dari sasaran 8.866 ekor. Masih belum tercapai target IB ini salah satunya disebabkan karena terbatasnya petugas inseminator dan sarana pelayanan IB yang ada saat ini.

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Kegiatan program ini dipusatkan di Kebun Binatang Taman Rimba, Kota Jambi. Pada tahun 2010, total dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp1.247.000.000,- Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian pakan satwa, pembangunan fisik taman, penimbunan tanah, pembangunan kandang mamalia kecil, renovasi kandang unta dan harimau serta pengadaan satwa mamalia kecil. Dengan keluarnya Perda mengenai retribusi masuk ke kebun binatang Taman Rimba sejak awal tahun 2011 maka pada tahun 2011 ditargetkan akan diperoleh PAD sebesar Rp500.000.000,-.

4. Program Peningkatan Fungsi Kesmavet

Pada program ini dilakukan kegiatan pengawasan peredaran pangan asal hewan berupa pemeriksaan sampel :

- a. Daging sapi sebanyak 25 sampel di pasar-pasar dalam 11 kab/kota
- b. Daging ayam sebanyak 15 sampel di pasar-pasar dalam 11 kab/kota
- c. Telur ayam sebanyak 10 sampel di pasar-pasar dalam 11 kab/kota
- d. Bahan olahan sebanyak 50 sampel di pasar dalam 11 kab/kota

Hasil pemeriksaan menunjuk semua sampel yang diperiksa mempunyai tingkat cemaran mikroorganisme berada diatas ambang batas minimal yang diperbolehkan. Sedangkan hasil pemeriksaan cemaran *Salmonella* dan residu antibiotika tidak ditemukan. Dari pemeriksaaan sampel olahan diperoleh hasil negatif daging babi. Hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada instansi teknis Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku.

5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini ditujukan untuk menunjang kegiatan penyusunan program dan rencana kerja pembangunan peternakan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa menyelenggarakan dan menghadiri berbagai

pertemuan dalam rangka pembahasan dan penyusunan program pembangunan peternakan baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Secara umum permasalahan utama pengembangan peternakan Provinsi Jambi adalah masih rendahnya populasi ternak besar dan kecil, dibandingkan potensi sumberdaya (pakan dan tenaga kerja) yang ada. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sumber bibit ternak serta dana yang dapat dialokasikan untuk pengadaan bibit ternak. Sejauh ini bibit ternak besar dan kecil yang dibutuhkan Provinsi Jambi masih didatangkan dari luar daerah. Sedangkan sumber dana utama

yang digunakan untuk pengadaan ternak masih sangat tergantung pada swadaya petani dan pemerintah. Sementara itu ketersediaan sumber dana komersial masih sangat terbatas. Dengan demikian maka ketersediaan ternak yang ada belum mampu memasok kebutuhan lokal sehingga sebagian besar kebutuhan masih didatangkan dari luar daerah.

Pemecahan masalah ini diantaranya akan dilakukan melalui pengembangan kelompok pengembangan pembibitan ternak (besar dan kecil). Guna mempercepat penumbuhan kelompok ini maka dibutuhkan ketersediaan modal lunak untuk memungkinkan petani dapat mengadakan ternak sesuai dengan kebutuhan mereka.

2.2.2.1.4. KEHUTANAN

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program ini secara umum bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan dalam pemanfaatannya dengan total dana sebesar Rp2.870.760.000,-. Dalam rangka mendukung program ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu; Kegiatan pembuatan tanaman unggulan lokal, Kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan, Kegiatan pengawasan dan peredaran hasil hutan, Identifikasi konflik pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan, Monitoring dan pinjam pakai kawasan hutan, Kegiatan konservasi anggrek alam, Pelacakan dan penegasan batas kawasan hutan, Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan investasi kehutanan dan Kegiatan tata ruang.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari tercapainya sebagian besar sasaran kegiatan, yaitu:

1. Terwujudnya kawasan hutan dengan tanaman unggulan lokal melalui pemeliharaan jenis gaharu seluas 45 ha yang terdiri dari

pemeliharaan tahun ke 2 seluas 25 Ha dan pemeliharaan tahun pertama seluas 20 Ha.

2. Terlaksananya kegiatan pelacakan dan penegasan batas kawasan hutan yang dilaksanakan di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Tanjab Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo sepanjang 5 Km di kawasan hutan (HP) Tabir Kejasung, Kabupaten Sarolangun sepanjang 5 Km di kawasan hutan (HP) Tabir Kejasung, Kabupaten Tanjab Timur sepanjang 5 Km di kawasan hutan lindung gambut Sungai Buluh.
3. Terwujudnya kegiatan identifikasi konflik dalam pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan di 9 (sembilan) Kabupaten yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjab Barat, Kabupaten Tanjab Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun.
4. Terlaksananya kegiatan monitoring pinjam pakai kawasan hutan di 3 Kabupaten yaitu Tebo, Muaro Jambi dan Sarolangun.
5. Terlaksananya kegiatan konservasi anggrek alam yang bekerja sama dengan Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) Jambi dengan mengikuti pameran anggrek tingkat Nasional di Kota Batam dan Lomba Anggrek Alam yang memperoleh juara ketiga untuk jenis anggrek *Phalaenopsis cornocervi*, mengikuti MUNAS PAI di Kota Batam, melaksanakan pengumpulan anggrek alam di 4 (empat) Kabupaten, dan terselenggaranya pelatihan budidaya anggrek tingkat Provinsi Jambi.

Selain hal-hal di atas, indikator keberhasilan dari program ini adalah:

1. Terwujudnya tertib peredaran hasil hutan dan revitalisasi industri hasil hutan sebesar 81%

2. Meningkatnya kemudahan dalam pelayanan dan adanya sosialisasi terhadap kayu berasal dari tanah milik/hak
3. Peningkatan jumlah Industri primer hasil hutan (IPHHK) yang aktif, dimana pada tahun 2009 jumlah IPHHK sebanyak 30 unit dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 40 unit,
4. Koordinasi yang semakin meningkat dengan Polda Jambi, Kehakiman dan Kejaksaan didalam penanganan kasus-kasus pelanggaran kehutanan. Jumlah kasus yang ditangani sebanyak 24 Kasus dan pengukuran barang bukti sebanyak 29 kasus.
5. Telah terlaksananya kegiatan verifikasi lapangan oleh tim terpadu Kementerian Kehutanan dalam rangka revisi tata ruang wilayah yang anggarannya terdapat dalam APBD perubahan 2010 dengan realisasi sebesar 67%.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah

- a. Adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan instansi atau pihak lain di luar Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, sehingga membutuhkan koordinasi dan konsultasi yang tidak mudah untuk mensinkronkan jadwal dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
- b. Belum seluruh kades/lurah mengikuti pelatihan kayu, sehingga peredaran kayu dari tanah milik/hak di beberapa desa terganggu.

2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Hutan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Hutan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dan terealisasi sebesar 86,17%. Program ini terdiri dari satu kegiatan yaitu inventarisasi dan pemantauan Sumber Daya Hutan dengan tujuan untuk mewujudkan

ketersediaan informasi mengenai potensi sumber daya hutan yang ada di Provinsi Jambi.

Hasil dari pelaksanaan program ini adalah:

1. Terlaksananya Sosialisasi tata batas kawasan hutan di 8 Kabupaten yaitu : Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Muaro Jambi, Sarolangun, Bungo, Merangin, Kerinci dan Tanjung Jabung Timur
2. Terlaksananya inventarisasi Hutan Lindung di 7 lokasi yaitu Hutan Lindung Gambut, Sungai Bram Hitam, Sungai Buluh, Air Hitam Dalam, Air Hutan Laut, Hutan Lindung Rantau Bayur dan Hutan Lindung Hulu Landai-Bukit Pale.

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Program ini bertujuan agar pengelolaan hutan dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. Program ini dilaksanakan dengan total anggaran sebesar Rp2.827.190.000,- dengan 10 kegiatan pendukung yaitu:

1. Kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2. Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Taman Hutan Kenali dan Kebun Raya Bukit Sari
3. Kegiatan pengamanan dan peredaran hasil hutan
4. Kegiatan proyek penunjang FLEGT EC-SP di Jambi
5. Kegiatan pengembangan daerah penyangga sekitar kawasan hutan
6. Pembangunan Demplot HTR lingkup Provinsi Jambi
7. Kegiatan penanaman pohon dalam rangka antisipasi pemanasan global dan penyelamatan
8. Kegiatan penyuluhan kehutanan

9. Kegiatan identifikasi potensi dan permasalahan pada kawasan hutan lindung, hutan lindung gambut dan Tahura, serta monitoring pengelolaan mangrove
10. Kegiatan study kelayakan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan Kebun Raya Bukit Sari

Adapun capaian program ini pada tahun 2010 adalah:

1. Pemrosesan 8 kasus kejahatan kehutanan oleh PPNS Dinas Kehutanan Provinsi dan PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten.
2. Menurunnya jumlah hotspot, dari 1784 hot spot pada tahun 2009 menjadi 623 hot spot pada tahun 2010.
3. Terlaksananya kegiatan penyuluhan di seluruh Kabupaten dan Kota untuk mengurangi angka perambahan hutan di Provinsi Jambi.
4. Pengembangan daerah penyangga sekitar kawasan konservasi berupa pembuatan demplot tanaman jelutung seluas ± 20 Ha di Desa Serdang Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjab Barat.
5. Pembangunan Demplot HTR lingkup Provinsi Jambi berupa kegiatan pemeliharaan demplot HTR sebanyak 3 demplot yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi ± 15 Ha, Kabupaten Tanjab Barat ± 15 Ha dan Kabupaten Sarolangun ± 15 Ha.
6. Penanaman pohon dalam rangka antisipasi pemanasan global juga telah berhasil dilaksanakan melalui pelaksanaan acara OBIT di Kabupaten Muaro Jambi dengan target penanaman 31 juta bibit tanaman dan terealisasi sebanyak 45 juta bibit se provinsi Jambi.
7. Pembangunan dan pemeliharaan kebun raya bukit sari dengan melaksanakan pembersihan kebun raya bukit sari seluas ± 80 Ha dan pembuatan pagar sepanjang 95 meter.

Permasalahan dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah aksesibilitas ke lokasi kegiatan yang sulit ditempuh ketika hari hujan, aksesibilitas jalan menuju lokasi

demplot HTR di Kabupaten sarolangun sangat sulit dengan curah hujan yang cukup tinggi serta terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengamanan hutan yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dibanding dengan luas kawasan hutan.

4. Program Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan

Program ini memiliki satu kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp100.000.000,- yaitu perencanaan dan monitoring evaluasi, dengan tujuan agar penyusunan kegiatan menjadi terencana dan dapat di evaluasi, sehingga tepat sasaran dan mencapai hasil yang maksimal. Realisasi yang dicapai program ini adalah sebesar 73,37%.

5. Pengumpulan Data, Statistik dan Pemantapan Sistem Informasi/Peningkatan Kualitas dan Akses SDA & LH

Program ini terdiri dari satu kegiatan prioritas yaitu kegiatan Pusat Informasi Kehutanan Provinsi Jambi yang dilaksanakan oleh UPTD-BPIK Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan pagu anggaran sebesar Rp101.200.000,- dan terealisasi sebesar 92,10%. Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan ketersediaan berbagai data dan informasi kehutanan serta meningkatkan pengelolaan sektor kehutanan dengan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik. Pencapaian program ini adalah telah dibuatnya website Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengenai Kehutanan di Provinsi Jambi dapat diakses oleh publik.

2.2.2.2. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Program Pengembangan Energi

Program Pengembangan energi bertujuan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana penyediaan energi, terutama bagi daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PT. PLN (persero). Selain itu dilakukan Pembinaan dan Pengawasan

pemanfaatan PLTMH dan PLTS pada desa-desa yang telah dibangun PLTMH dan PLTS.

Pada tahun 2010, program ini memperoleh alokasi dana sebesar Rp819.952.000,-. Secara Fisik terealisasi sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,34%. Capaian program ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23. Pembangunan Biogas Tahun 2010

NO	DESA, KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH (UNIT)
1	Pesantren Al-hidayah, Kota Baru	Kota Jambi	1
2	Desa Bukit Marau, Kecamatan Singkut	Kabupaten Sarolangun	1
3	Kelurahan Wirota Agung, Kecamatan Rimbo Bujang	Kabupaten Tebo	2
4	Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun	Kabupaten Sarolangun	2

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2010

Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik pada daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh PLN dan berpotensi untuk dikembangkannya pembangunan PLTMH, maka pada Tahun Anggaran 2010 dilakukan Studi Kelayakan Pembangunan PLTMH sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.24 Studi kelayakan pembangunan Mikro Hidro Tahun 2010

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa
1	Kerinci	Gunung Kerinci	Air Bahan I
2	Kerinci	Gunung Kerinci	Air Bahan II
3	Kerinci	Siulak Deras	Desa Kuning
4	Sarolangun	Batang Asai	Raden Anom
5		Batang Asai	Simpang Narso
6	Bungo	Pelepat	Batu Kerbau
7		Batin III Ulu	Sungai Talang

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2010

Untuk melihat perkembangan jumlah PLTMH dari tahun 2005 – 2010 yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi tergambar pada grafik di bawah ini.



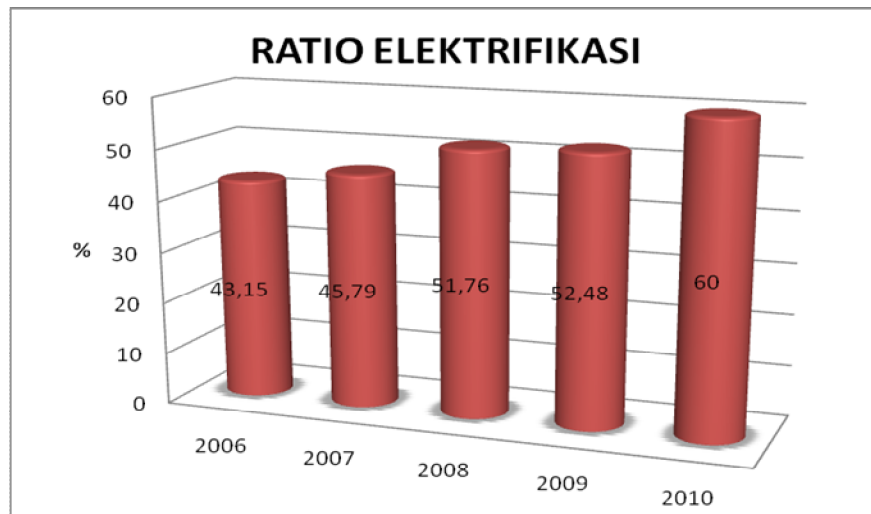
Gambar 3. Jumlah PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)

Sedangkan perkembangan jumlah PLTS dari tahun 2005 – 2010 yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 4. Jumlah PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)

Selanjutnya terhadap perkembangan kelistrikan tergambar rasio elektrifikasi Provinsi Jambi dari tahun 2006 – 2010 tertera pada grafik di bawah ini.



Gambar 5. Ratio Elektrifikasi Provinsi Jambi

2. Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana

Program ini bertujuan untuk mempermudah perolehan data dan informasi terkait bidang ESDM berupa potensi Mineral dan Batubara, tingkat pengusahaan tambang dan Migas, serta ketenagalistrikan. Pada tahun 2010 program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp106.134.600,- dan terealisasi 100%. Kegiatan dalam pencapaian program ini adalah pembuatan website ESDM dan sarana informasi.

3. Program Peningkatan Aksesibilitas Pemda, Koperasi dan Masyarakat terhadap Jasa

Program ini bertujuan dalam rangka mensosialisasikan penggunaan LPG Tabung 3 Kg dan mengawasi perhitungan lifting Migas dan penyaluran DBH Migas. Alokasi dana untuk Program ini sebesar Rp226.079.650,- dan telah terealisasi 100%.

Kegiatan yang termasuk ke dalam program ini adalah :

- a. Inventarisasi perhitungan lifting Migas dan Penyaluran realisasi DBH Migas.
- b. Pengawasan Pengangkutan, Niaga BBM, Keselamatan dan

Lindungan Lingkungan SPBU

- c. Sosialisasi penggunaan kompor gas dan LPG Tabung 3 Kg
- d. Rakornis Energi dan Sumber Daya Mineral

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program ini bertujuan agar terlaksananya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*). Program ini di fokuskan pada pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara serta perhitungan realisasi Dana bagi Hasil SDA Bidang Pertambangan Umum. Alokasi dana untuk program ini adalah sebesar Rp410.000.000,- dan terealisasi 100%.

- a. Bimbingan dan Pengawasan K3 dan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara
- b. Pengawasan dan Perhitungan PNPB Pertambangan Mineral dan Batubara
- c. Masterplan pemanfaatan mineral dan batubara dalam rangka pengembangan kegiatan usaha pertambangan.

5. Program Optimalisasi Pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan

Program ini bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Secara umum program ini berupa kegiatan inventarisasi dan survey mineral dan batubara. Alokasi untuk program ini adalah sebesar Rp762.458.750,- dan terealisasi 99%.

Kegiatan untuk pencapaian program ini adalah :

- a. Survey mineral dan batubara
- b. Monitoring Bencana alam geologi, air tanah serta sosialisasi bencana alam geologi dan air tanah.
- c. Inventarisasi penerimaan dana bagi hasil bidang ESDM
- d. Inventarisasi wilayah kerja bidang ESDM

2.2.2.3. PARIWISATA

Dalam pengembangan kepariwisataan, salah satu indikator keberhasilan yang tergambar adalah terjadinya peningkatan wisatawan manca negara yaitu sebesar 1,79 % yaitu dari 7.615 orang tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah kunjungan sebanyak 7.751 orang tahun 2010. Hal ini juga didukung oleh jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang meningkat sebesar 11,16 % yaitu dari 861.540 orang tahun 2009 menjadi 957.760 tahun 2010. Kenaikan wisatawan ini secara bertahap akan berpengaruh pada tumbuh dan berkembangnya perhotelan di Provinsi Jambi. Hingga tahun 2010, jumlah hotel berbintang sejumlah 23 hotel, dan hotel non berbintang 120 hotel, restoran sebanyak 48 buah, rumah makan sebanyak 489 buah.

Untuk mendukung pembangunan bidang kepariwisataan, pada tahun 2010 melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi telah dialokasikan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi seperti tertera pada tabel 4.56, untuk mendanai program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Sasaran program ini adalah penyebaran informasi mengenai potensi budaya dan pariwisata Jambi ke berbagai segmen pasar, yang meliputi kegiatan Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri, Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Daerah.

Program ini mendorong terlaksananya promosi kebudayaan pariwisata yang dapat diakses setiap saat, tersebarnya informasi mengenai potensi dan event serta destinasi pariwisata Provinsi Jambi ketingkat regional, nasional dan internasional, terwujudnya kerjasama antara pengelola usaha pariwisata dan meningkatnya minat kunjungan wisatawan ke Provinsi Jambi.

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang kepariwisataan ini, permasalahan yang dihadapi antara lain, masih belum optimalnya promosi pariwisata, kurangnya sarana dan prasarana kepariwisataan dan rendahnya minat investor untuk menanamkan modal bagi pengembangan potensi wisata di Provinsi Jambi.

Dalam menyikapi permasalahan ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan, dan meningkatkan nilai jual potensi pariwisata melalui promosi dan publikasi baik dalam bentuk informasi media cetak dan media elektronik maupun melalui informasi online.

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan kualitas objek daerah tujuan wisata Provinsi Jambi melalui kegiatan Pengembangan Objek wisata unggulan.

Melalui program ini diharapkan dapat mendorong terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana objek pariwisata unggulan, pengembangan dan penguatan informasi dan data base potensi objek destinasi wisata, pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata.

Masih rendahnya daya dukung pariwisata seperti akses sarana dan prasarana yang masih kurang, keterlibatan stakeholder yang kurang terpadu, SDM pengelola pariwisata (pemandu wisata) menjadi pekerjaan rumah yang harus ditingkatkan terhadap pengembangan Destinasi pariwisata. Untuk itu koordinasi, sinkronisasi, integrasi serta sinergitas dari pemerintah, Swasta dan Masyarakat seluruh stakeholder pariwisata agar terus ditingkatkan dalam memaksimalkan segala peluang dan potensi pariwisata yang ada.

2.2.2.4. KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Program Peningkatan ketahanan Pangan

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan dari komoditas perikanan, sampai ketingkat rumah tangga. Sasaran dari program ini untuk meningkatnya ketersediaan pangan, khususnya sumber protein hewani ikan, dari produksi yang berbasis lokal.

Kegiatan yang mendukung program peningkatan ketahanan pangan yaitu : 1) Pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan, 2) Pembinaan dan pengembangan sistem pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, 3) Penyelenggaraan revitalisasi perikanan, 4) Pengembangan propekan bandeng di tambak , 5). Promosi dan publikasi kegiatan perikanan, 6) Kampanye GEMARIKAN, 7) Pemberdayaan wanita tani/PKK, 8) Pembinaan pondok pesantren, 10) Pembinaan desa mandiri pangan 11) Pengembangan proksimas semah

Adapun capaian dari program ini terbinanya para pembudidaya, pengolah ikan dan nelayan, baik yang berlokasi di desa Mandiri Pangan maupun di sentra perikanan lainnya serta terkendalnya kesehatan ikan maupun habitatnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam mensukseskan program ini yaitu terbatasnya keterampilan para pembudidaya ikan dalam mengelola usahanya, sehingga hasil panen ada yang tidak mencapai target, Sedangkan solusinya yaitu memberikan keterampilan budidaya ikan khususnya bagi pembudidaya ikan pemula.

2. Program Pengembangan Agribisnis .

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha agribisnis dibidang agribisnis hulu, on farm, hilir dan usaha jasa pendukungnya.

Sasaran program ini yaitu meningkatnya pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan.

Kegiatan mendukung program pengembangan agribisnis yaitu :1) Pengembangan pola permodalan dan investasi dalam negeri dan asing, 2) Penguatan kelembagaan pemasaran dalam negeri, 3) Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan, 4) Pengembangan produk nilai tambah tinggi, 5) Pengawasan Mutu dan keamanan produk perikanan, 5) Peningkatan kompetensi lembaga sertifikasi, 6) Restrukturisasi dan Revitalisasi usaha industri pengolahan, 7) Pengembangan statistik pengolahan dan pemasaran, 8) Pengembangan pakan ikan alternatif magot, 9) Pengembangan Stasiun Pijuan.

Capaian dari program ini yaitu meningkatnya kegiatan usaha dan perdagangan ikan, dengan iklim usaha yang sehat serta memberikan tingkat keuntungan yang wajar bagi pembudidaya ikan.

Permasalahan yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, yaitu masih terbatasnya kemampuan para pembudidaya ikan dalam mengakses sumber permodalan dan pemasaran. Solusinya yaitu diberikannya keterampilan dalam penyusunan proposal/rencana usaha, serta memberikan alternatif tempat pemasaran/penampung.

3. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan.

Program ini bertujuan untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan nilai tambah hasil perikanan serta pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Sasaran dari program ini yaitu optimalnya pemanfaatan sumberdaya perikanan.

Kegiatan yang mendukung program pengembangan sumberdaya perikanan yaitu :1) Pengembangan prasarana perikanan, 2) Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil, 3) Pengembangan sarana perikanan, 4) Pengembangan kawasan budidaya air tawar, 5) Pengembangan usaha perikanan tangkap, 6) Pengembangan BBIS Kerinci, Pengembangan pelabuhan perikanan pantai, 7) Pengembangan UPBAP simpang jelita, 8) Pengembangan Stasiun Thehok, 9) Pengembangan Stasiun Telanaipura

Capaian dari program ini yaitu tercapainya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan melalui penyediaan fasilitas/keperluan bagi nelayan untuk melaut, serta bagi perlengkapan bagi pembudidaya ikan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, yaitu masih banyaknya lokasi nelayan dan pembudidaya ikan yang masih terpencar-pencar, sehingga sangat sulit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Solusinya yaitu dengan memanfaatkan tenaga penyuluh lapangan, yang berada di setiap kecamatan atau sentra perikanan.

4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan.

Program ini bertujuan untuk mengelola dan mendayagunakan potensi sumberdaya laut pesisir secara optimal, adil dan lestari melalui keserasian antara berbagai pemanfaatan sehingga memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah. Sasaran program ini yaitu meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan .

Kegiatan yang mendukung program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan yaitu :1) Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas, 2) Mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir, 2) Pengelolaan konservasi

keanekaragaman hayati laut. 3) Pengembangan Pengelolaan konservasi laut dan perairan 4) Optimalisasi pendayagunaan potensi pulau-pulau kecil, 5). Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut 6) Penyusunan analisa data dan statistik KP3K, 7) Penyusunan rencana tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 8) Pemberdayaan ekonomi, Sosial budaya masyarakat pesisir.

Pencapaian dari program ini diantaranya terjaganya kelestarian sumberdaya hayati ikan melalui pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak kelestarian sumberdaya ikan, seperti penggunaan listrik, racun dan bahan peledak.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, antara lain: terbatasnya tenaga penyidik perikanan yang ada, yang bisa melakukan penyidikan perkara. Adapun pemecahan masalahnya yaitu dengan melakukan patroli bersama dengan petugas keamanan, baik dari kepolisian maupun TNI.

5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran dari program ini yaitu meningkatnya perlindungan sumberdaya alam dan pengelolaan kawasan konservasi.

Kegiatan yang mendukung program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam yaitu :1) Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISWASMAS), 2) Penataan dan penegakan hukum, 3) Peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan, 4) Peningkatan Tata pemanfaatan sumberdaya ikan, 5) Pemacu stock/restocking ikan perairan umum, 6) Perlindungan dan konservasi/rehabilitasi sumberdaya alam, 7) Pengawasan terpadu penangkapan ikan.

Pencapaian dari program ini yaitu tercapainya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya perikanan, serta bertambahnya populasi ikan sebagai hasil dari pemacuan stok ikan.

Permasalahan utama dalam mensukseskan program ini yaitu masih adanya sekelompok masyarakat yang belum sadar dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan, solusinya yaitu dengan melakukan tindakan preventif dan repressif, bagi setiap para pelanggarnya.

Pada tahun 2009 total produksi komoditas perikanan di Provinsi Jambi sebesar 75.559,3 ton sedangkan pada tahun 2010 mencapai 81.403,6 ton, dengan demikian mengalami kenaikan rata-rata sebesar 7,7 %. Meningkatnya produksi perikanan ini menunjukkan bahwa secara umum komoditas perikanan mengalami peningkatan kualitas dan kenaikan harga, di samping itu peningkatan ini menggambarkan ketersediaan sarana yang digunakan untuk usaha perikanan tangkap dan budidaya. Peningkatan produksi ikan segar tersebut diiringi juga dengan peningkatan volume produk olahan berupa ikan asin, ebi, kerupuk ikan dan lain-lain. Secara rinci perkembangan produksi perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kenaikan produksi tertinggi di tahun 2010 pada perikanan budidaya kolam sebesar 34,5 %, sedangkan pada budidaya mina padi tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Pada tahun 2010 produksi perikanan tangkap naik sebesar 1,5 % dari tahun 2009, sedangkan untuk produksi budidaya naik sebesar 20 %.

Tabel 2.25. Perkembangan Produksi Perikanan menurut jenis usaha tahun 2009-2010

No	Jenis Usaha	Produksi (ton)		Perkembangan (%)
		2009	2010*	
I.	Perikanan Tangkap			
	a. Perairan Laut	44.120	44.380,0	1,1
	2.3. erairan Umum	5.919,6	6.436,0	8,7
II.	Perikanan Budidaya			
	a. Kolam	11.747,7	15.809,2	34,5
	a. Kolam	11.702,0	12.564,7	7,3
	b. Keramba	2.060,7	2.204,2	7,0
	c. Tambak	9,3	9,3	0
	d. Mina Padi			
	Jumlah	75.559,3	81.403,6	7,7

* Angka sementara per November 2010

Tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana sektor pertanian lainnya merupakan penyerap tenaga kerja yang besar. Secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja pada sektor ini di tahun 2009 sebanyak 28.159 RTP dan tahun 2010 sebanyak 29.024 RTP. Kondisi ini mengalami kenaikan sebesar 3,1 % sebagaimana rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.26 Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (TPT) tahun 2009 – 2010

No	Jenis Usaha	Jumlah RTP/Tahun		Perkembangan
		2009	2010*	
1	.Perikanan Laut	2.359	2.416	2,4
2	Perairan umum	8.491	8.645	1,8
3	Budidaya kolam	9.561	9.752	2,0
4	Keramba & Japung (KJA)	6.818	7.261	6,5
5	Budidaya tambak	793	810	2,1
6	Budidaya mina padi	137	140	2,2
	JUMLAH	28.159	29.024	3,1

Tingkat ketersediaan ikan untuk konsumsi penduduk Jambi pada tahun 2009 sebesar 27,0 kg/kap/th, sedangkan pada tahun 2010 mencapai 28,7 kg/kapita/tahun sehingga terjadi peningkatan rata-rata sebesar 6,3 %. Peningkatan konsumsi ini menggambarkan bahwa ketersediaan produk perikanan yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maupun usaha budidaya tersedia dengan cukup. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.60 berikut :

Tabel 2.27 ketersediaan konsumsi ikan perkapita tahun 2009 – 2010.

No	Uraian	Tahun (Kg)		Perkembangan (%)
		2009	2010*	
1	Konsumsi ikan perkapita	27,0	28,7	6,3

* angka sementara

Jumlah alat penangkapan ikan terjadi peningkatan 5,6 %, dimana pada tahun 2009 jumlah alat tangkap 31.148 unit dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 32.914 unit. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28 Jumlah alat penangkapan ikan tahun 2009 - 2010

No	Jenis Usaha	Jumlah Alat Penangkapan /Tahun		Perkembangan (%)
		2009	2010*	
1	Perikanan laut	2.614	2.687	2,8
2	Perairan umum	29.810	30.227	1,4
	JUMLAH	31.148,0	32.914	5,6

* angka sementara

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, 2010.

Jumlah unit kapal/perahu yang digunakan dalam penangkapan ikan pada tahun 2009 sebanyak 8.515 unit dan tahun 2010 sebanyak 8.585 unit, sehingga terjadi kenaikan jumlah

kapal/perahu sebanyak 0,8 %. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29 Jumlah perahu/kapal tahun 2009 s/d 2010

No	Jenis Usaha	Jumlah Perahu/Kapal per unit		Perkembangan (%)
		2009	2010*	
1	Penangkapan ikan dilaut	2.359	2.392	1,4
2	Penangkapan ikan di perairan umum	6.156	6.193	0,6
	JUMLAH	8.515	8.585	0,8

* angka sementara

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, 2010.

Pada tahun 2010 tingkat pendapatan nelayan/pembudidaya ikan naik sebesar 9,6 % pertahun. Pendapatan pembudidaya ikan pada tahun 2009 sebesar Rp10.500.000 pertahun dan tahun 2010 sebesar Rp11.900.000,- pertahun sehingga naik sebesar 13,3 % pertahun. Sedangkan pendapatan nelayan pada tahun 2009 sebesar Rp46.400.000,- dan tahun 2010 sebesar Rp50.500.000,- naik sebesar 8,8 % pertahun. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30 Tingkat pendapatan nelayan/pembudidaya ikan tahun 2009 s/d 2010

No	Jenis Usaha	Pendapatan nelayan/pembudidaya		Perkembangan (%)
		2009	2010*	
1	Nelayan	46.400.000,-	50.500.000,-	8,8
2	Pembudidaya	10.500.000,-	11.900.000,-	13,3
	JUMLAH	56.900.000,-	62.400.000,-	9,6

* angka sementara

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, 2010.

Pada tahun 2010 tingkat produksi benih ikan di Provinsi Jambi naik sebesar 2,0 % pertahun. Dimana jumlah produksi benih pada tahun 2009 sebesar 127.695.115 ekor dan tahun 2010 sebesar 130.260.700 ekor. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31 Tingkat produksi benih ikan tahun 2009 s/d 2010.

No	Uraian	Jumlah produksi (ekor)		Perkembangan (%)
		2009	2010*	
1	Produksi benih ikan	127.695.115,-	130.260.700	2,0

* Angka sementara per November 2010

Tingkat pelanggaran penangkapan ikan menurun sebesar 72,4% pertahun, dimana pada tahun 2009 pelanggaran perikanan sebanyak 29 kasus, sedangkan tahun 2010 menurun menjadi 8 kasus. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32 Pelanggaran perikanan tahun 2009 s/d 2010

No	Uraian	Jumlah pelanggaran (kasus)		Perkembangan (%)
		2009	2010*	
1	Pelanggaran penangkapan ikan	29	8	- 72,4

* Angka sementara per November 2010

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

2.3.1. Infrastruktur Daerah

1. Kualitas infrastruktur transportasi darat terutama jalan yang relatif rendah mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah provinsi Jambi maupun dari provinsi Jambi ke Provinsi tetangga. Pembangunan infrastruktur jalan-jalan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Provinsi Jambi perlu dilakukan

untuk kelancaran transportasi orang, barang dan jasa terutama dari kawasan sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran.

2. Terbatasnya pengembangan akses perhubungan untuk daerah pantai dan pulau terluar di bagian timur Provinsi Jambi, serta masih adanya desa yang belum terjangkau oleh sarana transportasi darat. Serta pembebanan berlebihan (*overloading*) masih terjadi terutama pada lintas Timur dan Barat Sumatera yang melalui Provinsi Jambi.

3. Transportasi sungai, danau dan laut merupakan transportasi tradisional masyarakat Jambi masih belum dimanfaatkan dengan baik. Transportasi ini relatif lebih murah karena mampu mengakomodasi kapasitas angkut yang lebih besar dan biaya perawatan sarana transportasi yang lebih rendah. Transportasi ini dapat dimanfaatkan terutama untuk angkutan barang seperti hasil tambang dan hasil pertanian dalam arti luas. Revitaliasi transportasi sungai dan laut perlu dilakukan untuk mengembalikan kejayaan transportasi sungai dan laut di Provinsi Jambi. Prasarana perhubungan laut belum tersedia Pelabuhan Internasional, yang ada baru pelabuhan laut antar pulau yang masih relatif kecil.

4. Prasarana perhubungan udara belum tersedia bandar udara internasional, yang ada hanya satu bandar udara sekunder dan satu bandara udara perintis.

5. Defisit tenaga listrik yang mencapai 30 MW sehingga pemadaman bergilir harus dilakukan. Pembangkit listrik sebagian besar masih menggunakan Pembangun Listrik Tenaga Uap dan tenaga diesel dan saat ini hanya tersedia 3 unit pembangkit listrik dengan kapasitas masih dibawah kebutuhan.

6. Sungai Merangin di Kabupaten Kerinci sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan potensi 350 MW belum termanfaatkan secara optimal. Provinsi Jambi butuh listrik

181,07 MW sementara kemampuan hanya 155 MW. Disamping itu dapat mengairi sawah-sawah disekitarnya. Jika dibangun PLTA 350 MW maka kelebihan kapasitas dapat didistribusikan pada daerah yang lain.

7. Kualitas Mutu Air (KMA) yang terdapat pada Sungai Batanghari sudah berada pada tingkat tercemar sedang sampai tercemar berat.

8. Pelayanan pos yang belum mampu menjangkau daerah-daerah yang terisolir, terutama di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Merangin daya jangkau telekomunikasi paling rendah hanya mencapai 30,5 persen wilayah desa.

9. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Selain itu pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian tersebut juga akan meningkatkan produksi padi khususnya sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jambi.

2.3.2. Sosial Budaya

2.3.2.1. Pendidikan

Permasalahan pokok pendidikan di Provinsi Jambi antara lain:

1. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah serta kesadaran masyarakat untuk bersekolah yang masih relatif rendah.
2. Belum meratanya sebaran pendidikan di kabupaten/kota yang menyebabkan perbedaan APK/APM yang mencolok antara kabupaten dan kota.
3. Banyak jumlah sekolah yang rusak, 53.6% dari total 14.747 ruang kelas SD dan 19.6% dari total 2.260 ruang kelas SMP serta 27.37% dari total 1.030 ruang kelas SMA.

4. Belum optimalnya proses belajar mengajar sebagai akibat sarana dan prasarana seperti buku, alat-praktik, alat peraga dan alat-alat laboratorium yang belum memadai.
5. Distribusi guru dan tenaga pendidik yang kurang merata antar satuan pendidikan dan antar wilayah termasuk terpenuhinya kebutuhan guru di daerah terpencil sesuai dengan standar pelayanan minimal.
6. Sistim Informasi Manajemen yang menyajikan data dan informasi belum berjalan dengan baik.
7. Belum mantapnya koordinasi antara dinas kabupaten/kota dengan dinas provinsi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.
8. Pelaksanaan muatan lokal yang masih bersifat umum dan belum menyentuh langsung terhadap kepentingan daerah masing-masing.
9. Distribusi tenaga pendidik yang tidak proporsional antar daerah maupun antara sekolah pada daerah yang sama, terutama yang berhubungan dengan tenaga pendidik bagi bidang ilmu tertentu.
10. Masih rendahnya serapan dunia usaha dan industri untuk menerima tenaga kerja tingkat menengah karena dianggap masih kurang terampil dan kurang profesional.

2.3.2.2. Kesehatan

Adapun permasalahan pokok yang dihadapi antara lain ;

1. Pelayanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata untuk seluruh lapisan dan strata ekonomi dan sosial masyarakat. Pelayanan kesehatan masih bersifat diskriminatif sehingga menyebabkan disparitas status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender.
2. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah, yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi di Provinsi Jambi.

3. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.
4. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Jambi pada saat ini masih belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Sarana, prasarana dan tenaga kesehatan terpusat di Kota Jambi sementara di sebagian besar ibukota Kabupaten tidak memiliki sarana, prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai apalagi di wilayah-wilayah terpencil.
6. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan penyebaran yang tidak merata.
7. Terbatasnya Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan.
8. Terbatasnya kegiatan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

2.3.2.3. Kebudayaan dan Pariwisata

Beberapa permasalahan bidang kebudayaan antara lain:

1. Besarnya potensi kepariwisataan di Provinsi Jambi belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.
2. Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur.
3. Rendahnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya nasional maupun budaya asing yang unggul dan dapat menunjang percepatan peningkatan pembangunan daerah.
4. Lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya, serta meningkatnya kegiatan masyarakat dalam upaya

pengembangan dan pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah.

5. Kurangnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah.

2.3.2.4. Pemuda dan Olahraga

Permasalahan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga meliputi:

1. Kurangnya minat pemuda baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang kewirausahaan.
2. Meningkatnya jumlah pemuda yang terlibat dalam jebakan NAPZA dan HIV/AIDS di sisi lain hal tersebut kurang diikuti dengan upaya-upaya mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap bahaya NAPZA dan HIV/AIDS tersebut.
3. Kurangnya pengembangan budaya olah raga di kalangan masyarakat luas.
4. Terbatasnya media yang dapat memfasilitasi pemuda dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Keterbatasan ini muncul sebagai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga serta tingkat pendidikan pemuda yang masih relatif rendah.
5. Belum optimalnya peran swasta dalam menunjang prestasi olah raga daerah.
6. Semakin berkurangnya ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah.

2.3.3. Perekonomian Daerah

2.3.3.1. Keuangan Daerah

Fakta dan Permasalahan dari Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. **Penerimaan PAD Provinsi Jambi masih tergantung pada penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama** yang besarnya pada tahun 2010 mencapai 85 persen dari total penerimaan PAD Provinsi Jambi pada tahun tersebut.
2. **Adanya kesenjangan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota** yang disebabkan adanya perbedaan karakteristik potensi sumberdaya yang berbeda setiap wilayah. Kabupaten/Kota dengan kapasitas fiskal terbesar adalah Kota Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, dan Bungo, sedangkan kapasitas fiskal terendah di Kabupaten Merangin.
3. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD), selama tahun 2010 mengalami peningkatan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan **penerimaan dari dana perimbangan masih lebih kecil**. Kondisi ini mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara persentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Jambi terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Provinsi sangat terbatas sebagai sumber pendapatan daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada.
4. Di masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dipenda Provinsi Jambi, **belum dapat segera mengetahui wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum melunasi pajaknya pada tahun bersangkutan**.

5. **Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak** terhadap peranan PKB dan BBN-KB sebagai sumber dana pembangunan daerah.
6. **Kewenangan di beberapa Samsat masih belum optimal.** Sedangkan status samsat telah menjadi Samsat penuh, seperti Samsat Kabupaten Tanjab Timur, Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi dan Samsat Kabupaten Sarolangun.

2.3.3.2. Sumberdaya Ekonomi

1. Menurunnya kinerja ekspor yang antara lain disebabkan biaya ekonomi tinggi; rendahnya infrastruktur ekspor seperti pelabuhan, peti kemas dan angkutan kapal laut serta rendahnya infrastruktur jalan ke pelabuhan; ketergantungan pada produk primer (nilai tambah rendah), penurunan ekspor produk kayu olahan dan karena keterbatasan bahan baku, berpengaruh besar terhadap kinerja ekspor Jambi; masih besarnya ketergantungan pasar ekspor pada negara tertentu seperti Singapura; keragaman ekspor yang masih rendah; lemahnya sistem jaringan informasi pasar ekspor terutama dalam mendukung peningkatan daya saing ekspor.
2. Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan.
3. Rendahnya pendapatan petani yang tercermin dari nilai NTP petani masih dibawah 100 (98,54) tahun 2009. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan daya beli petani di Jambi masih rendah karena rendahnya pendapatan.
4. Setiap tahun lahan-lahan potensi tanaman pangan dan hortikultura ada yang beralih (konversi) ke subsektor lain seperti perkebunan sawit, sehingga luas baku lahan pertanian pangan & hortikultura kecenderungan terjadi penurunan, jika tidak diikuti dengan pembukaan lahan – lahan baru.

5. Masih rendahnya pertambahan populasi ternak dari potensi (kapasitas tampung) yang ada.
6. Rendahnya produktivitas yang umumnya terdapat di daerah rawa/ pasang surut.
7. Rendahnya kualitas beras yang dihasilkan, karena terbatasnya mesin perontok gabah dan lantai jemur.
8. Terjadinya kesenjangan produktivitas karena belum optimalnya teknologi yang digunakan, ketersediaan dan kualitas air masih belum sesuai kebutuhan pertanian.
9. Masih tingginya desa rawan pangan di Provinsi Jambi.
10. Pola konsumsi masih banyak tergantung dengan padi-padian (beras).
11. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum mencapai ideal.
12. Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan nelayan.
13. Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasai nelayan tradisional, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki tertinggal jauh dengan nelayan asing yang masuk ke perairan Jambi.
14. Rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan teknologi serta terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan sehingga pembudidaya ikan belum mencapai skala usaha.
15. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding potensi lestarnya.
16. Tingginya tingkat kerusakan dari produksi perikanan, karena belum tersedianya *cold storage* untuk penyimpanan dan angkutan perikanan tersebut ke daerah pemasaran.
17. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, cold storage, jenis alat tangkap.
18. Merebaknya pencurian ikan dan terjadinya *over fishing*, serta pola penangkapan yang merusak ekosistem pesisir dan laut.

19. Masih ada oknum masyarakat yang menggunakan alat tangkap ikan terlarang seperti menggunakan tuba/setrum dan pencurian ikan di laut oleh Kapal Asing.
20. Aplikasi teknologi budidaya ikan belum merata, sehingga produksi budidaya belum memenuhi standar ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
21. Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpencair, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan.
22. Terbatasnya tenaga penyuluh teknologi perikanan, khususnya tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan.
23. Tingkat keterampilan dan pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan masih rendah, baik keterampilan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat.
24. Transportasi jalan belum lancar menyebabkan petani kesulitan dalam mendapatkan saprodi dan memasarkan produk.
25. Produksi dan kelestarian perikanan di perairan umum menghadapi tantangan adanya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan terutama untuk jenis-jenis ikan langka yang hampir punah.
26. Rendahnya produktivitas dan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.
27. Terbatasnya akses UMKM dan Koperasi kepada sumberdaya produktif
28. Tertinggalnya kinerja koperasi dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang disebabkan antara lain karena rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.

2.3.4. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Rendahnya nilai tambah sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan.
2. Belum optimumnya perhatian pada perkebunan rakyat. Memberikan perhatian yang lebih besar pada sub sektor perkebunan, terutama perkebunan rakyat.
3. Kemampuan dan keberlanjutan produksi pangan, pertanian, dan perikanan yang akan menghadapi kendala dan keterbatasan dukungan kapasitas sumberdaya alam.
4. Jaminan penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap input produksi (pakan, pupuk, dan benih).
5. Volume pemanfaatan energi dari tahun ke tahun masih bertambah , dan diperkirakan akan terus tumbuh dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Kesenjangan antara konsumsi dengan kemampuan memulihkan kembali, dan mengelola pemanfaatan tidak berimbang. Suatu saat jika pemanfaatan tidak dilakukan secara berimbang, dan substitusi teknologi tidak dikembangkan, ketahanan energi akan terganggu. Hal ini terjadi karena sebagian besar (lebih dari 90%) lapangan minyak yang saat ini beroperasi merupakan lapangan minyak tua (*mature*), sedangkan penambahan lapangan minyak baru tidak dapat mengimbangi laju kebutuhan minyak mentah dalam negeri.
6. Salah satu kendala utama pembukaan lapangan minyak baru adalah adanya **konflik atau ketidakselarasan fungsi lahan**, terutama dengan fungsi kawasan hutan konservasi dan lindung. Selain itu kendala lain adalah keterbatasan permodalan nasional, sehingga ketergantungan terhadap investor asing masih cukup tinggi.
7. Rendahnya minat berinvestasi **untuk pengusahaan mineral dan batubara**. Keadaan ini disebabkan masalah kepastian hukum

dan belum optimalnya sistem insentif untuk menarik masuknya investor baru dalam usaha pertambangan.

8. **Masih terbatasnya jumlah maupun kualitas sumberdaya manusia profesional** dalam penguasaan teknologi tenaga-tenaga pertambangan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat.
9. Pemanfaatan tambang telah menyisakan permasalahan lingkungan. **Reklamasi tambang belum dikelola secara ekologis dan ekonomis**, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup fisik meliputi air, udara, tanah, dan bentang alam, ataupun nonfisik seperti sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Persyaratan lingkungan yang ketat pada tingkat provinsi belum dipersiapkan secara optimal. Di samping itu, pembangunan pertambangan sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya alam belum dilaksanakan, ditata, dan dikembangkan secara terpadu dengan pembangunan wilayah dalam suatu kerangka tata ruang yang terintegrasi.
10. Masih tingginya kawasan hutan berstatus *'open access'* merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan. **Belum jelasnya tata batas kawasan hutan** menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.
11. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya **fragmentasi habitat satwa** yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa.
12. **Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air yang tersedia** pada musim hujan dan pada musim kemarau, menyebabkan ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, yang selain menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir. Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air telah

menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan lainnya berupa kekeringan yang berkepanjangan.

13. Tantangan monokultur tanaman tertentu, berpeluang merubah keseimbangan alam dan perubahan ekosistem, berdampak pada bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

2.3.5. Tata Pemerintahan

2.3.5.1. Pemerintahan Umum

1. **Efektivitas Peraturan Perundang-undangan.** Upaya untuk melakukan efektivitas peraturan daerah sampai dengan saat ini masih terkendala dengan masih adanya peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir sehingga kesulitan dalam membuat aturan turunannya di tingkat peraturan daerah. Pelibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan dalam bentuk peraturan daerah juga belum sepenuhnya dilakukan sehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan daerah masih dirasakan minim. Pada tingkat penegakan hukumnya juga masih dihadapkan pada banyak kendala, seperti masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat
2. **Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.** Salah satu permasalahan utama yang menjadi hambatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, terkait erat dengan belum tuntasnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, belum tuntas dan terintegrasinya program *Single Identification Number* (SIN), dan belum tuntasnya reformasi manajemen keuangan negara, terutama reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sampai dengan saat ini upaya pencegahan belum dilaksanakan secara integratif oleh aparat publik sebagai

penyedia pelayanan umum, bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.

Upaya pencegahan KKN juga masih terkendala oleh **belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan negara dan pengawasannya**. Penyebabnya antara lain oleh keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan auditor daerah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, belum sempurnanya mekanisme/hubungan kerja yang mengatur pengawasan yang dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan perlunya diperkuat kode etik/standar audit. Independensi pengawas internal dalam melakukan pengawasan juga masih sering mendapatkan kritik dari masyarakat.

Di samping permasalahan tersebut di atas, **budaya kerja produktif juga belum berkembang secara maksimal di lingkungan birokrasi**. Pelaksanaan kode etik bagi aparat birokrasi publik (*code of conduct*) masih kabur sehingga belum mampu menciptakan adanya budaya birokrasi yang sehat, seperti kerja keras, keinginan untuk berprestasi, kejujuran, rasa tanggungjawab, serta bersih dan bebas dari KKN. Di samping itu, pengaturan tentang konflik kepentingan di lingkungan birokrasi pemerintah yang dilakukan oleh PNS juga belum memadai. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, penerapan *e-procurement* belum dapat dilaksanakan. Padahal, pengembangan dan penerapan *e-procurement* merupakan instrumen yang efektif untuk mencegah praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa publik.

3. **Pelayanan Publik.** Meskipun kemajuan telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan skor indeks kepuasan masyarakat yang baik, namun disadari bahwa pemerintah Provinsi Jambi **belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi**, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

Para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Provinsi Jambi masih terkendala dengan berbagai regulasi, system pelayanan investasi dan birokrasi pelayanan perizinan yang lambat dan mahal. Oleh karena itu diperlukan adanya berbagai kemudahan pelayanan investasi.

Sebagian besar unit pelayanan public belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan. Hal ini diperburuk dengan belum tersedianya manajemen penanganan keluhan yang efektif. Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga penanganan pengaduan seperti “Ombudsman Daerah”.

4. **Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.** Belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Permasalahan lainnya adalah bahwa bisnis proses

yang ada di dalam birokrasi banyak yang belum efisien dan belum akuntabel. Proses kerja di dalam birokrasi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

5. **Pengembangan budaya hukum dan HAM.** Meskipun upaya pengembangan budaya hukum dan HAM terus dilakukan secara sinergi antara pemerinrah dan pemerintah provinsi, dan kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, namun kesadaran hukum serta penghormatan terhadap HAM masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan masih banyak kasus pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. Pada tahun 2009 saja, terdapat 2. 038 kasus pidana, 47 pidana korupsi, dan 349 kasus perdata.

Di sisi lain upaya pendidikan Hukum dan HAM serta Koordinasi penegakan HAM skala provinsi, dan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan Hukum dan HAM yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap pemerintah masih belum berjalan optimal. Demikian juga dengan kinerja Panpel RANHAM provinsi dan kab/kota dalam Provinsi Jambi.

2.3.5.2. Politik

1. Tingginya angka partisipasi dalam pemilu ternyata tidak menjamin kualitas pemilu, baik pemilu Kepala Daerah maupun legislatif dan eksekutif. Bahkan ada kecenderungan perubahan pola pikir masyarakat tentang pemilu. Ada anggapan yang keliru bahwa pemilu indentik dengan imbal jasa. Sehingga menimbulkan akses negatif terhadap berbagai kecurangan dalam pemilu. Khusus partisipasi politik perempuan, meskipun telah mengalami banyak kemajuan. Namun, kondisi ini belum mampu mengubah realitas rendahnya peran politik perempuan dalam lembaga-lembaga politik. Kendala yang masih dihadapi adalah

kompetisi internal partai politik, dan kompetisi di antara perempuan itu sendiri. Kendala lainnya adalah terkait faktor eksternal, seperti budaya patriakal yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan, dan masih banyaknya dianut paradigma bahwa dunia politik adalah kotor dan hanya cocok untuk laki-laki. Selain itu, perempuan juga masih belum dianggap sebagai kelompok yang berhak memiliki peran independen dalam melakukan aktualisasi diri di bidang sosial dan politik, serta belum memiliki akses yang sama ke dalam sumber-sumber pengetahuan dan pendidikan.

2. Sampai saat ini partai politik belum menunjukkan kinerja parpol yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai parpol, yaitu agregasi dan artikulasi politik, komunikasi politik, dan pendidikan politik. Selain itu Parpol pun menghadapi beberapa persoalan internal organisasinya, seperti sarana dan prasarana penunjang organisasi, konflik internal dalam pergantian kepengurusan, belum berjalan optimalnya proses kaderisasi dan mekanisme rekrutmen, lemahnya kemampuan dan kapasitas SDM kader dan fungsionaris partai dalam membangun dan mempraktikkan dasar-dasar demokrasi, dan lemahnya sistem demokrasi internal dalam partai politik. Akibatnya kepercayaan publik terhadap partai politik menjadi berkurang.
3. Masih rendahnya pemanfaatan informasi menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat sulit berpartisipasi dan ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan berperan dalam ruang publik, dan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari masalah penyediaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi publik yang masih sampai saat ini masih mengalami berbagai kekurangan, akibat dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bidang

informasi dan komunikasi, belum memadainya regulasi di bidang komunikasi dan informasi, serta sarana dan prasarana komunikasinya. Di sisi lain kondisi saat ini mengindikasikan industri media yang berkembang masih didominasi oleh kepentingan profit/industri yang dikhawatirkan mengganggu kebebasan pers.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Ekonomi makro Provinsi Jambi adalah salah satu alat untuk melihat sejauh mana kemampuan daerah yang dicerminkan antara lain sebagai berikut : Perdagangan antar daerah dan luar negeri Provinsi Jambi sejak triwulan I-2010 mengalami defisit. Namun pada triwulan II-2010 neraca perdagangan Jambi mencapai surplus, hal ini dicapai karena nilai ekspor Bulan Juni mencapai US\$ 90,59 juta atau naik 6,62 persen dan nilai impor bulan Juni hanya US\$ 14,26 juta atau turun 29,02 persen, sehingga surplus neraca perdagangan Provinsi Jambi bulan Juni 2010 sebesar US\$ 76,33 juta. Dengan demikian secara kumulatif surplus neraca perdagangan Januari-Juni 2010 mencapai US\$ 453,65 Juta (BPS, Agustus 2010).

Nilai ekspor Jambi periode Januari-Juni 2010 didominasi oleh karet olahan sebesar US\$ 328,45 juta atau 62,54 persen kemudian pertambangan sebesar US\$ 64,12 juta atau 12,21 persen, sehingga nilai tambah (*added value*) dari komoditi ekspor ini masih relatif rendah. Kondisi ini tentunya berpengaruh rendahnya pada *multiplier effect* dari komoditi ekspor tersebut seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan harga komoditi dan tentunya penerimaan daerah juga berpengaruh. Kemudian dari sisi negara tujuan, ekspor Jambi mayoritas ke negara Singapura sebesar US\$ 149,72 juta atau 28,51 persen, kemudian Malaysia US\$ 67,02 juta atau 12,76 persen dan China sebesar US\$ 63,29 juta atau 12,05 persen. Hal ini menunjukkan ketergantungan ekspor Jambi ke Singapura dan Malaysia cukup tinggi, dan karakteristik dari kedua negara tersebut adalah membeli komoditi primer atau bahan mentah dan sebagian bahan setengah jadi, dan

kedua negara tersebut akan mengolahnya kembali untuk di ekspor kembali ke Indonesia termasuk Jambi dalam bentuk barang jadi. Ekspor Jambi sebesar US\$ 405,93 juta atau 77,29 persen melalui Pelabuhan Talang Duku, kemudian US\$ 61,97 juta atau 11,80 persen melalui Pelabuhan Kuala Tungkal dan Pelabuhan Muara Sabak hanya sebesar US\$ 57,26 juta atau 10,90 persen.

Selanjutnya bila dilihat dari Impor Jambi menurut kelompok komoditi sampai Juni 2010 didominasi oleh mesin dan alat angkutan sebesar US\$ 38,07 juta atau 53,24 persen, hasil industri lainnya sebesar 18,73 juta atau 26,19 persen dan bahan kimia dan sejenisnya sebesar US\$ 10,23 juta atau 14,31 persen serta bahan makanan dan sejenisnya sebesar US\$ 2,67 juta atau 3,73 persen. Salah satu yang menjadi keprihatinan kita kedepan adalah meningkatnya impor bahan makanan dan sejenisnya yang dapat mengancam permintaan terhadap bahan makanan produk lokal termasuk dari Jambi, karena produk lokal tersebut kalah bersaing dari sisi kualitas dan harga, sehingga konsumen lebih menyukai produk makanan dari impor. Oleh karena dalam mewujudkan Jambi Emas 2015, sektor pertanian harus menjadi basis pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditi dari sektor pertanian tersebut yang padagilirannya dapat meningkat kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pangsa impor Provinsi Jambi menurut negara asal utama sampai Juni 2010 didominasi oleh Negara China sebesar US\$ 33,36 juta atau 46,65 juta, Singapura sebesar US\$ 14,20 juta atau 19,86 persen dan Amerika Serikat sebesar US\$ 5,36 juta atau 7,50 persen. Berdasarkan selisih ekspor dan impor tersebut, maka Provinsi Jambi mengalami surplus neraca perdagangan kumulatif bulan Januari-Juni 2010 sebesar US\$ 453,65 juta, sedangkan total surplus bulan Juni 2010 sebesar US\$ 76,33 juta atau 16,82 persen dari total kumulatif Januari-juni 2010, Negara yang memberikan surplus

terbesar pada bulan Juni 2010 adalah China sebesar US\$ 14,98 juta atau 19,63 persen, kemudian Jepang sebesar US\$ 11,73 juta atau 25,86 persen, Malaysia sebesar 14,99 persen, Amerika Serikat sebesar US\$ 8,595 juta atau 11,26 persen dan Singapura sebesar US\$ 6,54 juta atau 8,57 persen, negara lain sebesar US\$ 22,94 juta atau 30,05 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan Provinsi Jambi terhadap ekspor-impor dari negara China, Singapura, Jepang, Malaysia dan Singapura relatif besar, perlu dilakukan strategi diversifikasi dan strategi pengembangan pasar ekspor komoditi Provinsi Jambi, disamping yang lebih penting tentunya peningkatan nilai tambah dari komoditi ekspor tersebut.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jambi, pada bulan Agustus 2010, Kota Jambi mengalami deflasi sebesar 0,66 persen. Indeks harga konsumen (IHK) Kota Jambi turun dari 125,76 persen pada bulan Juli 2010 menjadi 124,93 pada bulan Agustus 2010. Laju inflasi tahun kelender Kota Jambi pada bulan Agustus sebesar 6,29 persen, sedangkan laju inflasi tahun ke tahun mencapai 7,92 persen. Inflasi tahun kelender sebesar 6,29 persen terjadi karena adanya kenaikan bahan makanan sebesar 14,71 persen, makanan jadi, minuman rokok dan tembakau sebesar 7,51 persen, perumahan, air listrik, gas dan bahan bakar sebesar 2,63 persen, sandang 1,31 persen, kesehatan 1,69 persen, pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,50 persen dan transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,12 persen. Pada bulan September – Oktober 2010 ini, diperkirakan dorongan permintaan secara umum akan lebih kuat karena momentum bulan puasa dan hari raya idul fitri 1431 Hijryah sehingga akan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Provinsi Jambi dalam mendorong tekanan inflasi. Inflasi di kota Jambi pada Tahun 2010 ini diperkirakan mencapai 7 – 8 persen, sehingga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang diprediksi hanya mencapai 6 - 7 persen. Walaupun tingkat inflasi di Kota Jambi

diperkirakan masih dibawah satu digit, namun pengendalian terhadap meningkatnya inflasi harus dijadikan prioritas dalam kebijakan stabilisasi, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, khususnya peningkatan produksi komoditas pokok yang selama ini didatangkan dari luar Provinsi Jambi.

Sektor riil mulai bergerak namun relatif lambat, hal ini tercermin dari pertumbuhan volume ekspor pada bulan Juni 2010 hanya sebesar 0,79 persen dan nilai ekspor sebesar 6,62 persen. Disisi lain nilai impor tumbuh sebesar 29,02 persen dan volumenya naik sebesar 21,76 persen. Namun secara keseluruhan neraca perdagangan Provinsi pada bulan Juni 2010 surplus sebesar US\$ 76,33 juta atau naik 17,66 persen dibanding bulan sebelumnya, sehingga kumulatif surplus neraca 453,65 juta.

Instrumen yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak adalah melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Proses peningkatan taraf hidup tersebut terutama sekali terfokus pada sektor-sektor yang menjadi andalan perekonomian di Provinsi Jambi. Peranan UMKM dan Koperasi pada sektor industri yang berbasis pertanian memiliki kecenderungan yang lebih tinggi berdampak positif terhadap perekonomian Provinsi Jambi, yaitu dengan angka multiplier rata-rata sebesar 7,55. Ini berarti, bila UMKM dan Koperasi pada sektor industri diberi injeksi sebesar 1 milyar maka output perekonomian Provinsi Jambi akan meningkat sebesar 7,55 milyar. Secara rata-rata selama tahun 2005 – 2009 perkembangan jumlah koperasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 5,29%. Dimana perkembangan jumlah koperasi pada tahun 2007 sebesar 3,25 %, tahun 2008 sebesar 4,08 % dan tahun 2009 sebesar 8,53 %. Sementara perkembangan jumlah koperasi aktif juga cenderung menunjukkan trend yang positif, dimana jika pada tahun 2007 menunjukkan perkembangan negatif 0,24 %, maka untuk tahun

2008 meningkat tajam sebesar 3,13 % dan terus mengalami peningkatan di tahun 2009 sebesar 5,65 %. Sedangkan untuk jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2007 meningkat sebesar 10,00 %, tahun 2008 meningkat sebesar 13,64 % dan pada tahun 2009 meningkat sebesar 7,31 %.

Pangsa investasi swasta pada triwulan II-2010 tidak banyak mengalami perubahan dibanding dengan periode-periode sebelumnya yakni sebesar 17,20 persen. Namun demikian, kredit investasi selama triwulan II-2010 tumbuh sebesar 13,34 persen dengan nilai mencapai Rp. 222,28 miliar. Kondisi ini meningkat lebih dua kali lipat dibandingkan dengan pencapaian triwulan I-2010 di mana kredit investasi hanya tumbuh 5,92 persen dengan nilai Rp. 98,94 miliar (Bank Indonesia, 2010).

Komoditas energi berperan sebagai sumber penerimaan PDRB Provinsi Jambi yaitu jumlah hasil minyak bumi yang dihasilkan dari Tahun 2004 mencapai 8.995,230 barrel berturut-turut Tahun 2005 sebanyak 9.265.060 barrel, pada Tahun 2006 sebanyak 8.375.790 barrel dan pada Tahun 2007 sebanyak 7.354.710, dan pada Tahun 2009 turun menjadi 6.795.020. Hal yang sama juga terjadi pada produksi gas alam dari 667.465 MMBTU pada Tahun 2000 menjadi hanya 27.020 MMBTU Tahun 2003, dan 8 995,23 MMBTU pada Tahun 2004, sekitar 9 265,06 MMBTU pada Tahun 2005, berturut-turut 8 375,79 MMBTU pada Tahun 2006, 7 354,71 MMBTU pada Tahun 2007 dan 6 795,02 MMBTU Tahun 2008. Sedangkan produksi batubara juga terjadi penurunan dari 60.585 ton Tahun 2000 menjadi hanya tinggal 8.206 ton Tahun 2003. Selanjutnya pada kurun waktu dua tahun terakhir terjadi kenaikan antara tahun Tahun 2007 dan Tahun 2008 terjadi kenaikan produksi sebesar 2.215.496,24 m ton Tahun 2007, dan 4.216.057,27 m ton pada Tahun 2009.

Indikator keberhasilan dari bidang ketenagakerjaan tergambar pada meningkatnya kesempatan kerja dibandingkan dengan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2006 sebesar 1.205.000 orang dan pada tahun 2009 sebesar 1.452.372 orang atau meningkat 20,53%, begitupula dengan angka kesempatan kerja pada Provinsi Jambi pada tahun 2006 sebesar 1.103.000 orang dan pada tahun 2009 sebesar 1.378.372 atau meningkat 24,97%. Pertumbuhan angkatan kerja pertahun relatif berfluktuasi selama periode 2006 – 2010, dimana pertumbuhan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 12,58 persen, sehingga secara rata-rata pertumbuhannya mencapai 4,9 persen pertahun. Demikian juga pertumbuhan kesempatan kerja relative berfluktuasi, dimana pada tahun 2006 hanya sebesar 0,56%, namun tahun 2009 mencapai 12,58%., Secara rata-rata jika digunakan periode tahun 2006 – 2009, maka pertumbuhan kesempatan kerja mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,96% pertahun. Dengan tingkat pertumbuhan kesempatan kerja yang mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,96% selama periode 2006 – 2009, membawa konsekuensi pada penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan. Tingkat pengangguran pada tahun 2006 sebanyak 94.703 orang, menurun menjadi 74.000 orang di tahun 2009, atau jumlah pengangguran menurun rata-rata sebesar (7,28) persen pertahun.

Program pembangunan SDM yang dilakukan di Provinsi Jambi selama ini telah mampu meningkatkan kualitas SDM menjadi semakin baik didasarkan pada Indek Pembangunan Manusia (IPM), dari 71,99 pada tahun 2008 menjadi 72,45 pada tahun 2009. Pada tingkat provinsi, Kota sungai Penuh menempati peringkat paling atas dengan IPM sebesar 76,29 lebih tinggi dari IPM di Kota Jambi yang berada pada peringkat kedua dengan IPM sebesar 75,47, sementara yang paling rendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan IPM sebesar 70,61. Namun jika dilihat lebih jauh mengenai tingkat

pendidikan penduduk khususnya penduduk yang berumur 10 tahun keatas, menunjukkan bahwa secara umum daya saing SDM Provinsi Jambi masih relatif rendah. Penduduk di atas umur 10 tahun yang tidak memiliki ijazah SD dan menamatkan SD/MI yang mencapai 58 persen. Sedangkan yang berpendidikan SLTP/MI 18 persen, SMU/MA/SMK sebanyak 19 persen, sementara yang termasuk dalam jajaran berpendidikan tinggi D1 hingga S.3 hanya 5 persen

Kebijakan ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2010 ini, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 73.904 orang atau 4,45 persen pada tahun 2010 (bulan Februari) menjadi 60.055 orang atau 4,45 persen tahun 2010 (bulan Februari). Demikian juga tingkat kemiskinan perkotaan menurun dari 117.285 orang penduduk miskin atau 12,71 persen menurun menjadi 110.819 orang atau 11,80 persen. Penduduk miskin pedesaan juga menurun dari 132.407 orang tahun 2009 atau 6,88 persen menjadi 130,788 orang atau 6,67 persen tahun 2010, sehingga secara total penduduk miskin Provinsi Jambi menurun dari 249.692 orang atau 8,77 persen di tahun 2009 menjadi 241.607 orang atau 8,34 persen pada tahun 2010 (BPS, 2010). Penurunan kemiskinan ini sebenarnya masih sangat labil dan satu saat dapat cepat berubah, karena tergantung pada garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan yang nilainya dalam pendapatan perkapita pada tahun 2010 sebesar Rp 216.187,- perbulan.

Jika dilihat dari kelompok pendapatan masyarakat yang berada di batas garis kemiskinan tersebut relatif banyak dan ini juga diperkuat oleh indeks kedalaman kemiskinan diperkotaan sebesar 1,62 dan secara total sebesar 1,05. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga golongan masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan dan dibawah garis kemiskinan dapat keluar dari zona kemiskinan

tersebut secara permanen melalui program pemberdayaan masyarakat miskin.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi berbagai daerah selama Triwulan I-2011 sejalan dengan trend pertumbuhan nasional. Realisasi pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan I-2011 mencapai 6,5%, sedikit di atas perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2011 sebesar 6,4%. Pertumbuhan sebesar 6,4% diperkirakan terjadi di propinsi DKI Jakarta selama Triwulan I-2011. Sedangkan di kawasan Sumatera, Jawa dan Kawasan Timur Indonesia pertumbuhan pada Triwulan I-2011 diperkirakan lebih rendah dari pertumbuhan nasional yaitu masing-masing 5,8%, 5,5% dan 5,6%. Namun, jika ditinjau lebih jauh Kawasan Timur Indonesia bagian Sulampua (Sulawesi, Ambon dan Papua) diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 7,5%.

Pertumbuhan perekonomian daerah selama Triwulan I-2011 disertai dengan laju inflasi daerah. Laju inflasi nasional tercatat 6,6%. Kawasan Jakarta dan Jawa mengalami laju inflasi yang lebih rendah, masing-masing sebesar 6% dan 6,4%. Hal ini disebabkan distribusi dan pasokan bahan baku yang lancar serta tingkat upah minimum provinsi yang relatif lebih tinggi. Sebaliknya kawasan Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia mengalami laju inflasi yang lebih tinggi masing-masing 7,5% dan 7,1%.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Jakarta didorong oleh optimisme domestik yang tercermin dari peningkatan konsumsi masyarakat dan peningkatan investasi akibat perbaikan iklim investasi. Sedangkan dari sisi penawaran, peningkatan terjadi pada kinerja sektor keuangan, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), dan sektor industri. Sedangkan kinerja sektor bangunan didukung oleh berbagai proyek pembangunan yang diantaranya proyek pembangunan pemerintah. Pemulihan ekonomi global juga

mendorong kinerja ekspor Jakarta. Peningkatan kinerja ekspor juga dialami kawasan Jawa. Namun, menurunnya konsumsi masyarakat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Jawa.

Sedangkan dari sisi penawaran, perekonomian Jawa didukung oleh momen puncak panen raya. Secara parsial, percepatan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terjadi di Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta masing-masing dari 5,65% menjadi 5,77% dan 3,84% menjadi 4,57%.

Sebaliknya, perlambatan pertumbuhan terjadi di Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur masing-masing dari 4,49%, 6,31% dan 6,67% pada triwulan sebelumnya, kini menjadi 4,41%, 5,89% dan 6,44%. Perlambatan pertumbuhan kawasan Sumatera pada Triwulan I-2011 terutama dipengaruhi rendahnya tingkat konsumsi masyarakat dan tingkat investasi. Hal ini sejalan dengan masih rendahnya realisasi APBD seiring dengan belum direalisasikannya kenaikan gaji PNS dan UMP. Pada sisi penawaran, perlambatan terjadi pada sektor berbasis sumber daya alam yaitu pertanian dan pertambangan akibat anomali iklim dan menurunnya *lifting* migas. Sebaliknya, percepatan pertumbuhan masih terjadi pada sektor-sektor *non-tradable*.

Anomali iklim juga menyebabkan penurunan kinerja sektor berbasis sumber daya alam di Kawasan Timur Indonesia. Selain itu, perlambatan juga terjadi pada sektor *non-tradable* seperti sektor PHR. Sejalan dengan sisi penawaran, sisi permintaan Kawasan Timur Indonesia juga mengalami perlambatan khususnya akibat penurunan konsumsi masyarakat pada Triwulan I-2011.

Sedangkan pada Triwulan II-2011, pertumbuhan ekonomi diberbagai daerah diperkirakan mengalami akselerasi. Hal ini terutama didorong optimisme masyarakat dan perbaikan iklim investasi seiring menurunnya dampak anomali iklim. Namun laju

inflasi di berbagai daerah diperkirakan masih lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi nasional.

Sedangkan perkembangan indikator ekonomi Provinsi Jambi pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2011

INDIKATOR	2009	2010	2010				2011	
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II
MAKRO								
Indeks harga Konsumen kota Jambi	117,54	129,91	119,34	123,18	126,10	129,91	128,87	128,66
Laju Inflasi Tahunan (y-oy) Kota Jambi	2,49	10,52	3,79	7,91	7,91	10,52	7,99	4,45
PDRB-Harga Konstan (Juta Rp) 1)	16.274.908	17.465.253	4.205.614	4.305.361	4.434.704	4.519.574	4.572.810	4.646.745,00
- Pertanian	5.003.441	5.259.856	1.281.632	1.301.250	1.328.520	1.348.454	1.369.056	1.386.795,00
- Pertambangan dan Penggalian	1.875.312	2.146.442	473.783	513.335	561.162	598.163	604.413	615.895,00
- Industri Pengolahan	2.137.363	2.233.275	555.209	557.660	559.860	560.546	565.508	575.646,00
- Listrik, Gas dan Air Bersih	128.646	145.524	34.217	34.920	36.902	39.484	39.900	40.548,00
- Bangunan	782.475	835.368	201.893	207.046	212.277	214.153	216.007	221.426,00
- Perdagangan Hotel dan Restoran	2.764.830	3.045.833	726.182	749.520	780.224	789.908	798.542	815.041,00
- Pengangkutan dan Komunikasi	1.268.175	1.318.770	325.432	327.721	331.731	333.886	336.959	339.422,00
- Keuangan, Persewaan dan Jasa	889.519	997.305	238.272	243.769	253.610	261.653	265.088	269.382,00
- Jasa	1.425.146	1.482.880	368.995	370.140	370.418	373.327	377.338	382.589,00
Nilai Ekspor Non Migas (USD ribu) 2)	612.603,00	1.374.724	224.179	308.434	342.806	499.305	563.797	550.266,00
Volume Ekspor Non Migas (Ribu ton)	1.337.556,00	2.758.979	265.662	454.808	729.660	1.305.849	1.326.848	1.919.283,00
Nilai Impor Non Migas (USD ribu) 3)	84.254,00	161.084	24.519	44.693	41.583	50.289	21.286	83.214,00
Volume Impor Non Migas (Ribu ton)	95,00	136	30	31	49	25	23	73,00

Sumber: Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional Triwulan I-2011

Catatan:

1) Angka Sementara berdasarkan tahun dasar 2000

2) Pengklasifikasian komoditi menggunakan 21 kelompok barang berdasarkan SITC 2 digit yang berlaku

3) Pengklasifikasian komoditi dalam statistik impor menggunakan SITC 2 digit

Berdasarkan kondisi dan uraian di atas, untuk tahun 2012 rencana target ekonomi makro dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2012

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun ke-0	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2011	2012	
1	Pertumbuhan PDRD	%	6,4	6,5 - 7,4	7,4 - 7,7	8,2 - 8,5
2	Laju Inflasi	%	2,49			
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	15,51	17,71	20,31	33,66
4	Indek Gini	%	0,269	0,26	0,257	245
5	Indek Ketimpangan Wiliamson	%	0,414	0,393	0,391	0,382
6	Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan	%	91,23	91,75	92,5	95

Kebijakan ekonomi makro pada tahun 2012 diarahkan sejalan dengan tema pembangunan nasional RKP 2012, yakni “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”.

Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2010 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi hingga tahun 2012, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2012 adalah sebagai berikut.

1. MENDORONG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI. Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, penguatan penyerapan belanja negara, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi.
2. MENJAGA STABILITAS EKONOMI. Perhatian akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar dihadapkan pada tingginya resiko harga komoditi baik migas maupun non-migas serta arus modal yang dapat membahayakan perekonomian.
3. MEMPERCEPAT PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN. Langkah-langkah akan dipusatkan pada upaya-upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat.

Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2012 ditargetkan berkisar antara 6,6 - 6,8 persen yang diharapkan mengarah pada 6,7 persen dan laju inflasi diperkirakan sebesar 5,5 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka akan menurun menjadi berkisar antara 6,4 – 6,7 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 11,5 persen pada tahun 2012.

Pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatkan investasi, menjaga ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dalam tahun 2012, perekonomian diperkirakan tumbuh sebesar 6,7 persen, lebih tinggi dibandingkan sasaran tahun 2011 (6,4 persen). Investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing sebesar 11,5 persen dan 10,2 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh 12,0 persen. Dalam keseluruhan tahun 2012, dengan terjaganya stabilitas ekonomi konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh 5,4 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 6,8 persen.

Sektor pertanian diperkirakan tumbuh 3,2 persen. Adapun industri pengolahan diperkirakan tumbuh 5,6 persen didorong oleh industri nonmigas yang meningkat tumbuh 6,3 persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estate, dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sebesar 9,0 persen; 8,2 persen; 8,9 persen; 13,0 persen; 6,2 persen; serta 6,3 persen.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen pada tahun 2012 membutuhkan investasi sebesar Rp 2.875 triliun. Pembiayaan investasi diperkirakan sekitar 11,1 persen berasal dari pemerintah dan 88,9 persen dari masyarakat termasuk swasta.

Kebijakan moneter terus diarahkan untuk menjaga likuiditas perekonomian agar sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian. Efektivitas kebijakan moneter akan terus ditingkatkan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah. Dengan nilai tukar

Rupiah yang stabil serta pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga, laju inflasi pada tahun 2012 diperkirakan sebesar 5,5 persen.

Penerimaan ekspor tahun 2012 diperkirakan meningkat sebesar 12,8 persen, didorong oleh peningkatan ekspor migas dan non-migas yang masing-masing naik 10,1 persen dan 13,5 persen. Sementara itu impor non-migas dan migas diperkirakan naik masing-masing sebesar 16,0 persen dan 5,6 persen. Dengan defisit sektor jasa-jasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2012 diperkirakan menurun menjadi USD 2,1 milyar.

Sementara itu surplus neraca modal dan finansial diperkirakan sebesar USD 17,6 milyar didorong oleh meningkatnya investasi asing langsung (neto) sebesar USD 13,0 milyar dan investasi portfolio (neto) sebesar USD 9,3 milyar, sedangkan investasi lainnya (neto) diperkirakan defisit sebesar USD 4,8 milyar. Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2012 diperkirakan meningkat sebesar USD 19,7 milyar dan cadangan devisa diperkirakan naik menjadi USD 137,8 milyar atau cukup untuk membiayai sekitar 7,6 bulan impor termasuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Pada tahun 2012 pendapatan negara dan hibah diperkirakan mencapai 15,9 persen PDB pada tahun 2012, yang didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar 12,6 persen PDB dan penerimaan bukan pajak sebesar 3,1 persen PDB. Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai 17,3 persen PDB, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 11,7 persen PDB dan transfer ke daerah sebesar 5,6 persen PDB.

Dengan perkiraan penerimaan dan belanja tersebut, ketahanan fiskal yang mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian diperkirakan tetap terjaga. Pada tahun 2012, defisit APBN diperkirakan sekitar 1,4 persen PDB, yang akan ditutup oleh

pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Ketahanan fiskal yang terjaga juga tercermin dari stok utang pemerintah yang diperkirakan menurun menjadi 25,0 persen PDB pada tahun 2012.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi sekitar 11,5 persen dan pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi berkisar antara 6,4-6,7 persen dari angkatan kerja.

Dengan harapan ekonomi tumbuh sebesar 6,7 persen, maka secara ringkas gambaran ekonomi makro dan neraca pembayaran tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel. 3.3 Gambaran Ekonomi Makro Tahun 2011 – 2012

Uraian	2009	2010	2011	2012
			Perkiraan	Proyeksi
PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	4.6	6.1	6.4	6.7
Sisi Pengeluaran				
Konsumsi Masyarakat	4.9	4.6	5.2	5.4
Konsumsi Pemerintah	15.7	0.3	6.4	6.8
PMTB	3.3	8.5	10.5	11.5
Ekspor Barang dan Jasa	-9.7	14.9	9.8	10.2
Impor Barang dan Jasa	-15	17.3	11.5	12

Uraian	2009	2010	2011	2012
			Perkiraan	Proyeksi
Sisi Produksi				
Pertanian	4	2.9	2.8	3.2
Pertambangan	4.4	3.5	2.4	2.6
Industri Pengolahan	2.2	4.5	5.1	5.6
Listrik, Gas, dan Air Bersih	14.3	5.3	8.5	9
Bangunan	7.1	7	7.3	8.2
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1.3	8.7	8.8	8.9
Pengangkutan dan Komunikasi	15.5	13.5	13.4	13
Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha	5.1	5.7	6.3	6.2
Jasa-jasa	6.4	6	6.2	6.3
LAJU INFLASI (%)	2.8	7	*	5.5
PENGANGGURAN TERBUKA (%)	7.9	7.1	7	6.6
PENDUDUK MISKIN (%)	13.9	13.3	11.5-12.5	11.5

Sumber : Buku RKP 2012, *) masih konsolidasi

Perkembangan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2011 tercatat sebesar 6,5% (*y-o-y*) dengan PDB nominal sebesar Rp1.732,3 Triliun. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 6,9%.

Dari sisi produksi, selama triwulan I-2011 sektor pertambangan dan penggalian serta sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan mengalami pertumbuhan tahunan yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 13,8 %. Sementara itu, sektor-sektor lain pertumbuhannya sedikit menurun. Peningkatan PDB sektor pertambangan dikarenakan permintaan barang tambang, khususnya batubara yang terus meningkat, baik dari permintaan domestik maupun luar negeri. Peningkatan batubara Indonesia dari luar negeri tidak hanya datang dari negara-negara di kawasan Asia, tetapi juga dari Eropa. Dari sisi domestik, Pemerintah berencana akan meningkatkan pemanfaatan batubara melalui pengembangan manfaat gas metana batubara (*coal bed methane/CBM*) untuk pembangkit listrik. Proyek CBM dari

lapangan Sangatta ditargetkan dapat memproduksi gas CBM untuk mensuplai pembangkit listrik di jaringan PLN sebelum akhir tahun 2011.

Sementara dari sisi permintaan, hanya pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara tahunan yang mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang meningkat secara umum berasal dari peningkatan upah dan gaji serta pendapatan dari hasil ekspor.

Pantauan 10 provinsi yang mengalami pertumbuhan Ekspor dan Impor non migas tertinggi di 33 provinsi, memperlihatkan Provinsi Jambi untuk pertumbuhan Ekspor Non Migas per Januari 2011 menduduki peringkat ke-3, sedangkan untuk pertumbuhan Impor Non Migas menduduki peringkat ke-10.

Dengan mendasarkan perkembangan terkini ekonomi dan keuangan maka asumsi makro 2012 direncanakan antara lain sebagai berikut :

Tabel : 3.4. Asumsi Makro Ekonomi tahun 2012

No	Asumsi Makro Nasional	Satuan	2011	2012
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,5	6,7
2	Inflasi	%	5,7	5,3
3	Kurs	\$/Rp	8.700	8.800
4	SBI 3 Bulan	%	5,6	6,5
5	Minyak Ind	(US\$/Brl)	95	90
6	Lifting Minyak	(Jt.brl/Hr)	945	950
7	Pengangguran terbuka	%	6,8	6,4 - 6,6
8	Penduduk Miskin	%	11,5 - 12,5	10,5 - 11,5

Pada bulan April 2011 terjadi deflasi sebesar 0,31 persen dari bulan sebelumnya karena berlanjutnya penurunan harga pangan seperti bumbu-bumbuan (bawang merah dan cabai) dan beras terkait musim panen raya. Secara tahunan, inflasi tercatat sebesar 6,65 persen (*Y-o-Y*). Inflasi (*headline inflation*) tersebut lebih rendah dari

bulan sebelumnya namun masih melebihi target inflasi Pemerintah dan Bank Indonesia yaitu sebesar 5 ± 1 persen. Sejak Februari 2011 tekanan inflasi mengalami penurunan seiring dengan penurunan tekanan inflasi *volatile food*. Selama tahun 2011 (Januari-April), tingkat inflasi tercatat sebesar 0,39 persen dengan dua kali mengalami deflasi pada bulan Maret dan April .

Tekanan inflasi komponen barang bergejolak (*volatile food*) terus menurun sejak Februari 2011. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga kelompok bahan makanan sebesar 1,9 persen, khususnya komoditas bumbu-bumbuan seperti bawang merah, cabai rawit, cabai merah dan beras. Harga komoditas tersebut menurun karena berlimpahnya pasokan terkait musim panen raya ditambah impor. Berdasarkan data historis, harga komoditas bumbu-bumbuan (bawang merah dan cabai) masih terbuka ruang mengalami deflasi pada bulan Mei 2011 karena level harga saat ini belum mencapai titik terendah di 2010 (Rp13.000/kg). Komoditas lain yang mengalami penurunan harga antara lain adalah daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng dan bayam. Sedangkan emas perhiasan, ikan segar, tomat, sayur dan rokok mengalami kenaikan harga. Dari sisi eksternal, tekanan harga pangan global relatif berkurang namun harga emas dan minyak mentah dunia terus meningkat karena adanya krisis politik di daerah Timur Tengah.

Inflasi inti (*core inflation*) tercatat sebesar 0,25 persen (*M-t-M*), stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi inti tercatat 4,62 persen (*Y-o-Y*) lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya (4,45 persen *Y-o-Y*). Tekanan inflasi inti meningkat terutama disebabkan kenaikan harga emas. Selain harga emas, tekanan eksternal juga terindikasi dari kenaikan *core tradeable* yang lebih cepat dari *non-tradeable* serta meningkatnya inflasi mitra dagang. Di sisi lain, penguatan nilai tukar rupiah semakin terbatas. Ekspektasi

inflasi konsumen meningkat diantaranya dipengaruhi oleh ketidakpastian kebijakan pemerintah terkait harga BBM subsidi.

Untuk inflasi komponen yang harganya diatur pemerintah (*administered prices*) tercatat sebesar 0,17 persen (*M-t-M*) atau 5,42 persen (*Y-o-Y*), sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya. Tekanan inflasi *administered prices* relatif rendah terkait minimalnya kebijakan penyesuaian harga yang dilakukan pemerintah. Komoditas *administered* yang berkontribusi pada inflasi bulan April adalah bensin dan rokok. Belum pastinya kebijakan BBM bersubsidi memunculkan spekulasi sehingga memicu terjadinya kelangkaan di sejumlah daerah khususnya di luar Jawa.

Pantauan atas ibukota provinsi, tingkat inflasi di beberapa ibukota provinsi jauh berada diatas inflasi nasional pada April 2011. Secara tahunan, inflasi tertinggi terjadi di kota Tanjung Pinang dikarenakan adanya gangguan jalur distribusi dan pasokan beberapa komoditas. Inflasi tinggi dominan terjadi di kota-kota Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

Pada triwulan I-2011, kota Jambi mengalami deflasi mencapai 0,80 persen (*Q-t-Q*), menurun dibandingkan triwulan IV-2010 yang mengalami inflasi sebesar 3,02 persen (*Q-t-Q*). Pergerakan inflasi bulanan yang tercatat di bulan Januari, Februari dan Maret 2011 masing-masing sebesar 1,82 persen (*M-t-M*), *minus* 0,32 persen (*M-t-M*) dan *minus* 2,26 persen (*M-t-M*). Sementara itu, secara tahunan, inflasi Kota Jambi pada triwulan pertama tahun 2011 ikut mengalami penurunan namun pada angka yang masih relatif tinggi yaitu sebesar 7,99 persen (*Y-o-Y*) dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 10,52 persen (*Y-o-Y*). Inflasi tahunan Kota Jambi ini lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 6,65 persen.

Deflasi yang terjadi pada triwulan I-2011 terutama disumbangkan oleh deflasi kelompok bahan makanan. Musim panen beras yang mulai terjadi sejak bulan Februari memicu penurunan

harga beras. Demikian halnya dengan cabe merah yang mulai memasuki musim panen di triwulan I-2011 mendorong turunnya harga bahan makanan.

Perkembangan harga-harga pada triwulan mendatang diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan I-2010, namun masih berada pada level yang cukup tinggi.

Namun demikian, inflasi tahunan (YoY) diperkirakan sedikit menurun dibandingkan triwulan laporan. Inflasi Kota Jambi pada Triwulan II-2011 diperkirakan sebesar 6,00 - 7,00 persen (Y-o-Y).

Faktor-faktor yang berpotensi akan memberikan tekanan inflasi di masa mendatang antara lain: 1) Musim tahun ajaran baru yang dapat memicu peningkatan biaya transportasi serta biaya pendidikan, 2) Meningkatnya pendapatan masyarakat seiring dengan meningkatnya biaya komoditi unggulan Jambi sehingga mendorong tingginya konsumsi, 3) Kondisi infrastruktur (jalan, jembatan) yang masih terkendala akan meningkatkan biaya distribusi dan transportasi barang dan jasa, 4) Potensi kembali meningkatnya harga bahan makanan yang turun di triwulan laporan akibat melimpahnya produksi dan pasokan dari luar daerah, 5) Potensi kenaikan harga minyak mentah dunia yang diikuti pergerakan harga-harga komoditas bahan-bahan pangan (kedelai, jagung, gandum), *crude palm oil (CPO)* di pasar internasional. Beberapa hal tersebut diperkirakan akan memacu meningkatnya angka inflasi pada periode triwulan II tahun 2011.

Berdasarkan uraian di atas, prediksi inflasi tahun 2011 sebesar **6,35 persen**.

Perekonomian Provinsi Jambi pada triwulan I-2011 menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,18 persen, melambat dibandingkan dengan triwulan IV-2010 yang sebesar 1,91 persen (Q-

t-Q). Namun demikian, secara tahunan pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 8,73 persen (*yo-y*) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,68 persen (*Y-o-Y*), masih lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 6,5 persen.

Pada triwulan I-2011, pertumbuhan ekonomi secara triwulanan (*Q-t-Q*) dipicu oleh sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Meningkatnya hasil produksi tanaman bahan makanan dan perkebunan memicu tumbuhnya sektor pertanian.

Ditinjau dari sisi pengeluaran, melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2011 terutama berasal dari oleh perlambatan konsumsi rumah tangga serta menurunnya konsumsi pemerintah. Setelah adanya perayaan hari besar keagamaan dan libur akhir tahun pada triwulan IV-2010, konsumsi masyarakat mengalami penurunan pada triwulan I-2011. Namun demikian, meningkatnya harga komoditi ikut mendorong masih tumbuhnya konsumsi.

Di sisi lain, rendahnya siklus realisasi APBD pada awal tahun memicu menurunnya konsumsi pemerintah pada triwulan I-2011. Selain itu, investasi juga menunjukkan penurunan di awal tahun ini yang tercermin dari menurunnya angka Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB). Di sisi lain, menurunnya net impor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Jambi.

Laju pertumbuhan kuartalan (*Q-t-Q*) PDRB Provinsi Jambi pada triwulan II-2011 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2010.

Namun demikian, secara tahunan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi diperkirakan akan melambat yaitu pada kisaran 7,60 - 8,60 persen (*Y-o-Y*).

Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pendorong pertumbuhan ekonomi Jambi pada triwulan mendatang serta didukung oleh meningkatnya ekspor Provinsi Jambi.

Dari sisi penawaran, perkembangan sektor pertanian pada triwulan mendatang diperkirakan masih tumbuh positif.

Semakin meningkatnya harga komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet menjadi pendorong tumbuhnya sektor pertanian pada triwulan mendatang. Selain itu, masih berlangsungnya musim panen tanaman bahan makanan (tabama) juga ikut mendorong peningkatan sektor ini. Sektor industri pengolahan diperkirakan akan meningkat pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan sektor pertanian.

Pada periode triwulan I-2011, jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi mencapai 1.527,5 ribu orang, berkurang 18,2 ribu orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja Agustus 2010 yang mencapai 1.545,7 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka pada bulan yang sama mencapai 3,85 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan Agustus 2010 yang mencapai 5,39 persen.

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan I-2011 mengalami peningkatan jika dibandingkan triwulan IV-2010 yaitu dari 96,41 menjadi 96,73. Angka NTP tersebut juga masih berada di bawah 100 yang mengindikasikan belum mencukupinya penerimaan petani dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efesiensi dan efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2011 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah

dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya penghematan dari sisi belanja.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah.

Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2012 tidak menerbitkan kebijakan untuk sumber penerimaan baru akan tetapi mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada.

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di Kabupaten/Kota, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan.
2. Melakukan upaya pendekatan pelayanan (jemput bola) kepada masyarakat melalui satuan administrasi manunggal satu atap (Samsat) Keliling ke beberapa kecamatan yang potensi Wajib Pajaknya cukup besar terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di beberapa Kabupaten.

3. Melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
5. Mengadakan pertemuan dengan *Dealer* Kendaraan Bermotor, Alat Berat dan perusahaan perkreditan serta pengusaha *Show Room* kendaraan bekas se-Provinsi Jambi, dalam rangka menjaring wajib pajak baru.
6. Membentuk Pos Pelayanan Pembayaran PKB di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci dan di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dalam rangka mendekatkan pelayanan wajib pajak.
7. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Samsat, terutama dengan pihak Kepolisian dan PT. Jasa Raharja dengan melakukan Razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak.
8. Melakukan penagihan *door to door* kepada masyarakat wajib pajak yang menunggak melalui "Samsat Batandang" dengan sistem petugas berkunjung ketempat pemilik kendaraan, khususnya di daerah pelosok.
9. Membangun *Drive Through* yang lokasinya di Samsat Kota Jambi dan WTC Batanghari, dengan cara wajib pajak tanpa harus turun dari kendaraannya dalam membayar pajaknya, cukup dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan. *Drive Through* ini

melayani pembayaran pajak kendaraan roda dua dan roda empat dengan waktu penyelesaian pengurusan lebih kurang 5 menit.

10. Melaksanakan kursus/diklat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2000, yang diikuti oleh petugas Samsat Kota Jambi dan dari perwakilan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dipenda Provinsi Jambi, yang dilaksanakan oleh PT. Point Development International dan telah memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 – 2000 dari Badan Sertifikasi Nasional dan diakui sebagai mutu standar pelayanan prima.

Dari rencana pendapatan daerah diasumsikan meningkat sebesar 20,05 persen atau 280,51 milyar yaitu dari Rp1,399 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp1,680 triliun pada tahun 2012. Peningkatan pendapatan daerah tersebut, terutama didorong oleh peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 24,42 persen atau meningkat dari Rp482,50 milyar menjadi Rp600,32 milyar dan retribusi daerah sebesar 21,41 persen atau meningkat dari Rp6,15 milyar menjadi Rp7,46 milyar serta Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meningkat sebesar 23,82 persen yakni dari 71,72 milyar menjadi 88,87 milyar pada APBD Induk Tahun 2012. Selanjutnya penerimaan dana perimbangan meningkat 17,40 persen atau sebesar Rp84,12 milyar dari tahun 2011 yaitu Rp827,82 milyar menjadi 971,67 milyar pada Tahun 2012.

Target pendapatan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5. Rencana Pendapatan Tahun 2012

Kode	URAIAN	2012
1	PENDAPATAN	1.679.628.954.013,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	707.759.221.327,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	600.317.579.667,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.462.787.500,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.106.827.350,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88.872.026.810,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	971.869.732.686,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	387.987.319.686,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	583.882.413.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012 sebagai instrumen utama kebijakan fiskal akan didesain sesuai dengan fungsinya baik sebagai alat stabilisasi ekonomi, dan alat alokasi dana masyarakat, maupun sebagai alat distribusi pendapatan. Selain itu, kebijakan alokasi anggaran dalam APBD akan diarahkan kepada ***upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar menuju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan*** sesuai dengan tema RKPD tahun 2012.

Dari sisi postur, RAPBD 2012 disusun dengan prinsip dasar optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan, dengan tetap memperhatikan pemberian insentif fiskal pada kegiatan dunia usaha,

yang ditopang dengan kebijakan reformasi birokrasi baik dalam bidang perpajakan maupun kepabeanan. Selain itu, berbagai upaya juga akan terus dilakukan untuk meningkatkan produksi sumber daya alam, baik migas maupun nonmigas sebagai sektor pendorong penerimaan daerah bukan pajak.

Di sisi belanja Daerah, arah kebijakan alokasi anggaran dalam RKPD 2012 akan berorientasi pada upaya pencapaian visi pembangunan Jambi EMAS 2015, melalui percepatan pembangunan Infrastruktur, kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya, sektor pertanian, Pengelolaan Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan alokasi belanja dalam RKPD 2012 akan tetap didasarkan pada penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah, yang merupakan perubahan mendasar dalam proses penganggaran dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan belanja Daerah juga akan menekankan pada *outcome basis*, yang selanjutnya diterjemahkan lebih lanjut ke dalam hasil (*output*) dan program, serta kegiatan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka menyukseskan program-program pembangunan nasional. Sebagian besar porsi belanja dalam RAPBD 2012 atau sekitar 60,29 persennya akan dialokasikan untuk belanja langsung dan digunakan untuk mendukung 5 prioritas pembangunan, yaitu: 1) Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Energi; 2) Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial Budaya; 3) Pengembangan Ekonomi Rakyat, investasi dan kepariwisataan; 4) Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam serta Lingkungan Hidup (LH); 5) Penataan Tata Pemerintahan yang baik.

Dalam RKPD tahun 2012, penetapan besaran defisit anggaran mengacu pada upaya tetap terjaganya konsolidasi dan kesinambungan fiskal, serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah untuk dapat menutup defisit tersebut dari sumber-sumber pembiayaan yang tidak memberatkan di masa kini dan mendatang.

Sementara itu, untuk menutup defisit tersebut diperoleh dari penerimaan pembiayaan yaitu prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2011 sebesar Rp150 milyar.

Kebijakan anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2012 dialokasikan untuk mendukung kebijakan nasional, terutama untuk belanja pegawai yang direncanakan akan terjadi kenaikan pada belanja gaji dan tunjangan sebesar 5 persen dan tetap menganggarkan untuk tambahan penghasilan bagi PNS dengan alokasi anggaran sama dengan tahun lalu. Disamping untuk memenuhi hal pokok tersebut, pemerintah daerah juga telah mengalokasikan belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota sesuai ketentuan perundang-undangan, serta belanja subsidi untuk operasi pasar, hibah kepada instansi semi pemerintah, bantuan keuangan bidang pendidikan kepada kabupaten/kota dan belanja tidak terduga.

Tabel 3.6. Proporsi Belanja Anggaran Provinsi Jambi Tahun 2005-2009 (%)

Uraian	Realisasi				2011
	2007	2008	2009	2010	
BELANJA	1.105.387.893.927,00	1.404.982.484.105,50	1.530.073.192.806,26	1.488.130.349.598	1.498.751.513.850
BELANJA TIDAK LANGSUNG	326.833.775.581,00	511.724.076.104,50	685.176.280.494,26	672.267.046.823	652.324.654.690
Belanja Pegawai	188.771.065.452,00	296.561.580.079,00	326.068.007.530,00	336.141.291.258	380.029.714.937
Belanja Subsidi		5.984.070.000,00	8.688.823.000,00	130.000.000	370.000.000
Belanja Hibah		3.592.607.000,00	7.438.277.500,00	64.358.880.705	19.896.707.248
Belanja Bantuan Sosial	3.248.723.500,00	3.282.616.600,00	22.222.754.434,00	37.191.081.892	59.369.300.000
Belanja Bantuan Keuangan	6.501.500.000,00	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	125.190.161.629,00	198.770.202.425,50	172.865.736.421,06	222.916.085.468	189.158.932.505
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		3.250.000.000,00	145.217.846.609,20	9.900.000.000	-
Belanja Tidak Terduga	3.122.325.000,00	283.000.000,00	2.674.835.000,00	1.629.707.500	3.500.000.000
BELANJA LANGSUNG	778.554.118.346,00	893.258.408.001,00	844.896.912.312,00	815.863.302.775	846.426.859.160
Belanja Pegawai	67.984.230.572,00	54.733.495.971,00	50.985.047.831,00	53.961.942.558	67.036.938.742
Belanja Barang dan Jasa	288.127.914.613,00	278.270.195.705,00	348.230.502.202,00	296.041.039.214	361.098.881.818
Belanja Modal	422.441.973.161,00	560.254.716.325,00	445.681.362.279,00	465.860.321.003	418.291.038.600

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Provinsi Jambi terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi. Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja. Pada tahun 2005 – 2008 terjadi surplus anggaran dan pada tahun 2009 terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran sebesar Rp 176,21 milyar untuk tahun 2009 dipenuhi dari Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp 386,30 milyar. Sumber penerimaan pembangunan selama tahun 2005-2009 sebagian besar berasal dari Silpa tahun lalu, hanya tahun 2005 dan 2006 penerimaan pembangunannya ada yang berasal Penerimaan Kembali Penyertaan Modal dan Penerimaan kembali piutang serta Penerimaan Hutang. Pada tahun 2005 penerimaan pembangunan sebesar Rp 172,93 milyar dimana sebesar Rp 168,93 milyar berasal Silpa tahun lalu Rp 4 milyar berasal dari penerimaan kembali penyertaan modal. Pada tahun 2006 realisasi penerimaan pembangunan sebesar Rp 280,699 milyar, dimana sebesar Rp 278,917 milyar berasal dari Silpa tahun lalu dan Rp 1 berasal dari penerimaan kembali penyertaan modal, kemudian Rp 641 juta berasal dari Penerimaan kembali piutang dan Rp 140 juta berasal dari penerimaan hutang. Realisasi Penerimaan pembangunan tumbuh rata-rata sebesar 22,25 persen dan Silpa tahun lalu tumbuh rata-rata sebesar 22,97 persen pertahun selama periode 2005-2009.

Perhitungan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan untuk menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah anggaran lima tahun yang akan datang.

Tabel 3.7 Kerangka Pendanaan APBD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 Menurut RPJMD (Rp Jutaan)

URAIAN	Tahun Anggaran					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1. Pendapatan Daerah	1,304,934	1,359,006	1,455,284	1,557,266	1,726,429	1,847,856
2. Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	200,000	100,000	90,000	81,000	72,000	65,610
3. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Tidak Langsung Periodik yang wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	706,676	551,309	587,945	627,095	692,325	727,873
a. Gaji Pegawai	266,976	330,785	352,767	376,257	415,395	436,724
b. Belanja Bagi Hasil Kab/Kota	176,271	173,268	184,783	197,087	217,588	228,760
c. Belanja Bantuan Keu Ke Kab/Kota	29,400	47,255	50,395	53,751	59,342	62,389
5. Belanja langsung Periodik yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama		658,681	693,747	731,219	793,654	827,678
a. Sektor Pendidikan 20%		212,648	226,779	241,879	267,040	280,751
b. Infrastruktur		315,034	335,969	358,340	395,614	415,927
c. Program Samisake	0	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000
6. Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
a. Pembentukan Dana cadangan	0	0	0	0	0	0
b. Penyertaan Modal/Investasi	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Pada kerangka pendanaan APBD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp 1,359 milyar, pendapatan ini akan digunakan untuk gaji pegawai dan guru serta pegawai honor sebesar Rp 330,785 milyar, belanja bagi hasil kabupaten/kota sebesar Rp 173,268 milyar dan belanja bantuan keuangan kabupaten/kota sebesar Rp 47,255 milyar. Semua belanja diatas merupakan Belanja Tidak Langsung Periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sesuai dengan visi misi Gubernur 2010-2015 untuk mewujudkan Jambi Emas. Pada sisi Belanja langsung Periodik yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dialokasikan pada sektor pendidikan sesuai dengan UU Pendidikan yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan Anggarannya sebesar 20 persen dari APBD, Berkenaan dengan itu program tersebut merupakan program prioritas dan utama yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan. Demikian juga untuk program infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan pelabuhan ini juga program prioritas dan utama serta program Rp 1 milyar satu kecamatan yang disebut dengan **program samisake** merupakan program prioritas dari Gubernur yang akan dialokasikan pada tahun 2011 sebesar Rp 131 milyar sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Provinsi Jambi dan dapat terjadi jumlah ini bisa meningkat untuk 5 tahun kedepan sesuai dengan perkembangan pemekaran kecamatan di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah selama tahun 2010-2015 diperkirakan sebesar 7,98 persen, sedangkan pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 7,19 persen dan pertumbuhan belanja langsung sebesar 5,88 persen, sehingga secara total belanja diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 7,19 persen pertahun selama periode 2010-2015.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah pendapatan daerah ditambah pencairan dana cadangan dan sisa lebih riil perhitungan anggaran yang menjadi total penerimaan

kemudian dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dari perhitungan tersebut diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2011 sebesar Rp 360,18 milyar dan tahun 2015 meningkat menjadi Rp 519,09 milyar atau meningkat rata-rata sebesar 7,98 persen, kemudian pertumbuhan rata-rata penerimaan sebesar Rp 7,17 persen, sedangkan total pertumbuhan rata-rata Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama sebesar 6,43 persen pertahun, sehingga pertumbuhan rata-rata Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan daerah untuk 5 tahun kedepan diperkirakan sebesar 9,57 persen pertahun untuk periode 2011-2015. Dari gambaran kemampuan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan relative kecil yaitu dari sebesar Rp 360,18 milyar tahun 2011 meningkat menjadi Rp 519,09 milyar tahun 2015. Berkenaan dengan itu perlu pengawasan yang lebih proaktif dalam menjalankan semua program wajib dan prioritas yang telah dijanjikan pada rakyat.

Jika dilihat dari rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Provinsi Jambi tahun 2010-2015. Dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2011 sebesar Rp 360,18 milyar, tahun 2012 sebesar Rp 393,15 milyar, tahun 2013 sebesar Rp 428,39 milyar dan tahun 2014 sebesar 487,09 milyar dan tahun 2015 meningkat menjadi Rp 519,09 milyar atau diprediksi meningkat rata-rata sebesar 7,98 persen. Kapasitas riil tersebut akan diperuntukkan untuk menunjang program wajib dan program prioritas selama tahun 2010-2015 mendatang. Pemilihan program dan kegiatan ini harus benar-benar mampu mendorong program prioritas dan program utama untuk mewujudkan Jambi Emas melalui *triple track plus one* yaitu ***pro poor, pro job*** dan ***pro growth*** serta ***pro environment***.

**Tabel 3.8 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 (Rp Jutaan)**

No	URAIAN	Tahun Anggaran					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		360,178	393,151	428,385	487,092	519,086
II	Total Rencana Prioritas Pengeluaran I (II.a-IIb-IIc)		265,000	285,000	325,000	370,000	400,000
II.a	Belanja langsung		923,681	978,747	1,056,219	1,163,654	1,227,678
	Dikurangi						
II.b	Belanja Langsung Periodik yg wajib dan mengikat serta prioritas utama		658,681	693,747	731,219	793,654	827,678
II.c	Pengeluaran Pembiayaan yang wajib mengikat serta Prioritas Utama		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	Sisa Kapasitas riil Kemampuan Keuangan daerah Setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)		95,178	108,151	103,385	117,092	119,086
III	Rencana Prioritas Pengeluaran II (III.a-III.b)		16,500	19,000	20,000	22,500	30,000
III.a	Belanja Tidak Langsung		567,809	606,945	647,095	714,825	757,873
	Dikurangi						
III.b	Belanja Tidak Langsung Periodik yang wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama		551,309	587,945	627,095	692,325	727,873
	Surplus Anggaran Riil (I - II - III)		78,678	89,151	83,385	94,592	89,086

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2009 – 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka kedepan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik
2. Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya
3. Mewujudkan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan
5. Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dalam memenuhi kepentingan umum

Tabel 4.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015

Visi : Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum	Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur
			Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik
			Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih
			Terpenuhinya pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan
2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya	Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya	Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas
			Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam

			mewujudkan prestise daerah
			Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial
			Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat
			Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas serta penataan administrasi kependudukan yang baik dalam upaya mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk yang disesuaikan dengan daya tampung alam dan lingkungan
			Terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan

			positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan
3	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri	Mewujudkan Jambi dengan Struktur Ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi	Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengu-rangi praktik ekonomi tinggi Tercapainya stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung terca-painya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan

			sumbangan terhadap pendapatan daerah
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat
			Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
			Perbaiki iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran
			Terwujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui

			kualitas pelayanan dan pemahaman serta kehidupan beragama
			Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan Kepariwisataaan daerah
			Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah
4	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan	Menciptakan Pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan	Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan
			Terciptanya pemanfaatan potensi tambang skala kecil dan besar
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan

			Kelestarian Lingkungan Hidup
			Penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan
5	Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender	Mewujudkan Kualitas Kinerja Birokrasi Pemerintah secara Profesional dalam Memenuhi Kepentingan Umum	Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik
			Terwujudnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum
			Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, Provinsi Jambi menetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan dalam bentuk :

1. Terselenggaranya Percepatan Pembangunan Infrastruktur
2. Terpenuhinya Pembangunan Infrastruktur energi dan listrik
3. Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih
4. Terpenuhinya pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan
5. Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas
6. Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah
7. Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial
8. Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat
9. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas serta penataan administrasi kependudukan yang baik dalam upaya mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk yang disesuaikan dengan daya tampung alam dan lingkungan
10. Terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan
11. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktek ekonomi tinggi
12. Terciptanya stabilitas makro ekonomi dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan

13. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat.
14. Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
15. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran
16. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah
17. Terwujudnya agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama
18. Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan Kepariwisata daerah
19. Terwujudnya Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya Air, Lahan dan Tambang
20. Terciptanya pemanfaatan potensi tambang skala kecil dan besar
21. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup
22. Penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan
23. Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik
24. Terwujudnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum
25. Terwujudnya Kesetaraan Gender dalam pembangunan daerah

Tabel. 4.2.
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun	Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2012	
1	2	3	4	5	6
	<i>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</i>				
	Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi				
	1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat daerah. Kepegawaian dan persandian				
1.1	Pertumbuhan PDRB				
1.2	Laju Inflasi		2.49	6.35	5.53
1.3	PDRB Perkapita	Rp.juta		20.31	33.66
1.4	Indeks Gini		0,269		
1.5	Indeks Ketimpangan Williamson		0,393		
1.6	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	91,23		
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat				
1	Pendidikan				

1.1	Angka Melek Huruf	tahun	7.68	8.24	8,50
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	%	96.06	98,40	
1.3	APK PAUD	%	53,43	57,0	60
1.4	APK SD	%			
	APK SMP/ SMPLB/MTs	%	98	101.2	
	Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA	%	72.98	78.8	
1.4	Angka Pendidikan yang ditamatkan				
1.4.1	Meningkatnya APM PAUD	%	58.43	66.3	
1.4.2	Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI	%	99.5	99.9	
1.4.3	APM SMP	%	69,5	70,0	
1.4.4	APM SMA	%	4,54		
2	Kesehatan				
2.1	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Persen	90	80.4	
2.2	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Persen	29,90	12.1	
2.3	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	Persen		5.8	
2.4	Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	Persen	8,6	8,45	
	Fokus Seni Dan Budaya				
	Jumlah gedung Olahraga	unit	5	1	10
	<i>Aspek Pelayanan Umum</i>				
	Fokus Pelayanan Urusan Wajib				
1	Pendidikan				
1.1	Pendidikan Dasar				

1.1.1	Angka Partisipasi sekolah	%	98,11	98,15	98,50
1.1.2	Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk		35,8	36,5	37,30
1.1.3	Rasio Guru terhadap murid	%	14,71	14,90	15,4
1.2	Pendidikan menengah				
1.2.1	Angka Partisipasi sekolah	%	85,04	85,9	87,00
1.2.2	Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk	%	11,89	13,5	14,6
1.2.3	Rasio Guru terhadap murid		13,35	13,53	13,70
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	unit	788	800	818
2	Kesehatan				
2.1	Rasio Posyandu per satuan balita		8,94		
2.2	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0,27		
2.3	Rasio Rumah sakit persatuan penduduk		0,0074		
2.4	Rasio Dokter per satuan penduduk		0,28		
2.5	Rasio Tenaga medis persatuan penduduk		2,66		
	Kependudukan dan Catatan Sipil				
	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	85	90	
	Rasio pasangan berakate nikah	%		90	
2.3.7					
2.3.8	Tingkat penduduk miskin	%	8.77	7,50	
2.3.9	Laju pertumbuhan penduduk	%	1.58	2,07	
2.3.10	Jumlah KAT yang diberi bantuan	Orang		150	

2.3.11	Jumlah penyandang cacat yang direhabilitasi panti asuhan	Orang		25	
2.3.12	Jumlah anak terlantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan dibina	Orang		75	
2.3.13	Jumlah lansia yang dilayani	orang		70	
2.3.14	Jumlah masyarakat yang mendapat jaminan sosial	orang		10	
2.3.15	Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan dan difasilitasi	KK		2	
2.3.16	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang dilatih keterampilan berusaha	Orang		40	
2.3.17	Meningkatnya jumlah sarana peribadatan	Anak unit	8,935	11	
2.3.18	Meningkatnya pondok pesantren				
2.3.19	Jumlah jama'ah Haji	Orang	2,632		
	UMP				
	Angka kesempatan kerja	orang	1,272,520	1.337.089	
	Angka pengangguran	orang	61,222	70.471	
2.1	Pertanian				
	JUmlah Desa Rawan Pangan	Desa	123	80	
2.1.1			-60.89%	(39,6%)	

2.1.2	Produktifitas padi	Kwtl/ha	41.4	44,85	
2.1.3	Produktifitas kedele	Kwtl/ha	12.62	13,85	
2.1.4	Produktifitas karet		849	904	
2.1.5	Produktifitas kelapa sawit		3,457	3,565	
2.1.6	Produktifitas kopi		828	966	
2.1.7	Produktifitas cassiavera		2,196	2,196	
2.1.8	Produktifitas Daging				
2.1.9	Produksi perikanan tangkap	ekor	51,502	52.613	
2.1.10	Produksi perikanan budidaya	ekor	32,728	61.537	
2.1.11	Pola Pangan Harapan	%	82.7	89,7	
	<i>Aspek Daya Saing Daerah</i>				
1	Kemampuan Ekonomi Daerah				
1.1	Pertumbuhan ekonomi		6.37	6,9 – 7,3	
1.2	Laju inflasi PDRB atas harga berlaku			5,5 – 6,5	
1.3	Nilai Pendapatan Daerah			1.455	
1.4	Persentase Ekspor	%		9,00-9,3	
1.5	Persentase Impor	%		10,6-11,0	
1.6	Jumlah unit usaha	unit	16,979	24,28	
1.7	Jumlah tenaga kerja	Orang	47,823	72,49	
1.8	Nilai Produksi industri	Rp M	186	3,212	
1.9	Jumlah Sentra industri kecil	Unit	70	77	
1.1	Tenaga Kerja Sentra industri kecil	Orang	4,015	4,34	
1.11	Jumlah Koperasi	Unit	3,155	3,43	
1.12	RAT	unit	951	917	
1.13	Nilai tukar petani	%	94.82		

2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur				
2.1	Jalan Provinsi dalam kondisi baik mencapai 75 persen di tahun 2015	%	31.63	15	
2.2	Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%		20	
2.3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana trans-portasi sungai dan laut	%		20	
2.5	Meningkatnya ka-pasitas dan daya dukung pelabuhan udara di Provinsi Jambi antara lain Pelabuhan Udara Sultan Taha, Jambi, pelabuhan udara di Muara Bungo dan Sungai Penuh	%		20	
2.6	Terbangunnya sistem jaringan tran-sportasi perkotaan dan perdesaan di wilayah terpencil, dan pedalaman, yang dapat men-jangkau seluruh lapisan masyarakat	%		20	100
2.7	Rasio elektrifikasi meningkat dari 55% menjadi 82% di tahun 2015 (target nasional 80% pada tahun 2014)	%	55	5,4	82
2.8	Jumlah PLTMH meningkat menjadi 23 unit pada tahun 2015 (Jumlah PMTH 9 unit pada tahun 2009)	unit	9	2	19
2.9	Jumlah PLTS Tahun 2015 sebanyak 7.084 unit	unit	5,649	300	6.149
2.1	Persentase jumlah prasarana sumber daya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi	%			

2.11	Tingkat pemanfaatan ketersediaan air baku	%		100	100
2.12	Persentase tingkat kinerja pelayanan air minum masyarakat	%			
2.13	Persentase tersedianya perumahan sehat bagi masyarakat	%		2,4	
3	Iklim Berinvestasi				
3.1	Persentase investasi	%		16,4-16,5	
3.2	Pelayanan satu pintu	Unit			
4	SDM				
4.1	IPM		72.45		
4.2	Angka harapan hidup	Tahun	68.95	72.8	

4.2. Prioritas Pembangunan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, tentunya akan tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Provinsi Jambi mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan Provinsi Jambi 2010-2015, sebagai berikut:

1. Peningkatan infrastruktur wilayah dan Pelayanan umum,
dengan fokus :

- a) Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur Listrik
- b) Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih
- c) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan.

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta sosial budaya, dengan fokus :

- a) Pemerataan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas
- b) Peningkatan Peran Agama dan Budaya Dalam Pembangunan
- c) Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga
- d) Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial
- e) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan

3 Pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan,
dengan fokus :

- a) Meningkatkan Perekonomian Daerah
- b) Meningkatkan kepariwisataan daerah

4 Ketahanan pangan dan sumberdaya alam serta Lingkungan hidup, dengan fokus :

- a) Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan
- b) Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya mineral, Air, Lahan dan energi yang dapat diperbarukan.
- c) Peningkatan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup

5. Penataan Tata Pemerintahan yang baik, dengan fokus :

- a) Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik
- b) Peningkatan Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum
- c) Peningkatan Kesetaraan Gender

Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Dalam upaya mewujudkan Misi Pertama: Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Penataan Ruang, melalui program antara lain:

- (1) Program Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Program Penataan Kawasan.

b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Pengairan), melalui program antara lain:

- (1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rawa.
- (3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku/Air Tanah.
- (4) Program Pengendalian Banjir.
- (5) Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong.

c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Cipta Karya), melalui Program antara lain :

- (1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
- (2) Program Pengembangan Perumahan.
- (3) Program Pengembangan Kawasan Permukiman.
- (4) Program Pembangunan Saluran Drainase.
- (5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
- (6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

d. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Bina Marga), melalui program antara lain:

- (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- (2) Program Inspeksi Jalan dan Jembatan.
- (3) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan.
- (4) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (5) Program Pembebasan Lahan untuk Jalan dan Jembatan

e. Urusan Wajib Perhubungan, melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (2) Program Pengembangan Transportasi Perkotaan.
- (3) Program Pengembangan Terminal Terpadu Multi Moda.
- (4) Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- (5) Program Pengembangan Perkeretaapian.
- (6) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
- (7) Program Transportasi Udara.
- (8) Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

f. Urusan Pilihan Ketramigrasian, melalui program antara lain :

(1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

(2) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

g. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui program antara lain :

(1) Program Pengembangan Potensi dan Kecukupan Energi Listrik dan Bahan Bakar

(2) Program Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan.

2. Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Pendidikan melalui program antara lain :

(1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.

(2) Program Wajib Belajar 12 tahun.

(3) Program Pendidikan Menengah.

(4) Program Pendidikan Non-Formal.

(5) Program Pendidikan Luar Biasa.

(6) Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan.

(7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

b. Urusan Wajib Kesehatan melalui program antara lain :

(1) Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

(2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

(3) Program Pengawasan Obat dan Makanan.

(4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan.

(5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

(6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

(7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

(8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

- (9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
- (10) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
- (11) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.
- (12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
- (13) Program Upaya Kesehatan Perorangan.
- (14) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
- (15) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
- (16) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata.
- (17) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.

c. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga, melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan.
- (2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
- (3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
- (4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga.
- (5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
- (6) Program Kebijakan dan Pengembangan Kepemudaan dan Olah Raga.
- (7) Program Data Base Kepemudaan dan Keolah Ragaan.

d. Urusan Wajib Perpustakaan, melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Budaya Membaca dan Pembinaan Perpustakaan.
- (2) Pelestarian dan Pemeliharaan Bahan Pustaka

e. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
- (2) Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- (3) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- (4) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- (5) Program Pembinaan Anak Terlantar.
- (6) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
- (7) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
- (8) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).
- (9) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- (10) Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.

f. Urusan Wajib Kebudayaan melalui program antara lain:

- (1) Program Pengembangan Nilai Budaya.
- (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- (3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
- (4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

g. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi.
- (3) Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

h. Urusan Pilihan Ketransmigrasian melalui program antara lain:

- (1) Program Transmigrasi Lokal.
 - (2) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal.
- 3.** Dalam upaya mewujudkan Misi Ketiga: Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM.
- (2) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM.
- (3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- (4) Program Pengembangan Kemitraan.
- (5) Program Perkuatan Permodalan UMKMK.
- (6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK.
- (7) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang kondusif.
- (8) Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKM

b. Urusan Wajib Penanaman Modal, melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- (2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- (3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

c. Urusan Wajib Ketenagakerjaan, melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
- (3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

d. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, melalui program antara lain:

- (1) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
- (2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- (4) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.
- (5) Program Pengembangan Data dan Informasi.
- (6) Program peningkatan kapasitas kelembangaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (7) Program Kerjasama Pembangunan
- (8) Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

e. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui program antara lain:

- (1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat.

f. Urusan Pilihan Industri, melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
- (2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- (3) Program Penataan Struktur Industri

g. Urusan Pilihan Perdagangan, melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
- (2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan.
- (4) Program Pengembangan Standarisasi Nasional.

h. Urusan Pilihan Pariwisata, melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- (3) Program Pengembangan Kemitraan.

i. Urusan Pilihan Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura), melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- (2) Program Peningkatan Nilai Tambah Agribisnis.
- (3) Program Peningkatan Pemasaran Produk Pertanian.

j. Urusan Pilihan Pertanian (Perkebunan) melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan.
- (2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

i. Urusan Pilihan Pertanian (Pternakan), melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pternakan.

k. Urusan Pilihan Kehutanan, melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Kehutanan.

l. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dengan program sebagai berikut:

- (1) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
- (2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- (3) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

m. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral dengan program sebagai berikut:

- (1) Program Promosi Investasi Sektor Pertambangan dan Energi
- (2) Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Wilayah Tambang.

4. Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat: Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan;; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Ketahanan Pangan melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

(2) Program Lumbung Pangan.

b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Bina Marga) melalui program antara lain :

(1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

c. Urusan Wajib Lingkungan Hidup melalui program antara lain :

(1) Program Pengendalian dan Pengrusakan Lingkungan.

(2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

(3) Program Fasilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

(4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

d. Urusan Pilihan Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura), melalui program antara lain

(1) Program Pengembangan Sentra-sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(2) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(3) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian.

(4) Program Perbaikan dan Penyediaan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana Pertanian

e. Urusan Pilihan Pertanian (Perkebunan), melalui program antara lain :

(1) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan.

(2) Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan.

(3) Program Pengembangan Proteksi Tanaman Perkebunan.

(4) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan .

(5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

(6) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

f. Urusan Pilihan Pertanian (Peternakan), melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
- (2) Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak.
- (3) Program Penerapan Teknologi Peternakan.
- (4) Program Pengembangan Peternakan.
- (5) Program Peningkatan Fungsi Kesmavet

h. Urusan Pilihan Kehutanan, melalui program antara lain :

- (1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
- (2) Program Kemitraan .
- (3) Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- (4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi.
- (5) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- (6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pembangunan Desa Mandiri Pangan dan Pembangunan Lumbung Desa.

i. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya.
- (2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
- (3) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

j. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Energi.
- (2) Program Survei Geologi dan Sumberdaya Mineral, Mitigasi Bencana Alam Geologi, dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral.
- (3) Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.
- (4) Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan dan Pertambangan.

- (5) Program Pembinaan dan Pengawasan K3 Pertambangan.
 - (6) Program Pengembangan Sumur Tua dan Pengusahaan Migas.
 - (7) Program Pengembangan Potensi Energi Lokal/Desa.
5. Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender.; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** melalui program antara lain :
- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 - (4) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS.
 - (5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - (7) Program Pendidikan Kedinasan.
 - (8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
 - (9) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
 - (10) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - (11) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (12) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
 - (13) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 - (14) Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
 - (15) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (16) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- (17) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- (18) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan.
- (19) Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
- (20) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- (21) Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
- (22) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- (23) Program Pendataan dan Pembinaan PNS
- (24) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- (25) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- (26) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akses Publik Terhadap Informasi Hukum
- (27) Program Perencanaan dan Perbantuan Hukum
- (28) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- (29) Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan
- (30) Program Penelitian dan Pengembangan.
- (31) Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
- (32) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi
- (33) Program Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial
- (34) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan SDA
- (35) Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi PNS

b.Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika melalui program antara lain :

- (1) Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa.
- (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
- (4) Program Pengembangan Pemetaan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
- (5) Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan

c. Urusan Wajib Kearsipan dengan program sebagai berikut:

- (1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
- (2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
- (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan.

d. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri dengan program sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Program Perwujudan Lembaga Demokrasi yang makin kokoh.
- (3) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
- (4) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- (5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

e. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

- (3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- (4) Program Keluarga Berencana
- (5) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

f. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
- (2) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
- (3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- (4) Program Penerapan Pemerintahan yang baik.
- (5) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Desa
- (6) Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PAUD

PROGRAM LINTAS BIDANG DAN LINTAS SKPD

Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan Jambi 2010-2015, selain program-program yang berdasarkan urusan diatas, juga ditetapkan program dan kegiatan baik lintas SKPD maupun lintas sektoral yang nantinya akan diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan menuju Jambi EMAS 2015 yang meliputi :

- (1) Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)
- (2) Pengembangan Revitalisasi Sungai Batanghari.
- (3) Pengembangan kawasan konservasi.
- (4) Pembangunan industri hilir.
- (5) Pengembangan Bandar Udara Sultan Thaha, Depati Parbo dan Bungo.
- (6) Pengembangan Pelabuhan Laut
- (7) Pembangunan *sport centre*
- (8) Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Sumberdaya Lokal.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Adapun rencana program dan kegiatan untuk mendukung kebijakan menuju Jambi EMAS dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB VI

PENUTUP

RKPD Provinsi Jambi Tahun 2012 merupakan formulasi kebijakan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dukungan berupa pemberian masukan dan keterlibatan monitoring dan pengendalian pekerjaan ataupun proyek pembangunan tahun 2012 adalah tugas yang harus dilaksanakan bersama demi mencapai tujuan dan hasil pembangunan yang optimal. Hanya dengan demikian maka seluruh capaian hasil pembangunan akan dapat menghantarkan penduduk dan masyarakat Provinsi Jambi ke tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, dukungan pembiayaan juga menjadi salah satu penentu terhadap kelancaran seluruh pekerjaan dimasa depan. Lebih dari itu, dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi syarat mutlak dari pada pelaksanaan RKPD 2012. Walaupun menghadapi tantangan dalam pembanguna, namun demikian percepatan pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh hasil nyata dari pada pembangunan itu sendiri.

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS